

BELAKANG



SAMPING

DEPAN



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah digariskan, agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sistimatis dalam tahapan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) serta ayat (4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6332);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Labuha Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun, baik di tingkat Nasional maupun Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 adalah kerangka dasar bagi pengelolaan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara langsung, dengan memperhatikan aspirasi dan kehendak masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, pelaku bisnis dan sektor swasta, serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan disegala bidang; dan
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya akan disusun dan dijabarkan secara sistematis kedalam RKP Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan menjadi pedoman bagi perumusan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renstra OPD, Renja OPD, Rencana Kerja Anggaran OPD, dengan berpedoman kepada RPJP Daerah dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara komprehensip.

Pasal 3

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan acuan/pedoman resmi bagi jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan, sekaligus sebagai referensi bagi masyarakat dan kalangan swasta untuk mengetahui arah pembangunan daerah dan program-program strategis Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pedoman untuk menentukan arah pembangunan Daerah dengan berdasarkan pada kondisi riil dan proyeksinya kedepan;
- b. Menyediakan satu acuan dan/atau pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) dan bentuk dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
- c. Memberikan kemudahan bagi seluruh jajaran aparat Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan serta kegiatan lima tahunan Daerah; dan
- d. Menjadi bahan evaluasi diakhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026.

Pasal 5

RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta Rencana-rencana Kerja yang bersifat indikatif sesuai mekanisme yang berlaku yang diuraikan lebih lanjut secara sistematis dalam 9 (sembilan) BAB sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS |
| BAB V | : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB VI | : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB VII | : KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| BAB IX | : PENUTUP |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut RPJM Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

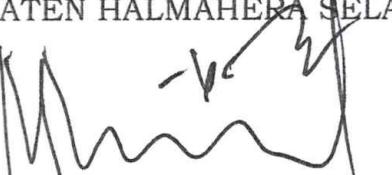
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 23 November 2021



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 23 November 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


MASLAN Hi. HASAN
Nip. 19650709 199903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 19..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

TTD

RUSLAN, SH
Nip 19780124 200501 1 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA (NOMOR 19/2021);

DAFTAR ISI

| | | |
|--|-------|---------|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR TABEL | | iii |
| DAFTAR GAMBAR | | ix |
| | | |
| BAB I PENDAHULUAN | | I - 1 |
| 1.1. Latar Belakang | | I - 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | | I - 3 |
| 1.3. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya | | I - 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | | I-10 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | | I-12 |
| | | |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | | II - 1 |
| 2.1. Sejarah Singkat Kabupaten Halmahera Selatan | | II - 1 |
| 2.2. Aspek Geografi dan Demografi | | II - 4 |
| 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat | | II-23 |
| 2.4. Aspek Pelayanan Umum | | II-38 |
| 2.5. Aspek Daya Saing Daerah | | II-81 |
| | | |
| BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | | III - 1 |
| 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu | | III - 2 |
| 3.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah | | III-16 |
| 3.3. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah | | III-21 |
| 3.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026 | | III-24 |
| | | |
| BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | | IV - 1 |
| 4.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDGs) | | IV - 1 |
| 4.2. Telaah Kebijakan Nasional (RPJM Nasional) | | IV - 3 |
| 4.3. Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Maluku Utara) | | IV - 6 |
| 4.4. Telaah RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan | | IV - 7 |
| 4.5. Telaah RTRW Kabupaten Halmahera Selatan | | IV-10 |
| 4.6. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal | | IV-11 |
| 4.7. Telaah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab Halmahera Selatan ... | | IV-13 |
| 4.8. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) | | IV-13 |
| 4.9. Telaah Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial | | IV-14 |
| 4.10. Permasalahan Pembangunan | | IV-14 |
| 4.11. Isu-Isu Strategis | | IV-30 |

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| BAB V | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V - 1 |
| 5.1. | Visi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan | V - 1 |
| 5.2. | Misi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan | V - 2 |
| 5.3. | Tujuan dan Sasaran | V - 3 |
| BAB VI | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VI - 1 |
| 6.1. | Analisis Lingkungan | VI - 1 |
| 6.2. | Analisis Strategi Pilihan | VI - 4 |
| 6.3. | Strategi dan Arah Kebijakan | VI-13 |
| 6.4. | Arah Kebijakan Pembangunan | VI-29 |
| 6.5. | Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu | VI-29 |
| 6.6. | Program Strategis Pembangunan Daerah | VI-35 |
| 6.7. | Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Daerah | VI-38 |
| BAB VII | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | VII - 1 |
| 7.1. | Program Prioritas Perangkat Daerah | VII - 1 |
| 7.2. | Kerangka Pendanaan | VII - 8 |
| BAB VIII | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | VIII - 1 |
| 8.1. | Indikator Kinerja Makro | VIII - 2 |
| 8.2. | Indikator Kinerja Utama (IKU) | VIII - 3 |
| 8.3. | Indikator Kinerja Daerah (IKD) | VIII-11 |
| BAB IX | P E N U T U P | IX - 1 |
| 9.1. | Kaidah Pelaksanaan | IX - 1 |
| 9.2. | Pengembangan Pembiayaan Pembangunan | IX - 2 |
| 9.3. | Pedoman Transisi | IX - 3 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menandai dimulainya babak baru penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia, yaitu implementasi otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan berlandaskan azas desentralisasi, pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat, mendelegasikan hampir seluruh kewenangannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali enam bidang urusan yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Yustisi, Moneter/Fiskal Nasional dan Agama. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan yang didelegasikan (urusan pemerintahan konkuren) ditetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Urusan yang didelegasikan tersebut, didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta sesuai kepentingan strategis nasional.

Sebagai produk hukum terbaru terkait desentralisasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin memperkokoh peran strategis daerah dalam kontribusinya untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah yang terdahulu (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004), telah disempurnakan dalam regulasi yang lahir saat masa transisi kepemimpinan nasional ini. Salah satu yang menjadi fokus penyempurnaan adalah perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur secara meluas, sistematis dan mengedepankan sinergisitas melalui penetapan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berkala.

Perencanaan secara umum adalah aspek yang fundamental dalam kerangka pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanaan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berawasana lingkungan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem, dimana komponen-komponen yang membentuk kerangka perencanaan pembangunan saling terkait satu dengan lainnya. Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika melakukan penyusunan program-program pembangunan daerah, wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Untuk menjamin berjalanannya sistem perencanaan pembangunan dimaksud, telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Prasyarat lain yang menopang sinergitas perencanaan pembangunan daerah adalah pengaplikasian beragam pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah seperti pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas (*Pasal 261 UU 23 Tahun 2014*). Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah semakin memperkuat sinergitas antar Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional.

Salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah baru dilantik.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. Tujuan umum dibentuknya Kabupaten Halmahera Selatan yaitu mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Sampai saat ini, capaian pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten Halmahera Selatan telah mampu mentransformasikan diri dari Daerah Otonomi Baru menjadi salah satu kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di provinsi Maluku Utara. Walaupun demikian, seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan yang semakin kompleks, diperlukan keberlanjutan dan perubahan yang lebih



baik (*sustain and change*) dari aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang ideal di Kabupaten Halmahera Selatan sekaligus menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pasca dilantiknya **H. Usman Sidik** sebagai Bupati Halmahera Selatan dan **Hasan Ali Bassam Kasuba** sebagai Wakil Bupati Halmahera Selatan oleh Gubernur Maluku Utara pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 131.82 - 1055 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan langsung melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan 2012-2032 serta memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2019 - 2024, RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, dan RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033. Selanjutnya RPJMD menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja tahunan dan pendanaannya. Selanjutnya sesuai Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD, yaitu dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan OPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta bersifat indikatif.

Setiap OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan selanjutnya menjabarkan Renstra tersebut menjadi Rencana Kerja (Renja) OPD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh *stakeholders* yang terkait di Kabupaten Halmahera Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,



- Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20210 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;



27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan 2005 – 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Labuha Tahun 2020-2040;

1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku Utara, RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan dan RTRW Kabupaten Halmahera Selatan.



1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Agar RPJM Nasional mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi irama pembangunan, maka RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 wajib mengacu pada pokok-pokok ‘Nawa Cita’ tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas-bawah (top down) diimplementasikan dalam penyusunan RPJM Daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara

Visi pembangunan Provinsi Maluku Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2020-2024 adalah: “Maluku Utara Sejahtera”. Visi itu kemudian dijabarkan dalam Lima Misi, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya; 2) Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah; 3) Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis; 4) Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelaanjutan; dan 5) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

Sama halnya dengan RPJM Nasional, substansi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan

RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-5 (2021-2025) atau tahap akhir yang secara spesifik diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan tahap sebelumnya yang belum terselesaikan dengan penekanan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan infrastruktur ekonomi dan wilayah, 2) Mengembangkan investasi dan pemasaran komoditas unggulan, 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan



dan berkelanjutan dan 5) Mengembangkan tata kehidupan pemerintahan, keagamaan dan sosial budaya.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut di atas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Posisi RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2021-2026 selanjutnya menjadi dokumen yang menjabarkan perencanaan jangka panjang secara lebih terfokus.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Selatan

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem kota-kota;
2. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan aksesibilitas regional maupun sub regional dengan pengembangan sistem transportasi yang terpadu;
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana;
5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan;
8. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
9. Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
10. Pengembangan kawasan strategis;
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

Lebih lanjut, pengembangan wilayah Halmahera Selatan sebagai pusat-pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lain-lain sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi : *Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)* yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan. *Pusat Kegiatan Lokal (PKL)* yaitu kawasan perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang. *Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)* yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Kukupang dan Waikyon, serta *Pusat Pelayanan Lokal (PPL)* di 21 kecamatan.
2. Pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas Kawasan suaka alam, Kawasan hutan lindung dan Kawasan resapan air.



- Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan perkebunan, Kawasan peternakan, Kawasan perikanan (minapolitan, perikanan tangkap, budidaya perikanan), Kawasan pertambangan, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, Kawasan pertambangan panas bumi, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kawasan peruntukan lainnya.
3. Sedang pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi, serta daya dukung lingkungan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Rencana Strategis OPD Kabupaten Halmahera Selatan

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi OPD untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra OPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas OPD serta dilengkapi dengan indikator kinerja atau tolok ukur pencapaiannya.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) prioritas pembangunan daerah; dan c) rencana kerja dan kerangka pendanaan, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Renja OPD Kabupaten Halmahera Selatan

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya



OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dasar penyusunan RKA OPD.

1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

Guna mensinergikan pembangunan Halmahera Selatan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan/atau Sustainable Development Goals (SDGs), maka dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 juga memperhatikan hasil dan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 yakni terdapat empat pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD sebagai berikut:

- a) Pilar Sosial meliputi:
 - 1) Penanggulangan kemiskinan;
 - 2) Penanggulangan kesenjangan wilayah;
 - 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - 4) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
 - 5) Kedaulatan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat;
 - 6) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b) Pilar Ekonomi meliputi:
 - 7) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
- c) Pilar Lingkungan meliputi:
 - 8) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
- d) Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan meliputi:
 - 9) Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - 10) Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat.;

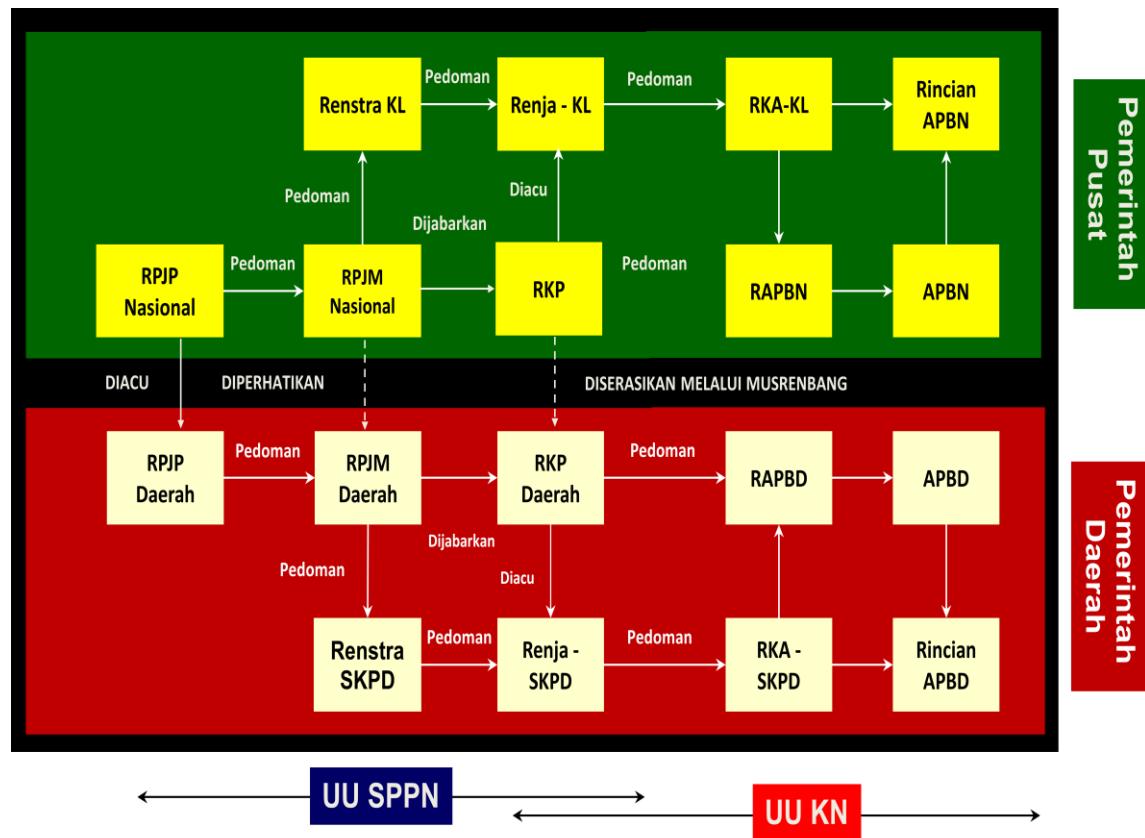
1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Dengan Dokumen-dokumen Lainnya

Guna mensinergikan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain diluar komponen perencanaan. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD. Adapun contoh dari dokumen-dokumen lain yang dimaksud misalnya RISPAM (Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum), SSK (strategi Pengembangan Sanitasi Kabupaten), Grand Desain Kependudukan, dan lain-lain.



Untuk memperjelas skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 pada intinya adalah skema atas penjabaran visi dan misi Bupati Halmahera Selatan terpilih yang terjabarkan dalam beberapa tujuan pembangunan. Untuk mencapai tujuan pembangunan dimaksud, ditetapkanlah sasaran pembangunan beserta besaran target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas. Rumusan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN



BAB I menjelaskan tentang: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen RPJMD

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II menjelaskan tentang: Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Halmahera Selatan, Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III menjelaskan tentang: Kinerja Keuangan Masa Lalu, Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026.

Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV menjelaskan tentang: Telaah Kebijakan Internasional (SDG's), Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN), Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Maluku Utara), Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026, Telaah RPJP Kabupaten Halmahera Selatan, Telaah RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal, Telaah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Halmahera Selatan dan Telaah Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial, Permasalahan Pembangunan, serta Isu-Isu Strategis.

Bab V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V menjelaskan tentang: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

Bab VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI menjelaskan tentang: Analisis Lingkungan, Analisis Strategi Pilihan, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Program Strategis Pembangunan Daerah

Bab VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII menjelaskan tentang: Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII menjelaskan tentang: Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

BAB IX PENUTUP

BAB IX menjelaskan tentang: Kaidah Pelaksanaan dan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah



1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya periode tahun 2021-2026;
2. Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dilingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Sebagai alat ukur untuk penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala OPD dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program kerja Pemerintah Daerah;
6. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai tujuan, sasaran dan prioritas program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat.

Sedang Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Halmahera Selatan dengan propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



TABEL EVALUASI

| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2015 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | |
|----------|---|------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | |
| 1.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | 61.26 | 62 | 63 | 64.5 |
| 1.2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 5.78 | 5.9 | 6.1 | 6.3 |
| 1.3 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rp | 4,006,858.80 | 4,407,544.68 | 4,848,299.15 | 5,333,129.06 |
| 1.4 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Juta Rp | 3,077,302.90 | 3,261,941.07 | 3,457,657.99 | 3,665,116.99 |
| 1.5 | Inflasi | % | 4.52 | 4,5 – 5,5 | 4,5 – 5,5 | 4,5 – 5,5 |
| 1.6 | PDRB Per Kapita | Rp | 18,226,582 | 19,685,066 | 21,260,258 | 22,972,774 |
| 1.7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 6.31 | 5,00 – 6,00 | 5,00 – 6,00 | 5,00 – 6,00 |
| 1.8 | Rasio penduduk yang bekerja | % | 64.97 | 65 | 66 | 67 |
| 1.9 | Indeks Gini | % | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| 1.10 | Prosentase Penduduk Miskin | % | 5.88 (2014) | 5.88 | 5.8 | 5.7 |
| 1.11 | Ketahanan Pangan (Skor PPH) | Gr/Kap/ hr | 50.2 | 50.2 | 51.17 | 52.67 |
| 1.12 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.8 |
| 2 | Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | |
| 2.1 | Pendidikan | | | | | |
| 2.1.1 | Angka Melek Huruf (%) | % | 98.05 | 98.2 | 98.4 | 98.6 |
| 2.1.2 | Angka Rata-rata Lama Sekolah (Thn) | Tahun | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.3 |
| 2.1.3 | Angka Harapan Lama Sekolah (Thn) | Tahun | 11.91 | 12 | 12.4 | 12.8 |
| 2.1.4 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | % | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 |
| 2.1.5 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | % | 91.89 | 92.39 | 92.89 | 93.39 |
| 2.1.6 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C | % | 73.06 | 74 | 75 | 77 |
| 2.1.7 | Angka Partisipasi Kasar (APK) PT | % | 18.3 | 20 | 21 | 22 |
| 2.1.8 | Angka Kelulusan (AL) SD/SMP/SMA/SMK | % | 98.99 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Kesehatan | | | | | |
| 2.2.1 | Angka Usia Harapann Hidup (Thn) | thn | 65.03 | 65.2 | 65.4 | 65.6 |
| 2.2.2 | Angka Kematian Bayi | Per 1000 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 2.2.3 | Prosentase Balita Gizi Buruk | % | 4.04 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 2.2.4 | Universal Child Immunization | % | 78 | 78 | 80 | 83 |
| 2.2.5 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin | % | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Tenaga Kerja | | | | | |
| 2.3.1 | Rasio Penduduk yang Bekerja | % | 64.97 | 65 | 66 | 67 |
| 3 | Fokus Seni Budaya dan Olah Raga | | | | | |
| 3.1 | Kebudayaan | | | | | |
| 3.1.1 | Persentase Kesenian Daerah yang Dilestarikan | % | 17 | 17 | 44 | 72 |
| 3.1.2 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | kali | 2 | 2 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-----------|------|------|------|
| 3.1.3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar budaya | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.1.4 | Jumlah Gedung Kesenian (sarana dan prasarana seni budaya) | Unit | 2 | - | - | - |
| 3.2 | Pemuda dan Olah Raga | | | | | |
| 3.2.1 | Lapangan olahraga (Prasarana Olah Raga) | Unit | 33 | 0 | 2 | 1 |
| 3.2.2 | Jumlah atlet berprestasi pada event OR tingkat Provinsi / Nasional | Org | N/A | 5 | 5 | 5 |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | |
| 4 | Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | |
| 4.1 | Pendidikan | | | | | |
| 4.1.1 | Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4.1.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 97.9 | 97.9 | 98.1 | 98.3 |
| 4.1.3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 75.6 | 77 | 79 | 81 |
| 4.1.4 | Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C | % | 61.12 | 63 | 65 | 67 |
| 4.1.5 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | % | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.35 |
| 4.1.6 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | % | 4.81 | 4.71 | 3.71 | 2.71 |
| 4.1.7 | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | % | 5.6 | 5.5 | 5 | 4.5 |
| 4.1.8 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 99.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.9 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 4.1.10 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 20.25 | 25 | 35 | 45 |
| 4.1.11 | Sekolah dengan Akreditasi minimal B | % | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4.2 | Kesehatan | | | | | |
| 4.2.1 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | % | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.2.2 | Angka kesakitan penduduk | % | 18.34 | 18 | 16 | 14 |
| 4.2.3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 4.2.4 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 4.2.5 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 95 | 90 | 90 | 90 |
| 4.2.6 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.7 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.8 | Cakupan kunjungan bayi | % | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 4.2.9 | Indeks Kepuasan Masyarakat >80% untuk Pelayanan RSUD Labuha | % | 75,72 (B) | 77.5 | 80 | 82.5 |
| 4.2.10 | Peningkatan Status / Tipe RSUD Labuha | Type | D | D | D | C |

| | | | | | | |
|---------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|
| 4.2.11 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kelas III) melalui BPJS/KHS di RSUD Labuha | % | N/A | - | 70 | 80 |
| 4.3 | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | |
| 4.3.1 | Persentase lahan pertanian yang teraliri irigasi | % | 300 (18%) | 19 | 21 | 22 |
| 4.3.2 | Persentase kawasan sumber air baku untuk pertanian yang tersedia dan terpelihara | % | 50 | 51 | 53 | 55 |
| 4.3.3 | Persentase kawasan sumber air baku untuk air minum yang tersedia dan terpelihara | % | 27 | 35 | 45 | 65 |
| 4.3.4 | Persentase berkurangnya Kawasan Rawan Longsor dan Abrasi | % | 16 | 17 | 19 | 21 |
| 4.3.5 | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap | % | 17.74 | 19.24 | 20.74 | 22.24 |
| 4.3.6 | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik | % | 15 | 25 | 37 | 50 |
| 4.3.7 | Persentase informasi perencanaan Tata Ruang yang tersedia | % | 80 | 80 | 90 | 95 |
| 4.3.8 | Persentase luas kawasan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dalam tata ruang | % | 50 | 50 | 65 | 75 |
| 4.3.9 | Rasio elektrifikasi (cakupan listrik PLN) | % | 45.2 | 50 | 55 | 60 |
| 4.3.10 | Persentase desa yang sudah terakses listrik | % | 44 | 44 | 56 | 68 |
| 4.4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | |
| 4.4.1 | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | % | 29 | 27 | 25 | 23 |
| 4.4.2 | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | % | - | 100 | 75 | 50 |
| 4.4.3 | Rumah Tangga Ber Sanitasi (Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak) | % | 56.25 | 60 | 65 | 70 |
| 4.4.4 | Rumah tangga pengguna air bersih (Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak) | % | 54.31 | 60 | 65 | 70 |
| 4.4.5 | Proporsi drainase lingkungan dalam kondisi baik | % | 60 | 60 | 65 | 70 |
| 4.4.6 | Rasio bangunan yang ber IMB (Kawasan Perkotaan) | % | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 4.4.7 | Persentase Penanganan sampah Perkotaan | % | 37 | 45 | 65 | 70 |
| 4.4.8 | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | % | 0.31 | 0.8 | 1.3 | 1.8 |
| 4.4.9 | Persentase Lokasi Taman Kota Yang Dikelola | % | - | - | 25 | 43 |
| 4.4.10 | Persentase Lokasi pemakaman Yang Dikelola | % | - | - | 10 | 20 |
| 4.5 | Trantib dan Linmas | | | | | |
| 4.5.1 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | % | 67.88 | 68 | 70 | 75 |
| 4.5.2 | Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | % | 41.18 | 49.02 | 58.82 | 78.43 |
| 4.5.3 | Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan | % | n.a | - | 60.3 | 61.5 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 4.5.4 | Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan edisiologi negara terhadap aparatur dan masyarakat per 1.000 penduduk | % | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 4.5.5 | Tingkat penyelesaian konflik di masyarakat | % | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 4.5.6 | Cakupan pembinaan aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik per 1.000 penduduk | % | n.a | 2 | 5 | 7 |
| 4.5.7 | Rasio Tenaga SATPOL PP Per 10.000 Penduduk | Per 10.000 | 4.41 | 5.58 | 6.75 | 7.92 |
| 4.5.8 | Rasio Linmas Terlatih Pamswakarsa per 10.000 penduduk | Per 10.000 | - | 0 | 0 | 4.78 |
| 4.5.9 | Cakupan Keterlibatan dalam Pengendalian Kamtib di Daerah | Frek Pengama | 0 kali | 0,3 kali | 0,3 kali | 0,5 kali |
| 4.5.10 | Cakupan Patroli Siaga Trantib; | Frek Patroli | 0,03 kali per wil | - | 0,20 kali | 0,30 kali |
| 4.5.11 | Cakupan Penegakan Perda/K3; | % | 41.4 | 50 | 50 | 50 |
| 4.5.12 | Persentase Desa Tersosialisasi Standar Penyelenggaraan Linmas. | % | - | - | - | 24.1 |
| 4.6 | Sosial | | | | | |
| 4.6.1 | Persentase pelayanan kelembagaan sosial di masyarakat | % | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 4.6.2 | Persentase Menurunnya angka PMKS | % | 22.46 | 20.42 | 18.39 | 16.36 |
| 4.6.3 | Persentase cakupan pelayanan sosial masyarakat | % | 2.96 | 2.59 | 2.33 | 2.37 |
| 5 | Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | |
| 5.1 | Tenaga Kerja | | | | | |
| 5.1.1 | Persentase tenaga kerja terdaftar dan mendapatkan pelatihan serta ditempatkan | % | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 5.1.2 | Persentase peningkatan TKM | % | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 5.1.3 | Persentase TKM yang memanfaatkan TTG dan volume usahanya meningkat | % | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 5.1.4 | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 60 | 60 | 60 | 70 |
| 5.1.5 | Persentase kasus ketengakerjaan yang diselesaikan | % | 60 | 50 | 50 | 60 |
| 5.1.6 | Jumlah tengah kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK/ BPJS Ketenagakerjaan | % | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 5.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | |
| 5.2.1 | Persentase KK yang pendapatannya meningkat setelah diberikan bantuan dari UPPKS | % | 50 | 50 | 55 | 60 |
| 5.2.2 | Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 50.87 | 50.87 | 50.93 | 50.97 |
| 5.2.3 | Persentase penurunan KDRT | % | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 5.2.4 | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | % | n.a | < 5% | < 5% | < 5% |
| 5.2.5 | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|--|---|
| 5.2.6 | Persentase capaian Kota Labuha sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak | % | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 5.3 | Pangan | | | | | |
| 5.3.1 | Skor PPH | Gr/Kap/ hari | 50.2 | - | 51.17 | 52.67 |
| 5.3.2 | Prosentase penanganan wilayah/desa rawan pangan | % | - | - | 5 | 5 |
| 5.3.3 | Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras per tahun | ton | - | - | 250 | 250 |
| 5.3.4 | Stabilitas harga pangan (beras) ditingkat konsumen (Cofisien Variasi <10%) | % CV | - | - | 20 | 20 |
| 5.3.5 | Prosentase Pangan yang Aman dikonsumsi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3.6 | Ketersediaan daging lokal ditingkat konsumen | Kg | 56,000 | 64,800 | 73,600 | 82,400 |
| 5.3.7 | Ketersediaan Telur lokal ditingkat konsumen | Kg | 600 | 680 | 760 | 840 |
| 5.3.8 | Persentase Kelompok Tani Baru yang terbentuk | % | - | 5% | 10% | 15% |
| 5.3.9 | Persentase penyuluhan pertanian bersertifikat | % | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 21.43 |
| 5.4 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | |
| 5.4.1 | Persentase jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air | % | 5.26 | 10.53 | 26.32 | 52.63 |
| 5.4.2 | Prosentase luasan lahan yang ditetapkan dan dinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa | % | N/A | 0 | 25 | 50 |
| 5.4.3 | Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | % | N/A | 0 | 11 | 16 |
| 5.4.4 | Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara | % | N/A | 0 | 10 | 15 |
| 5.4.5 | Peningkatan status Laboratorium Lingkungan | % | Belum Terakreditasi | Uji Provinsi | status Inlayer (teruji) dalam Uji Provisensi untuk 5 Parameter | status Inlayer (teruji) dalam Uji Provisensi untuk 10 Parameter |
| 5.4.6 | Beroperasinya pengelolaan kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya | % | N/A | - | MOU, Survey dan persiapan kawasan | Rencana Induk dan Rencana Aksi |
| 5.5 | Pertanahan | | | | | |
| 5.5.1 | Luas lahan bersertifikat (Hak Milik) | SHM | 37,644 | - | 5,000 | 5,000 |
| 5.5.2 | Presentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah | % | 21 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------|-------|-------|
| 5.6 | Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil | | | | | |
| 5.6.1 | Tingkat kepuasan masyarakat (nilai IKM Pelayanan Kependudukan) | % | 67.96 | 69.5 | 71 | 72.5 |
| 5.6.2 | Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP | % | 48.86 | 48.86 | 58.86 | 68.86 |
| 5.6.3 | Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA | % | n.a | - | - | 2 |
| 5.6.4 | Kepemilikan akta kelahiran | % | 14.22 | 15 | 20 | 30 |
| 5.6.5 | Persentase cakupan bantuan akta/buku nikah gratis | % | n.a | - | 25 | 50 |
| 5.7 | Pengendalian Penduduk dan KB | | | | | |
| 5.7.1 | Cakupan peserta KB aktif | % | 29.73 | 57.08 | 69.91 | 82.73 |
| 5.7.2 | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) | % | 65.2 | 65.4 | 65.6 | 65.8 |
| 5.7.3 | Persentase TRIBINA yang mendapatkan pembinaan berkelanjutan | % | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 5.7.4 | Presentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) | % | 7.89 | 7 | 6.5 | 6 |
| 5.7.5 | Persentase menurunnya Keluarga Pra Sejahtera | % | 14.3 | 13 | 12 | 11 |
| 5.8 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | |
| 5.8.1 | Persentase SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kapasitasnya meningkat | % | 30.12 | - | 60.24 | 70.28 |
| 5.8.2 | Persentase desa yang telah memiliki prasarana pemerintahan desa dan berfungsi baik | % | 35.74 | 37.35 | 38.15 | 38.96 |
| 5.8.3 | Persentase Perempuan di Dalam Kelembagaan Desa | % | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 5.8.4 | Rasio Posyandu Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.8.5 | Rasio PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.8.6 | Persentase BUMDES yang beroperasi aktif | % | 7.23 | - | 41.29 | 53.82 |
| 5.8.7 | Rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) | % | - | - | 4.02 | 12.05 |
| 5.8.8 | Rasio Produktifitas Pemanfaatan TTG | % | 2.01 | 2.41 | 12.45 | 22.49 |
| 5.8.9 | Tingkat peran serta kelembagaan masyarakat perdesaan | % | 8.03 | 10.71 | 14.73 | 20.08 |
| 5.8.10 | Persentase desa mandiri | % | 0.4 | 2.81 | 5.22 | 7.63 |
| 5.8.11 | Persentase Desa Tertinggal | % | 79.84 | 76.31 | 62.25 | 48.19 |
| 5.9 | Perhubungan | | | | | |
| 5.9.1 | Jumlah kendaraan yang memiliki Ijin Trayek | Ijin | 190 | 210 | 230 | 245 |
| 5.9.2 | Persentase kendaraan yang layak operasi | % | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 5.9.3 | Persentase menurunnya tingkat Kecelakaan Darat | % | 30 | 28 | 26 | 23 |
| 5.9.4 | Persentase Menurunnya tingkat Kecelakaan Laut | % | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 5.10 | Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | |
| 5.10.1 | Persentase Implementasi E-Goverment di Kabupaten Halmahera Selatan | % | 22 | 22 | 44 | 66 |
| 5.10.2 | Pameran/expo | kali | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 5.10.3 | Percentase Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik | % | 20 | 20 | 25 | 35 |
| 5.10.4 | Percentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB | % | 6.67 | 6.67 | 13.33 | 20 |
| 5.10.5 | Percentase Terpenuhinya Pengembangan dan Pengendalian Sandi Negara | % | - | - | 10 | 20 |
| 5.11 | Koperasi dan UKM | | | | | |
| 5.11.1 | Percentase Koperasi aktif | % | 38.18 | 50 | 52.5 | 54 |
| 5.11.2 | Percentase Koperasi Aktif yang volume usahanya meningkat | % | 5 | 5 | 8 | 11 |
| 5.11.3 | Cakupan Bina Usaha Mikro dan Kecil, Menengah | % | 13.2 | 17.4 | 25.2 | 28.92 |
| 5.11.4 | Percentase UMKM yang volume usahanya meningkat | % | 35 | 37 | 40 | 43 |
| 5.11.5 | Cakupan penerima dana bergulir dari Pemerintah Daerah | % | n.a | 0.07 | 0.13 | 0.2 |
| 5.11.6 | Percentase Usaha Mikro dampingan (penerima bantuan) yang volume usahanya meningkat | % | 4 | 50 | 55 | 60 |
| 5.12 | Penanaman Modal | | | | | |
| 5.12.1 | Nilai Realisasi PMA/PMDN (miliar rupiah) | Rp | | | | |
| 5.12.2 | Jumlah Investor PMA / PMDN | Unit Usaha | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 5.12.3 | Rasio daya serap tenaga kerja lokal | % | 25 | 25 | 30 | 35 |
| 5.12.4 | Percentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.12.5 | Presentasi pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti | % | n.a | 80 | 80 | 80 |
| 5.13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | |
| 5.13.1 | Rata-rata tingkat partisipasi Organisasi Kepemudaan | % | N/A | 80 | 70 | 80 |
| 5.13.2 | Jumlah event Olah Raga Tkt Kabupaten | event | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5.14 | Statistik | | | | | |
| 5.14.1 | Percentase ketersediaan data dan informasi (Buku Profil Halsel, Buku PDRB, Buku Indikator Ekonomi, Buku IPM, Buku Inkesra, IKM) untuk perencanaan pembangunan | % | 100 | 6 dok (20%) | 6 dok (20%) | 6 dok (20%) |
| 5.15 | Kearsipan | | | | | |
| 5.15.1 | Penerapan pengelolaan arsip secara baku | % | n.a | - | 20 | 40 |
| 5.15.2 | Prosentase dokumen penitig yang diarsipkan | % | 0.42 | 0.69 | 24.31 | 50 |
| 5.15.3 | Tingkat layanan informasi kearsipan | % | n.a | - | 50 | 50 |
| 5.16 | Perpustakaan | | | | | |
| 5.16.1 | Percentase Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | % | 57.7 | 66.85 | 75.14 | 83.43 |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 5.16.2 | Pengunjung perpustakaan | % | 16.92 | 20 | 30 | 40 |
| 5.16.3 | Persentase Perpustakaan Desa / Khusus yang aktif | % | 12.05 | 12.05 | 14.06 | 16.06 |
| 6 | Fokus Urusan Pilihan | | | | | |
| 6.1 | Pertanian | | | | | |
| 6.1.1 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | % | 37.61 | 38 | 38 | 39 |
| 6.1.2 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | % | 35.29 | 34.79 | 34.29 | 33.79 |
| 6.2 | Pariwisata | | | | | |
| 6.2.1 | Peningkatan angka kunjungan wisatawan | % | N/A | 2.38 | 4.49 | 6.25 |
| 6.2.2 | Jumlah sarana dan prasarana rekreasi | kaw | N/A | - | - | - |
| 6.3 | Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| 6.3.1 | Produksi perikanan tangkap | Ton | 38,237.88 | 39,121.20 | 40,041.42 | 41,069.42 |
| 6.3.2 | Produksi perikanan budidaya | Ton | 14,084.06 | 15,674.96 | 17,462.53 | 19,471.57 |
| 6.3.3 | Jumlah Produksi hasil pengolahan ikan | Ton | 442 | 460 | 479 | 501 |
| 6.3.4 | Percentase ketaatian pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | % | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 6.3.5 | Percentase peningkatan produksi perikanan di kawasan Minapolitan | % | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 6.4 | Industri | | | | | |
| 6.4.1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 9.3 | 10 | 10.3 | 11 |
| 6.4.2 | Pertumbuhan sector Industri | % | 11.65 | 11 | 12 | 13 |
| 6.4.3 | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | n.a | 27 | 33 | 40 |
| 6.5 | Perdagangan | | | | | |
| 6.5.1 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 18.26 | 18.25 | 18.5 | 18.75 |
| 6.5.2 | Pertumbuhan PDRB sector perdagangan | % | 12.53 | 13 | 13.5 | 14 |
| 6.5.3 | Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal | % | n/a | 5 | 7 | 10 |
| 6.6 | Transmigrasi | | | | | |
| 6.6.1 | Jumlah warga transmigrasi yang meningkat taraf hidupnya | kK | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 6.6.2 | Terbangunnya lokasi transmigrasi baru dan pengembangan transmigrasi yang sudah ada | ha | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 7 | Fokus Urusan Pemerintahan Umum | | | | | |
| 7.1 | Perencanaan Pembangunan | | | | | |
| 7.1.1 | Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD | % | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 7.1.2 | Tersedianya informasi pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, KUA/PPAS POKOK, KUA/PPAS Perubahan dan dokumen perencanaan lain) | % | 100 | 4 dok (25%) | 3 dok (18,75%) | 3 dok (18,75%) |
| 7.1.3 | Persentase kesesuaian antara Program RPJMD dengan RKPD | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7.1.4 | Persentase kesesuaian antara Program RKPD dengan PPAS | % | 90 | 90 | 90 | 90 |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|---------|---------|---------|
| 7.1.5 | Percentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RTRW / RDTR maupun Peraturan Zonasi | % | n.a | 30 | 35 | 40 |
| 7.1.6 | Tersedianya informasi perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang dimanfaatkan oleh Pemda/Pemerintah atau stakeholder | % | n.a | 30 | 40 | 50 |
| 7.1.7 | Percentase Program RPJMD yang tercapai target kinerjanya | % | n.a | 50 | 60 | 70 |
| 7.1.8 | Percentase OPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja $\geq 76\%$) | % | n.a | 50 | 60 | 70 |
| 7.2 | Keuangan Daerah | | | | | |
| 7.2.1 | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah | % | 2.77 | 5 | 6 | 7 |
| 7.2.2 | Percentase Capaian PAD | % | 46.97 | 50 | 55 | 60 |
| 7.2.3 | Opini atas LKPD | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 7.2.4 | Percentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah | % | 24.59 | 32.79 | 35.25 | 59.02 |
| 7.3 | Pengawasan Pembangunan | | | | | |
| 7.3.1 | Percentase SKPD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material | % | 5.38 | 4.66 | 3.94 | 3.23 |
| 7.3.2 | Percentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti | % | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 7.3.3 | Percentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti | % | 58.49 | 60 | 70 | 80 |
| 7.3.4 | Maturitas Implementasi SPIP | Level | Level 1 | Level 1 | Level 1 | Level 2 |
| 7.3.5 | Percentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi LAKIP/AKIP oleh Inspektorat Minimal B | % | 20 | 23.33 | 55.56 | 74.07 |
| 7.3.6 | Level Kapabilitas APIP | Level | Level 1 | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| 7.4 | Kepegawaian dan Diklat | | | | | |
| 7.4.1 | Percentasi Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010) | % | 2,22 (100 pelanggaran) | 10 | 10 | 10 |
| 7.4.2 | Prosentase Peningkatan Karir Pegawai | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4.3 | Prosentase Peningkatan PNS dengan kualifikasi S1/S2/S3 | % | 35.21 | 38.67 | 39.17 | 40.07 |
| 7.4.4 | Percentase Meningkatnya Profesionalisme Pejabat Struktural | % | 15.69 | 18.94 | 26.07 | 33.2 |
| 7.4.5 | Percentase Meningkatnya Profesionalisme Pejabat Fungsional | % | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 7.5 | Pemerintahan Umum | | | | | |
| 7.5.1 | Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
| 7.5.2 | Penilaian LPPD Pemerintah Daerah | | C | CC | C+ | B |
| 7.5.3 | Penilaian AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah | | C | CC | C+ | B |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.5.4 | Persentase RANPERDA yang disahkan menjadi PERDA | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.5 | Persentase RANPERBUP yang disahkan menjadi PERBUP | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.5.6 | Persentase Pekerjaan yang dilelang secara elektronik | % | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 7.5.7 | Tingkat pencapaian PROLEGDA | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.6 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | |
| 7.6.1 | Prosentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh Pemda, masyarakat dan stakeholder lainnya | % | n.a | - | 50% | 60% |
| 7.7 | Penanggulangan Bencana | | | | | |
| 7.7.1 | Rasio Pembinaan Penduduk di daerah Rawan Bencana | % | 13 | 17 | 37 | 57 |
| 7.7.2 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.7.3 | Persentase Kecukupan Logistik saat Penanganan Bencana | % | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 7.7.4 | Persentase Terpenuhinya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Kondisi Khusus (Pasca Bencana) | % | 16 | 16 | 25 | 35 |
| C | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | |
| 8 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | |
| 8.1 | Produktivitas total daerah | Rp/org/ thn | 44,515,678 | 48,515,678 | 52,515,678 | 56,515,678 |
| 8.2 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | Rp | 659,542 | 719,542 | 769,542 | 819,542 |
| 8.3 | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | Rp | 285,217 | 295,217 | 305,217 | 315,217 |
| 9 | Fokus Infrastruktur Daerah | | | | | |
| 9.1 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Km/unit | 3.43 | 3.93 | 4.43 | 4.93 |
| 9.2 | Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (darat/laüt/udara) | ton | 2,959 | 3,459 | 3,959 | 4,459 |
| 9.3 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Orang | 434,286 | 484,000 | 534,000 | 584,000 |
| 9.4 | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | % | 54.31 | 60 | 65 | 70 |
| 9.5 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi) | % | 74.84 | 75.5 | 77 | 78.5 |
| 10 | Fokus Keuangan | | | | | |
| 10.1 | Target Capaian Pajak Daerah | Juta Rp | 6,925 | 9,349 | 12,621 | 17,038 |
| 10.2 | Target Capaian Retribusi Daerah | Juta Rp | 2,118 | 2,648 | 3,310 | 4,138 |
| 11 | Fokus Komunikasi dan Informatika | | | | | |
| 11.1 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 75 | 76 | 79 | 83 |
| 11.2 | Persentase desa yang dapat mengakses sinyal telepon seluler | % | 53 | 53 | 63 | 74 |
| 12 | Fokus Iklim Investasi | | | | | |
| 12.1 | Lama proses perijinan | | | | | |
| | - Ijin Pola Non Survey | Hari | 7 | 6 | 5 | 4 |
| | - Ijin Pola Survey | Hari | 30 | 25 | 20 | 17 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 12.2 | Peningkatan Prosentase Desa Mandiri | % | 0.4 | 2.81 | 5.22 | 7.63 |
| 12.3 | Penurunan Prosentase Desa Tertinggal | % | 79.84 | 76.31 | 62.25 | 48.19 |
| 13 | Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | |
| 13.1 | Rasio Angkatan Kerja lulusan S1/S2/S3 | % | 3.69 | 4 | 4.5 | 5 |
| 13.2 | Rasio Ketergantungan | % | 69.37 | 70 | 70 | 70 |

ASI REALISASI RPJMD PERIODE SEBELUMNYA

| AHUN | | Kondisi Akhir Tahun 2020 | REALISASI CAPAIAN TAHUN | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2019 | 2020 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 66 | 67.5 | 70 | 62.17 | 62.64 | 63.39 | 64.11 | 63.84 |
| 6.5 | 6.65 | 6.8 | 5.69 | 16.06 | 15.44 | 12.46 | 16.22 |
| 5,866,441.97 | 6,453,086.17 | 6,453,086.17 | 4,359,407.22 | 5,138,870.93 | 6,317,524.37 | 7,226,328.09 | 8,698,970.00 |
| 3,885,024.01 | 4,118,125.45 | 4,118,125.45 | 3,238,569.08 | 3,758,574.89 | 4,338,828.78 | 4,860,180.96 | 5,670,698.00 |
| 4,5 – 5,5 | 4,5 – 5,5 | 4,5 – 5,5 | 2.03 | 1.82 | 3.98 | 1.53 | 2.08 |
| 24,823,233 | 26,835,928 | 26,835,928 | 19,508,700 | 22,610,300 | 27,322,900 | 30,824,100 | 36,438,100 |
| 5,00 – 6,00 | 5,00 – 6,00 | 5,00 – 6,00 | 6.31 | 4.68 | 4.01 | 4.58 | 4.4 |
| 68 | 69 | 69 | 93.69 | 95.32 | 95.99 | 95.42 | 95.6 |
| 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.244 | 0.209 | 0.265 | 0.252 | 0.26 |
| 5.6 | 5.5 | 5.5 | 4.11 | 4.1 | 4.8 | 5.03 | 5.21 |
| 54.17 | 55.67 | 55.67 | N/A | N/A | 4 | 9 | 19 |
| 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.64 | 1.7 | 1.72 | 1.66 | 1.54 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 98.8 | 99 | 99 | N/A | N/A | 98.61 | 97.75 | 98.2 |
| 7.35 | 7.4 | 7.4 | 7.15 | 7.42 | 7.43 | 7.62 | 7.92 |
| 13.2 | 13.5 | 13.5 | 11.91 | 12.31 | 12.52 | 12.76 | 12.8 |
| 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.46 | 112.55 | 115.92 | 111.54 | 108 |
| 93.89 | 94.39 | 94.39 | 83.12 | 88.05 | 98.8 | 82.04 | 108 |
| 79 | 80 | 80 | 76.34 | 90.68 | 81.09 | 90.37 | 116.04 |
| 23 | 24 | 24 | 17.2 | 18.7 | 19.4 | 20.5 | 21.9 |
| 100 | 100 | 100 | 98.2 | 98.7 | 98.5 | 99.4 | 99.6 |
| | | | | | | | |
| 65.8 | 66 | 66 | 65.11 | 65.2 | 65.42 | 65.75 | 65.86 |
| 0.1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6.6 | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 86 | 90 | 90 | 82 | 78 | 75 | 78 | 85 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 68 | 69 | 70 | 93.69 | 95.32 | 95.99 | 95.42 | 95.6 |
| | | | | | | | |
| 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| 2 | 2 | 40 | 33 | 35 | 35 | 37 | 38 |
| 5 | 5 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29 | 30 | 30 | - | 35.08 | 36.11 | 38.3 | 53.23 |
| 98.5 | 98.8 | 98.8 | 98.12 | 97.78 | 98.38 | 98.15 | 88.73 |
| 83 | 84.61 | 84.61 | 75.95 | 75.84 | 75.26 | 74.56 | 67.94 |
| 69 | 71 | 71 | 60.02 | 61.22 | 55.41 | 59.2 | 68.23 |
| 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.61 | 0.54 |
| 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.39 |
| 4 | 3.5 | 3 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.4 |
| 100 | 100 | 100 | 96.37 | 96.38 | 95.53 | 94.89 | 95.76 |
| 86 | 88 | 90 | 68.21 | 73.37 | 72.28 | 71.47 | 72.67 |
| 55 | 60 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 40 | 40 | 46.45 | 52.81 | 56.23 | 58.19 | 60.39 |
| | | | | | | | |
| N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 11 | 11 | 19.2 | 18.4 | 16.7 | 18.8 | 21.3 |
| 87 | 88 | 88 | 73 | 75 | 79 | 83 | 73 |
| 86 | 88 | 88 | 82 | 78 | 75 | 78 | 87 |
| 95 | 100 | 100 | 88 | 90 | 92 | 95 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 72 | 47 | 70 | 30 | 39 |
| 100 | 100 | 100 | 0.2 | 8.16 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 82 | 84 | 84 | 100 | 90 | 87 | 74 | 83 |
| 85 | 87.5 | 87.5 | 75.72 | 76.81 | 79.34 | 81.45 | 82.67 |
| B | B | B | D | D | C | C | C |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 24 | 25 | 25 | 18 | 20.2 | 20.89 | 21.78 | 23.36 |
| 58 | 60 | 60 | 52.5 | 54.8 | 56.3 | 58.7 | 59.8 |
| 80 | 100 | 100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 23 | 25 | 25 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 23.74 | 25.24 | 25.24 | 14.63 | 18.36 | 20.93 | 21.77 | 23.61 |
| 65 | 80 | 80 | 51.23 | 57.88 | 75 | 94 | 95 |
| 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 90 | 100 | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 65 | 70 | 75 | 39.52 | 44.91 | 45.48 | 46.2 | 100 |
| 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 21 | 19 | 19 | 17.92 | 22.75 | 20.35 | 21.29 | 24.24 |
| 25 | 0 | 0 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| 80 | 90 | 90 | 45.99 | 42.09 | 51.37 | 51.9 | 68.4 |
| 80 | 90 | 90 | 44.2 | 55.58 | 52.4 | 58.83 | 59.65 |
| 80 | 90 | 90 | 2.38 | 2.98 | 3.72 | 4.65 | 5.82 |
| 13 | 17 | 17 | 6.8 | 10.7 | 12.5 | 66.8 | 16.7 |
| 75 | 80 | 80 | 37 | 41 | 47 | 52 | 60 |
| 2.3 | 2.8 | 2.8 | 25.57 | 25.58 | 25.59 | 25.6 | 26.01 |
| 62 | 80 | 80 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 |
| 30 | 40 | 40 | 33.33 | 40 | 46.67 | 53.33 | 66.67 |
| | | | | | | | |
| 80 | 85 | 85 | 69.29 | 71.43 | 72.41 | 73.79 | 78.67 |
| 88.24 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 62.01 | 65 | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 12 | 15 | 15 | 8.03 | 12.05 | 16.06 | 20.08 | 24 |
| 70 | 75 | 75 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 9 | 10 | 10 | 16.06 | 20.08 | 24.10 | 28.11 | 32.13 |
| 9.09 | 10.26 | 10.26 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 2.51 |
| 9.55 | 14.33 | 14,33 (315 org) | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 2.51 |
| 0,5 kali | 0,5 kali | 0,5 kali/thn | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| 0,90 kali | 0,90 kali | 0,90 kali/ wil | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 60 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48.19 | 72.29 | 72.29 | N/A | 40.16 | 52.21 | 60.24 | 74.30 |
| | | | | | | | |
| 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14.31 | 12.29 | 12 | 26.85 | 24.64 | 21.86 | 19.90 | 15.82 |
| 3 | 4 | 5 | 2.24 | 2.64 | 3.06 | 3.98 | 4.75 |
| | | | | | | | |
| 70 | 70 | 70 | 62.5 | 68.75 | 71.875 | 72.5 | 73.75 |
| 70 | 70 | 70 | 56.02 | 62.24 | 64.73 | 65.97 | 68.46 |
| 70 | 70 | 70 | 66 | 68 | 72 | 73 | 75 |
| 70 | 70 | 70 | 62.24 | 65.35 | 66.60 | 68.46 | 72.20 |
| 60 | 60 | 60 | 60.0 | 66.7 | 73.3 | 76.7 | 80.0 |
| 70 | 86 | 86% (3.000) | 61.33 | 64.20 | 68.17 | 74.50 | 77.33 |
| | | | | | | | |
| 65 | 70 | 75 | 69.07 | 72.43 | 73.42 | 74.40 | 75.47 |
| 51.01 | 51.01 | 51.01 | 53.13 | 54.65 | 50.83 | 50.87 | 51.00 |
| 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.7 | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 0.16 |
| < 5% | < 5% | < 5% | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 |
| 100 | 100 | 100 | 18 | 64 | 95 | 68 | 100 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|---|
| 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| | | | | | | | |
| 54.17 | 55.67 | 55.67 | N/A | N/A | 4 | 9 | 19 |
| 5 | 5 | 20 | 4.76 | 9.52 | 14.29 | 19.05 | 23.81 |
| 250 | 250 | 250 | 232 | 245 | 254 | 265 | 275 |
| | | | | | | | |
| 20 | 20 | 20 | N/A | N/A | 4.1 | N/A | N/A |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 91,200 | 100,000 | 100,000 | 58,358 | 60,567 | 61,778 | 62,446 | 64,271 |
| 920 | 1,000 | 1,000 | N/A | N/A | 780 | 920 | N/A |
| 20% | 25% | 25% | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| 23.81 | 26.19 | 26.19 | 7.1 | 10.4 | 17.6 | 21.2 | 25.8 |
| | | | | | | | |
| 78.95 | 100 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 90 | 90 | 25 | 35 | 45 | 60 | 75 |
| 22 | 27 | 27 | 72.00 | 73.33 | 74.07 | 83.33 | 87.50 |
| | | | | | | | |
| 19 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) | Mendapatkan Lisensi dari KLHK | Memiliki lisensi sebagai lab. lingkungan (Akreditasi oleh KAN dan ter registrasi pada KLHK) | Belum Terakreditasi | Belum Terakreditasi | Uji Provinsi | status Inlayer (teruji) dalam Uji Provisensi untuk 5 Parameter | status Inlayer (teruji) dalam Uji Provisensi untuk 10 Parameter |
| Action | Action | Beroperasinya Kebun Raya Mangrove dan/atau TAHURA | N/A | N/A | N/A | N/A | MOU, Survey dan persiapan kawasan |
| | | | | | | | |
| 5,000 | 5,000 | 57,644 | 7,780 | 5,297 | 7,694 | 16,524 | 2,231 |
| 20 | 20 | 80 | 20 | 25 | 32.5 | 36 | 48 |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.67 | 33.33 | 33.33 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| | | | | | | | |
| 56.5 | 59.5 | 59.5 | 56.25 | 34.76 | 36.19 | 38.18 | 44.49 |
| 15 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 |
| 32.4 | 44.6 | 44.6 | 20.2 | 27.4 | 30.8 | 45.5 | 45.5 |
| 48 | 55 | 55 | 20 | 27 | 38 | 43 | 55 |
| 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.09 | 0.15 | 0.9 | 0.3 | 0.35 |
| | | | | | | | |
| 65 | 70 | 70 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 |
| | | | | | | | |
| | | | # ##### | # ##### | # ##### | # ##### | # ##### |
| 11 | 13 | 15 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 40 | 45 | 50 | 24.3 | 30 | 34.2 | 38.2 | 45.4 |
| 95 | 100 | 100 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 80 | 90 | 90 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| | | | | | | | |
| 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| | | | | | | | |
| 6 dok (20%) | 6 dok (20%) | 30 dok (100%) | N/A | N/A | N/A | 96.5 | 98 |
| | | | | | | | |
| 60 | 80 | 80 | 26.67 | 30 | 33.33 | 36.67 | 40 |
| 75 | 100 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | |
| 91.71 | 100 | 100 | 45.2 | 52.67 | 60.32 | 73.4 | 85.7 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 | 75 | 75 | 40.3 | 45.6 | 52.4 | 55.1 | 61.7 |
| 18.07 | 22.09 | 25.00 | 4.82 | 5.62 | 8.03 | 10.04 | 12.05 |
| | | | | | | | |
| 40 | 42.5 | 45 | 37.21 | 37.62 | 38 | 40.32 | 40.57 |
| 33.29 | 32.79 | 32.29 | 35 | 31,02, | 26.41 | 23.82 | 20.24 |
| | | | | | | | |
| 7.72 | 9.22 | 9.22 | 2.38 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 3.8 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | |
| 42,105.08 | 42,866.26 | 42,866.26 | 39,870.71 | 40,406.56 | 40,470.99 | 34,757.90 | 32,903.18 |
| 21,729.73 | 24,267.97 | 24,267.97 | 620.78 | 670.78 | 733.46 | 757.57 | 1,229.67 |
| 525 | 565 | 565 | 249.67 | 250.71 | 253.56 | 267.88 | 680 |
| | | | | | | | |
| 85 | 100 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 50 |
| | | | | | | | |
| 70 | 75 | 75 | 45 | 50 | 63.66 | 60 | 65 |
| | | | | | | | |
| 11.3 | 12 | 12 | 9.21 | 9,26 | 9,71 | 9,85 | 9,92 |
| 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | -205 | 21 | 51 |
| 46 | 55 | 55 | - | - | - | 10 | 30 |
| | | | | | | | |
| 19 | 19.5 | 19.5 | 18,28 | 18,30 | 18,75 | 19 | 19,25 |
| 14.5 | 15 | 15 | 14 | 14,5 | 14,25 | 15 | 15 |
| 15 | 20 | 20 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| | | | | | | | |
| 700 | 800 | 800 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| | | | | | | | |
| 200 | 200 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 45 | 50 | 50 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| | | | | | | | |
| 3 dok (18,75%) | 3 dok (18,75%) | 16 dok (100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| | | | | | | | |
| 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45 | 50 | 50 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | 90 | 90 | 62 | 65 | 65 | 67 | 68 |
| 80 | 90 | 90 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 2.21 | 2.25 | 2.36 | 3.88 | 5.09 |
| 65 | 70 | 70 | 69.02 | 72.5 | 81.95 | 88.93 | 97.07 |
| WTP |
| 82.79 | 100 | 100 | 30 | 32 | 32 | 33 | 35 |
| | | | | | | | |
| 2.51 | 1.79 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 80 | 95 | 100 | 20 | 40 | 40 | 66.21 | 20 |
| 90 | 95 | 100 | 50.72 | 63.9 | 64.47 | 66.03 | 73.17 |
| Level 3 | Level 3 | Level 3 | N/A | N/A | N/A | Level 2 | Level 2 |
| 81.48 | 92.59 | 100 | 46.67 | 53.33 | 60 | 70 | 80 |
| Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 1 | Level 1 | Level 1 | Level 2 | Level 2 |
| 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100 | 100 | 100 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 39.57 | 40.57 | 40.57 | 30.3 | 31.54 | 32.46 | 33.27 | 34.86 |
| 40.34 | 47.47 | 55.25 | 24.51 | 44.12 | 0.00 | 2.94 | 28.43 |
| 11 | 14 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | |
| 75 | 80 | 82.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 |
| B+ | A | A | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 3.02 | 3.32 |
| B+ | A | A | C | C | CC | CC | CC |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 30 | 35 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| 100 | 100 | 100 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| | | | | | | | |
| 70% | 80% | 80% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| | | | | | | | |
| 77 | 97 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 100 | 100 | 100 | 13 | 37 | 37 | 77 | 97 |
| 90 | 100 | 100 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 45 | 60 | 75 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 62,515,678 | 68,515,678 | 68,515,678 | 31,864,335 | 33,278,230 | 41,248,416 | 44,515,678 | 49,687,962 |
| 869,542 | 919,542 | 919,542 | 373,333 | 423,678 | 444,617 | 458,836 | 476,439 |
| 325,217 | 335,217 | 335,217 | 291,013 | 334,591 | 256,462 | 393,171 | 380,250 |
| | | | | | | | |
| 5.43 | 5.93 | 5.93 | 3.93 | 4.24 | 4.37 | 4.84 | 5.38 |
| 4,959 | 5,500 | 5,500 | 2,005 | 2,034 | 2,167 | 2,565 | 3,025 |
| 634,000 | 700,000 | 700,000 | 404,192 | 424,336 | 483,227 | 397,857 | 409,514 |
| 80 | 90 | 90 | 44.2 | 55.58 | 52.4 | 58.83 | 59.65 |
| 80 | 81.5 | 81.5 | 81.86 | 91.31 | 92.04 | 94.74 | 91.26 |
| | | | | | | | |
| 23,002 | 31,053 | 31,053 | 8,870.79 | 8,904.93 | 8,647.88 | 29,539.55 | 41,686.10 |
| 5,172 | 6,465 | 6,465 | 2,155.47 | 6,813.76 | 2,398.82 | 5,759.93 | 4,139.23 |
| | | | | | | | |
| 87 | 90 | 90 | 45.83 | 52.29 | 70.26 | 73.65 | 79.28 |
| 83 | 90 | 90 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | | | | | | |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 10 | 10 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10.04 | 12.45 | 12.45 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4 |
| 34.14 | 20.08 | 20.08 | 79.51 | 78.7 | 77.1 | 75.1 | 76.7 |
| | | | | | | | |
| 5.5 | 6 | 6 | 5.59 | 6.78 | 7.12 | 7.66 | 8.47 |
| 70 | 70 | 70 | 69.38 | 66.86 | 66.26 | 65.62 | 64.92 |

| Realisasi Kondisi Akhir 2020 | % Realisasi Akhir Periode | SKPD Penanggung Jawab |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 17 | 18 |
| | | |
| | | Komposit |
| 63.84 | 2.69 | |
| 16.22 | 185.06 | |
| 8,698,970.00 | 99.54 | |
| 5,670,698.00 | 75.10 | |
| 2.08 | 2.46 | |
| 36,438,100 | 86.78 | |
| 4.4 | -30.27 | |
| 95.6 | 2.04 | |
| 0.26 | 6.56 | |
| 5.21 | 26.76 | |
| 19 | 375.00 | |
| 1.54 | -6.10 | |
| | | |
| | | Dikbud |
| 98.2 | -0.42 | |
| 7.92 | 10.77 | |
| 12.8 | 7.47 | |
| 108 | -8.05 | |
| 108 | 29.93 | |
| 116.04 | 52.00 | |
| 21.9 | 27.33 | |
| 99.6 | 1.43 | |
| | | Dinkes |
| 65.86 | 1.15 | |
| 9 | -35.71 | |
| 0.2 | -90.00 | |
| 85 | 3.66 | |
| 100 | 0.00 | |
| | | Nakertrans |
| 95.6 | 2.04 | |
| | | Dikbud |
| 100 | 100.00 | |
| 2 | 100.00 | |

| | | |
|-------|---------------|-----------------------------|
| 6 | 100.00 | |
| 2 | 100.00 | |
| | | Dinas Pariwisata / OR |
| 38 | 15.15 | |
| 45 | 80.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Dikbud |
| 53.23 | 51.74 | |
| 88.73 | -9.57 | |
| 67.94 | -10.55 | |
| 68.23 | 13.68 | |
| 0.54 | -26.03 | |
| 0.39 | -30.36 | |
| 4.4 | -29.03 | |
| 95.76 | -0.63 | |
| 72.67 | 6.54 | |
| N/A | | |
| 60.39 | 30.00 | |
| | | Dinkes |
| 100 | 0.00 | |
| 21.3 | 10.94 | |
| 73 | 0.00 | |
| 87 | 6.10 | |
| 100 | 13.64 | |
| 39 | -45.83 | |
| 0.2 | 0.00 | |
| 83 | -17.00 | |
| 82.67 | 9.18 | RSUD Labuha |
| C | 100.00 | RSUD Labuha |

| | | |
|-------|---------------|---------------------------------|
| 100 | 100.00 | RSUD Labuha |
| | | PU dan TR |
| 23.36 | 29.78 | |
| 59.8 | 13.90 | |
| 70 | 133.33 | |
| 30 | 66.67 | |
| 23.61 | 61.38 | |
| 95 | 85.44 | |
| 100 | 100.00 | |
| 90 | 80.00 | |
| 100 | 153.04 | |
| 100 | 0.00 | |
| | | Dinas perumahan dan LH |
| 24.24 | 35.27 | |
| 4 | -80.00 | |
| 68.4 | 48.73 | |
| 59.65 | 34.95 | |
| 5.82 | 144.54 | |
| 16.7 | 145.59 | |
| 60 | 62.16 | |
| 26.01 | 1.72 | |
| 74 | 184.62 | |
| 66.67 | 100.00 | |
| | | Satpol-PP dan Kesbangpol |
| 78.67 | 13.54 | Kesbangpol |
| 100 | 200.00 | |
| N/A | | |

| | | |
|-------|---------------|----------------------------|
| 24 | 200.00 | |
| 90 | 50.00 | |
| 32.13 | 100.00 | |
| 2.51 | 213.75 | Satpol - PP |
| 2.51 | 213.75 | |
| 0.6 | 600.00 | |
| 0.8 | 700.00 | |
| 100 | 0.00 | |
| 74.30 | | |
| | | Dinas Sosial, KB dan PP |
| 100 | 100.00 | |
| 15.82 | 41.07 | |
| 4.75 | 112.16 | |
| | | |
| | | Nakertrans |
| 73.75 | 18.00 | |
| 68.46 | 22.22 | |
| 75 | 13.64 | |
| 72.20 | 16.00 | |
| 80.0 | 33.33 | |
| 77.33 | 26.09 | |
| | | Dinas Sosial, KB dan PP |
| 75.47 | 9.26 | |
| 51.00 | -4.01 | |
| 0.16 | 77.14 | |
| 2.6 | -18.75 | |
| 100 | 455.56 | |

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| 75 | 87.50 | |
| | | Dinas Pertanian |
| 19 | | |
| 23.81 | 400.00 | |
| 275 | 18.53 | |
| N/A | N/A | |
| 100 | 0.00 | |
| 64,271 | 10.13 | |
| N/A | | |
| 20% | 300.00 | |
| 25.8 | 263.38 | |
| | | LHK |
| 100 | 11.11 | |
| 75 | 200.00 | |
| 87.50 | 21.53 | |
| 10 | 0.00 | |
| status Inlayer (terujui) dalam Uji Provisensi untuk 10 Parameter | 100.00 | |
| MOU, Survey dan persiapan kawasan | 100.00 | |
| | | DPKAD/BPN |
| 39,526 | 408.05 | |
| 48 | 140.00 | |

| | | |
|-------|---------------|------------------------------------|
| | | Dinas Kependudkan dan Capil |
| 89 | 100.00 | |
| 96.59 | 221.97 | |
| 6270 | | |
| 72.15 | 95.00 | |
| 100 | 0.00 | |
| | | Dinas Sosial, KB dan PP |
| 75.9 | 8.43 | |
| 75.9 | 8.43 | |
| 86 | 86.00 | |
| 2.8 | 0.00 | |
| 18.16 | 0.49 | |
| | | |
| 76 | 46.15 | |
| 40.6 | 25.31 | |
| 5 | 66.67 | |
| 70 | 16.67 | |
| 100 | 0.00 | |
| 2.81 | 40.00 | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| 4 | 25.00 | |
| 76.7 | 3.53 | |
| | | Dishub |
| N/A | N/A | |
| 75 | 10.29 | |
| 30 | 21.05 | |
| < 1 | <1 | |
| | | Dinas Infokom |
| 95.64 | 10.54 | |
| 1 | 100.00 | |

| | | |
|-------|--|--|
| 100 | 100.00 | |
| 2.9 | 31.82 | |
| 90 | 90.00 | |
| | Kop & UKM | |
| 44.49 | -20.91 | |
| 20 | 11.11 | |
| 45.5 | 125.25 | |
| 55 | 175.00 | |
| 0.35 | 288.89 | |
| 85 | 54.55 | |
| | PM dan PTSP | |
| ##### | -98.25 | |
| 14 | 100.00 | |
| 45.4 | 86.83 | |
| 90 | 12.50 | |
| 90 | 28.57 | |
| | Dinas Pemuda dan OR | |
| 80 | 80.00 | |
| 12 | 1100.00 | |
| | Dinas Infokom, Statistik dan Persandian | |
| 98 | 1.55 | |
| | Kearsipan & Perpustakaan | |
| 490 | 1737.27 | |
| 100 | 66.67 | |
| N/A | N/A | |
| | Kearsipan & Perpustakaan | |
| 85.7 | 89.60 | |

| | | |
|-----------|---------------|-------------------------------|
| 61.7 | 53.10 | |
| 12.05 | 150.00 | |
| | | |
| | | Distan |
| 40.57 | 9.03 | |
| 20.24 | -42.17 | |
| | | Dinas Pariwisata dan OR |
| 3.8 | 59.66 | |
| 3 | 0.00 | |
| | | DKP |
| 32,903.18 | 76.76 | |
| 1,229.67 | 5.07 | |
| 680 | 120.35 | |
| | | |
| 50 | 50.00 | |
| 50 | 66.67 | |
| | | Perindag |
| 9,92 | 9,92 | |
| 51 | 51 | |
| 40 | 40 | |
| | | Perindag |
| 19,25 | 5.31 | |
| 15 | 7.14 | |
| 22 | 120.00 | |
| | | Nakertrans |
| 800 | 77.78 | |
| 800 | 800.00 | |
| | | |
| | | |
| | | Bappeda |
| 20 | 150.00 | |
| | | |
| 100 | 0.00 | |
| 100 | 11.11 | |
| 100 | 0.00 | |

| | | |
|---------|---------------|--------------------|
| 50 | 66.67 | |
| 100 | 0.00 | |
| 68 | 9.68 | |
| 50 | 25.00 | |
| | | DPKD |
| 5.09 | 130.32 | |
| 97.07 | 40.64 | |
| WTP | 100.00 | |
| 35 | 16.67 | |
| | | Inspektorat |
| N/A | | |
| 20 | 100.00 | |
| 73.17 | 44.26 | |
| Level 2 | 100.00 | |
| 80 | 71.43 | |
| Level 2 | 100.00 | |
| | | BKD |
| 90 | 800.00 | |
| 70 | 40.00 | |
| 35.21 | 16.20 | |
| 100 | 308.00 | |
| N/A | | |
| | | SETDA |
| 89 | 100.00 | |
| 3.32 | 3.75 | |
| CC | 100.00 | |

| | | |
|------------|---------------|-----------------|
| 100 | 100.00 | |
| 100 | 100.00 | |
| 30 | 50.00 | |
| 60 | 50.00 | |
| | | Bappeda |
| 50% | 66.67 | |
| | | BPPD |
| 5 | 100.00 | |
| 97 | 646.15 | Satpol-PP |
| 80 | 33.33 | |
| 70 | 40.00 | |
| | | |
| | | |
| 49,687,962 | 55.94 | Komposit |
| 476,439 | 27.62 | Komposit |
| 380,250 | 30.66 | Komposit |
| | | |
| 5.38 | 36.90 | PU dan Dishub |
| 3,025 | 50.87 | Dishub |
| 409,514 | 1.32 | Dishub |
| 59.65 | 34.95 | Dinas Perumahan |
| 91.26 | 11.48 | ESDM |
| | | |
| 41,686.10 | 369.93 | DPKAD |
| 4,139.23 | 92.03 | DOKAD |
| | | |
| 79.28 | 72.99 | Infokom |
| 80 | 33.33 | Infokom |
| | | |
| 3 | 57.14 | PTSP |
| 10 | 66.67 | PTSP |

| | | |
|-------|--------------|------------------|
| 4 | 25.00 | BPMD + Pemdes |
| 76.7 | 3.53 | BPMD + Pemdes |
| | | |
| 8.47 | 51.52 | Komposit |
| 64.92 | 6.43 | Komposit |

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Sejarah Singkat Kabupaten Halmahera Selatan

Periode Kesultanan Bacan hingga lahirnya Republik Indonesia

Sejarah Kabupaten Halmahera Selatan berawal dari sejarah tentang “*Jazirat al-Mulk*”, yaitu nama kepulauan di ufuk timur bagian utara dari kepulauan Indonesia. Istilah “*Jazirat al-Mulk*” oleh para saudagar Arab, mempunyai arti: *negeri raja-raja*. Selain itu, dikenal juga istilah “*Jazirah tuil Jabal Mulku*” dengan Pulau Halmahera sebagai pulau induk di kawasan ini. Dari kata Muluk dan Mulku inilah yang kemudian menjadi Molucco menurut ucapan dan outografi orang Portugis, Moluken menurut orang Belanda dan terakhir orang Indonesia sendiri menyebutnya Maluku.

Catatan sejarah tentang “*Jazirah tuil Jabal Mulku*” berlanjut dengan kemunculan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku) yang terdiri atas:

1. Kesultanan Bacan
2. Kesultanan Jailolo
3. Kesultanan Tidore
4. Kesultanan Ternate

Bacan, arti harfiahnya adalah: (*mem-*) *baca*. Kesultanan Bacan adalah suatu kerajaan yang berpusat di Pulau Bacan, Kepulauan Maluku. Sultan Bacan yang pertama adalah Sultan Muhammad Bakir yang berkuasa pada tahun 1235 hingga 1265 dan telah memeluk agama Islam, yang memindahkan pusat kesultannya dari Pulau Makian ke Pulau Kasiruta. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, pusat pemerintahan Kesultanan Bacan dipindahkan dari Pulau Kasiruta ke Pulau Bacan hingga saat ini. Meski berada di Maluku, wilayahnya cukup luas hingga ke wilayah Papua.

Sultan Ternate yaitu Sultan Mudaffar Syah menyatakan bahwa makna dari “bacan” atau “membaca” adalah memasukkan sesuatu, atau usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam otaknya untuk menjadi pengetahuan. Makna tersebut tidak bisa dilepaskan juga dengan tugas dan fungsi Sultan Bacan dalam Kesultanan Moloku Kie Raha yaitu memasok logistik.

Bacan dalam beberapa manuskrip sejarah sering juga ditulis sebagai Bachian, Bachan atau Batjan, dan diduga sudah eksis sejak tahun 1322. Kesultanan Bacan berpusat di Pulau Bacan. Wilayah Kesultanan Bacan pada saat jayanya cukup luas, yaitu dari Maluku hingga ke wilayah Papua. Banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misool dan beberapa daerah lain berada di bawah administrasi pemerintahan Kesultanan Bacan pada masa jayanya.



Pengaruh bangsa Eropa pertama di Pulau Bacan diawali oleh Portugis yang kemudian membangun benteng pada tahun 1558. Bernevald Fort adalah benteng Portugis yang masih utuh berdiri di Pulau Bacan sampai sekarang. Pada tahun 1609 benteng ini diambil alih oleh VOC yang menandai awal penguasaan Hindia Belanda di Pulau Bacan. Pada tahun 1889 sistem monarki Kesultanan Bacan diganti dengan sistem kepemerintahan di bawah kontrol Hindia Belanda. Pulau Bacan tidak hanya mempunyai peran dalam produksi cengkeh dan pala pada masa itu, akan tetapi juga menjadi pusat kontrol atas produksi dan distribusi cengkeh dan pala di Ternate, Tidore, Moti, Makian dan Halmahera.

Periode Kemerdekaan sampai tahun 2003

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1957 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pembagian wilayah pemerintahan menjadi Pemerintahan Swapraja yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Setempat atau disebut KPS.

Pada masa Inpassing pemerintahan pada tahun 1960, daerah-daerah dipecah dalam bentuk distrik. Kemudian pemerintah melakukan perubahan distrik menjadi kecamatan. Pada tahun 1957 Camat Haerie diangkat menjadi camat pertama di kecamatan Bacan, kabupaten Maluku Utara, yang kemudian setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Maluku Utara yang melahirkan Kabupaten Halmahera Selatan, kecamatan Bacan menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera Selatan hingga saat ini.

Kerusuhan sosial yang terjadi pada awal tahun 2000-an di Maluku Utara juga berimbas ke Kecamatan Bacan dan wilayah-wilayah di sekitarnya, yang mengakibatkan konflik horizontal diantara masyarakat, dan membuat terpuruknya kehidupan masyarakat pasca konflik tersebut.

Periode Tahun 2003 - 2010

Menyusul lahirnya Kabupaten Halmahera Selatan pada 10 Juni 2003, Arief Yasin Wahid ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Halmahera Selatan sampai terpilihnya Muhammad Kasuba sebagai Bupati Halmahera Selatan definitive pertama melalui Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005, dan dilantik pada tanggal 10 Agustus 2005.

Pasca dilantik sebagai Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba melakukan proses identifikasi permasalahan daerah untuk menemukan solusi terbaik bagi tahapan pembangunan yang akan dijalankan.

Agenda terbesar yang dihadapi Bupati Muhammad Kasuba pada awal pemerintahannya adalah bagaimana mengangkat kehidupan masyarakat Halmahera Selatan dari keterpurukan pasca konflik horizontal menjadi lebih baik. Muhammad Kasuba kemudian menetapkan tema besar kebijakan pembangunannya dengan konsep **Recovery Sosial** (pemulihan kondisi sosial masyarakat).



Melalui konsep Recovery Sosial tersebut, selama periode tahun 2005-2010 pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dengan memfokuskan pada 3 pendekatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Karakter
2. Pembangunan Stabilitas
3. Pembangunan Kemandirian

Untuk mewujudkan pembangunan karakter, Muhammad Kasuba mencanangkan konsep Manajemen Pemerintahan Berbasis Nilai yang mengedepankan dimensi moral dan pengembangan integritas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pembangunan stabilitas daerah dilaksanakan dengan program utama mengembalikan masyarakat Halmahera Selatan yang berada di daerah pengungsian akibat konflik horizontal ke daerah asalnya masing-masing. Program ini berhasil memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa stabilitas keamanan di Halmahera Selatan telah kembali normal, dan menjadikan Halmahera Selatan sebagai daerah yang paling aman pasca konflik di Maluku Utara berdasarkan hasil exposé Polda Maluku Utara saat itu.

Sebagai upaya memperkuat basis sosial masyarakat Halmahera Selatan, pembangunan kemandirian diarahkan agar masyarakat Halmahera Selatan mampu berdikari pasca konflik horizontal dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonominya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah pimpinan Bupati Muhammad Kasuba menggulirkan program pendidikan dan kesehatan gratis sambil membenahi infrastruktur pedesaan sebagai bagian dari pelayanan dasar masyarakat. Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan derajat kesehatan masyarakat.

Periode tahun 2010 - 2016

Muhammad Kasuba yang terpilih kembali dalam Pilkada Halmahera Selatan tahun 2010 mengusung visi “Mewujudkan Halmahera Selatan sebagai Kabupaten yang bermoral agamis, stabil dan mandiri, sehat dan cerdas, maju dan sejahtera dalam kebersamaan yang adil” untuk periode kedua masa jabatannya. Bupati Muhammad Kasuba kemudian kembali menetapkan tema besar kebijakan pembangunannya pada periode ini dengan konsep ***Recovery Ekonomi*** (pemulihian kondisi ekonomi masyarakat).

Periode tahun 2016 - 2021

Bahrain Kasuba, S.Pd, M.Pd yang didampingi Iswan Hasjim, ST, MT terpilih dalam Pilkada Halmahera Selatan untuk periode tahun 2016-2021 dengan mengusung visi “Memantapkan pembangunan Halmahera Selatan sebagai kabupaten kepulauan yang sejahtera dan berdaya saing dalam kebersamaan yang adil.” Kali ini tema besar kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan pada periode ini adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah”** dengan branding daerah adalah *Halmahera Selatan The Island of Spices*.



2.2 Aspek Geografi dan Demografi

2.2.1 Aspek Geografi

2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 km², yang terdiri dari daratan seluas 8779,32 km² (22%) dan luas lautan sebesar 31.484,40 km² (78%), atau sekitar 27,62% dari luas wilayah Propinsi Maluku Utara yang luasnya mencapai 145.801,10 km². Jarak terjauh utara-selatan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan lebih kurang 219 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat lebih kurang 198 km.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 pada awal berdirinya Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 9 kecamatan dan 194 desa.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Selatan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003

| NO | KECAMATAN | Ibu Kota | Jml Desa |
|-----|-------------------|----------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kec. Bacan | Labuha | 29 |
| 2 | Kec. Bacan Timur | Babang | 20 |
| 3 | Kec. Bacan Barat | Indari | 26 |
| 4 | Kec. Kayoa | Guruapin | 26 |
| 5 | Kec. Pulau Makian | Waikyon | 22 |
| 6 | Kec. Gane Timur | Maffa | 14 |
| 7 | Kec. Gane Barat | Saketa | 37 |
| 8 | Kec. Obi | Laiwui | 13 |
| 9 | Kec. Obi Selatan | Wayaloar | 7 |
| | JUMLAH | | 194 |

Sumber : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003

Mengingat rentang kendali yang luas ditengah masih sulitnya jangkauan transportasi kesejumlah wilayah, maka pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007, wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dibagi menjadi 30 kecamatan dan 249 desa. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Obi Selatan (100.059 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Kayoa Selatan (2.407 ha). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Pulau Makian (15 desa), sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Kayoa Barat (4 desa) dan Kecamatan Obi Timur (4 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2.
Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Selatan
Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007

| NO | KECAMATAN | Ibu Kota | Jumlah | | Luas | |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | | Desa | RT/SLS | Ha | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Kec. Bacan | Labuha | 14 | 68 | 28.138 | 3,47 |
| 2 | Kec. Bacan Selatan | Mandaong | 10 | 54 | 15.627 | 1,93 |
| 3 | Kec. Bacan Timur | Babang | 10 | 35 | 42.804 | 5,28 |
| 4 | Kec. Bacan Timur Selatan | Wayaua | 7 | 23 | 29.656 | 3,66 |
| 5 | Kec. Bacan Timur Tengah | Bibinoi | 7 | 24 | 25.514 | 3,15 |
| 6 | Kec. Obi Selatan | Wayaloar | 8 | 19 | 100.059 | 12,34 |
| 7 | Kec. Obi | Laiwui | 9 | 23 | 99.105 | 12,22 |
| 8 | Kec. Obi Barat | Jikohay | 6 | 9 | 8.730 | 1,08 |
| 9 | Kec. Obi Timur | Sum | 4 | 12 | 58.756 | 7,25 |
| 10 | Kec. Obi Utara | Madapolo | 7 | 33 | 14.840 | 1,83 |
| 11 | Kec. Mandioli Selatan | Jiko | 6 | 16 | 12.819 | 1,58 |
| 12 | Kec. Mandioli Utara | Indong | 6 | 21 | 8.939 | 1,10 |
| 13 | Kec. Kep Batanglomang | Bajo | 8 | 31 | 5.154 | 0,64 |
| 14 | Kec. Bacan Barat | Indari | 7 | 22 | 16.695 | 2,06 |
| 15 | Kec. Kasiruta Barat | Palamea | 10 | 30 | 25.210 | 3,11 |
| 16 | Kec. Kasiruta Timur | Loleojaya | 8 | 19 | 22.896 | 2,82 |
| 17 | Kec. Bacan Barat Utara | Yaba | 8 | 18 | 24.467 | 3,02 |
| 18 | Kec. Kayoa | Guruapin | 14 | 53 | 8.092 | 1,00 |
| 19 | Kec. Kayoa Barat | Busua | 4 | 24 | 2.500 | 0,31 |
| 20 | Kec. Kayoa Selatan | Laluin | 6 | 21 | 2.407 | 0,30 |
| 21 | Kec. Kayoa Utara | Laromabati | 6 | 16 | 3.622 | 0,45 |
| 22 | Kec. Pulau Makian | Waikyon/ Kota | 15 | 59 | 5.125 | 0,63 |
| 23 | Kec. Makian Barat | Mateketen | 7 | 23 | 3.282 | 0,40 |
| 24 | Kec. Gane Barat | Saketa | 10 | 38 | 45.590 | 5,62 |
| 25 | Kec. Gane Barat Selatan | Gane Dalam | 8 | 16 | 23.323 | 2,88 |
| 26 | Kec. Gane Barat Utara | Dolik | 12 | 30 | 46.331 | 5,71 |
| 27 | Kec. Kep Joronga | Kukupang | 7 | 20 | 13.754 | 1,70 |
| 28 | Kec. Gane Timur | Maffa | 12 | 58 | 60.648 | 7,48 |
| 29 | Kec. Gane Timur Tengah | Bisui | 8 | 22 | 28.598 | 3,53 |
| 30 | Kec. Gane Timur Selatan | Gane Luar | 5 | 16 | 28.089 | 3,46 |
| JUMLAH | | | 249 | 853 | 810.770 | 100 |

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Halmahera Selatan

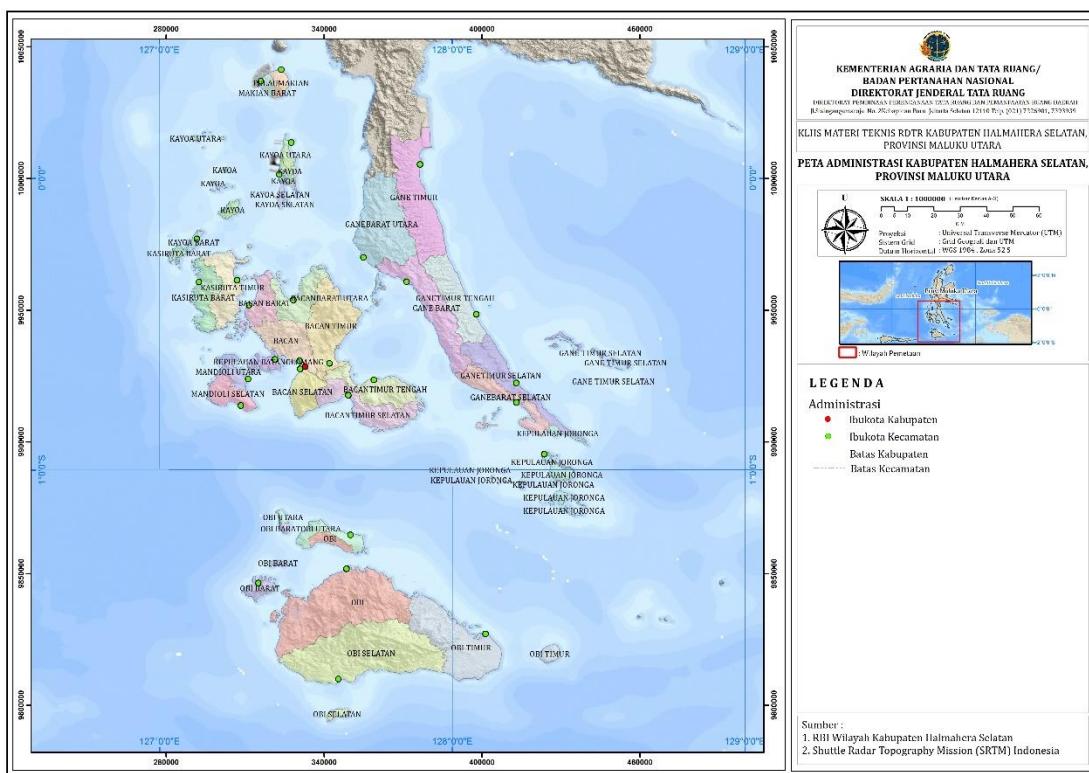
2.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara (sekarang Halmahera Barat), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, terletak antara 126° 45' bujur timur dan 129° 30' bujur timur dan 0° 30' lintang utara dan 2° 00' lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate;
- b. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Seram;
- c. Sebelah timur dibatasi oleh Laut Halmahera;
- d. Sebelah barat dibatasi Laut Maluku.



Gambar 2.1.



Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, 2012

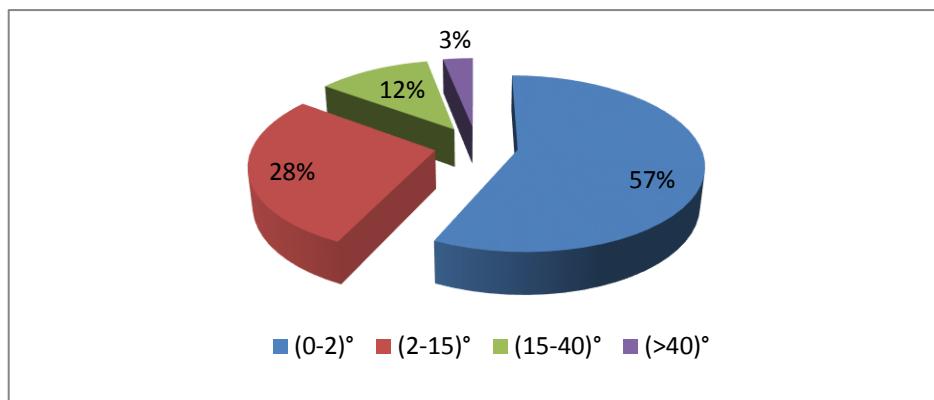
2.2.1.3. Topografi

Sebagai wilayah kepulauan maka topografi wilayah Kabupaten Halmahera Selatan seluas 85,07 persen tergolong datar dan landai yang banyak terdapat di wilayah pesisir dan sisanya 14,93 persen tergolong lahan agak curam (derajat kemiringan 15-40 °) dan lahan curam (derajat kemiringan >40 °). Semakin ke dalam dan jauh dari pantai maka kebanyakan lahan berbukit-bukit. Wilayah kecamatan yang memiliki mayoritas daerah dengan jenis kelerengan datar - landai (0 - 2 °) antara lain kecamatan Kayoa, Kayoa Utara, Kayoa Selatan, Gane Timur, Gane Timur Tengah, Gane Timur Selatan, Kepulauan Joronga, Kepulauan Botanglomang, Mandioli Utara, Mandioli Selatan, Obi Utara, dan Obi Timur. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki kondisi kelerengan curam – sangat curam (15 - >40 °) adalah kecamatan Makian, Makian Barat, Gane Barat Utara, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Bacan, Bacan Timur, Bacan Selatan, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Obi, dan Obi Selatan.

Jika dilihat dari sifat permukaan dan kemiringan (Topografi) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan terbagi atas 4 kategori yaitu:

- Tanah datar dengan kelas lereng (0-2) ° Seluas 461.555 Ha (56,93%).
 - Tanah landai dengan kelas lereng (2-15) ° seluas 228.180 Ha (28,14%).
 - Tanah agak curam kelas lereng (15-40) ° seluas 95.680 Ha (11,80%).
 - Tanah curam dengan kelas lereng > 40 ° seluas 25.355 Ha (3,13%).

Gambar 2.2.
Kondisi Topografi Kabupaten Halmahera Selatan



Sumber : Bappeda Kab Halmahera Selatan (data diolah)

2.2.1.4. Jenis Tanah

Jenis Tanah yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan secara umum adalah :

1. Jenis tanah *padsolik* merah kuning terdapat di Obi bagian timur, Pulau Kayo dan Obi bagian tengah
2. Jenis tanah *latosal* terdapat di Gane Timur, Gane Barat, dan Bacan
3. Jenis tanah *reguosol* terdapat di Pulau makian, Pulau Obi pesisir utara
4. Jenis tanah *aluvial* terdapat di Pulau Obi bagian barat

2.2.1.5. Kondisi dan Struktur Geologi

Gambaran umum mengenai kondisi geologi dan jenis batuan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai komposisi yang sangat bervariasi, terdiri dari *batuan beku*, *sediment* dan *metamorf*. Karakteristik dan persebaran batuannya tertentu sesuai dengan daerah pembentukannya seperti: Batuan Beku di sebagian Pulau Makian sebagai hasil dari erupsi Gunung Kie Besi, Batuan Sedimen di Pulau Kayoa, Batuan Residual di sebagian Pulau Obi serta Batuan Skiss Metamorf di sebagian Pulau Bacan.

Jenis batuan mempengaruhi tekstur tanah, sedang tekstur tanah didefinisikan sebagai perbandingan ukuran partikel-partikel kandungan tanah antara debu, tanah liat dan pasir dari satu contoh tanah. Tekstur berpengaruh langsung terhadap unsur hara, drainase dan kepekaan terhadap erosi. Juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga tanah, persediaan dan kecepatan peresapan air di daerah tersebut, dimana hal itu sangat berperan dalam mudah tidaknya lapisan tanah diolah.

Berdasarkan data struktur geologi, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tersusun atas 20 jenis batuan yang dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut.



Tabel 2.3
Jenis Batuan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

| No | Jenis Batuan | Luas (Km2) |
|-----|---|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | <i>Alluvium</i> | 1,010.92 |
| 2 | Batuan Gunung Api <i>Holosen</i> | 159.60 |
| 3 | Batuan Gunung Api <i>Neogen</i> | 148.70 |
| 4 | Batuan Gunung Api <i>Oligo-Miosen</i> | 1,648.94 |
| 5 | Batuan Gunung Api <i>Plio-Plistosan</i> | 44.07 |
| 6 | Batuan Malihan | 11.17 |
| 7 | Batuan Terobosan | 2.19 |
| 8 | Batuan <i>Ultramafik</i> | 397.60 |
| 9 | Batu Gamping Terumbu | 830.34 |
| 10 | Formasi Anggai | 200.40 |
| 11 | Formasi Bacan | 775.76 |
| 12 | Formasi Fluk | 94.55 |
| 13 | Formasi Kayasa | 7.06 |
| 14 | Formasi Loleobasso | 45.15 |
| 15 | Formasi Obi | 288.02 |
| 16 | Formasi Woi | 454.44 |
| 17 | Komplek Malihan | 262.52 |
| 18 | Sediment Klastik <i>Miosen</i> | 348.91 |
| 19 | Sediment Klastik <i>Neogen</i> | 1,365.00 |
| 20 | Terobosan Tersier | 42.25 |
| 21 | Tidak Ada Data | 48.72 |

Sumber : Peta Struktur Geologi, 2006, dan Hasil Olahan Konsultan RTRW, 2008

Sedang struktur geologi di Halmahera Selatan berbentuk struktur lipatan berupa sinklin dan antiklin terlihat jelas pada Formasi Weda (Tmpw) yang berumur Miosen Tengah-Pliosen Awal. Sumbu lipatan berarah utara – selatan, timur laut - barat daya dan barat laut - tenggara. Struktur sesar terdiri dari sesar normal dan sesar naik, umumnya berarah utara-selatan dan baratlaut-tenggara.

Petunjuk akan adanya banyak sesar di Pulau Bacan diperoleh baik dari hasil pengamatan di lapangan maupun pada potret udara. Sesar diduga terdapat di sepanjang Sungai Sayoang yang mengalir dari baratlaut ke tenggara dan memisahkan daerah perbukitan bagian timur dan barat Pulau Bacan bagian utara. Pada jalur sesar tersebut muncul batuan terobosan granit/*granodiorit* berumur Tersier dan batuan gunung api berumur Kuarter.

Berdasarkan peta sesar dapat diketahui sebaran garis sesar di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Garis sesar yang tersebar dapat digolongkan berdasarkan jenis dan proses pembentuknya, seperti pada tabel 2.4. berikut.



Tabel 2.4.
Jenis Sesar dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

| No | Jenis Sesar | Jumlah | Panjang (meter) |
|-----|-----------------|--------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Antiklin | 9 | 86,974 |
| 2 | Gunung api giat | 1 | 23,183 |
| 3 | Kontak geologi | 2 | 14,406 |
| 4 | Sesar | 36 | 269,701 |
| 5 | Sesar Normal | 7 | 118,683 |

Sumber : RTRW Kab Halmahera Selatan, 2012

2.2.1.6. Hidrologi

Ketersediaan air di bumi yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai penunjang kehidupan manusia sangat terbatas yakni hanya sekitar 3 persen dari volume air keseluruhan, sisanya sekitar 97 persen merupakan air laut yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung, dan dari 3 persen air tersebut terdiri dari air permukaan dan air tanah yang keberadaannya dipengaruhi oleh iklim, topografi, jenis batuan dan kondisi permukaan tanah serta tata guna lahan.

Kondisi hidrologi (kondisi air permukaan dan air tanah) Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi oleh iklim, curah hujan serta keberadaan sungai dan danau. Berdasarkan keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah teridentifikasi, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 151 DAS dan 5 buah danau (dengan 4 danau besar yang terdapat di Kec. Bacan Timur, Kec. Bacan Timur Tengah dan Kec. Obi).

Tabel 2.5.
Nama Danau dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

| No | Lokasi | Nama Danau |
|-----|--------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bacan Timur Tengah | Danau Lama |
| 2 | Bacan Timur | Talaga Nusa dan Talaga Manggayoang |
| 3 | Obi | Danau Karo |

Sumber : RTRW Kabupaten Halmahera Selatan, 2012

Sementara kondisi hidrogeologi di Kabupaten Halmahera Selatan dibagi atas beberapa tipologi kondisi hidrogeologi yaitu berdasarkan tipologi produktifitas aquiferanya yang terdiri atas :

- Produktif setempat; akuifer produktif berarti akuifer dengan keterusan beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah serta debit mata air umumnya $< 10 \text{ l/det}$.
- Produktif rendah setempat; Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti umumnya keterusan sangat rendah, air tanah dangkal dalam jumlah yg terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan.



- c. Produktif sedang; Akuifer produksi sedang berarti aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran besar. Debit mata air terbesar mencapai 100 l/det.
- d. Setempat produktif sedang; Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti akuifer tidak menerus, tipis, dan rendah keterusannya, maka air tanah umumnya dangkal, debit sumur umumnya < 5 l/det.
- e. Tidak produktif dangkal; Daerah air tanah langka atau tak berarti

Berdasarkan kondisi produktifitas aquifernya, Kabupaten Halmahera Selatan sebagian besar wilayahnya memiliki produktifitas aquifer rendah setempat. Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki produktifitas aquifer tinggi terdapat di Pulau Makian.

Sumber Daya Air di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi curah hujan, danau, sungai dan air tanah dalam (mata air). Curah hujan pada umumnya cukup untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti untuk irigasi, industri, air minum dan untuk keperluan domestik lainnya. Dalam keadaan lapisan permukaan daerah tangkapan hujan (*catchment area*) ditumbuhi vegetasi yang lebat, debit aliran sungai pada saat curah hujan tinggi, fluktuasinya relatif tidak terlalu mencolok, perbedaan aliran air pada musim hujan dan musim kemarau tidak besar. Sebaliknya perbedaan ini akan cukup besar jika lapisan permukaan daerah tangkapan hujan (*catchment area*) relatif tidak terlindungi vegetasi atau telah dipenuhi oleh bangunan dan infrastruktur lainnya yang menyebabkan permukaan tanah menjadi kedap air. Sebagai langkah untuk menanggulangi dampak negatif yang timbul maka diperlukan upaya konservasi air tanah, melakukan pengaturan dan pembatasan daerah pengambilan air tanah pada zona-zona konservasi air tanah dan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan tata guna air.

Sungai-sungai yang ada memiliki tingkat kerapatan yang tinggi, dengan demikian potensi aliran air yang dihasilkan seharusnya dapat memberikan manfaat yang merata keseluruhan wilayah Halmahera Selatan. Akan tetapi kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal ditambah adanya kerusakan lingkungan di beberapa kawasan membuat air hujan tidak bertahan dan menimbulkan fluktuasi debit aliran air yang tidak menguntungkan. Pada saat musim penghujan aliran air sungai melimpah namun hanya berlangsung dalam waktu yang relatif pendek sehingga daya gunanya kecil, namun disisi lain dapat menimbulkan bahaya banjir terutama di daerah-daerah bagian hilir. Sebaliknya pada saat musim kemarau aliran sungai sangat kecil, atau bahkan ada yang sampai kering. Dengan demikian penggunaan air perlu diatur sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dan menghindari terjadinya bencana.

Penduduk di Halmahera Selatan dalam memenuhi kebutuhan air, selain berasal dari sungai, juga dari sumber mata air. Potensi sumber daya air di Halmahera Selatan sangat bervariasi dengan aquifer berskalan kecil sampai tinggi. Sedang debit sumber mata air juga bervariasi, perhatikan data pada table 2.6 berikut:



Tabel 2.6.
Potensi Debit Mata Air Sumber Air Bersih di Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Nama Mata Air | Lokasi | Debit (l/dtk) | NO | Nama DAS | Lokasi | Debit (l/dtk) |
|-----|---------------|--------|---------------|-----|----------------|------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Babang | Bacan | 0,1 | 24 | Air Lelewi | Bacan | 35,0 |
| 2 | Sayoang | Bacan | 7,0 | 25 | Telaga Biru | Bacan | 40,0 |
| 3 | Panambuang | Bacan | 2,0 | 26 | Air Kubung | Bacan | 2,0 |
| 4 | Gersia 1 | Bacan | 1,0 | 26 | Dolik 1 | Gane Barat | 1,0 |
| 5 | Gersia 2 | Bacan | 2,0 | 27 | Jebubu Dolik | Gane Barat | 3,0 |
| 6 | Kupal | Bacan | 3,0 | 28 | Bublo Saketa | Gane Barat | 1,0 |
| 7 | Arab | Bacan | 10,0 | 29 | Hahal | Gane Barat | 0,2 |
| 8 | Panas Kupal | Bacan | 0,1 | 30 | Lamo | Gane Barat | 3,0 |
| 9 | Kupal II | Bacan | 2,0 | 31 | Cango | Gane Barat | 3,0 |
| 10 | Panas II | Bacan | 5,0 | 32 | Jebubu Gumira | Gane Barat | 3,0 |
| 11 | Beringin 1 | Bacan | 2,0 | 33 | Jebubu Batulak | Gane Barat | 2,0 |
| 12 | Waymika | Bacan | 0,5 | 34 | Hafo | Gane Barat | 1,0 |
| 13 | Air Jebubu 1 | Bacan | 15,0 | 35 | Posi-posi | Gane Barat | 0,5 |
| 14 | Arumamang | Bacan | 0,1 | 36 | Doro | Gane Timur | 5,0 |
| 15 | Sengga 1 | Bacan | 0,2 | 37 | Lemo-lemo 1 | Gane Timur | 12,5 |
| 16 | Sengga 2 | Bacan | 0,1 | 38 | Lemo-lemo 2 | Gane Timur | 1,0 |
| 17 | Air Jebubu 2 | Bacan | 0,2 | 39 | Usaha Baru | Gane Barat | 8,0 |
| 18 | Air Rota | Bacan | 0,1 | 40 | Bidomelaku | Gane Barat | 10,0 |
| 19 | Air Tumbuh 1 | Bacan | 3,0 | 41 | Tabamasa | Gane Barat | 0,2 |
| 20 | Air Tumbuh 2 | Bacan | 0,4 | 42 | Papaceda | Gane Barat | 1,0 |
| 21 | Indari 1 | Bacan | 2,0 | 43 | Oha 1 | Gane Barat | 2,0 |
| 22 | Indari 2 | Bacan | 0,1 | 44 | Oha 2 | Gane Barat | 2,0 |
| 23 | Ahadao | Bacan | 11,0 | | | | |

Sumber : RPJMD Prov. Maluku Utara, 2014

2.2.1.7. Klimatologi

Karakteristik iklim wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 mm sampai dengan 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya serta semenanjung Halmahera bagian Selatan.

Selain itu Kabupaten Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh dua musim yaitu:

- a. Musim Utara pada bulan Oktober-Maret yang diselingi angin Barat dan Pancaroba pada bulan April.
- b. Musim Selatan pada bulan September diselingi angin Timur dan Pancaroba pada bulan Oktober.

Menurut klasifikasi Schmidt F.H dan J.H.A Ferguson (1951), secara umum Kabupaten Halmahera Selatan beriklim Tipe A dan Tipe B kecuali Saketa yang bertipe C. Menurut Klasifikasi Koppen (1960) Kabupaten Halmahera Selatan bertipe A kecuali Laiwui yang bertipe Am.



Berdasarkan tingkat curah hujan 1.250 – 3.250 mm/tahun dengan sebaran curah hujan di mayoritas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 2.250 mm/tahun dan curah hujan tertinggi yaitu 3.250 mm/tahun terjadi di dataran tinggi di kec. Obi, kec. Obi Timur dan kec. Obi Selatan dan curah hujan terendah yaitu 1.250 mm/tahun terjadi di kec. Bacan, kec. Bacan Timur dan kec. Gane Barat.

2.2.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Halmahera Selatan meliputi **kawasan Lindung** dan **kawasan budidaya**. Kawasan lindung meliputi Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Bakau, Daerah Resapan Air, Daerah Rawan Bencana, Kawasan Konservasi, Daerah Sempadan Pantai, serta Daerah Sempadan Sungai dan Danau. Sementara kawasan budidaya meliputi Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Konversi dan Penggunaan Lain. Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan: Cagar Alam bertambah 7,38%; luas Hutan Lindung bertambah 17,75%; luas Hutan Produksi bertambah 1,97%; luas Hutan Produksi Terbatas berkurang 4,77%; luas Hutan Produksi Konversi berkurang 41,90%; hutan bakau tetap dan untuk penggunaan lainnya naik 97,48%. Perubahan ini akibat perhitungan ulang luas kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 302/Menhut-II/2013 tentang kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya kawasan hutan di Halmahera Selatan ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 415/Kpts-II/1999. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan di Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | TAHUN | Luas (Ha) | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | | Cagar Alam | Hutan Lindung | Hutan Produksi | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Konversi | Hutan Bakau | Penggunaan Lain |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 2011 | 39.419,10 | 111.282,80 | 181.819,10 | 187.061,60 | 219.321,50 | - | 72.219,20 |
| 2 | 2012 | 42.327,22 | 131.097,98 | 185.277,50 | 178.361,50 | 127.424,28 | 4.128,25 | 142.449,12 |
| 3 | 2013 | 42.327,23 | 131.034,55 | 185.404,62 | 178.134,62 | 127.415,49 | 4.128,25 | 142.621,15 |
| 4 | 2014 | 42.327,23 | 131.034,56 | 185.404,55 | 178.134,62 | 127.415,49 | 4.128,25 | 142.621,15 |

Sumber: RTRW Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032

Kawasan Cagar Alam berada pada Kawasan CA Gunung Sibela di Pulau Bacan seluas 22.672,56 ha, Kawasan CA di Pulau Obi seluas 19.654,66 ha, dan Kawasan CA Taman Laut di Kepulauan Widi seluas 2.531,00 ha.

Gunung Sibela ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 326/Kpts-II/1987 tanggal 15 Oktober 1987 dengan luas kawasan 22.672,56 Ha, Gunung Sibela merupakan salah satu gunung tertinggi di Maluku Utara dengan ketinggian 2.118 meter diatas permukaan laut. CA Gunung Sibela terletak di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, memiliki banyak sumber mata air yang mengalir kebeberapa sungai. Kondisi tanah berpasir dan berbatu. Curah hujan rata-rata tahunan 410 mm dengan temperatur 30-320C. Potensi flora



merupakan vegetasi hutan dataran tinggi dan hutan tropis Diptherocarpaceae, vegetasi Matoa (*Pometia pinnata*), Samama (*Antocephalus macrophyllus*), Anggrek Alam dan Cengkeh Alam (*Cengkeh avo*). Sedang potensi fauna: Kera Bacan (*Macaca nigra*), Bayan (*Electus roratus*), Burung Raja (*Cicinnurus regius*), Kakatua Alba (*Cacatua alba*), Nuri Ternate (*Lorius garrulus*), Perkicit Violet (*Eos squamata*). Serta potensi wisata dan jasa lingkungan adalah trekking dan wisata minat khusus.

2.2.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari:

1. Kawasan rawan banjir menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Kawasan rawan letusan gunung api seluas kurang lebih 8.407 Ha di kecamatan Pulau Makian dan Makian Barat
3. Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 117.435 Ha di kecamatan Gane Barat, Gane Barat Utara dan Bacan Timur Tengah.
4. Kawasan rawan gempa menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Kawasan rawan tsunami menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan

2.2.4 Kawasan Konservasi dan Perlindungan Terumbu Karang

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Halmahera Selatan bahwa Kawasan Konservasi dan Perlindungan Terumbu Karang di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi wilayah Gane Timur Selatan (Kep. Joronga), Pulau Obi, Pulau Bacan bagian selatan, Pulau Mandioli, Pulau-pulau Kasiruta, Kayoa dan Kepulauan Widi.

Sedang berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 251/KPTS/MU/2019 tanggal 15 desember 2019, menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Halmahera Selatan dengan nama kawasan *Suaka Pulau Kecil Halmahera Selatan* terletak di Kepulauan Widi seluas 7.690,00 ha yang meliputi zona inti 940 Ha, zona pemanfaatan terbatas 2.420 Ha dan Zona lainnya 4.330 Ha., dan berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 99 Tahun 2012 menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah dengan nama *Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Halmahera Selatan* seluas 6.386,46 ha, yang berlokasi pada kawasan perairan sekitar Kepulauan Guraici dengan koordinat lokasi berada pada $127^{\circ}10' - 127^{\circ}18'$ BT dan $0^{\circ}08'LS - 0^{\circ}02'LU$.

2.2.5 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032 sebagai berikut:

2.2.5.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana umum dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas:



- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Labuha di Pulau Bacan;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi: a. kawasan perkotaan Guruapin di Kecamatan Kayoa; b. kawasan perkotaan Mafa di Kecamatan Gane Timur; c. kawasan perkotaan Saketa di Kecamatan Gane Barat; dan d. kawasan perkotaan Babang di Kecamatan Bacan Timur.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi: a. kawasan perkotaan Laiwui di Kecamatan Obi; b. kawasan perkotaan Loleojaya di Kecamatan Kasiruta Timur; c. kawasan perkotaan Gane Dalam di Kecamatan Gane Barat Selatan; dan d. kawasan perkotaan Waikyon di Kecamatan Makian.
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi: a. Indari di Kecamatan Bacan Barat; b. Yaba di Kecamatan Bacan Barat Utara; c. Mandaong di Kecamatan Bacan Selatan; d. Wayaua di Kecamatan Bacan Timur Selatan; e. Bibinoi di Kecamatan Bacan Timur Tengah; f. Kukupang di Kecamatan Kepulauan Joronga; g. Dolik di Kecamatan Gane Barat Utara; h. Gane Luar di Kecamatan Gane Timur Selatan; i. Bisui di Kecamatan Gane Timur Tengah; j. Palamea di Kecamatan Kasiruta Barat; k. Bajo di Kecamatan Kepulauan Batanglomang; l. Busua di Kecamatan Kayoa Barat; m. Laluin di Kecamatan Kayoa Selatan; n. Laromabati di Kecamatan Kayoa Utara; o. Mataketen di Kecamatan Makian Barat; p. Jiko di Kecamatan Mandioli Selatan; q. Indong di Kecamatan Mandioli Utara; r. Jikohai di Kecamatan Obi Barat; s. Wayaloar di Kecamatan Obi Selatan; t. Sum di Kecamatan Obi Timur; u. Madapolo di Kecamatan Obi Utara; dan v. kawasan perkotaan-perkotaan lain yang akan dibentuk.

Sementara sistem jaringan utama yang ada meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan transportasi udara dan sistem jaringan transportasi intermoda. Dan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

2.2.5.2 Rencana Pola Ruang

A. Kawasan Peruntukan Pertanian

- Kawasan pertanian meliputi kawasan peruntukan tanaman pangan dan hortikultura seluas lk. 9.943,95 Ha yang tersebar hampir di seluruh kecamatan dan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- Kawasan perkebunan dengan komoditas utama kelapa, kelapa sawit, cengkeh, kakao dan pala tersebar diseluruh kecamatan dengan luas lk. 105.509,77 Ha.
- Kawasan peternakan berpotensi dikembangkan di Kayoa, Bacan Barat, Bacan Timur, Gane Timur dan Gane Barat dan wilayah lainnya di Halmahera Selatan

B. Kawasan Peruntukan Perikanan

- Kawasan Perikanan Tangkap dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Halmahera Selatan dengan komoditi utama ikan tuna, ikan cakalang, lobster, kakap, dan kerapu.



- Kawasan Budidaya perikanan meliputi :

Keramba Jaring Apung (KJA) pada wilayah-wilayah Gane Barat Selatan dan Kepulauan Joronga, pesisir utara dan barat Kepulauan Obi, pesisir utara dan selatan Labuha, pesisir utara Bacan Barat Utara, pesisir timur Mandioli Utara, pesisir timur Kasiruta Timur, pesisir barat Bacan Barat, Kayoa dan Kayoa Selatan, serta kepulauan Botanglomang.

Rumput Laut pada wilayah-wilayah perairan Kayoa dan Kayoa Selatan, Kasiruta Timur dan Bacan Barat, Bacan dan kepulauan Botanglomang, Gane Timur Selatan, Mandioli Selatan, Kepulauan Joronga dan Obi Utara bagian selatan.

Mutiara pada wilayah-wilayah perairan Obi Barat, Kasiruta Barat dan Timur, Bacan Selatan, Bacan Timur Tengah dan Obi

- Kawasan Minapolitan : Bacan-Botanglomang dengan prasarana pendukung pelabuhan perikanan dan balai benih ikan, Jikotamo dengan prasarana pendukung pelabuhan perikanan, Kepulauan Joronga dengan prasarana pendukung budidaya rumput laut, dan Ngofakiah dengan prasarana pendukung pelabuhan dan pengalengan ikan.

C. Kawasan Peruntukan Pertambangan

- Nikel di Kecamatan Obi dan Obi Selatan;
- Pasir Besi di Kecamatan Gane Timur dan Gane Timur Tengah;
- Tembaga di Kecamatan Bacan, Bacan Barat dan Bacan Barat Utara;
- Emas di Pulau Obi dan Bacan
- Minyak dan Gas Bumi di Semenanjung Halmahera bagian selatan.
- Panas Bumi di Bacan Timur Tengah
- Batubara di Pulau Bacan
- Mangan (Batu Bacan) di Pulau Kasiruta, Bacan dan Obi

D. Kawasan Peruntukan Industri

- Kawasan Industri pengolahan rumput laut di Obi, Kepulauan Botanglomang dan Kepulauan Joronga, pengolahan padi/beras di Gane Timur, pengolahan kakao di Bacan Timur dan Gane Barat, pengolahan cengkeh di Obi dan Kasiruta, dan industri pengolahan kelapa di Bacan Timur, Gane Barat, Obi dan Kayoa, serta industri pengolahan ikan di Bacan dan Bacan Selatan.
- Industri kecil : pengolahan gula aren, olahan sagu, kerupuk ikan dan batu aji di Bacan dan Kepulauan Botanglomang.
- Kawasan industri pengolahan nikel di Pualu Obi.

E. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perdesaan lk. 7.501 hektar, dan kawasan permukiman perkotaan lk. 970 hektar yang tersebar di 30 kecamatan, serta kawasan permukiman transmigrasi lk. 5.517,19 hektar di kecamatan Gane Timur, Gane Barat dan Bacan Barat Utara.



F. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Potensi Kawasan peruntukan pariwisata meliputi tema wisata alam dan tema wisata budaya.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya:

- kawasan pelestarian Tarian Katreji berlokasi di Kecamatan Bacan;
- kawasan pelestarian Tarian Togal berlokasi di Pulau Makian dan Kayoa;
- kawasan pelestarian Soya-soya berlokasi di Kecamatan Kayoa;
- kawasan pelestarian Tarian Marabose di Kecamatan Bacan;
- kawasan pelestarian Tarian Dendang di Kecamatan Bacan;
- Gua Pantai Rijang berlokasi di Kecamatan Obi Selatan;
- Benteng Barnavelt berlokasi di Kecamatan Bacan;
- Keraton Bima Kesultanan Bacan berlokasi di Kecamatan Bacan;
- Masjid dan Kuburan Sultan di Kecamatan Bacan;
- Keraton (Ompu Asal) Kasdam berlokasi di Kecamatan Kasiruta Timur;
- Benteng Foya berlokasi di Kecamatan Gane Timur;
- Benteng Waidoba berlokasi di Kecamatan Kayoa;
- Benteng Mouriet berlokasi di Pulau Makian.

Kawasan peruntukan pariwisata alam:

- Danau Karo kerlokasi di Kecamatan Obi;
- Danau Manggayoang di Kecamatan Bacan Timur;
- Danau Nusa di Kecamatan Bacan Timur;
- Cagar Alam Gunung Sibela berlokasi di Kecamatan Bacan;
- Cagar Alam Pulau Obi di Kecamatan Obi;
- Kali Barangka Dolong berlokasi di Kecamatan Bacan;
- Air Belanda di Kecamatan Bacan Selatan;
- Air Terjun Bibinoi dan Songa Bacan Timur Tengah;
- Puncak Gunung Kie Besi berlokasi di Pulau Makian;
- Pantai Omamoi berlokasi di Kecamatan Bacan Selatan;
- Pantai Pulau Sambiki berlokasi di Kecamatan Obi;
- Pantai Akebaru berlokasi di Kecamatan Obi;
- Pantai Pulau Nusa Ra di Kecamatan Bacan;
- Taman Laut Tanjung Gurango di Kecamatan Bacan Selatan;
- Taman Laut Pananboang di Kecamatan Bacan Selatan;
- Taman Laut Tanjung Mangga di Kecamatan Mandioli Selatan;
- Taman Laut Pulau Widi berlokasi di Kecamatan Gane Timur Selatan;
- Taman Laut Pulau Kusu di Kecamatan Bacan Timur;
- Taman Laut Pulau Proco di Kecamatan Bacan Timur;
- Taman Laut Pulau Sali Kecil di Kecamatan Bacan Timur;
- Pantai Laut Pulau Lelei berlokasi di Kecamatan Kayoa;
- Pantai Pulau Guraici berlokasi di Kecamatan Kayoa;
- Pantai Watambi berlokasi di Kecamatan Kayoa;
- Habitat Kupu-kupu berlokasi di Sungai Ra, Sayoang dan Gunung Suwanggi Kecamatan Bacan Timur; dan Desa Sum Kecamatan Obi Timur



G. Kawasan Hutan

Kawasan hutan meliputi kawasan-kawasan hutan dengan kategori sebagai berikut:

- Kawasan Cagar Alam (CA) seluas 42.327,23 Ha
- Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 131.034,56 Ha
- Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 185.404,55 Ha
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 178.134,62 Ha
- Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 127.415,49 Ha
- Kawasan Hutan Bakau 4.128,25 Ha
- Kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

H. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Kawasan Pesisir yang merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, sedang Kawasan Pulau-Pulau Kecil yakni pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km², dengan jumlah pulau di Halmahera Selatan lebih kurang 371 buah, sekitar 41 pulau berpenghuni dan sisanya 330 pulau tidak berpenghuni. Panjang garis pantai lk 2.394 km. Pulau-pulau besar antara lain Bacan, Obi, Obi Latu, Mandioli, Kasiruta, Makian, Kayoa, Amabatu, Kosah, Pinangkara, Lemo, Nenas, Paniki, Waindi, Tuada, Tomatamo, Ngaimadodera, dan Rica.

I. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi:

- Komando Distrik Militer 1509/Labuha di Kecamatan Bacan Selatan
- Kompi Senapan A Batalyon Infanteri 732 Banau di Kecamatan Bacan Timur
- Pos Angkatan Laut di Kecamatan Bacan Selatan
- Markas Polisi Militer di Hidayat Kecamatan Bacan
- Polres di Tomori Kecamatan Bacan

J. Kawasan Strategis

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri atas:

- Kawasan Strategis Provinsi;
- Kawasan Strategis Kabupaten; dan
- Kawasan Strategis Nasional

2.2.6 Aspek Demografi

Indikator dari demografi adalah *ukuran, struktur dan distribusi penduduk*. Penduduk merupakan sumber daya yang potensial bagi proses pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal bagi pelaksanaan pembangunan, namun dapat pula menjadi beban jika tidak tertangani secara serius sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai masalah sosial seiring dengan berkembangnya penduduk seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam proses



pembangunan, penduduk berada pada dua sisi sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus menjadi objek atau sasaran pembangunan itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 sebanyak 248.395 jiwa, terdiri dari laki-laki 129.501 jiwa dan perempuan 121.798 jiwa. Luas wilayah daratan Halmahera Selatan adalah 8.779,32 km² sehingga kepadatan penduduk rata-rata hanya 25,04 jiwa per kilometer persegi. Angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten lain di Indonesia. Kepadatan penduduk di Halmahera Selatan tersebar tidak merata. Hal ini terlihat dari rentang kepadatan penduduk yang sangat jauh antar kecamatan. Kepadatan terendah yaitu 5,71 jiwa per kilometer persegi terdapat di Kecamatan Obi Timur dan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kayoa Selatan yaitu 239,38 jiwa per kilometer persegi. Untuk itu perlu dirumuskan pembangunan wilayah kecamatan yang merata sehingga penduduk tidak terkonsentrasi dalam satu atau beberapa wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pertambangan dan industri di Obi, kawasan transmigrasi di Gane Timur, kawasan pertumbuhan baru Indari-Loleojaya, Makian-Kayao dan Seketa dapat menjadi alternatif kebijakan pengembangan wilayah. Salah satu dampak dengan bertambahnya penduduk adalah kebutuhan akan areal permukiman dan mengurangi areal lahan produktif.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk, KK dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 223.460 | 227.280 | 231.217 | 235.090 | 238.733 |
| 2 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 43.436 | 44.178 | 44.944 | 45.696 | 46.379 |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (% / tahun) | 1,64 | 1,70 | 1,72 | 1,66 | 1,54 |
| 4 | Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa) | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |

Sumber: *Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021*

Kecamatan Bacan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu 28.788 jiwa pada tahun 2019. Struktur umur penduduknya juga tergolong penduduk usia muda jumlahnya lebih banyak daripada penduduk usia tua. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Kayoa Utara, dengan jumlah penduduk 2.889 jiwa. Perhatikan tabel 2.9. berikut.



Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | | Laju Per tumbuhan Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk Thn 2020 | |
|-----|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Tahun | | | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019-2020 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1 | Bacan | 23.633 | 24.832 | 25.524 | 28.788 | 27.045 | 5,29 | 88,76 | |
| 2 | Bacan Selatan | 15.834 | 16.603 | 16.954 | 19.369 | 19.560 | 5,11 | 115,60 | |
| 3 | Bacan Timur | 11.004 | 11.520 | 11.792 | 12.491 | 12.794 | 3,65 | 27,60 | |
| 4 | Bacan Timur Tengah | 5.948 | 6.068 | 6.120 | 6.451 | 6.158 | 2,42 | 22,29 | |
| 5 | Bacan Timur Selatan | 7.220 | 7.241 | 7.262 | 7.800 | 7.493 | 2,41 | 23,33 | |
| 6 | Obi Selatan | 13.100 | 13.133 | 13.100 | 14.972 | 12.178 | 3,38 | 11,24 | |
| 7 | Obi | 16.070 | 16.338 | 16.472 | 16.268 | 20.538 | 1,06 | 19,14 | |
| 8 | Obi Barat | 3.950 | 3.943 | 3.943 | 5.850 | 5.211 | 10,38 | 55,13 | |
| 9 | Obi Timur | 3.671 | 3.678 | 3.669 | 3.931 | 3.705 | 1,97 | 5,82 | |
| 10 | Obi Utara | 8.903 | 8.918 | 8.897 | 10.162 | 9.128 | 3,38 | 56,81 | |
| 11 | Mandioli Selatan | 6.294 | 6.339 | 6.334 | 7.070 | 6.936 | 2,96 | 49,97 | |
| 12 | Mandioli Utara | 3.381 | 3.466 | 3.495 | 4.019 | 3.809 | 4,33 | 39,35 | |
| 13 | Kep. Botanglomang | 6.700 | 6.677 | 6.657 | 7.605 | 7.655 | 3,35 | 137,16 | |
| 14 | Bacan Barat | 3.878 | 3.916 | 3.918 | 4.521 | 4.327 | 3,82 | 23,94 | |
| 15 | Kasiruta Barat | 5.000 | 5.030 | 5.039 | 6.087 | 5.807 | 5,00 | 21,27 | |
| 16 | Kasiruta Timur | 4.291 | 4.394 | 4.420 | 4.885 | 4.865 | 3,25 | 19,62 | |
| 17 | Bacan Barat Utara | 4.618 | 4.706 | 4.739 | 5.029 | 5.010 | 2,45 | 18,91 | |
| 18 | Kayoa | 8.806 | 8.873 | 8.853 | 8.945 | 9.057 | 0,75 | 103,37 | |
| 19 | Kayoa Barat | 3.772 | 3.801 | 3.797 | 4.313 | 4.336 | 3,37 | 160,18 | |
| 20 | Kayoa Selatan | 6.309 | 6.305 | 6.283 | 6.776 | 6.822 | 2,02 | 261,78 | |
| 21 | Kayoa Utara | 2.966 | 2.987 | 2.995 | 2.889 | 2.896 | 0,19 | 74,76 | |
| 22 | Pulau Makian | 9.667 | 9.758 | 9.740 | 10.124 | 10.032 | 1,35 | 180,76 | |
| 23 | Makian Barat | 3.816 | 3.845 | 3.859 | 3.997 | 3.968 | 1,69 | 111,65 | |
| 24 | Gane Barat | 8.554 | 8.533 | 8.496 | 10.219 | 10.019 | 4,44 | 20,29 | |
| 25 | Gane Barat Selatan | 6.229 | 6.304 | 6.336 | 6.424 | 6.796 | 1,37 | 26,91 | |
| 26 | Gane Barat Utara | 6.542 | 6.521 | 6.503 | 7.408 | 7.336 | 3,29 | 14,62 | |
| 27 | Kep. Joronga | 5.716 | 5.702 | 5.688 | 7.154 | 7.203 | 5,68 | 48,37 | |
| 28 | Gane Timur | 9.543 | 9.677 | 9.688 | 9.122 | 9.253 | -0,37 | 14,09 | |
| 29 | Gane Timur Tengah | 4.243 | 4.332 | 4.356 | 4.553 | 4.354 | 2,04 | 14,06 | |
| 30 | Gane Timur Selatan | 3.802 | 3.840 | 3.842 | 4.077 | 4.104 | 1,97 | 13,49 | |
| | TOTAL | 223.460 | 227.280 | 228.771 | 251.299 | 248.395 | 3,15 | 28,29 | |

Sumber : Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan jika dilihat dari data lima tahun terakhir rata-rata sebesar 3,15%. Pertumbuhan ini relatif tinggi, karena berkembangnya kawasan-kawasan pertambangan dan kawasan pertumbuhan baru yang



menarik banyak pekerja dari luar daerah masuk ke Kabupaten Halmahera Selatan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah kependudukan yang serius. Oleh karena itu, upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilakukan secara berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan bidang kependudukan juga dapat tercermin dari semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif secara ekonomi yakni usia 0-14 tahun (usia muda) dan 65 tahun ke atas (usia tua). Indikator ini dapat dilihat dari angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif secara ekonomi (15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dirinya karena semakin kecil beban untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

**Tabel 2.10
Angka Beban Ketergantungan di Halmahera Selatan, 2016-2020**

| Tahun | Prosentase Kelompok Umur | | | Angka Beban Ketergantungan |
|-------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 38,01 | 59,04 | 2,95 | 69,38 |
| 2017 | 38,01 | 59,03 | 2,95 | 66,86 |
| 2018 | 32,49 | 62,88 | 4,62 | 66,26 |
| 2019 | 18,68 | 76,42 | 4,19 | 65,62 |
| 2020 | 20,11 | 75,29 | 4,35 | 64,92 |

Sumber : *Halmahera Selatan Dalam Angka* (BPS), 2017-2021

Berdasarkan struktur umurnya penduduk Halmahera Selatan tergolong pada strata usia muda. Hal ini terlihat jelas dengan banyaknya persentase golongan umur muda. Hal ini menunjukkan tingginya fertilitas penduduk Halmahera Selatan. Artinya pada tahun-tahun yang akan datang penduduk Halmahera Selatan lebih didominasi oleh usia muda, sehingga struktur penduduknya lebih dinamis. Kondisi ini perlu disikapi dengan baik yaitu dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menunjang perkembangan pemuda yang diharapkan mampu membangun Halmahera Selatan. Perhatikan 2.11 berikut :



Tabel 2.11.
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Kelompok Umur (Tahun) | Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|---------|---------|----------------|
| | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |
| | | L | P | Jml |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | 0 – 4 | 14.903 | 14.714 | 29.617 | 15.153 | 14.970 | 30.123 | 13.162 | 12.591 | 25.753 | 3.494 | 3.270 | 6.764 | 2.412 | 2.223 | 4.635 |
| 2 | 5 – 9 | 14.934 | 14.292 | 29.226 | 15.186 | 14.543 | 29.729 | 12.770 | 11.083 | 23.853 | 10.646 | 10.130 | 20.776 | 9.945 | 9.865 | 19.810 |
| 3 | 10 – 14 | 13.491 | 12.602 | 26.093 | 13.721 | 12.826 | 26.547 | 12.010 | 12.721 | 24.731 | 14.752 | 14.046 | 28.798 | 13.272 | 13.140 | 26.412 |
| 4 | 15 – 19 | 11.073 | 10.247 | 21.320 | 11.259 | 10.425 | 21.684 | 9.377 | 10.076 | 19.453 | 16.982 | 15.769 | 32.751 | 16.621 | 16.150 | 32.771 |
| 5 | 20 – 24 | 8.187 | 8.624 | 16.811 | 8.319 | 8.771 | 17.090 | 7.357 | 8.204 | 15.561 | 15.358 | 13.987 | 29.345 | 15.775 | 13.699 | 29.474 |
| 6 | 25 – 29 | 8.930 | 9.553 | 18.483 | 9.076 | 9.719 | 18.795 | 9.383 | 8.733 | 18.116 | 11.448 | 10.819 | 22.267 | 13.252 | 10.231 | 23.483 |
| 7 | 30 – 34 | 8.381 | 8.757 | 17.138 | 8.519 | 8.911 | 17.430 | 9.102 | 9.524 | 18.626 | 10.394 | 10.254 | 20.648 | 11.201 | 9.303 | 20.504 |
| 8 | 35 – 39 | 7.993 | 7.862 | 15.855 | 8.126 | 7.999 | 16.125 | 9.701 | 9.464 | 19.165 | 9.349 | 9.255 | 18.604 | 10.702 | 9.122 | 19.824 |
| 9 | 40 – 44 | 6.691 | 5.958 | 12.649 | 6.801 | 6.065 | 12.866 | 7.936 | 6.760 | 14.696 | 8.454 | 8.775 | 17.229 | 9.404 | 8.946 | 18.350 |
| 10 | 45 – 49 | 5.334 | 4.968 | 10.302 | 5.423 | 5.057 | 10.480 | 7.861 | 6.552 | 14.413 | 7.603 | 7.402 | 15.005 | 7.950 | 7.590 | 15.540 |
| 11 | 50 – 54 | 4.505 | 4.096 | 8.601 | 4.580 | 4.170 | 8.750 | 4.545 | 4.172 | 8.717 | 6.232 | 5.704 | 11.936 | 6.842 | 6.366 | 13.208 |
| 12 | 55 – 59 | 3.266 | 2.810 | 6.076 | 3.322 | 2.860 | 6.182 | 4.363 | 4.853 | 9.216 | 4.765 | 4.243 | 9.008 | 4.561 | 4.746 | 9.307 |
| 13 | 60 – 64 | 2.665 | 2.026 | 4.691 | 2.710 | 2.060 | 4.770 | 3.180 | 2.716 | 5.896 | 4.073 | 3.555 | 7.628 | 4.223 | 3.656 | 7.879 |
| 14 | 65 – 69 | 1.452 | 1.330 | 2.782 | 1.478 | 1.352 | 2.830 | 2.183 | 1.313 | 3.496 | 2.678 | 1.874 | 4.552 | 2.836 | 2.132 | 4.968 |
| 15 | 70 – 74 | 1.018 | 936 | 1.954 | 1.035 | 955 | 1.990 | 1.561 | 1.461 | 3.022 | 1.610 | 1.338 | 2.948 | 1.823 | 1.675 | 3.498 |
| 16 | 75 + | 832 | 1.030 | 832 | 843 | 1.046 | 1.889 | 1.876 | 2.181 | 4.057 | 1.663 | 1.377 | 3.040 | 1.488 | 1.629 | 3.117 |
| | JUMLAH | 113.655 | 108.775 | 222.430 | 115.551 | 111.729 | 227.280 | 116.367 | 112.404 | 228.771 | 129.501 | 121.798 | 251.299 | 132.307 | 120.473 | 252.780 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Halsel, 2016-2020



2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi dalam jangka panjang adalah terjadinya transformasi struktural sehingga perekonomian terkonsentrasi pada sektor-sektor yang dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki daya saing (sektor basis, atau sektor kunci, atau sektor unggulan). Tidak semua sektor dalam suatu perekonomian memiliki kemampuan tumbuh yang sama, sehingga dibutuhkan spesialisasi untuk mendorong pertumbuhan rata-rata yang relatif tinggi. Terkonsentrasi kegiatan ekonomi (spesialisasi) pada sektor-sektor strategis/unggulan sangat berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat berimbas terhadap akselerasi pertumbuhan secara simultan dan sinergis. Suatu sektor ekonomi dapat dikatakan unggul apabila sektor tersebut memenuhi beberapa kriteria minimal: 1) sektor tersebut merupakan sektor basis; 2) sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan jangka menengah dan panjang, adalah mampu mencetak sumber daya manusia yang handal, baik sebagai buruh pekerja/karyawan, maupun sebagai pelaku usaha atau pemilik modal. Upaya-upaya untuk mentransformasi penduduk dan angkatan kerja Kabupaten Halmahera Selatan yang besar menjadi *man power* yang kompetitif, perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, antara lain dengan mengutamakan pendidikan menengah kejuruan, pendidikan *life skill* di sekolah-sekolah umum, serta pendidikan diploma dan politeknik untuk level pendidikan tingginya. Demikian pula perlu membangun pusat-pusat pelatihan tenaga kerja sehingga setiap angkatan kerja yang akan memasuki pasar kerja dapat diserap dengan seoptimal mungkin.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah disektor pertanian dan perikanan sebagai sector yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Halmahera Selatan, agar masyarakat yang bergelut di sektor pertanian dan perikanan dapat menikmati peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan yang sepadan dengan jerih payahnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna peningkatan sektor pertanian dan perikanan adalah melalui diversifikasi usaha tani dan nelayan, pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, hingga peningkatan akses petani dan nelayan kepada sektor hulu dan hilir, disamping penguasaan pada aspek teknologi dan budidayanya.

Pembangunan perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan beberapa tahun terakhir juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sektor industri pengolahan, sebagai penyumbang kedua terbesar PDRB di Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor pertambangan dan penggalian.



2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (HK) tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 13,18% yaitu dari Rp 3.238.569,08 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 5.670.698,00 miliar pada tahun 2020. Selama tahun 2016-2020, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan adalah sektor *pertanian, kehutanan dan perikanan* (rata-rata 25,73 %), *industri pengolahan* (rata-rata 21,57 %), *perdagangan besar dan eceran* (rata-rata 16,62 %), *pertambangan dan penggalian* (rata-rata 11,03 %) serta *administrasi pemerintahan dan jaminan sosial* (rata-rata 8,94 %). Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12.
PDRB dan Persentase Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2010
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

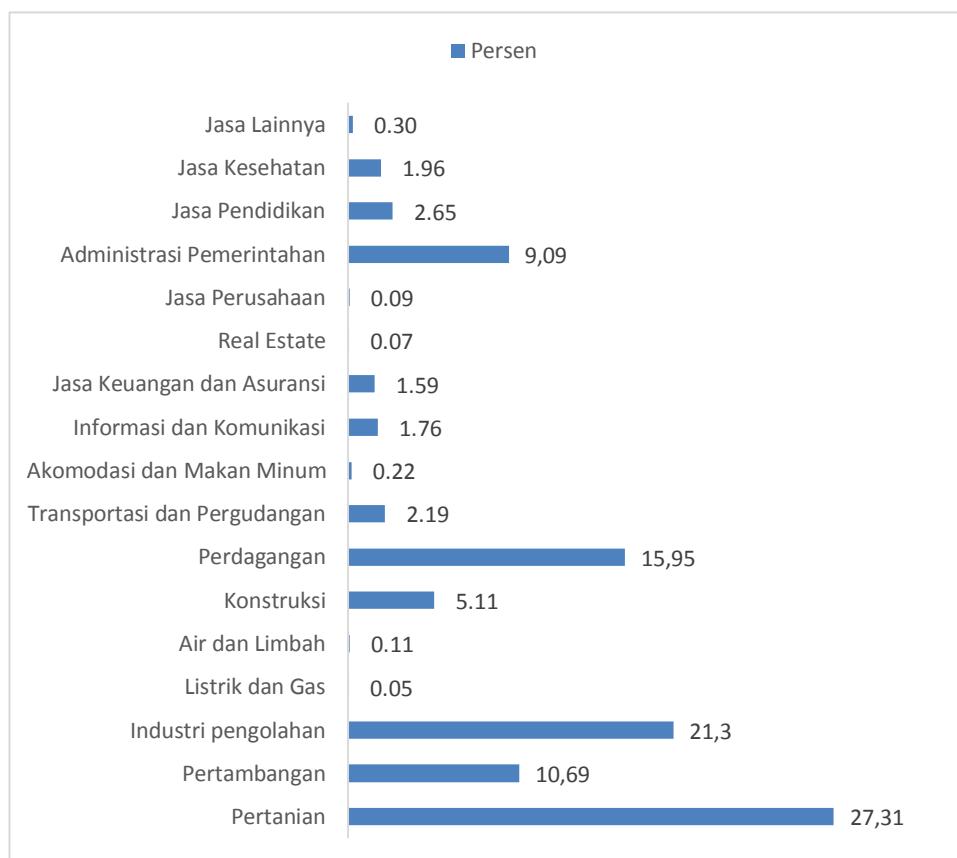
| No | Sektor | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|----|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | (Rp juta) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.050.777,77 | 32,45 | 1.066.825,01 | 28,38 | 1.087.508,32 | 25,06 | 1.112.089,98 | 22,88 | 1.127.070,00 | 19,88 |
| 2 | Pertambangan & penggalian | 267.755,54 | 8,27 | 306.144,44 | 8,15 | 482.157,54 | 11,11 | 709.520,60 | 14,60 | 738.020,00 | 13,01 |
| 3 | Industri pengolahan | 321.537,61 | 9,93 | 712.740,96 | 18,96 | 981.004,23 | 22,61 | 1.135.865,16 | 23,37 | 1.868.940,00 | 32,96 |
| 4 | Listrik dan Gas | 2.332,34 | 0,07 | 2.469,57 | 0,07 | 2.670,24 | 0,06 | 2.704,56 | 0,06 | 2.780,00 | 0,05 |
| 5 | Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah | 4.938,42 | 0,15 | 5.133,31 | 0,14 | 5.427,85 | 0,13 | 5.717,29 | 0,12 | 5.980,00 | 0,11 |
| 6 | Konstruksi | 191.679,50 | 5,92 | 206.126,39 | 5,48 | 220.189,87 | 5,07 | 229.219,43 | 4,72 | 267.130,00 | 4,71 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 624.701,18 | 19,29 | 661.997,12 | 17,61 | 718.007,95 | 16,55 | 772.901,40 | 15,90 | 780.760,00 | 13,77 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 80.940,45 | 2,50 | 87.810,37 | 2,34 | 90.710,30 | 2,09 | 94.839,21 | 1,95 | 85.770,00 | 1,51 |
| 9 | Akomodasi dan Makan Minum | 8.423,97 | 0,26 | 9.144,73 | 0,24 | 9.619,23 | 0,22 | 9.868,10 | 0,20 | 9.678,00 | 0,17 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 76.305,01 | 2,36 | 80.997,76 | 2,16 | 83.529,42 | 1,93 | 87.577,13 | 1,80 | 92.060,00 | 1,62 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 59.363,91 | 1,83 | 62.527,47 | 1,66 | 65.648,92 | 1,51 | 67.718,55 | 1,39 | 71.670,00 | 1,26 |
| 12 | Real Estate | 2.767,71 | 0,09 | 2.989,96 | 0,08 | 3.159,19 | 0,07 | 3.312,85 | 0,07 | 3.340,00 | 0,06 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 3.488,37 | 0,11 | 3.707,33 | 0,10 | 3.904,23 | 0,09 | 4.036,97 | 0,08 | 4.000,00 | 0,07 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 360.731,72 | 11,14 | 357.142,04 | 9,50 | 381.145,57 | 8,78 | 408.197,11 | 8,40 | 390.080,00 | 6,88 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 97.673,05 | 3,02 | 102.937,63 | 2,74 | 107.315,12 | 2,47 | 113.249,56 | 2,33 | 113.450,00 | 2,00 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 73.187,92 | 2,26 | 77.233,02 | 2,05 | 83.084,33 | 1,91 | 88.593,01 | 1,82 | 94.970,00 | 1,67 |
| 17 | Jasa Lainnya | 11.964,61 | 0,37 | 12.647,78 | 0,34 | 13.746,47 | 0,32 | 14.770,05 | 0,30 | 15.000,00 | 0,26 |
| | PDRB ADHK | 3.238.569,08 | 100 | 3.758.574,89 | 100 | 4.338.828,78 | 100 | 4.860.180,96 | 100 | 5.670.698,00 | 100 |

Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017- 2021



PDRB atas dasar harga berlaku (HB) tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata 16,98% yaitu dari Rp 4.359,41 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp 8.698,95 miliar pada tahun 2020. Selama tahun 2016-2020, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku adalah sektor *pertanian, kehutanan dan perikanan* (rata-rata 27,31%), *industri pengolahan* (rata-rata 21,3%), *perdagangan besar dan eceran* (rata-rata 15,95%), *pertambangan dan penggalian* (rata-rata 10,69%), serta *administrasi pemerintahan dan jaminan sosial* (rata-rata 9,09%). Kontribusi masing-masing sector selama lima tahun dalam pertumbuhan PDRB AHb Kabupaten Halmahera Selatan diperlihatkan dalam Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3
Percentase Rata-rata Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021

Sedang perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi setiap sektor dalam PDRB Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.13.

Selama tahun 2016-2020, kontribusi terbesar dalam pembentukan rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku diberikan oleh sektor Industri Pengolahan (57,18%), diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian (35,61%), Listrik dan Gas (16,88%), Jasa Konstruksi (11,67%) dan Jasa Perusahaan (9,33%), sementara sektor yang memberi kontribusi terkecil dalam rata-rata pertumbuhan PDRB ADHb adalah sektor Pertanian (4,41%).



Tabel 2.13.
PDRB dan Persentase Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Sektor | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|------------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | (Rp juta) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.525.630,78 | 35,00 | 1.593.838,84 | 31,02 | 1.668.355,33 | 26,41 | 1.725.807,69 | 23,88 | 1.760.240,00 | 20,24 |
| 2 | Pertambangan & penggalian | 299.679,47 | 6,87 | 374.036,30 | 7,28 | 710.921,49 | 11,25 | 1.059.266,68 | 14,66 | 1.167.280,00 | 13,42 |
| 3 | Industri pengolahan | 407.493,65 | 9,35 | 888.509,44 | 17,29 | 1.432.895,32 | 22,68 | 1.690.164,77 | 23,39 | 2.939.430,00 | 33,79 |
| 4 | Listrik dan Gas | 2.647,97 | 0,06 | 3.162,41 | 0,06 | 3.454,42 | 0,05 | 3.504,64 | 0,05 | 3.640,00 | 0,04 |
| 5 | Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah | 5.882,95 | 0,13 | 6.153,30 | 0,12 | 6.514,39 | 0,10 | 6.865,32 | 0,10 | 7.220,00 | 0,08 |
| 6 | Konstruksi | 251.999,11 | 5,78 | 271.913,66 | 5,29 | 302.781,38 | 4,79 | 332.803,68 | 4,61 | 391.420,00 | 4,50 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 814.462,79 | 18,68 | 889.573,38 | 17,31 | 989.432,55 | 15,66 | 1.100.639,02 | 15,23 | 1.117.730,00 | 12,85 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 113.717,66 | 2,61 | 126.002,63 | 2,45 | 131.387,48 | 2,08 | 140.463,50 | 1,94 | 128.680,00 | 1,48 |
| 9 | Akomodasi dan Makan Minum | 11.094,01 | 0,25 | 12.361,07 | 0,24 | 13.114,90 | 0,21 | 13.560,67 | 0,19 | 13.300,00 | 0,15 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 89.749,73 | 2,06 | 98.918,15 | 1,92 | 105.281,04 | 1,67 | 111.170,41 | 1,54 | 117.480,00 | 1,35 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 80.654,84 | 1,85 | 89.623,65 | 1,74 | 97.288,50 | 1,54 | 102.777,53 | 1,42 | 106.560,00 | 1,23 |
| 12 | Real Estate | 3.608,61 | 0,08 | 4.028,20 | 0,08 | 4.364,41 | 0,07 | 4.638,60 | 0,06 | 4.730,00 | 0,05 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 4.694,91 | 0,11 | 5.122,34 | 0,10 | 5.551,91 | 0,09 | 5.983,24 | 0,08 | 6.270,00 | 0,07 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial | 500.195,44 | 11,47 | 505.516,16 | 9,84 | 553.832,05 | 8,77 | 609.683,20 | 8,44 | 602.040,00 | 6,92 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 136.108,82 | 3,12 | 149.168,55 | 2,90 | 158.389,01 | 2,51 | 170.554,87 | 2,36 | 174.000,00 | 2,00 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 96.806,06 | 2,22 | 104.914,76 | 2,04 | 116.374,68 | 1,84 | 129.015,33 | 1,79 | 139.020,00 | 1,60 |
| 17 | Jasa Lainnya | 14.980,42 | 0,34 | 16.028,09 | 0,31 | 17.585,51 | 0,28 | 19.428,94 | 0,27 | 19.910,00 | 0,23 |
| PDRB ADHB | | 4.359.407,22 | 100 | 5.138.870,93 | 100 | 6.317.524,37 | 100 | 7.226.328,09 | 100 | 8.698.970,00 | 100 |

Sumber : Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021

Sementara itu dalam pembentukan PDRB atas dasar harga konstan, kontribusi terbesar dari Industri Pengolahan (60,03%), diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian (30,74%), Jasa Konstruksi (8,75%) , Air, Pengolahan Sampah dan Limbah (4,91 %) ,Listrik dan Gas (4,56%), dan Jasa Lainnya (5,86%), sementara sektor yang memberi kontribusi terkecil dalam rata-rata pertumbuhan PDRB ADHk adalah sektor Transportasi dan Perdagangan (1,69 %) dan Pertanian (1,76%). Pertumbuhan sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 2.14



Tabel 2.14.
Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Hk)
dan Harga Berlaku (Hb) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Sektor | Pertumbuhan PDRB ADHb (%) | | | | | | Pertumbuhan PDRB ADHK (%) | | | | | |
|----|--|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 35,00 | 31,02 | 26,41 | 23,82 | 20,24 | 25,37 | 32,45 | 1,5 | 1,94 | 2,26 | 1,35 | 1,76 |
| 2 | Pertambangan & penggalian | 6,87 | 7,28 | 11,25 | 14,62 | 13,42 | 11,64 | 8,27 | 14,34 | 57,49 | 47,16 | 4,02 | 30,74 |
| 3 | Industri pengolahan | 9,35 | 17,29 | 22,68 | 22,92 | 33,79 | 26,91 | 9,93 | 121,7 | 37,64 | 15,79 | 64,54 | 60,03 |
| 4 | Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 5,9 | 8,13 | 1,29 | 2,90 | 4,56 |
| 5 | Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 3,9 | 5,74 | 5,33 | 4,65 | 4,91 |
| 6 | Konstruksi | 5,78 | 5,29 | 4,79 | 5,17 | 4,50 | 4,94 | 5,92 | 7,5 | 6,82 | 16,72 | 3,,94 | 8,75 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran | 18,68 | 17,31 | 15,66 | 15,40 | 12,85 | 15,31 | 19,29 | 6,0 | 8,46 | 9,04 | 0,27 | 3,7 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 2,61 | 2,45 | 2,08 | 1,93 | 1,48 | 1,99 | 2,50 | 8,5 | 3,30 | 4,34 | -9,38 | 1,69 |
| 9 | Akomodasi dan Makan Minum | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 8,6 | 3,30 | 4,34 | -1,25 | 3,61 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 2,06 | 1,92 | 1,67 | 1,53 | 1,35 | 1,62 | 2,36 | 6,2 | 3,13 | 4,85 | 5,12 | 4,83 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,85 | 1,74 | 1,54 | 1,42 | 1,23 | 1,48 | 1,83 | 5,3 | 4,99 | 3,15 | 5,84 | 4,82 |
| 12 | Real Estate | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 8,0 | 5,66 | 4,86 | 0,98 | 4,88 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 6,3 | 5,31 | 3,40 | -0,92 | 3,51 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 11,47 | 9,84 | 8,77 | 8,32 | 6,92 | 8,46 | 11,14 | -1,00 | 6,72 | 5,00 | -2,53 | 2,05 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 3,12 | 2,90 | 2,51 | 2,35 | 2,00 | 2,44 | 3,02 | 5,4 | 4,25 | 5,53 | 0,18 | 3,84 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,22 | 2,04 | 1,84 | 1,78 | 1,60 | 1,82 | 2,26 | 5,5 | 7,58 | 6,63 | 7,20 | 6,73 |
| 17 | Jasa Lainnya | 0,34 | 1,31 | 0,28 | 0,27 | 2,23 | 0,27 | 0,37 | 5,7 | 8,69 | 7,45 | 1,59 | 5,86 |
| | PDRB TOTAL | 99,98 | 100,99 | 100 | 100 | 102 | 102,76 | 100,02 | 219,34 | 179,15 | 147,14 | 84,56 | 156,27 |

Sumber : *Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021*

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun fluktuatif. Pada tahun 2016 perekonomian tumbuh 5,69%, kemudian naik menjadi 16,06% pada tahun 2017 dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 16,22%. Gambar 2.4 berikut memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan selama 5 tahun terakhir:



Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Maluku Utara (2016-2021)

PDRB perkapita menurut harga berlaku (HB) selama 5 tahun meningkat rata-rata 12,93% per tahun yaitu dari Rp. 19.508.700 pada tahun 2016 menjadi Rp. 36.438,100 pada tahun 2020. Sementara PDRB perkapita menurut harga konstan 2010 meningkat dari Rp. 14.492.800 menjadi Rp. 23.753.500 pada tahun 2020. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.15

Tabel 2.15
PDRB Per Kapita Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Uraian | Nilai (Ribu Rp) | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | PDRB per Kapita ADH Berlaku | 19.508,7 | 22.610,3 | 27.322,9 | 30.824,1 | 36.438,1 |
| 2 | PDRB per Kapita ADH Konstan 2010 | 14.492,8 | 16.537,2 | 18.765,2 | 20.755,1 | 23.753,5 |

Sumber: BPS Prov Maluku Utara, 2017-2021

2.3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi serta adanya ketidaklancaran distribusi barang. *Inflasi* juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Jika terjadi proses sebaliknya maka disebut *deflasi*.



Inflasi merupakan presentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang disebut Indeks Harga Konsumen (HK). Kenaikan IHK ini yang disebut dengan Laju Inflasi.

IHK Kabupaten Halmahera Selatan pada Januari 2020 sebesar 125,72 dan pada bulan Desember 2020 naik menjadi 127,37 artinya bahwa secara umum rata-rata harga komoditas di Halmahera Selatan pada tahun 2020 telah mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen per bulan.

Perbandingan Inflasi Kabupaten Halmahera Selatan dengan inflasi Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2016-2020 sebagaimana tabel 2.16:

Tabel 2.16
Nilai Inflasi Rata-rata (y to y)
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Inflasi Kab Halmahera Selatan(%) | 2,03 | 1,82 | 3,98 | 1,53 | 2,08 |
| 2 | Inflasi Prov Maluku Utara (%) | 1,91 | 1,97 | 4,12 | 2,24 | 2,13 |
| 3 | Inflasi Nasional (%) | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 1,47 | 1,68 |

Sumber: BPS Prov. Maluku Utara, 2017- 2021

Pada Bulan Desember tahun 2020 inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Bahan Makanan 0,73 dan pengeluaran Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,72%, dan terendah pada kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar sebesar -0,49%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.17
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| NO | Indikator | Tahun 2020 | | | |
|----|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Q1/Mar | Q2/Jun | Q3/Sep | Q4/Des |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | UMUM | 0,01 | 0,45 | -0,11 | 0,14 |
| 1 | Bahan Makanan | 0,27 | 0,15 | -0,48 | 0,73 |
| 2 | Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,44 |
| 3 | Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar | 0,08 | 0,00 | -0,56 | -0,49 |
| 4 | Sandang | 0,,27 | -0,27 | -0,01 | 0,61 |
| 5 | Kesehatan | 0,31 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| 6 | Pendidikan | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,15 |
| 7 | Tarnsportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |

Sumber: BPS Kab Halmahera Selatan, 2021



2.3.1.3 Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Indeks Gini di Kabupaten Halmahera Selatan selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan pada kategori rendah dengan indeks gini rata-rata 0,246 masih di bawah angka rata-rata provinsi Maluku Utara sebesar 0,311 dan nasional 0,391.

Apabila dikaitkan dengan angka pendapatan per kapita yang semakin meningkat dengan angka indeks Gini yang semakin menurun mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Halmahera Selatan semakin meningkat dan semakin banyak penduduk yang dapat menikmatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.18:

**Tabel 2.18.
Gini Ratio Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Indeks Gini Halmahera Selatan | 0,244 | 0,209 | 0,265 | 0,252 | 0,260 |
| 2 | Indeks Gini Maluku Utara | 0,280 | 0,286 | 0,330 | 0,328 | 0,330 |
| 3 | Indeks Gini Nasional | 0,400 | 0,390 | 0,393 | 0,389 | 0,385 |

Sumber: BPS Maluku Utara dan data diolah, 2017- 2021

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

2.3.2.1 Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka harapan lama, dan angka rata-rata lama sekolah.

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Halmahera Selatan mencapai 12,80 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk merasakan pendidikan minimal hingga Diploma II.

2) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu



meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah sebesar 7,15 tahun atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama kelas 1 dan meningkat menjadi 7,92 tahun pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.19

Tabel 2.19.
Capaian Indikator Pendidikan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 11,91 | 12,31 | 12,52 | 12,76 | 12,80 |
| 2 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 7,15 | 7,42 | 7,43 | 7,62 | 7,92 |

Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021

2.3.2.2 Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2016-2020 telah mampu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Tahun 2020 rata-rata usia harapan hidup penduduk Halmahera Selatan 65,86 tahun masih di bawah Usia Harapan Hidup secara provinsi maupun nasional.
- 2) Di samping itu, angka kesakitan di Halmahera Selatan masih fluktuatif, walau kinerja semakin membaik
- 3) Angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi yakni 161 orang per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, masih perlu terus diturunkan
- 4) Kondisi balita gizi buruk tahun 2020 sebesar 0,2 persen, tetap harus dipertahankan kalau perlu diturunkan lagi.
- 5) Cakupan penggunaan air bersih tahun 2020 sebesar 53 %, pencapaian angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan angka Nasional 86%
- 6) Cakupan penggunaan jamban keluarga di Kabupaten Halmahera Selatan sebesar tahun 2019 sebesar 47,73 % masih dibawah target Nasional dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 68,34 %, karena masyarakat di pedesaan mulai menyadari bahwa buang air besar di sungai/pantai tidak baik dan akan memcemari lingkungan serta air serta sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus terus dilakukan.

Adapun capaian indikator kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.20



Tabel 2.20.
Capaian Indikator Kesehatan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Usia harapan hidup rata-rata | 65,11 | 65,20 | 65,42 | 65,75 | 65,86 |
| 2 | Angka kesakitan penduduk (Incidence Rate DBD) per 100.000 penduduk | 1,82 | 1,82 | 0,04 | 20,134 | 10,72 |
| 3 | Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH | 608 | 429 | 608 | 175 | 161 |
| 4 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH | 14 | 7 | 7 | 6,6 | 9 |
| 5 | Prevelensi Balita Gizi buruk (%) | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Persentase Balita Stunting (%) | - | - | 3 | 14 | 11 |
| 7 | Universal Child Immunization (%) | 82 | 78 | 75 | 78 | 85 |
| 8 | Rasio Dokter Umum per 1.000 penduduk | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,28 |
| 9 | Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk | 0,018 | 0,044 | 0,058 | 0,068 | 0,068 |
| 10 | Rasio Posyandu per Balita | 11,1 | 13,4 | 11,2 | 17,3 | 17,24 |
| 11 | Cakupan Penggunaan Air Bersih (%) | 40 | 42 | 45 | 48 | 53 |
| 12 | Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga (%) | - | - | - | 43,73 | 68,34 |
| 13 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC (%) | 72 | 47 | 70 | 30 | 16 |
| 14 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Malaria (%) | 1,95 | 0,75 | 0,2 | 1 | 0,11 |
| 15 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Dinas Kesehatan Halmahera Selatan (Diolah dari berbagai sumber), 2017-2021

2.3.2.3 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja, yaitu kelompok penduduk yang tersedia menawarkan jasa kerjanya pada tingkat upah dan kondisi perekonomian tertentu. Sedangkan permintaan tenaga kerja ditunjukkan oleh jumlah kesempatan kerja atau jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. Deviasi antara kedua indikator tersebut menghasilkan angka pengangguran terbuka yang tidak lain adalah jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 109.663 orang, yang terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 95.60 orang dan penduduk yang tidak bekerja sebanyak 4.848 orang. Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2019 adalah 95,42% kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.21



Tabel 2.21.
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penduduk Usia 15 tahun ke atas (Jiwa) | 154.969 | 144.111 | 147.507 | 151.285 | 109.663 |
| 2 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 69,35 | 67,52 | 72,73 | 69,93 | 68,25 |
| 3 | Rasio Penduduk yan berkerja (%) | 93,69 | 95,32 | 95,99 | 95,42 | 95,60 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,31 | 4,68 | 4,01 | 4,58 | 4,40 |

Sumber: *Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021*

Sementara data persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan utama masih didominasi oleh pekerja dalam sektor pertanian dan perikanan sebagaimana disajikan dalam table 2.22 berikut ini:

Tabel 2.22.
Persentase Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Jenis Lapangan Pekerjaan | Tahun (%) | | | | |
|----|--|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan | 59,97 | 59,12 | 57,88 | 57,18 | 13,48 |
| 2 | Industri pengolahan | 4,46 | 4,82 | 5,01 | 5,18 | 39,15 |
| 3 | Perdagangan besar/eceran dan Hotel/Restoran | 9,72 | 10,01 | 10,34 | 10,33 | 7,71 |
| 4 | Jasa kemasyarakatan / Public Services | 14,37 | 13,92 | 13,79 | 13,81 | N/A |
| 5 | Pertambangan, listrik/gas/air, bangunan/konstruksi, angkutan, komunikasi, Keuangan/Asuransi, dan Jasa Sewa | 11,47 | 12,13 | 12,98 | 13,50 | 39,64 |
| | JUMLAH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: *Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021*

2.3.2.4 Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.



Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, di mana Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi tersebut untuk mencapai 17 sasaran pembangunan millenium berkelanjutan yaitu

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan



17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan

Begitu juga dengan arahan RPJM Provinsi Maluku Utara maupun Nasional masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Halmahera Selatan dimulai dari RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2005-2010 sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan yang dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran, IPM serta pemberdayaan gender di Kabupaten Halmahera Selatan terlihat pada tabel 2.23 berikut ini.

Tabel 2.23.
Perkembangan Angka Kemiskinan, Pengangguran dan IPM
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | Tingkat Kemiskinan (%) | 4,11 | 4,10 | 4,80 | 5,03 | 5,21 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,31 | 4,68 | 4,08 | 4,58 | 4,40 |
| 3 | IPM | 62,17 | 62,64 | 63,39 | 64,11 | 63,84 |
| 4 | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 65,11 | 65,20 | 65,42 | 65,75 | 65,86 |
| 5 | Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 12,31 | 12,52 | 12,76 | 12,80 | 12,85 |
| 6 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 7,42 | 7,43 | 7,62 | 7,92 | 7,91 |
| 7 | Pengeluaran Riil (ribu Rp) | 6.894 | 7.026 | 7.156 | 7.300 | 7.300 |

Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021

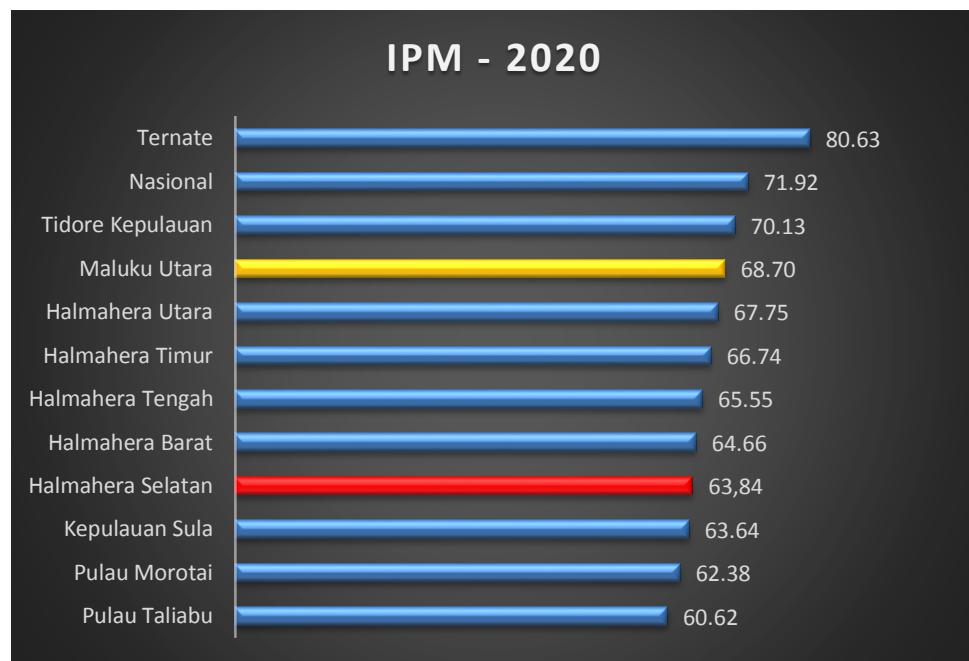
Dari data di atas dapat kita lihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan berada pada level 4,61 persen di Tahun 2015, dan pada tahun yang sama angka pengangguran terbuka mencapai 2,34%. Angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan sempat menunjukkan trend yang menurun namun pada tahun 2018 kembali meningkat sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal. Khusus untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah masih perlu melakukan perluasan kesempatan kerja sektor formal maupun informal, baik di pedesaan maupun perkotaan, atau bahkan di kantong-kantong pengangguran. Di samping itu, upaya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, serta pengembangan usaha mandiri melalui optimalisasi fungsi dan pendayagunaan fasilitas yang ada harus menjadi fokus perhatian pula.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Halmahera Selatan senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2015 berada pada level 61,26 poin dan meningkat menjadi 64,11 poin di Tahun 2019. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli



masyarakat. Akan tetapi tahun 2020 akibat merebaknya wabah Covid-19 IPM Kabupaten Halmahera Selatan sedikit mengalami penurunan kelevel 63,84 poin. Sebagai perbandingan IPM Kabupaten Halmahera Selatan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara disajikan pada gambar 2.5 berikut ini :

Gambar 2.5
Angka IPM menurut kabupaten/kota di Maluku Utara Tahun 2020



Sumber : BPS Maluku Utara, 2021

2.3.2.5 Perlindungan Sosial

Geliat pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan yang bergerak maju dalam beberapa tahun terakhir, selain berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan bermacam-macam masalah sosial. Selain kemiskinan, masalah sosial lain yang mengiringi dinamika masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan antara lain kecacatan dan rendahnya aksesibilitas bagi penyandang cacat, ketunasusilaan, keterlantaran, dan ketidaktuntasan dalam penanganan korban bencana alam. Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mengambil kebijakan strategis untuk penanganan masalah-masalah sosial yang ada. Kebijakan sosial yang digulirkan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan mengurangi Potensi dan Sumber Masalah Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilakukan melalui pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial. Berikut data jumlah penduduk rawan sosial di Kabupaten Halmahera Selatan.



Tabel 2.24
Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Sosial
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---------------------------------|-------|------|-------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Keluarga Fakir Miskin (%) | 9,06 | 9,25 | 11,01 | 11,79 | 12,01 |
| 2 | Balita Terlantar (Jiwa) | - | - | - | - | - |
| 3 | Anak Terlantar (Jiwa) | - | - | - | - | - |
| 4 | Usia Lanjut Terlantar (Jiwa) | - | - | - | 2.813 | 2.917 |
| 5 | Gelandangan (Jiwa) | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Komunitas Adat Terpencil (Jiwa) | - | - | - | - | - |
| 7 | Penyandang Cacat (Jiwa) | - | - | - | 597 | 632 |
| 8 | Korban Bencana Alam (Jiwa) | - | - | - | 61.714 | 63.762 |
| 9 | Pengemis (Jiwa) | - | - | - | - | - |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2020

2.3.2.6 Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia seutuhnya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat menjadi persoalan bersama yang harus dipecahkan.

Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan terus dilakukan dengan pelaksanaan secara lintas bidang dan lintas program. Keberhasilan dari berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik turut menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Aksi afirmasi di berbagai bidang pemberdayaan perempuan terus dilanjutkan antara lain: di bidang kesehatan dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di daerah perdesaan; merevitalisasi fungsi pos pelayanan terpadu (Posyandu). Di bidang pendidikan, dengan memberikan beasiswa guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf. Dan di bidang ekonomi upaya pengintegrasikan kepentingan perempuan dalam program-program pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro melalui program dana bergulir dan sebagainya. Secara



lengkap capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dalam tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25
Perkembangan Keterlibatan Perempuan Dalam Organisasi
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah Perempuan Usia Kerja | 68.975 | 70.865 | 72.558 | 74.682 | 78.984 |
| 2 | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan | 32.008 | 33.552 | 42.205 | 39.662 | 40.384 |
| 3 | Rasio Jenis kelamin | 103,51 | 103,42 | 103,53 | 106,32 | 106,02 |
| 4 | Jumlah Perempuan di Pemerintahan | 1.898 | 1.935 | 1.983 | 2.039 | 2.014 |
| 5 | Jumlah Perempuan di DPRD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Jumlah Organisasi Perempuan | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| 7 | Jumlah Kelompok Usaha Perempuan | | | | | |
| | - Koperasi | 167 | 185 | 185 | 207 | 229 |
| | - KUBE | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |

Sumber: *Halmahera Selatan dalam Angka (BPS)*, 2017-2021

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.3.3.1 Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni serta budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan, setiap seni harus mengandung kebudayaan yang khas dan setiap kebudayaan pasti memiliki nilai seni yang indah. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki setidaknya dua jenis kelompok seni dan budaya yaitu Seni Musik dan Seni Tari. Kelompok-kelompok seni dan budaya tersebut terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk pengembangan kelompok seni dan budaya tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan fasilitas bagi kelompok seni untuk semakin mengembangkan karyanya. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan gedung/sanggar seni/taman budaya yang dapat memfasilitasi kelompok seniman dan budayawan untuk terus mengapresiasi karya-karyanya. Selain itu, seni budaya merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Halmahera Selatan maka perlu dikembangkan wisata budaya terutama pada Kawasan Kota Tua Labuha yang merupakan salah satu pilar pariwisata sekaligus dapat melestarikan seni dan budaya lokal.

2.3.3.2 Olah Raga

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat dari semakin banyak jumlah organisasi dan prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Halmahera Selatan baik tingkat provinsi maupun nasional meskipun jumlah klub dan gedung olahraga yang ada masih terbatas. Melihat kelompok/organisasi olahraga yang semakin berkembang dan munculnya jenis olahraga baru yang dipertandingkan perlu upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya manusia olahraga yaitu pelatih, wasit, pembina, klub olahraga dan atlet. Selain itu juga perlu melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk latihan maupun pertandingan.



2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD Kabupaten Halmahera Selatan.

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.1.1 *Urusan Pendidikan*

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Halmahera Selatan dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|-------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | APS 7 – 12 Tahun | 98,86 | 99,51 | 100 | 99,71 | 100 |
| 2 | APS 13 – 15 Tahun | 96,37 | 96,38 | 95,53 | 94,89 | 95,01 |
| 3 | APS 16 – 18 Tahun | 68,21 | 73,37 | 72,28 | 71,47 | 72,14 |
| 4 | APS 19 – 24 Tahun | 23,30 | 24,98 | 27,01 | 28,56 | 28,78 |
| 5 | APS PAUD | - | 35,08 | 36,11 | 38,30 | 39,31 |
| 6 | APK SD/MI | 117,46 | 112,55 | 115,92 | 111,54 | 105,39 |
| 7 | APK SMP/MTs | 83,12 | 88,05 | 98,80 | 82,04 | 86,5 |
| 8 | APK SMA/MA/SMK | 76,34 | 90,68 | 81,09 | 90,37 | 90,86 |
| 9 | APM SD/MI | 98,12 | 97,78 | 98,38 | 98,15 | 98,5 |
| 10 | APM SMP/MTs | 75,95 | 75,84 | 75,26 | 74,56 | 74,90 |
| 11 | APM SMA/MA/SMK | 60,02 | 61,22 | 55,41 | 59,20 | 60,27 |

Sumber: *Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021*

Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2015 APS untuk SD/MI sebesar 98,82. Kondisi ini meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2019 APS SD/MI menjadi 99,71. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI yang hampir mencapai 100% mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya upaya yang keras dan terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memudahkan anak-anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar melalui program pendidikan gratis dan juga penyebaran guru ke berbagai pelosok Halmahera Selatan.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs APS pada tahun 2015 sebesar 93,96 dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 94,89. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2015 adalah 72,68 kondisi ini stabil hingga pada tahun 2019 mencapai 71,47.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2015 sebesar 97,90 dan pada tahun 2019 APM SD/MI sebesar 98,15. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 75,60 dan pada tahun 2019 APM SMP/MTs menjadi 74,56. Hal yang harus menjadi perhatian adalah jenjang pendidikan SMP/MTs yang Angka Partisipasinya masih rendah

2. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan



anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA, sedangkan jalur pendidikan non formal meliputi Kelompok Bermain (KB), TPA, dan satuan PAUD sejenis.

**Tabel 2.27
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020**

| No | Nama Lembaga | Jumlah | | Jumlah Murid | Guru | | |
|----|------------------|--------|--------|--------------|--------|-------------|------|
| | | Negeri | Swasta | | Jumlah | Sertifikasi | % |
| 1 | TK / RA | 1 | 38 | 2.016 | 114 | 2 | 1,75 |
| 2 | Kelompok Bermain | - | 251 | 9.512 | 689 | - | |
| 3 | TPA / TPQ | - | 123 | 1.830 | 258 | - | |
| 4 | SPS | - | 8 | 303 | 24 | - | |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Tabel 2.27 menunjukkan bahwa Lembaga PAUD yang dikelola swasta di Kabupaten Halmahera Selatan cukup banyak sehingga dapat membantu dalam peningkatan Pendidikan PAUD di Kabupaten Halmahera Selatan, yang perlu diperhatikan adalah pemberian insentif untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD.

3. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar sembilan tahun yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten adalah pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Capaian APK dan APM di Kabupaten Halmahera Selatan diketahui masih dibawah target nasional terutama jenjang SMP dikarenakan kualitas pendidikan yang belum merata sehingga menyebabkan anak usia sekolah khususnya di daerah yang berbatasan dengan daerah dengan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik cendrung sekolah didaerah lain. Selain itu belum meratanya kualitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan terkait masalah Pendidikan juga dicerminkan oleh : a) Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan unit cost; b) Pengembangan kurikulum dan bahan ajar masih belum sesuai dengan standar; c) Keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di lingkungan sekolah; d. Keterbatasan pembinaan minat bakat prestasi yang ada di sekolah masih kurang.

Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun disajikan pada Tabel 2.28 yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 247 orang atau 13,83% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 158 orang atau 15,42% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Masih minimnya guru yang telah bersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Halmahera Selatan Masih rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas pendidikan di



Kabupaten Halmahera Selatan terutama dalam hal peningkatan kualifikasi pendidik menjadi S-1 dan kompetensi pendidik serta kesejahteraan tenaga pendidik.

Tabel 2.28
Kondisi Pendidikan Dasar SD dan SMP
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| No | Nama Lembaga | Jumlah | | Jumlah Murid | Guru | | |
|----|--------------|--------|--------|--------------|--------|-------------|-------|
| | | Negeri | Swasta | | Jumlah | Sertifikasi | % |
| 1 | SD | 263 | 24 | 33.839 | 2.001 | 247 | 13,83 |
| 2 | MI | 3 | 29 | 2.671 | 311 | N/A | |
| 3 | SMP | 72 | 45 | 13.090 | 1.098 | 158 | 15,42 |
| 4 | MTs | 4 | 38 | 3.888 | 497 | N/A | |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

4. Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal.

Hasil analisis rasio jumlah murid/guru se Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29
Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| No | Nama Lembaga | Jumlah Lembaga | Jumlah Warga Belajar | Jumlah Tutor |
|----|--|----------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | 1 | 50 | 5 |
| 2 | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) | 35 | 3.695 | 270 |
| 3 | Lembaga Kursus dan Pelatihan | 1 | 120 | 4 |
| 4 | Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | - | - | - |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA.



Tabel 2.30
Kondisi Program Paket A, B dan C
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| No | Nama Program | Jumlah Warga Belajar | | Jumlah | Ujian Nasional | | |
|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|----------|
| | | L | P | | Peserta | Lulus | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Paket A | 140 | 130 | 270 | 111 | 111 | 100 |
| 2 | Paket B | 720 | 550 | 1.270 | 584 | 584 | 100 |
| 3 | Paket C | 1.264 | 891 | 2.155 | 888 | 888 | 100 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.



Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kesehatan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rasio Puskesmas/Pustu per 10.000 penduduk | 2,70 | 2,69 | 2,73 | 2,68 | 2,28 |
| 2 | Rasio Polindes/Poskesdes per 10.000 penduduk | 5,54 | 5,48 | 5,51 | 5,55 | 5,41 |
| 3 | Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| 4 | Rasio Dokter per 10.000 penduduk | 1,73 | 1,89 | 3,06 | 2,64 | 2,48 |
| 5 | Rasio Tenaga Medis per 10.000 penduduk | 27,25 | 30,94 | 40,92 | 40,89 | 31,18 |
| 6 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 73 | 75 | 79 | 83 | 73 |
| 7 | Cakupan desa UCI (Universal Child Immunization) | 82 | 78 | 75 | 78 | 87 |
| 8 | Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan (%) | 88 | 90 | 92 | 95 | 100 |
| 9 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC (%) | 72 | 47 | 70 | 30 | 39 |
| 10 | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Malaria (%) | 0,20 | 8,16 | 0,20 | 0,00 | 0,2 |
| 11 | Cakupan Kunjungan Bayi (%) | 100 | 90 | 87 | 74 | 83 |
| 12 | Jumlah Puskesmas | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 13 | Jumlah Puskesmas Pembantu | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 14 | Jumlah Polindes / Poskesdes | 115 | 116 | 119 | 122 | 135 |
| 15 | Jumlah Posyandu | 328 | 328 | 334 | 320 | 336 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan, 2016

Angka kematian bayi dari tahun ketahun fluktuatif dengan berbagai penyebab sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.32 berikut ini.

Tabel 2.32
Angka Kematian Bayi

| NO | Penyebab Kematian | Tahun | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bayi Lahir Berat Badan Rendah | 17 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Asfiksia | 12 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 3 | Kelainan Bawaan | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Lain-lain (Aspiria, diare, pendarahan intrakranial, dan penyebab lain) | 29 | 17 | 23 | 23 | 30 |
| | Jumlah | 63 | 31 | 35 | 34 | 46 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021



Angka kematian Ibu juga demikian dari tahun ketahun fluktuatif dengan berbagai penyebab sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.33 berikut ini.

**Tabel 2.33
Angka Kematian Ibu**

| NO | Penyebab Kematian | Tahun | | | | |
|----|-----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pendarahan | 18 | 13 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | PER / PEB / Eklampsi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Embolik Air Ketuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Infeksi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lain-Lain Penyakit Penyerta | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| | Jumlah | 28 | 20 | 9 | 10 | 8 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021

Jika memperhatikan tabel 2.34 berikut ini maka penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat adalah diare dan hipertensi, ini berarti pola hidup masyarakat yang harus diperhatikan.



Tabel 2.34
Angka Kesakitan

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Penyakit Menular | | | | | |
| 1 | Tuberkulosis (TB) EBTA Positif | 193 | 245 | 282 | 276 | 159 |
| 2 | Kasus HIV | 16 | 4 | 6 | 35 | 14 |
| 3 | Kasus AIDS | 27 | 1 | 6 | 13 | 13 |
| 4 | Kasus Syphilis | 8 | 34 | 0 | 26 | 101 |
| 5 | Kusta | 36 | 126 | 99 | 176 | 94 |
| 6 | Kasus Campak | 24 | 138 | 27 | 13 | 3 |
| 7 | Pneumonia Balita ditemukan dan ditangani | 79 | 33 | 179 | 81 | 48 |
| 8 | Kasus Diare ditemukan dan ditangani | 7.285 | 6.142 | 6.397 | 5.296 | 3.351 |
| 9 | DBD | 40 | 4 | 0 | 45 | 29 |
| 10 | Malaria | 426 | 158 | 45 | 228 | 24 |
| 11 | Leptospirosis | - | - | - | - | - |
| | Penyakit Tidak Menular | | | | | |
| 1 | Jumlah Kasus IVA Positif pada perempuan usia 30-50 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Tumor/Benjolan Payudara pada perempuan 30-50 tahun | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 Jam | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diabetes Melitus | - | 1.040 | 736 | 1.441 | 1.531 |
| 5 | Hipertensi | - | 5.400 | 4.135 | 6.975 | 4.803 |
| | | - | | | | |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021

Berikut ini adalah beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan sampai dengan tahun 2020.



Tabel 2.35
Fasilitas Kesehatan

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rumah Sakit Umum | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Klinik Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Klinik Pratama | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Apotik | 12 | 12 | 16 | 19 | 18 |
| 7 | Klinik Kecantikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laboratorium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toko Obat | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | Optik / Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Puskesmas Rawat Inap | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | Puskesmas Non Rawat Inap | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13 | Puskesmas Pembantu | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 14 | Puskesmas Keliling | - | - | - | - | 25 |
| | <i>Speed Boat</i> | - | - | - | - | 3 |
| | <i>Roda Empat</i> | - | - | - | - | 4 |
| | <i>Roda Dua</i> | - | - | - | - | 18 |
| 15 | Posyandu Aktif | 322 | 328 | 328 | 334 | 313 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021

Tabel 2.36
Kelas Rumah Sakit

| NO | Penyebab Kematian | Tahun 2020 | |
|----|-------------------|------------|---------------------|
| | | Kelas | Akreditasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RSUD Labuha | C | Akreditasi Purnama |
| 2 | RSU OBI | D | Akreditasi Madya |
| 3 | RS Bisui | Pratama | Belum Terakreditasi |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021

Berdasarkan Akreditasi yang telah dilakukan Pemerintah maka di Halmahera Selatan Puskesmas dengan status DASAR sebanyak 16 PKM, MADYA sebanyak 15 PKM dan UTAMA sebanyak 1 PKM, sebagaimana disajikan pada tabel 2.37.

Tabel 2.37
Status Puskesmas



| NO | PUSKESMAS | STATUS | Tahun Ak | | | | |
|----|---------------|--------|----------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | WAYALOAR | DASAR | | | ✓ | | |
| 2 | LAIWUI | DASAR | | | ✓ | | |
| 3 | JIKOHAI | MADYA | | | | ✓ | |
| 4 | SUM | MADYA | | | | ✓ | |
| 5 | MADAPOLO | DASAR | | | ✓ | | |
| 6 | LABUHA | MADYA | | ✓ | | | |
| 7 | JKO | DASAR | | | ✓ | | |
| 8 | INDONG | DASAR | | | ✓ | | |
| 9 | GANDASULI | MADYA | | | ✓ | | |
| 10 | BAJO | DASAR | | | ✓ | | |
| 11 | BABANG | MADYA | | | ✓ | | |
| 12 | WAYAUA | MADYA | | | | ✓ | |
| 13 | BIBINOI | DASAR | | ✓ | | | |
| 14 | INDARI | MADYA | | | | ✓ | |
| 15 | PALAMEA | MADYA | | | | ✓ | |
| 16 | LOLEO JAYA | UTAMA | | | ✓ | | |
| 17 | YABA | MADYA | | | | ✓ | |
| 18 | KAYOA | DASAR | | | ✓ | | |
| 19 | LELEI | MADYA | | | | ✓ | |
| 20 | BUSUA | DASAR | | | ✓ | | |
| 21 | LALUIN | DASAR | | | ✓ | | |
| 22 | LAROMABATI | DASAR | | | | ✓ | |
| 23 | MAKIAN | DASAR | | | ✓ | | |
| 24 | MATEKETEN | MADYA | | | | ✓ | |
| 25 | SAKETA | DASAR | | | ✓ | | |
| 26 | GANE DALAM | DASAR | | | ✓ | | |
| 27 | DOLIK | MADYA | | | ✓ | | |
| 28 | KUKUPANG | DASAR | | | ✓ | | |
| 29 | MAFFA | MADYA | | | ✓ | | |
| 30 | SUMBER MAKMUR | DASAR | | | | ✓ | |
| 31 | BISUI | MADYA | | | | ✓ | |
| 32 | GANE LUAR | MADYA | | | ✓ | | |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021



Tabel 2.38
Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

| NO | Penyebab Kematian | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | |
|----|---|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Jml Peserta | % | Jml Peserta | % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) - APBN | 58.512 | 23,5 | 57.605 | 22,8 |
| 2 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) - APBD | 12.000 | 4,8 | 17.779 | 7,0 |
| 3 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 21.358 | 8,6 | 29.048 | 11,5 |
| 4 | Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) | 8.076 | 3,2 | 10.730 | 4,3 |
| 5 | Bukan Pekerja | 1.109 | 0,4 | 798 | 0,3 |
| | Jumlah Penduduk Yang Terdaftar JKN | 101.082 | 40,6 | 115.960 | 45,9 |
| | Jumlah Penduduk Yang Belum Terdaftar JKN | 148.040 | 59,4 | 136.820 | 54,1 |
| | Total Penduduk | 249.122 | | 252.780 | |

Sumber : BPJS Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021

Data tahun 2020 menunjukkan jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 1.544 orang, sebagaimana tabel 2.39

Tabel 2.39
Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dokter Spesialis | 4 | 10 | 13 | 15 | 15 |
| 2 | Dokter Umum | 37 | 43 | 47 | 40 | 42 |
| 3 | Dokter Gigi Spesialis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dokter Gigi | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 5 | Perawat | 390 | 415 | 405 | 424 | 489 |
| 6 | Perawat Gigi | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Bidan | 276 | 360 | 479 | 536 | 508 |
| 8 | Tenaga Kefarmasian | 43 | 55 | 64 | 59 | 93 |
| 9 | Kesehatan Masyarakat | 90 | 132 | 123 | 135 | 207 |
| 10 | Sanitarian | 10 | 27 | 25 | 27 | 46 |
| 11 | Gizi | 38 | 36 | 32 | 43 | 68 |
| 12 | Keterapiam Fisik | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Teknis Medik | 76 | 83 | 46 | 14 | 56 |
| | JUMLAH | 983 | 1.177 | 1.237 | 1.305 | 1.544 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Halmahera Selatan, 2021



2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Halmahera Selatan yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 16,43% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 23,61%.

Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2016 menunjukkan jumlah angka 51,23% dalam kondisi baik, kondisi tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 95,00%.

Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan tercatat 967,24 pada tahun 2018, Mengalami Penurunan di tahun 2020 yaitu 875.23

Tabel 2.40
Rasio Tempat Ibadah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2018-2020

| NO | Bangunan tempat Ibadah | Thn 2018 | | | Thn 2019 | | | Thn 2020 | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Jml (unit) | Jml peme luk | Rasio | Jml (unit) | Jml peme luk | Rasio | Jml (unit) | Jml peme luk | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=4/3) | (6) | (7) | (8=7/8) | | | |
| 1. | Mesjid | 334 | 2.864 | 637,31 | 324 | 217.992 | 672,81 | 376 | 22.459 | 591,64 |
| 2. | Gereja | 102 | 33.653 | 329,93 | 110 | 33.289 | 302,62 | 112 | 31.762 | 283,59 |
| | Jumlah | 436 | 246.517 | 967,24 | 434 | 251.281 | 975,43 | 488 | 254.221 | 875,23 |

Sumber : Kemenag Kab. Halmahera Selatan, 2021

Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2016 angka menunjukkan 2,38% dan pada tahun 2020 mencapai 5,82% dengan asumsi perhitungan kondisi drainase baik dibagi seluruh drainase yang ada. Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum:



Tabel 2.41
Indikator Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2016-2020 Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/mantap (%) | 14,63 | 18,36 | 20,93 | 21,77 | 23,61 |
| 2 | Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%) | 51,23 | 57,88 | 75,00 | 94,00 | 95,00 |
| 3 | Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk | 9,57 | 14,27 | 18,97 | 23,67 | 28,39 |
| 4 | Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per satuan penduduk (%) | 25,57 | 25,58 | 25,59 | 25,60 | 26,01 |
| 5 | Drainase dalam kondisi baik / tidak tersumbat (%) | 2,38 | 2,98 | 3,72 | 4,65 | 5,82 |

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Halmahera Selatan, 2021

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam bidang perumahan indikator kinerja dinilai di antaranya dari indikator rumah tangga pengguna air bersih, indikator rumah tangga pengguna listrik, indikator rumah tangga bersanitasi dan indikator rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih, listrik dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%.

Khusus peningkatan dan penurunan yang terjadi pada indikator pengguna listrik karena dimungkinkan adanya satu atau lebih jaringan listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga. Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2016 adalah sebesar 44,20% dan pada tahun 2017 sejumlah 55,58 %, kemudian meningkat menjadi 59,65% pada tahun 2020. Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 81,86 % pengguna pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 91,31% pada tahun 2017, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 91,26%. Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2016 angka yang tercatat sejumlah 45,99%, selanjutnya pada tahun 2017 angka yang tercatat sejumlah 42,09 %, serta pada tahun 2020 angka tercatat sejumlah 68,40 %. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan jumlah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga didapatkan angka sebesar 82,08 % pada tahun 2016 dan 75,76 % pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.42:



Tabel 2.42
Indikator Urusan Perumahan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) | 44,20 | 55,58 | 52,40 | 58,83 | 59,65 |
| 2 | Rumah Tangga Bersanitasi Layak (%) | 45,99 | 42,09 | 51,37 | 51,90 | 68,40 |
| 3 | Rumah Tangga Penggunaan Listrik (%) | 81,86 | 91,31 | 92,04 | 94,74 | 91,26 |
| 4 | Rumah Tangga Layak Huni (%) <i>Catatan: Luas Lantai per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$</i> | 82,08 | 77,25 | 79,65 | 77,71 | 75,76 |

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Halamahera Selatan, 2021

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah polisi pamong praja dan linmas menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban masyarakat, jumlah pos kamling menggambarkan Ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan Ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Semakin meningkatnya rasio antara jumlah Pos Siskamling disbanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat.

Laju pertambahan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Satpol PP dibantu Anggota Linmas yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Halmahera Selatan. Rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah Linmas di Kabupaten Halmahera Selatan sudah jauh melebihi apa yang dipersyaratkan dalam SPM. Data perkembangan indicator ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana table 2.43:

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rasio Jumlah Polisi-PP per 10.000 penduduk | 0,8 | 1,2 | 2,6 | 2,4 | 2,51 |
| 2 | Rasio Pos Kamling per jumlah desa (%) | 73,0 | 75,0 | 82,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Penegakan PERDA (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%) (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) | 100 | 100 | 100 | 82,7 | 100 |

Sumber: Satpol-PP Kabupaten Halmahera Selatan, 2021



Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat.

Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga meningkatkan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).

Di samping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti tabel 2.44:

Tabel 2.44
Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|---|---------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali) | 1 | 6 | 3 | 1 | - |
| 2 | Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (kali) | 1 | 6 | 6 | 1 | 15 |

Sumber: Badan KESBANGPOL Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

2.4.1.6 Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah Kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial.

Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel 2.45:



Tabel 2.45
Indikator Urusan Sosial
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 39,0 | 44,0 |
| 2 | Jumlah saran sosial | | | | | |
| | • Panti Asuhan | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | • Panti Jompo | - | - | - | - | - |
| | • Panti Sosial | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Penanganan PMKS | 259 | 259 | 350 | 400 | 580 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2019 seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. Pada Periode tahun 2015-2019 mengalami sedikit perubahan yaitu 70,22 % di Tahun 2016, menjadi 70,52 % di Tahun 2020.

Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari pencari kerja terdaftar yang menunjukkan angka 39,50 % di Tahun 2016, 43,45 % di Tahun 2018, dan 5,88 % di Tahun 2020. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 4,94% di tahun 2016, 4,15% di tahun 2017, dan 4,74 % di tahun 2020.



Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2016-2020 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Indikator Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 70,22 | 72,44 | 66,46 | 69,35 | 70,52 |
| 2 | Pencari Kerja yang ditempatkan (%) | 39,50 | 39,00 | 43,45 | 44,90 | 5,88 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,96 | 4,15 | 2,34 | 6,31 | 4,74 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

2.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar.

Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan, secara tidak langsung juga berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan

Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel 2.47 berikut:

Tabel 2.47
Angka Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rasio KDRT (%) | 0,70 | 0,26 | 0,47 | 0,34 | 0,16 |
| 2 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 53,13 | 54,65 | 50,83 | 50,87 | 51,00 |
| 3 | Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 18 | 64 | 95 | 68 | 100 |

Sumber: BUP, KB dan Taskin Kabupaten Halmahera Selatan, 2021



2.4.2.3 Urusan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang Aman Beragam, Bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- UU. No.7/1996 tentang pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- PP. No.68/2002 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 7/1996 tentang ketahanan pangan
- PP. No.3/2007 tentang Pemerintah provinsi/Kabupaten/kota Wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.
- PP. No.38/2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan Wajib

Ketersediaan pangan pada tahun 2010 terjadi penurunan karena anomali cuaca dan serangan hama (OPT). Kondisi tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan serangan OPT/Organisme Pengganggu Tumbuhan) dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan produksi walau tidak signifikan dikarenakan terjadinya penambahan luas tanam seiring dengan datangnya musim penghujan sehingga terjadi peralihan komoditas dan penggunaan/aplikasi teknologi Pengelolaan tanaman terpadu/PTT.

2.4.2.4 Urusan Pertanahan

Data kepemilikan sertifikat tanah dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana ditunjukkan table 2.48:

Tabel 2.48
Jumlah Kepemilikan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | | Jumlah |
|-----------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Hak Milik (HM) | 7.780 | 5.297 | 7.694 | 16.524 | 2.231 | 39.526 |
| 2 | Hak Guna Bangunan (HGB) | 33 | 1 | 1 | 1 | 121 | 157 |
| 3 | Hak Guna Usaha (HGU) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 4 | Hak Pakai | 2 | 2 | 65 | 5 | 334 | 408 |

Sumber: BPS/Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan, 2021



2.4.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan tujuan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2019. Sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. Pelayanan sampah di Kabupaten Halmahera Selatan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh BPLHK dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. Persentase/rasio pelayanan sampah diperoleh dari prakiraan volume timbunan sampah dibagi dengan kapasitas pengangkutan sampah oleh BPLHK.

Upaya lainnya adalah melalui penanganan pengaduan kasus lingkungan. Kantor BPLHK telah berupaya untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang dilakukan.

2.4.2.6 Urusan Kependudukan, Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB

Pelayanan kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator, pada tahun 2015 penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP sebesar 29 persen meningkat menjadi 78 persen pada tahun 2019. Demikian pula cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-17 tahun pada tahun 2016 sebesar 37 persen meningkat menjadi 65 persen pada tahun 2019. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 2.49:

Tabel 2.49
Angka Rasio Kependudukan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP | 30,00 | 39,00 | 67,00 | 78,00 | 96,59 |
| 2 | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | 37,00 | 43,00 | 52,00 | 65,00 | 72,15 |

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Halmahera Selatan sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha juga terus digalakkan.

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.



Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel 2.50:

Tabel 2.50
Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|---|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga | 4,22 | 4,22 | 4,20 | 4,22 | 4,22 |
| 2 | Persentase kategori keluarga Kurang sejahtera (Pra-Sejahtera dan Sejahtera I) | 18,25 | 18,24 | 18,25 | 18,21 | 18,16 |
| 3 | Peserta KB Pria (%) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,29 | 0,31 |
| 4 | Pasangan Usia Subur (PUS) | 33.448 | 33.365 | 33.372 | 33.451 | 33.494 |
| 5 | Peserta KB Aktif | 23.414 | 23.914 | 25.360 | 26.834 | 25.422 |
| 6 | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (Peserta KB Aktif) | 70,00 | 71,67 | 75,99 | 80,21 | 75,90 |

Sumber: BUP, KB dan Taskin Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

2.4.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Posyandu aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK dari tahun 2015 – 2020 mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Sedangkan PKK aktif mengalami penurunan karena sebagian besar anggotanya sudah masuk kelompok binaan PKK di setiap RT/RW.

Untuk jumlah LSM dari tahun 2015 – 2020 sama, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas penunjang dan ketertiban masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semakin terbuka/transparan. Swadaya masyarakat dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 - 2020 mengalami kenaikan cukup tinggi, besaran kenaikannya tergantung pada dana stimulant yang diberikan. Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dititikberatkan pada pengabdian secara swadaya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.51:



Tabel 2.51
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| N O | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah kelompok binaan PKK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Jumlah LSM | 14 | 21 | 24 | 24 | 25 |
| 3 | Jumlah PKK Aktif | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Jumlah Posyandu Aktif | 305 | 304 | 291 | 320 | 320 |

Sumber: BPS dan BPMD Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memacu setiap Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan Pembangunan di desa maupun kawasan perdesaan. Jika ditelaah lebih lanjut status desa di kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 terdapat 4 desa Maju (2%) menjadi 9 desa Maju Tahun 2019 (3,61%), 46 desa Berkembang (18%) menjadi 53 desa Berkembang Tahun 2019 (21,29%), 154 desa Tertinggal (62%) menjadi 165 desa Tertinggal Tahun 2019 (66,27%), dan 45 desa Sangat Tertinggal (18%) menjadi 22 desa Sangat Tertinggal Tahun 2019 (8,84%), selengkapnya disajikan dalam tabel 2.52. berikut ini.



Tabel 2.52
Status Desa Kab. Halmahera Selatan
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

| NO | KECAMATAN | Ibu Kota | Status Desa | | | |
|-----|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | Maju | Ber-kembang | Ter-tinggal | Sangat Tertinggal |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Kec. Bacan | Labuha | 4 | 7 | 3 | - |
| 2 | Kec. Bacan Selatan | Mandaong | 4 | 5 | 1 | - |
| 3 | Kec. Bacan Timur | Babang | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 4 | Kec. Bacan Timur Selatan | Wayaua | - | 4 | 3 | - |
| 5 | Kec. Bacan Timur Tengah | Bibinoi | - | 1 | 6 | - |
| 6 | Kec. Obi Selatan | Wayaloar | - | - | 6 | 2 |
| 7 | Kec. Obi | Laiwui | - | 7 | 2 | - |
| 8 | Kec. Obi Barat | Jikohay | - | - | 4 | 2 |
| 9 | Kec. Obi Timur | Sum | - | - | 4 | - |
| 10 | Kec. Obi Utara | Madapolo | - | 4 | 3 | - |
| 11 | Kec. Mandioli Selatan | Jiko | - | 1 | 5 | - |
| 12 | Kec. Mandioli Utara | Indong | - | - | 5 | 1 |
| 13 | Kec. Kep Batanglomang | Bajo | - | - | 8 | - |
| 14 | Kec. Bacan Barat | Indari | - | - | 7 | - |
| 15 | Kec. Kasiruta Barat | Palamea | - | 1 | 6 | 3 |
| 16 | Kec. Kasiruta Timur | Loleojaya | - | - | 5 | 3 |
| 17 | Kec. Bacan Barat Utara | Yaba | - | - | 6 | 2 |
| 18 | Kec. Kayoa | Guruapin | - | 4 | 10 | - |
| 19 | Kec. Kayoa Barat | Busua | - | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Kec. Kayoa Selatan | Laluin | - | 2 | 4 | - |
| 21 | Kec. Kayoa Utara | Laromabati | - | - | 6 | - |
| 22 | Kec. Pulau Makian | Waikyon/ Kota | - | - | 15 | - |
| 23 | Kec. Makian Barat | Mateketen | - | - | 7 | - |
| 24 | Kec. Gane Barat | Saketa | - | 5 | 4 | 1 |
| 25 | Kec. Gane Barat Selatan | Gane Dalam | - | 1 | 5 | 2 |
| 26 | Kec. Gane Barat Utara | Dolik | - | 6 | 5 | 1 |
| 27 | Kec. Kep Joronga | Kukupang | - | - | 6 | 1 |
| 28 | Kec. Gane Timur | Maffa | - | 3 | 8 | 1 |
| 29 | Kec. Gane Timur Tengah | Bisui | - | - | 8 | - |
| 30 | Kec. Gane Timur Selatan | Gane Luar | - | - | 4 | 1 |
| | JUMLAH | Tahun 2020 | 10 | 48 | 170 | 21 |
| | | Tahun 2019 | 9 | 53 | 165 | 22 |

Sumber: DPMD Kab. Halmahera Selatan, 2021

2.4.2.8 Urusan Perhubungan

Sebagai sebuah Kabupaten Kepulauan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut menjadi sangat penting dalam mendukung pergerakan orang dan barang dalam, dari dan ke Kabupaten Halmahera Selatan. Meningkatnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan menyebabkan peningkatan pergerakan orang dan barang di dalam, dari dan ke Halmahera Selatan. Tabel 2.53 menyajikan indikator-indikator perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020:



Tabel 2.53
Indikator Kegiatan Perhubungan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--|---------|---------|----------|---------|---------|
| 1 | Jumlah arus penumpang kapal laut | | | | | |
| 1.1. | Dalam kabupaten | 232.632 | 241.591 | 293.259- | 201.931 | 211.648 |
| 1.2. | Dari kabupaten ke luar kabupaten (Org) | 102.000 | 104.500 | 109.870 | 112.020 | 108.033 |
| 1.3. | Dari luar kabupaten ke kabupaten (Org) | 69.560 | 78.245 | 80.098 | 83.906 | 89.833 |
| 2 | Jumlah arus penumpang pesawat udara | | | | | |
| 2.1. | Dari kabupaten ke luar kabupaten (Org) | 3.890 | 4.078 | 4.346 | 4.186 | 5.953 |
| 2.2. | Dari luar kabupaten ke kabupaten (Org) | 5.788 | 5.944 | 6.003 | 5.462 | 7.067 |
| 3 | Jumlah arus barang laut/darat/udara | | | | | |
| 3.1. | Pelabuhan Kapal Penumpang (Ton) | 1.956 | 1.980 | 2.110 | 2.498 | 2.940 |
| 3.2. | Pelabuhan Kapal Kargo (Ton) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Bandar Udara (Ton) | 49 | 54 | 57 | 67 | 85 |
| 4 | Jumlah Sarana Pengangkutan yang Terdaftar | | | | | |
| 4.1. | Jumlah kapal penumpang kapasitas sedang-besar | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 4.2. | Jumlah Speedboat dan sejenisnya | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 |
| 4.3. | Jumlah angkutan umum darat yang memiliki ijin trayek | 121 | 137 | 154 | 170 | 190 |
| 5 | Jumlah Prasarana Perhubungan | | | | | |
| 5.1. | Terminal Angkutan Darat (unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Dermaga Permanen (unit) | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 |
| 5.3. | Bandar Udara (unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Halmahera Selatan, 2021

2.4.2.9 Urusan Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Kemajuan di bidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran. Data perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.54:



Tabel 2.54
Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi
Tahun 2016-2020 Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah Surat Kabar Nasional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah Surat Kabar Lokal | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Jumlah Penyiaran | | | | | |
| | • Radio Nasional (jaringan kedaerah) | - | - | - | - | - |
| | • Radio Lokal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • TV Lokal / Nasional | - | - | - | - | - |
| 4 | Website milik Pemda | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Pameran/Ekspo yang diikuti Pemda Halsel sebagai partisipan: | | | | | |
| | • Skala event tingkat lokal/ kabupaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | • Skala event tingkat regional / provinsi | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | • Skala event tingkat Nasional | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | • Skala event tingkat Internasional | - | - | - | - | - |

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Halmahera Selatan, 2021

Sementara rasio penggunaan telepon baik sambungan rumah maupun seluler meningkat setiap tahun, demikian pula penggunaan computer dan internet juga terus bertambah, sebagaimana diperlihatkan pada table 2.55 di bawah ini. Peningkatan ini disebabkan karena kebutuhan akan akses internet saat ini sudah semakin mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah.

Tabel 2.55
Prosentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Teknologi Informatika
dan Telekomunikasi di Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Telepon Rumah | 0,66 | 0,94 | 3,10 | 2,11 | 0,00 |
| 2 | Telepon Seluler | 45,83 | 52,29 | 70,26 | 73,65 | 79,28 |
| 3 | Komputer | 3,86 | 6,10 | 9,51 | 9,25 | 4,25 |
| 4 | Internet | 1,65 | 1,79 | 4,19 | 4,37 | 28,10 |

Sumber : BPS Kab. Halmahera Selatan, 2021



2.4.2.10 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Koperasi

Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Halmahera Selatan adalah koperasi. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Halmahera Selatan terlihat dari jumlah koperasi yang ada menunjukkan trend yang meningkat yaitu 221 koperasi pada tahun 2015 menjadi 275 koperasi pada tahun 2019. Akan tetapi koperasi aktif mengalami penurunan dari 123 koperasi pada tahun 2015 menjadi 105 koperasi pada tahun 2019. Seiring menurunnya koperasi aktif jumlah anggota juga semakin menurun dari 12.581 orang pada tahun 2015 menjadi 8.571 orang pada tahun 2019. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama untuk memacu perkembangan koperasi di Halmahera Selatan, sebagai salah satu pilar ekonomi di masyarakat.

Sementara hasil usaha koperasi dari data yang ada menunjukkan peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 6.293.879.000,00 pada tahun 2012 menjadi Rp. 6.821.654.000,00 pada tahun 2014. Jumlah volume usaha sebesar Rp. 131.610.000.000,00 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 152.414.846.000,00 pada tahun 2014. Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 5.269.802.000,00 pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 6.096.794.000,00 pada tahun 2014.

Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Halmahera Selatan dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Perkembangan Koperasi
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah Koperasi | 224 | 256 | 268 | 275 | 299 |
| | – Koperasi Aktif | 126 | 89 | 97 | 105 | 133 |
| | – Koperasi Tidak Aktif | 98 | 167 | 171 | 170 | 166 |
| 3 | Prosentase Koperasi Aktif (%) | 56,25 | 34,76 | 36,19 | 38,18 | 44,49 |
| 4 | Jumlah Anggota Koperasi | 12.606 | 12.780 | 8.541 | 8.571 | 9.350 |
| 5 | Jumlah Modal Sendiri (Rp 000) | 6.293.879 | 6.575.214 | 6.821.654 | 6.9642.918 | 10.289.042.700 |
| 6 | Volume Usaha (Rp 000) | 131.610.000 | 141.063.497 | 152.414.846 | 162.941.000 | 11.124.356,52 |
| 7 | SHU (Rp 000) | 5.269.802 | 5.953.291 | 6.096.794 | 6.157.329 | 8.568.178 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Selatan, 2021



B. Usaha Kecil Menengah (UKM) Non BPR/LKM

Sesuai UU Nomor 20 tahun 2008, menjelaskan bahwa Usaha Kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria jumlah kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 1 M atau hasil penjualan tahunan sebesar Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar. Sedang usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp 500 juta – Rp 10 Miliar atau hasil penjualan tahunan sebesar Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar. Kabupaten Halmahera Selatan memiliki jumlah Usaha Kecil Menengah sebanyak 817 dan non Lembaga keuangan mikro sebesar 832, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.57

Tabel 2.57
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2016, 2020 Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Uraian | 2016 | 2020 |
|----|------------------------|------|------|
| 1 | Jumlah seluruh UKM | 2534 | 2871 |
| 2 | Jumlah BPR/LKM | 1 | 3 |
| 3 | Jumlah UKM non BPR/LKM | 817 | 817 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Selatan, 2021

C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) / Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM di Kabupaten Halmahera Selatan tercantum dalam Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Jumlah BPR/LKM Tahun 2016, 2020 Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Uraian | 2016 | 2020 |
|----|--------------------|------|------|
| 1 | Jumlah BPR | 0 | 1 |
| 2 | Jumlah LKM | 1 | 2 |
| 3 | Jumlah BPR dan LKM | 1 | 3 |

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Selatan, 2021



2.4.2.11 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Perkembangan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Jumlah Organisasi Olah Raga | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Jumlah Kegiatan Kepemudaan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Jumlah Kegiatan Olah Raga | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | Jumlah Lapangan Olah Raga | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
| | o Lap Bola Kaki | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| | o Lap Bola Vollli | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| | o Lap Bulutangkis | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | o Lap Tennis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2021

Berdasarkan data table diatas terlihat perkembangan cukup signifikan pada jenis organisasi pemuda dimana pada tahun 2016 organisasi pemuda berjumlah 3 dan pada tahun 2017 bertambah 7 organisasi pemuda yang terbentuk sehingga pada tahun 2017 menjadi 10 dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 5 organisasi dan tahun 2020 jumlah keseluruhan menjadi 15. Pada tahun 2016 jumlah lapangan olah raga 44, dan tahun 2020 menjadi 47 lapangan olahraga Sedangkan untuk jumlah organisasi olah raga jumlahnya sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 10 cabang olahraga. Adapun kegiatan kepemudaan mengikuti jumlah organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan kegiatan olah raga adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan di sekolah. Pada tahun 2016 sebanyak 5 kegiatan dan pada tahun 2019 sebanyak 5 kegiatan olahraga.

2.4.2.12 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.



Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya: buku Halmahera Selatan Dalam Angka, buku PDRB kabupaten, buku Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan buku Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2.4.2.13 Urusan Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.60
Perkembangan Seni Budaya
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015-2019**

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Jumlah Karya seni budaya yang dilestarikan | N/A | N/A | N/A | 6 | 6 |
| 3 | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Beberapa karya seni budaya atau kegiatan budaya di Halmahera Selatan antara lain: Popas Lipu, Arungi Nusa, Batijkakang Lecak, Tari Togal, Tari Dendang dan Imbung-Imbung Batu Bacan. Sedang kawasan cagar budaya yang ada di Halmahera Selatan antara lain: Benteng Barnaveld, Kedaton Bima Kesultanan Bacan, Mesjid Sultan Bacan, Rumah Kuning, Rumah Putih, dan Kebun Karet.

2.4.2.14 Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.



Pelaksanaan SKPB tahun 2019 yang diterapkan di 30 SKPD mencapai 36,67% sedangkan pada tahun 2015 baru mencapai 23,33%. Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2.61:

Tabel 2.61
Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Peningkatan SDM pengelola karsipan (Orang) | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 2 | Persentase SKPD menerapkan SKPB (%) | 26,67 | 30,00 | 33,33 | 36,67 | 40,00 |

Sumber: Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah, 2021

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menambah jumlah perpustakaan maupun jumlah koleksi pustaka.

Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 15 unit dan dilengkapi dengan 2 armada perpustakaan keliling. Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel 2.62:

Tabel 2.62
Perkembangan Perpustakaan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) | 750 | 53 | 129 | 386 | 700 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia (Eksp) | | | | | |
| | o Fiksi | 2.920 | 3.618 | 3.986 | 3.986 | 4756 |
| | o Non Fiksi | 1.638 | 3.144 | 3.546 | 7.665 | 4.423 |
| | o Majalah | 113 | 149 | 159 | 159 | 110 |
| | o Buku Referensi | 716 | 1.736 | 2.307 | 8.478 | 107 |
| | o Lainnya | 586 | 842 | 882 | 882 | 230 |

Sumber: Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah, 2021



2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Pertanian

Target utama sector pertanian adalah upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Mengingat masih sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sector pertanian. Oleh karena itu sector pertanian ditetapkan sebagai motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan mengentaskan kemiskinan. Perekonomian Halmahera Selatan banyak bergantung dari sector pertanian dan perkebunan, hal ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 35,29% pada tahun 2019. Fokus urusan pilihan Pertanian adalah peningkatan produktifitas bahan pangan utama. Perkembangan indikator Pertanian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.63:

Tabel 2.63
Produktivitas Usaha Pertanian Pada PDRB
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|---------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Produktivitas Padi atau bahan pangan utama local lainnya (Kw/ha) | | | | | |
| | o Padi sawah | 5.100 | 4.250 | 3.996 | 5.508 | 6.975 |
| | o Padi Ladang | 1.174 | 1.139 | 8.823 | 5.672 | 2.674 |
| | o Jagung | 2.141 | 8.303 | 5.570 | 1.984 | 3.903 |
| | o Kedelai | 263 | 20 | - | - | - |
| | o Kacang Tanah | 670 | 673 | 1.320 | 311 | 159 |
| | o Kacang Hijau | 458 | 304 | 791 | 129.000 | 172 |
| | o Ubi Kayu | 7.294 | 5.067 | 5.470 | 561 | 568 |
| | o Ubi Jalar | 4.642 | 2.384 | 2.590 | 209 | 196 |

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Perkebunan di Halmahera Selatan sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang luas arealnya mencapai lebih kurang 42.000 Ha dengan komoditas utama yaitu kelapa, kakao, cengkeh dan pala. Fokus urusan pilihan perkebunan adalah meningkatkan produktifitas hasil perkebunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Indikator terkait usaha perkebunan dapat dilihat dalam Tabel 2.64:



Tabel 2.64
Indikator Usaha Perkebunan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Luas Lahan Perkebunan | | | | | |
| | ○ Kelapa (ha) | 29.731 | 29.731 | 29.731 | 29.731 | 29.731 |
| | ○ Kakao (ha) | 4.120 | 4.120 | 4.120 | 3.920 | 3.920 |
| | ○ Cengkeh (ha) | 3.390 | 3.390 | 3.990 | 3.990 | 3.990 |
| | ○ Aren (ha) | 622 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| | ○ Pala (ha) | 5.607 | 7.261 | 8.357 | 8.956 | 10.265 |
| 2 | Produksi Hasil Perkebunan | | | | | |
| | ○ Kelapa (ton) | 20.476 | 22.572 | 23.235 | 23.523 | 23.253 |
| | ○ Kakao (ton) | 1.979 | 2.086 | 18.219 | 2.195 | 2.195 |
| | ○ Cengkeh (ton) | 650 | 724 | 767 | 769 | 769 |
| | ○ Pala (ton) | 398 | 521 | 605 | 601 | 601 |
| | ○ Aren (ton) | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

2.4.3.2 Urusan Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi hutan produksi dan hutan rakyat. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan selain membudidayakan jenis tanaman kayu juga telah mengembangkan hasil produksi kehutanan non kayu seperti damar dan lainnya yang dapat memberikan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan kehutanan sebagian besar kewenangannya telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi dan kewenangan kabupaten/kota hanya pada pengembangan TAHURA. Untuk itu program-program sektor kehutanan lima tahun kedepan lebih diarahkan pada pengembangan TAHURA, RTH, dan sejenisnya.

2.4.3.3 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam sektor energi, fokus upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan adalah mengupayakan agar masyarakat dapat menikmati layanan Listrik dari berbagai sumber energi yang dapat diakses. Sampai saat ini belum semua desa di Halmahera Selatan memiliki jaringan Listrik PLN karena kondisi wilayah yang berpulau-pulau yang belum dapat dijangkau oleh PLN. Untuk masyarakat yang belum terjangkau layanan listrik PLN, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengupayakan penggunaan listrik tenaga diesel dan tenaga surya. Selain diesel dan tenaga surya, ada potensi pembangkitan listrik dengan



sumber lainnya seperti mikro hidro dan panas bumi, tetapi sampai saat ini pengusahaannya masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan awal.

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan bervariasi di dalam wilayahnya. Bahan-bahan galian tambang yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan menurut jenis bahan galian adalah sbb:

- Emas berlokasi di Bacan, Obi dan Kayoa sampai saat ini belum dikelola
- Besi berlokasi di Pulau Obi sampai saat ini belum dikelola
- Batu Bara berlokasi di desa Goro-goro (Bacan Timur), Dobo, Air Sobesi Kec. Obi, Gunung Sabale (P. Makian) sampai saat ini belum dikelola.
- Nikel berlokasi di Mala-mala, Loji dan Kawasi Kecamatan Obi belum dikelola.

Selain itu terdapat juga hasil tambang berupa batu-batuan yang terkenal disebut Batu Bacan, hal ini karena Batu ini hanya terdapat di Pulau Bacan, Batu ini warnanya mirip Batu Giok, walaupun memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan, tetapi potensi hasil tambang ini pun belum dapat dikelola secara optimal karena faktor modal usaha dan peralatan yang belum memadai.

Fokus urusan pertambangan di Halmahera Selatan adalah memastikan bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dijalankan di dalam Kabupaten memenuhi seluruh aspek perijinan, lingkungan, sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Indikator terkait sektor energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dalam Tabel 2.65:

Tabel 2.65
Indikator Usaha Pertambangan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rasio Elektrifikasi | 39,52 | 44,91 | 45,48 | 46,20 | 100 |
| 2 | Cakupan Layanan Listrik PLN | 39,52 | 44,91 | 45,48 | 46,20 | 67,32 |
| 3 | Cakupan Layanan Listrik Mandiri | 28,20 | 30,10 | 31,32 | 39,64 | 32,68 |
| | o Desa menggunakan pembangkit listrik tenaga disel | 8,20 | 8,56 | 9,10 | 10,04 | |
| | o Desa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya | 12,60 | 13,15 | 13,80 | 14,46 | |
| | o Desa menggunakan pembangkit listrik tenaga lainnya | 2,50 | 2,70 | 3,10 | 3,21 | |
| 7 | Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB (%) | 10,30 | 9,63 | 8,11 | 7,40 | 10,12 |

Sumber: PLN Cabang Halmahera Selatan, 2021



2.4.3.4 Urusan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Halmahera Selatan selama tahun 2015- 2019 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,93% per tahun. Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor Pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2015 - 2019 masih sangat kecil yakni rata-rata sebesar 0,11% per tahun. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.66
Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata Pada PDRB
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|------|-------|-------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kunjungan wisatawan Asing (orang) | 160 | 296 | 264 | 103 | 75 |
| 2 | Kunjungan wisatawan domestic (orang) | 939 | 401 | 3.011 | 3.319 | 4365 |
| 3 | Kontribusi sector Pariwisata terhadap PDRB (%) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Sumber: Halmahera Selatan dalam Angka (BPS), 2017-2021

Berdasarkan data potensi wisata di Halmahera Selatan terdapat beberapa jenis destinasi yang dapat dikembangkan, sebagai berikut:

Tabel 2.67
Jenis Destinasi Wisata Kabupaten Halmahera Selatan

| No | Jenis Destinasi Wisata | Lokasi |
|----|------------------------|---|
| 1 | Sejarah | Keraton Sultan Bacan – Amasing Kota, Bacan Mesjid Sultan Bacan – Amasing Kota, Bacan Benteng Bernaveld – Labuha, Bacan Rumah Putih – Kampung Makian, Bacan Selatan Rumah Kuning – Amasing Kota, Bacan Ompu Asal – Kasiruta Dalam Goa Jeret (Kuburan Tua) - Kasiruta |
| 2 | Alam | Cagar Alam Gunung Sibela – Bacan (Habitat Monyet Bacan/ <i>Macaca Nigra</i> , Burung Bidadari/ <i>Standar Wallacea Wings</i> , Burung Nuri Ternate/ <i>Lorius Garulus</i> , Burung Raja/ <i>Cicinnurus Regius</i> , Burung Kasturi Merah/ <i>Eos Bornea</i> , Kakatua Alba/ <i>Cacatua Alba</i> , Perkicit Violet/ <i>Eos Squamata</i> , Anggrek Alam, Kupu-Kupu/ <i>Ornithopera Aesakus</i>) Hutan Karet – Bacan Perkebunan Duku Bacan – Amasing Kali, Bacan Barangka Dolong – Bacan Kawasan Air Panas Tawa – Bacan Timur Tengah Kawasan Air Panas Kayoa Tambang Batu Bacan - Kasiruta |
| 3 | Pulau | Kepulauan Widi – Gane Timur Tengah (99 pulau) Kepulauan Guraici - Kayoa Nusa Ra – Indomut, Bacan |



| No | Jenis Destinasi Wisata | Lokasi |
|----|------------------------|--|
| | | Pulau Poroco, Pulau Kusu, Pulau Sali – Bacan Timur Pulau Sambiki – Obi Pulau Sali – Bacan Timur (terdapat <i>Sali Bay Resort</i>) Pulau Gata-Gata, Pulau Woka, Pulau Taunu, Pulau Belang-Belang, Pulau Tusa, Pulau Gamumu, Pulau Tabalai. |
| | Pantai | Pantai Omamoy – Bacan Selatan Dermaga Biru, Sibela Beach, Babang – Bacan Timur Pogo-Pogo – Bacan Barat Pantai Poate, Pantai Sagawele, Pantai Wattambi |
| | Air Terjun/Sungai | Air Terjun Aha Kolano – Kasiruta Air Terjun Amasing Kali – Bacan Air Terjun Gandasuli – Bacan Selatan Air Terjun Kubung – Bacan Selatan Air Terjun Nyonyifi – Bacan Timur Air Terjun Bibinoi – Bacan Timur Tengah Air Terjun Curupana dan Air Terjun Paramasang – BT Selatan Air Terjun Saketa – Gane Barat |
| | Danau | Danau Manggayoang – Wayamiga, Bacan Timur Telaga Nusa – Wayamiga, Bacan Timur Danau Karo - Obi |

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

2.4.3.5 Urusan Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kelautan dan perikanan difokuskan untuk membantu masyarakat Halmahera Selatan meningkatkan produktifitas usaha perikanan tangkap dan juga budi daya hasil laut seperti rumput laut dan budi daya ikan dasar. Upaya yang dilakukan adalah memberikan bantuan sarana penangkapan kepada masyarakat nelayan untuk menangkap ikan, menyediakan bibit rumput laut dan juga membangun sarana pabrik es, ABF dan cold storage serta Tempat Pelelangan Ikan. Perkembangan usaha Perikanan di Halmahera Selatan disajikan dalam tabel 2.68:



Tabel 2.68
Indikator Urusan Perikanan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|---|---------------|----------|-----------|------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap (ton) | | | | | |
| | ○ Ikan Tuna | 3.926,90 | 4.586,00 | 5.973,23 | 5.361,205 | 4.265,537 |
| | ○ Ikan Cakalang | 3.629,90 | 4.333,00 | 5.987,97 | 7.650,412 | 5.210,586 |
| | ○ Ikan Teri | 1.009,56 | 1.000,00 | 939,00 | 681,343 | 681,243 |
| | ○ Ikan Julung | 421,00 | 408,00 | 420,7 | 309,021 | 388,950 |
| | ○ Ikan Kembung | 6.101,66 | 2.500,00 | 255,53 | 214,119 | 213,989 |
| | ○ Ikan Layang | 5.820,43 | 5.324,00 | 4.012,49 | 3.019,167 | 6.355,236 |
| | ○ Ikan Dolosi | 2.712,44 | 2.700,00 | 170,19 | 208,321 | 207,211 |
| | ○ Ikan Julung | 421,00 | 408,00 | 420,7 | 309,021 | 388,950 |
| | ○ Ikan Dasar | 6.019,16 | 6.012,00 | 10.798,26 | 11.036,696 | 8.029,134 |
| | ○ Hasil Laut Lainnya | 1.362,99 | 1.389,56 | 3.211,86 | 3.016,234 | 3.022,244 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya Laut (ton) | | | | | |
| | ○ Ikan Kerapu | 2.319,28 | 2.123,00 | 2.220,27 | - | 2.003,025 |
| | ○ Rumput Laut | 447.050 | 610.820 | 689.420 | 387.850 | 854.000 |
| | ○ Siput Mutiara | 18.422 | 57.042 | 42.112 | 43.822 | 59.889 |
| | ○ Udang Fanamei | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 90.000 |
| | ○ Ikan Nila & Mas | 1.151 | 2.500 | 2.661 | 2.945 | 5.612 |
| | ○ Udang Lobster | 319 | 532 | 2.416 | 1.858 | 1.891 |
| | ○ Lainnya | 0,10 | 0,50 | 1,80 | 0,55 | 10,26 |
| 3 | Produksi Hasil Pengolahan Ikan (ton) | | | | | |
| | ○ Ikan Kering | 38 | 40 | 45 | 35 | 30 |
| | ○ Ikan Asap | 760 | 765 | 772 | 758 | 743 |
| | ○ Ikan Asin | 70 | 80 | 97 | 105 | 90 |
| | ○ Abon Ikan | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0,05 |
| | ○ Kerupuk Ikan Kamplang | 21 | 22 | 23 | 21 | 20,5 |
| | ○ Keragenan Rumput Laut | - | - | - | - | - |
| 4 | Konsumsi ikan dan hasil laut lainnya di masyarakat (Kg/Kpt/tahun) | 54,86 | 55,86 | 56,96 | 58,98 | 61,96 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan bahwa sarana dan prasarana produksi perikanan tahun 2019 sebagai berikut : Pabrik Pengolahan hasil perikanan 2 unit, Cold Storage 7 unit ini miliki 2 perusahaan yaitu DKP Provinsi dan **Perusahaan Perinus**, Perusahaan bidang perikanan 20 unit, PPI 2 unit terdapat di Desa Panambunag dan Desa Sayoang Milik DKP Provinsi , TPI 2 unit, Perahu Nelayan Tenaga mesin 536 unit, Perahu nelayan bermesin 5-15 PK sebanyak 2.846 unit, Perahu Nelayan bermesin 15-30 PK sebanyak 380 unit, Perahu Nelayan bermesin 10-30 GT sebanyak 834 unit dan Perahu Nelayan bermesin 30 GT keatas sebanyak 25 unit. Selain itu Sarana dan prasarana Produksi Perikanan yang dibangun tahun 2019 dan 2020 adalah Pengadaan Bibit Ikan Bandeng 1 Paket, Pembagunan Kolam Air Ikan Air Tawar serta Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar 3000 Benih serta rehab Kolam ikan air tawar di desa Sambiki serta Pembangunan



jalan produksi dan talud penahan ombak pada lokasi Benih Ikan Lokal (BBIL) di desa Indomut

2.4.3.6 Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan di Kabupaten Halmahera Selatan berkontribusi sebesar 33,79% terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, meningkat dari tahun 2019. Jumlah industri kecil/menengah dan rumah tangga sebanyak 453 usaha dengan jenis kegiatan berupa industri makanan dan minuman, industri berbahan dasar kayu dan bambu, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, dan lainnya. Kontribusi industri kecil/menengah dan rumah tangga mencapai 25% dari nilai total produksi dan 75% merupakan kontribusi industri logam dasar (pengolahan nikel) yang berlokasi di Obi. Pendampingan dan pemberdayaan industri kecil/menengah dan rumah tangga merupakan prioritas pembangunan pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal. Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil/menengah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun data perkembangan indikator perindustrian tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.69

Tabel 2.69
Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pertumbuhan Industri (%) | 0,29 | 0,88 | 1,75 | 4,58 | 26,03 |
| 2 | Jumlah Industri Besar (Unit) | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Jumlah Industri kecil/menengah/home industry (unit) | 336 | 336 | 342 | 358 | 453 |
| 4 | Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap (orang) | 1.384 | 1.508 | 1.693 | 1.954 | 2.337 |
| 5 | Kontribusi sector Perindustrian terhadap PDRB (%) | 9,35 | 17,29 | 22,68 | 23,39 | 33,79 |

Sumber: Dinas Koperindag Kab Halmahera Selatan, 2021

Selama tahun 2016-2020, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 16,35% pertahun. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun menurun akibat pengaruh kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan yang semakin tinggi. Kinerja sektor perdagangan disajikan pada table 2.70 berikut ini:



Tabel 2.70
Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Eksport bersih perdagangan (Rp) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Jumlah pedagang | | | | | |
| | o Pedagang Besar | 51 | 55 | 70 | 84 | 84 |
| | o Pedagang Menengah | 136 | 168 | 195 | 203 | 190 |
| | o Pedagang Kecil | 1.607 | 1.943 | 2.003 | 2.018 | 1.661 |
| 3 | Jumlah Sarana Perdagangan | | | | | |
| | o Pasar | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| | o Toko | 174 | 268 | 342 | 367 | 388 |
| | o Warung / Kios | 2.498 | 3.613 | 4.162 | 4.763 | 3.963 |
| | o Rumah Makan / Restoran | 10 | 11 | 14 | 17 | 38 |
| 4 | Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB (%) | 18,68 | 17,31 | 15,66 | 15,23 | 12,85 |

Sumber: Dinas Koperindag Kabupaten Halmahera Selatan, 2021

Pada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat 7 pasar aktif dengan jumlah pedagang yang memiliki kios dan los sebanyak 9.433 pedagang.

Tabel 2.71
Data Pasar Tradisional
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| No | Nama Pasar | Tahun | Operasional Pasar | Jumlah Sarana | Jenis Dagangan |
|-----------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pasar Induk Tuwokona | 2019 | Harian (412 Pedagang) | 34 Kios 3 Los 1 Arahant | Pakaian, Sembako dan Barito |
| 2 | Pasar Desa Labuha (Milik BumDes Labuha) | 2020 | Harian (38 Pedagang) | | Pakaian dan Sembako |
| 3 | Pasar Desa Amasing Kota | 2003 | Harian (27 Pedagang) | 2 Los | Sembako dan Barito |
| 4 | Pasar Rakyat Babang, Bacan Timur | 2018 | Harian (126 Pedagang) | 14 Kios 1 Los | Pakaian, Sembako dan Barito |
| 5 | Pasar Saketa, Gane Barat | 2019 | Harian (56 Pedagang) | 13 Kios 2 Los | Pakaian, Sembako dan Barito |
| 6 | Pasar Guruapin, Kayoa | 2018 | Harian (29 Pedaganag) | 5 Kios 1 Los | Pakaian, Sembako dan Barito |
| 7 | Pasar Jikotamo, Obi | 2019 | Harian (28 Pedagang) | 13 Kios 1 Los | Pakaian, Sembako dan Mobeler |
| 8 | Pasar Laiwui, Obi | 2018 | Harian (26 Pedagang) | 6 Kios 2 Los | Sembako dan Barito |
| 9 | Pasar Indari, Bacan Barat | 2018 | Harian (belum aktif) | 6 Kios 2 Los | Sembako dan Barito |
| | Jumlah | | 742 Pedagang | 91 Kios 14 Los | |

Sumber: Dinas Koperindag Kab Halmahera Selatan, 2021



2.4.3.7 Urusan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan sampai saat ini masih tergantung pada kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Kabupaten Halmahera Selatan berfungsi sebagai daerah penerima yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para transmigran yang masuk ke wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan berlokasi pada 4 (empat) kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Gane Timur dengan luas kawasan transmigrasi lk. 3.008,32 Ha terdiri dari dua lokasi yaitu kawasan transmigrasi Waimili dan Sumber Makmur
2. Kecamatan Gane Barat Utara dengan luas kawasan transmigrasi lk. 8,87 Ha dan merupakan bagian dari kawasan transmigrasi Sumber Makmur
3. Kecamatan Bacan Barat dan Bacan Barat Utara dengan luas kawasan transmigrasi lk. 2.500 Ha yaitu kawasan transmigrasi Jojame-Kusubibi. Kawasan ini dalam tahap perencanaan dan telah mendapatkan penetapan dari Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Transmigrasi. Rencana selanjutnya adalah pembukaan lahan dan rencana penempatan.

2.4.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan Umum

2.4.4.1 Unsur Sekretariat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas 3 Asisten dan 9 Bagian.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.72
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nilai Evaluasi PD Kinerja | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 3,20 | 2,80 | 2,50 | 3,02 | Belum di Evaluasi |
| 4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) | 38,44 (C) | 41,48 (C) | 50,20 (CC) | 50,59 (CC) | CC |

Sumber : Sekretariat Daerah Kab Halmahera Selatan, 2021

2.4.4.2 Unsur Sekretariat DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwakilan yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam urusan pemerintahan. DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mendukung fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran, sekretariat Dewan memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen, yaitu:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Integrasi program kerja DPRD dengan RPJM dan RKPD melalui kegiatan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Dewan yang telah diintegrasikan dengan program-program DPRD.

Pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ranperda yang Masuk Prolegda | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Ranperda yang disetujui | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | Persentase Ranperda yang disetujui (%) | 38,88 | 50,00 | 40,00 | 45,00 | 30,00 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Halmahera Selatan, 2021



Pada tahun 2020, kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah menerbitkan dokumen-dokumen legislasi DPRD, yakni peraturan daerah sejumlah 20 buah, persetujuan bersama/berita acara 20 buah, keputusan DPRD sejumlah 6 buah dan keputusan pimpinan DPRD sejumlah 5 buah.

2.4.4.3 Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses menentukan pilihan kebijakan pembangunan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di suatu daerah. Perencanaan ini dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan harus konsisten antar perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Hal ini dibuktikan dengan terakomodasinya 100% program yang ada di RPJMD dalam RKPD maupun APBD. Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.74

Tabel 2.74
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tersedia dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda | Perda No 9/2016 tentang RPJMD Kab Halmahera Selatan Tahun 2016-2021 | | | | |
| 2 | Tersedia dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | Perkada No. 16/2016 tentang RKPD 2017 | Perkada No. 12/2017 tentang RKPD 2018 | Perkada No. 9/2018 tentang RKPD 2019 | Perkada No. 14/2019 tentang RKPD 2020 | Perkada No. 20/2020 tentang RKPD 2021 |
| 3 | Tersedia dokumen perencanaan detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada | - | - | - | - | Perda No. 5/2020 RDTR Kaw Perkotaan Labuha |

Sumber: Bappelitbangda Kab. Halmahera Selatan, 2021



Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Selatan bekerjasama dengan Bappeda Kabupaten Batang Jawa Tengah telah menerapkan e-Planning dalam proses Perencanaan Daerah dan mulai tahun 2021 proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Halmahera Selatan mulai menerapkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.4.4.4 Unsur Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Halsel secara umum dalam kategori baik dimana secara konsisten mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangan oleh BPK. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2014 atau 7 (tujuh) tahun yang lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dipertanggung jawabkan dan cerminan dari profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang dimiliki. Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dari tahun 2016 hingga 2020 meskipun dinamis, terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 6,69% dari tahun-tahun sebelumnya yang masih di atas 10 %. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Detail gambaran keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Keuangan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Opini atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase SILPA terhadap Total APBD | 0,24 | 0,55 | 1,91 | 3,59 | 2,28 |
| 3 | Persentase Belanja Operasi terhadap Total APBD | 53,38 | 54,89 | 54,76 | 51,49 | 56,48 |
| 4 | Persentase Belanja Modal terhadap Total APBD | 29,22 | 25,47 | 23,71 | 30,48 | 22,29 |
| 5 | Prosentase Capaian PAD | 69,02 | 72,50 | 81,95 | 88,93 | 97,07 |
| 6 | Kontirbusi PAD terhadap Total Pendapatan | 2,21 | 2,25 | 2,36 | 3,88 | 5,09 |
| 7 | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Sumber: DPKAD Kab. Halmahera Selatan, 2021



2.4.4.5 Unsur Pengawasan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi ini lebih dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar. Kebijakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu bentuk dan tekad mendukung cita-cita reformasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai konsekuensi untuk menciptakan kabupaten yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN. Kebijakan tersebut diambil oleh manajemen (instansi atau pejabat yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan di bidang pengawasan) dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Auditor adalah pelaksana pengawasan yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh auditor. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai, yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. Tuntutan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor atau APIP di Indonesia dalam peraturan tersebut di atas, secara hukum mengisyaratkan kewajiban untuk penyelesaiannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu rangkaian pengawasan yang meliputi: perencanaan pengawasan, proses pengawasan, laporan hasil pengawasan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



Tabel 2.76
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TLHP Internal (Insp Kabupaten) | 20 | 40 | 40 | 66,21 | 20 |
| 2 | TLHP Eksternal (BPK) | 50,72 | 63,90 | 64,47 | 66,03 | 73,17 |

Sumber: Inspektorat Kab Halmahera Selatan, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 - 2020 meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, pada tahun 2020 masih terdapat kekurangan tenaga Aparatur Pengawasan sejumlah 44 personil. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Perhitungan Formasi Auditor pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka jumlah total kebutuhan auditor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan adalah 51 personil sedangkan kondisi saat ini berjumlah 7 personil sehingga ada kekurangan 44 personil.

Kondisi jumlah tenaga Aparatur Pengawasan dan rincian kebutuhannya terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Kondisi Aparatur Pengawasan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| No | Jenis Jabatan | Jumlah | Kebutuhan | Kekurangan |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Struktural | | | |
| | - Inspektur | 1 | 1 | - |
| | - Sekretaris | 1 | 1 | - |
| | - Inspektur Pembantu | 5 | 5 | - |
| | - Kasubag | 3 | 3 | - |
| 2 | Jabatan Fungsional Tertentu | | | |
| | - Auditor | 8 | 52 | 20 |
| | - P2UPD | 0 | 10 | 10 |
| | - Auditor Kepegawaian | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Jabatan Fungsional Umum | 22 | 20 | - |
| | Jumlah | 38 | 97 | 35 |

Sumber: Inspektorat Kab Halmahera Selatan, 2021



Pencapaian indikator kinerja pembangunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.78
Indikator Kinerja Pembangunan SPIP
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|----------------|------|------|------|---------|---------|
| 1 | Maturitas SPIP | NA | NA | NA | Level 2 | Level 2 |
| | | NA | NA | NA | 2,8 | 2,8 |

Sumber: Inspektorat Kab Halmahera Selatan, 2021

2.4.4.6 Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian indikator kinerja kepegawaian kabupaten Halmahera Selatan sebagainana table 2.78 berikut ini:

Tabel 2.79
Jumlah PNS menurut Golongan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Gol. I | 91 | 76 | 72 | 58 | 56 |
| 2 | Gol. II | 1.415 | 1.487 | 1.380 | 1.356 | 1.226 |
| 3 | Gol. III | 2.390 | 2.090 | 2.120 | 2.223 | 2.267 |
| 4 | Gol. IV | 591 | 570 | 562 | 533 | 522 |
| | JUMLAH | 4.487 | 4.223 | 4.134 | 4.170 | 4.071 |

Sumber: BKPPD, 2021

2.4.4.7 Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.80
Jumlah Pejabat mengikuti Diklat PIM
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|-----------------|---------------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Diklat PIM I | | | | | 1 |
| 2 | Diklat PIM II | | | | | 8 |
| 3 | Diklat PIM IIII | | 23 | | 3 | 20 |
| 4 | Diklat PIM IV | 25 | 22 | | | - |
| | JUMLAH | 25 | 45 | | 3 | 29 |

Sumber: BKPPD, 2021



2.4.5 Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh camat adalah Urusan Kewilayahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

2.5 Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kemampuan ekonomi daerah dilakukan dengan melihat indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh gambaran tersebut adalah melalui indikator PDRB per kapita. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Selatan mengalami tren peningkatan, baik dilihat melalui harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010.

Kemampuan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita Produktivitas Tenaga Kerja yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Selama tahun 2016–2020 Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 11,97% per tahun, yaitu dari Rp. 31.864.335 per angkatan kerja per tahun pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 24.251.861 per angkatan kerja per tahun pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.81:



Tabel 2.81
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Non Pangan per Kapita
Tahun 2016-2020 Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|-----------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp) | 373.333 | 423.678 | 444.617 | 458.836 | 991.203 |
| 2 | Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Rp) | 291.013 | 334.591 | 256.462 | 393.171 | 114.186 |
| 3 | Produktifitas Total Daerah (Rp / orang/ tahun) | 31.864.335 | 33.278.230 | 41.248.416 | 44.515.678 | 24.251.861 |

Sumber : *Halmahera Selatan dalam angka (BPS), 2017-2021*

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Fasilitas sarana prasarana willyah tersebut diantaranya:

Perhubungan

Pertumbuhan pergerakan orang dan barang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik akibat pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan merespon peningkatan pergerakan orang dan barang ini dengan mengupayakan pembangunan infrastruktur perhubungan baik di laut, darat maupun udara.

Pembangunan infrastruktur perhubungan laut dilakukan dengan menambah sarana pelabuhan angkutan orang dan barang di ibukota-ibukota kecamatan untuk mendukung pergerakan orang dan barang di dalam Kabupaten Halmahera Selatan.

Untuk mendukung perhubungan darat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mendorong pembangunan jalan darat berbasis pulau, seperti pembangunan jalan lingkar pulau Bacan untuk menghubungkan desa-desa di pesisir pulau Bacan ke ibukota Kabupaten. Pembangunan jalan dan jembatan juga dilaksanakan di pulau Obi dan pulau Halmahera bagian selatan, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi di wilayah tersebut, yaitu kegiatan di sektor pertambangan (Obi) dan pertanian (seperti kawasan transmigrasi di Gane Timur). Kegiatan ini mendorong peningkatan panjang jalan darat yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.



Di sektor perhubungan udara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mendorong masuknya pesawat udara dari luar Halmahera Selatan bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan juga bersama Kementerian Perhubungan mendorong penambahan panjang landasan udara yang ada sehingga Bandar Udara Oesman Sadik Labuha bisa didarati oleh pesawat dengan ukuran yang lebih besar.

Tabel 2.82
Kondisi Sektor Perhubungan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Uraian | Capaian Tahun | | | | |
|------|--|---------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jumlah orang pengguna terminal/pelabuhan (orang) | 201.597 | 269.784 | 324.419 | 379.086 | 243.041 |
| 1.1. | Laut | 193.491 | 251.491 | 304.269 | 360.544 | 234.989 |
| 1.2. | Darat | 1.400 | 1000 | 1.200 | 900 | 850 |
| 1.3. | Udara | 6.706 | 17.293 | 18.950 | 17.642 | 7.202 |
| 2 | Jumlah barang yang melalui terminal/pelabuhan (Ton) | 163.927 | 814.859 | 7.414.859 | 10.686.671 | 1.303.305 |
| 2.1. | Laut | 124.850 | 743.370 | 7.414.859 | 10.633.054 | 1.285.305 |
| 2.2. | Darat | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Udara | 39.077 | 71.489 | 90.895 | 53.617 | 18.233 |
| 3 | Panjang jalan dalam wilayah kabupaten (km) | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 |
| 3.1. | Jalan Negara | 105,32 | 105,32 | 105,32 | 105,32 | 105,32 |
| 3.2. | Jalan Provinsi | 645,50 | 645,50 | 645,50 | 645,50 | 645,50 |
| 3.3. | Jalan Kabupaten | 934,80 | 934,80 | 934,80 | 934,80 | 934,80 |
| 4 | Kondisi jalan dalam wilayah kabupaten (km) | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 |
| 4.1. | Baik | 169,33 | 169,32 | 199,32 | 225,16 | 234,99 |
| 4.2. | Rusak Ringan | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 162,42 | 205,89 |
| 4.3. | Rusak Berat | 673,17 | 673,21 | 643,21 | 642,59 | 597,14 |
| 4.4. | Belum Terbangun | 754,72 | 754,69 | 754,69 | 655,44 | 647,60 |
| 5 | Kondisi jalan berdasarkan jenis perkerasannya dalam wilayah kabupaten (km) | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 | 958,80 |
| 5.1. | Hotmix | 59,65 | 62,75 | 62,75 | 74,55 | 82,76 |
| 5.2. | Aspal | 91,35 | 100,88 | 100,88 | 100,78 | 103,33 |
| 5.3. | Sirtu | 172,38 | 145,8 | 145,8 | 213,51 | 212,43 |
| 5.4. | Tanah | 635,42 | 649,37 | 649,37 | 569,94 | 560,28 |
| 6 | Jalan belum terbangun (km) | 674,26 | 674,23 | 674,23 | 584,97 | 547,14 |
| 6.1. | Jalan Negara | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Jalan Provinsi | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Jalan Kabupaten | 674,26 | 674,23 | 674,23 | 584,97 | 547,14 |

Sumber : 1). Dinas Perhubungan, 2) Dinas PU dan Kimpraswil, 3) BPS Kab. Halmahera Selatan, 2020,2021



Sarana Perekonomian

Sebagai pendukung kegiatan perekonomian, keberadaan hotel dan restoran merupakan sarana perekonomian yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Jumlah penginapan di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2020 sebanyak 41 unit, yang terdiri dari hotel sebanyak 4 unit dan losmen/penginapan lainnya sebanyak 37 unit.

Jumlah restoran di Kabupaten Halmahera Selatan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2016, jumlah restoran/rumah makan sebesar 50 unit dan pada tahun 2020, menjadi 68 unit, perhatikan data berikut ini:

Tabel 2.83
Ketersediaan Hotel/Penginapan dan Restoran Tahun 2016-2020
Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Hotel berbintang | - | - | - | - | - |
| 2 | Hotel Non Bintang / Melati | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Penginapan lainnya | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| | Jumlah | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 |
| 4 | Restoran / Rumah Makan | 50 | 50 | 58 | 64 | 68 |

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Halmahera Selatan, 2021

Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan. Data rasio elektrifikasi berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara Cabang Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan meningkat dari tahun ketahun dimana pada tahun 2016 Rasio Eletrifikasi tercatat 100 % dan yang terdiri dari cakupan layanan PLN Tahun 2020 sebesar 67,32 % dan Listrik Mandiri sebesar 32,68%.

Tabel 2.84
Indikator Kelistrikan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Indikator | Capaian Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rasio Elektrifikasi (%) | 39,52 | 44,91 | 45,48 | 45,20 | 100 |
| 2 | Cakupan Layanan Listrik PLN (%) | 39,52 | 44,91 | 45,48 | 45,20 | 67,32 |
| 3 | Cakupan Layanan Listrik Mandiri (%) | 28,20 | 30,10 | 31,32 | 29,64 | 32,68 |

Sumber : Data dari PLN Cabang Bacan, 2021



2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan dan Ketertiban

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan Daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Tabel 2.85
Indikator Keamanan, Ketertiban dan Iklim Investasi Tahun 2016-2020
Kabupaten Halmahera Selatan

| NO | Indikator | Tahun | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Angka Kriminalitas | 137 | 151 | 174 | 161 | 131 |
| 2 | Jumlah demo (kali) | 30 | 35 | 26 | 24 | 19 |
| 3 | Lama proses perijinan | 3-7 hari |
| 4 | Jumlah jenis pajak / retribusi daerah | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Jumlah Perda yang mendukung iklim Usaha/Investasi | -- | -- | -- | 2 Perda | 2 Perda |

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, BPS Kabupaten Halmahera Selatan,2021

Perizinan dan Penanaman Modal

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Penyelenggaran Perizinan yang diselenggarakan oleh DPM-PTSP dan Perangkat Daerah lain, meliputi:

Dinas Pendidikan dari : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, (2). Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia dini (PAUAD), dan (3). Izin Lembaga Kursus dan Peiatihan



Dinas Kesehatan, terdiri dari: 1) Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; (2) Izin Apotek (3). Izin Toko Obat (4). Izin Praktek Dokter Umum / Spesialis (5). Izin Praktek Perawat / Bidan. (6). Izin Praktek Pengobatan Tradisional (7). Izin Klinik Kesehatan / Balai Pengobatan. (8). Izin Optikal. (9). Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terdiri dari : 1) Izin rnendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) , 3. Izin Reklame

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari : (1). Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan/ Pemukiman (2). Izin Lingkungan (3). Izin Tempat Penyimpan sementara Limbah B3

Dinas Perhubungan, terdiri dari: 1) Izin Trayek (2). izin Usaha angkutan (3). Izin Pembangunan Pelabuhan/ Dermaga Khusus (4). Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor 5. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : (1). Izin Usaha Budidaya Perikanan (2). Bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP)

Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Terdiri dari : 1. Izin Perpanjangan Memperkerjakan tenaga Kerja Asing (IMTA).

Dians Kebudayaan dan Pariwisata Terdiri dari : 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) : (A). Izin Hotel Melati.(B). Izin Perhotelan, (C). Izin Tempat Penginapan, (D). Izin usaha Rumah makan, (E). Izin Usaha Kantin, (F). Izin Usaha Restoran, (G). Izin Usaha café, (H). Izin Usaha Salon Kecantikan (I). Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (J). Izin Daya Tarik Wisata (K). Izin Kawasan Wisata (L). Izin Jasa Transportasi Wisata (M). Izin Jasa Perjalanan Wisata (N). Izin Jasa Makanan dan Minuman Wisata (O). Izin Penyediaan Akomodasi Wisata . (P).Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Dinas Penanaman Modal Terdiri dari : (1). Izin Prinsip Penanaman Modal (2). Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal (3). Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal (4). Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Pananaman Modal (5). Izin Lokasi

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terdiri dari : (1). Izin Usaha Pertanian (2). Izin Usaha Perkebunan . (3). Izin Usaha Peternakan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Terdiri Dari : (1). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (2). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (3). Izin Usaha Industri (IUI) (4). Tanda DaftarIndustri (TDI) (5). Tanda Daftar Gudang (TDG) (6). Izin Usaha Toko Modern (7). Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan (8). Izin Usaha Simpan Pinjam (9). Surat Izin Tempa t Usaha (SITU)



Dinas Komunikasi dan Informatika Terdiri dari : Izin Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tabel 2.86
Rekapitulasi Perizinan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| NO | Jenis Izin | Tahun | | | | |
|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | IMB | 68 | 107 | 125 | 668 | 167 |
| 2 | SITU | - | 580 | 617 | 575 | 566 |
| 3 | SIUP | - | 58 | 617 | 537 | 449 |
| 4 | TDP | - | 570 | 617 | 574 | 469 |
| 5 | HO | - | 596 | - | - | - |
| 6 | TDUP | - | - | - | 5 | 14 |
| 7 | TDI | - | - | - | 6 | 9 |
| 8 | TDG | - | - | - | 1 | 16 |
| 9 | FISKAL | - | - | - | 96 | 153 |
| 10 | IZIN LOKASI | - | - | - | - | 7 |
| 11 | NIB | - | - | - | - | 305 |
| 12 | IZIN LINGKUNGAN | - | - | - | 6 | 28 |
| 13 | IUI | - | - | - | - | 8 |

Sumber : Dinas PM dan PTSP, 2021

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar-daerah maupun lintas sektor.

Adanya iklim investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Oleh karena itu, memperbaiki iklim investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan suatu tugas yang penting bagi pemerintah daerah mengingat investasi pemerintah hanya merupakan bagian kecil dari total investasi. Dengan adanya investasi, akan didapatkan pertambahan output ataupun pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Kabupaten Halmahera Selatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 dilihat dari jumlah unit usahanya terus menunjukkan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Halmahera Selatan cenderung kondusif.



Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Halmahera Selatan sampai dengan tahun 2020 meliputi investasi PMA sebanyak 7 unit usaha dengan nilai investasi 14 Triliun Rupiah dan investasi PMDN 593 unit dengan nilai investasi 1,8 Triliun rupiah. Adapun rasio daya serap tenaga kerja masih sangat kecil. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, serta perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Tabel 2.87
Data Penanaman Modal
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------------|----------|----------|--------|-------|-------|
| 1 | Jumlah Investor | 4 | 744 | 457 | 581 | 593 |
| | - PMA | 4 | 3 | - | - | - |
| | - PMDN | - | 741 | 457 | 581 | 593 |
| 2 | Nilai Investasi (Miliar Rp) | 6.500,91 | 9.372,43 | 159,25 | 62,94 | 88,66 |
| | - PMA | 5.034,63 | 9.292,81 | - | - | - |
| | - PMDN | 1.466,28 | 79,62 | 159,25 | 62,94 | 88,66 |
| 3 | Daya Serap Tenaga Kerja | | | | | |
| | - PMA | - | - | - | 1.102 | 1.377 |
| | - PMDN | - | - | - | 6.312 | 6.334 |

Sumber: Dinas PM-PTSP Kab Halmahera Selatan, 2021

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari *kualitas tenaga kerja* dan *tingkat ketergantungan penduduk*.

Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas. Tingginya kualitas sumberdaya manusia secara langsung mendorong Indeks Pembangunan Manusia dan tersedianya tenaga kerja siap pakai sesuai dengan tingkat dan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi.



Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.

Dari segi pendidikan, pada tahun 2020, penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Halmahera Selatan masih didominasi tingkat pendidikan SD/sederajat dengan persentase sekitar 43,36 persen. Hal ini dikarenakan penduduk yang tidak bersekolah didominasi oleh penduduk usia lanjut, sehingga saat mereka meninggal berarti mengurangi angka penyebutnya. Penduduk berpendidikan diploma dan sarjana mengalami kenaikan yang signifikan. Namun yang masih menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan adalah angka pengangguran. Meskipun angkanya turun dari tahun sebelumnya, namun secara jumlah masih besar, terutama untuk penduduk berpendidikan sarjana.

Tabel 2.88
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020

| No | Pendidikan Tertinggi | Angkatan Kerja | | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase |
|----|------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | Bekerja | Pengangguran | | | |
| 1 | Tamat SD/Sederajat | 47.452 | 747 | 21.473 | 69.672 | 43,36 |
| 2 | Tamat SMP/Sederajat | 22.860 | 968 | 12.381 | 36.209 | 22.53 |
| 3 | Tamat SMA/Sederajat | 23.529 | 2.315 | 15.328 | 41.172 | 25,62 |
| 4 | Tamat Perguruan Tinggi | 10.999 | 793 | 1.825 | 13.617 | 8,47 |
| | Jumlah | 104.840 | 4.823 | 51.007 | 160.670 | 99,98 |

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2020

Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 mencapai angka 69,38%, ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 69 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas). Demikian juga di tahun 2020 rasio ketergantungan mencapai angka 64,92% berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 64 usia belum produktif dan usia tidak produktif, ini berarti angka beban tanggungan penduduk mengalami penurunan dibanding tahun 2016.



Tabel 2.89
Rasio Ketergantungan Penduduk
Kabupaten Halmahera Selatan

| Tahun | Prosentase Kelompok Umur | | | Angka Beban Ketergantungan |
|-------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| | 0-14 Tahun | 15-64 Tahun | 65+ Tahun | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 38,01 | 59,04 | 2,95 | 69,38 |
| 2017 | 38,01 | 59,03 | 2,95 | 66,86 |
| 2018 | 32,49 | 62,88 | 4,62 | 66,26 |
| 2019 | 18,68 | 76,42 | 4,19 | 65,62 |
| 2020 | 20,11 | 75,29 | 4,35 | 64,92 |

Sumber : *Halmahera Selatan Dalam Angka (BPS), 2017-2021*



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. **Fungsi pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. **Fungsi alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. **Fungsi distribusi**, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. **Fungsi stabilisasi**, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan anggaran yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan



3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Bagian ini membahas kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro, serta memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dengan sistematis dan terpola.

Tujuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara lebih baik. Salah satu aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020

Otonomi daerah berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Selatan meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan pada tabel 3.1. Pada periode 2016-2020, total pendapatan daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,21 % pertahun, dari sebesar Rp. 1,17 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1,48 trilyun pada tahun 2020. Sedangkan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 6,81 % pertahun, dari sebesar Rp. 0,95 trilyun pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 1,20 trilyun pada tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata belanja yang lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata pendapatan menunjukkan kemampuan mendanai mengalami penurunan. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya SiLPA yang relatif besar karena realisasi pendapatan melebihi target, dan realisasi belanja dibawah target.



Tabel 3.1
Realisasi APBD Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun (Rp Juta) | | | | |
|----|------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.170.939,15 | 1.282.415,45 | 1.333.621,05 | 1.507.208,54 | 1.482.042,27 |
| 2 | BELANJA | 949.196,89 | 1.003.371,86 | 1.023.518,49 | 1.295.961,41 | 1.204.183,08 |
| 3 | TRANSFER | 199.323,63 | 243.518,84 | 280.161,89 | 280.409,02 | 276.169,07 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 22.418,63 | 35.524,75 | 29.940,67 | (69.161,89) | 1.690,12 |
| 4 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 2.795,19 | 28.994,32 | 136.987,80 | 73.755,81 |
| 5 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 19.623,44 | 31.451,27 | 34.080,59 | 11.299,57 | 41.641,60 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (19.623,44) | (28.656,08) | (5.086,27) | 125.688,23 | 32.114,21 |
| | SILPA TAHUN BERKENAN | 2.795,19 | 6.868,67 | 24.854,40 | 56.526,34 | 33.804,33 |

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2020

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagaimana table 3.2. berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun (Rp Juta) | | | | | Rerata Pertumbuhan (%) |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | PENDAPATAN | | | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 25.932,46 | 28.876,51 | 31.501,59 | 58.523,67 | 75.395,57 | 33,76 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 8.870,79 | 8.904,93 | 8.647,88 | 29.539,55 | 41.686,10 | 70,05 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 2.155,47 | 6.813,76 | 2.398,82 | 5.759,93 | 4.139,23 | 65,82 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.278,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,73 | - |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 13.627,84 | 13.157,82 | 20.454,89 | 23.224,19 | 28.352,51 | 21,91 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 1.145.006,69 | 1.253.538,94 | 1.264.598,08 | 1.406.133,18 | 1.354.110,21 | 4,46 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak | 23.654,64 | 14.449,88 | 11.397,19 | 9.744,80 | 20.080,93 | 7,88 |
| 1.2.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) | 39.627,00 | 29.052,26 | 42.695,81 | 66.841,27 | 76.628,90 | 22,87 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 692.872,75 | 682.940,15 | 751.125,98 | 766.195,54 | 700.871,57 | 0,51 |
| 1.2.4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 175.472,98 | 231.633,50 | 242.796,54 | 347.162,00 | 328.826,09 | 18,63 |
| 1.2.5 | Dana Penyesuaian | 202.953,48 | 280.481,34 | 200.185,11 | 194.264,69 | 208.365,71 | 3,47 |
| 1.2.6 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.7 | Dana Transfer Pemda Lainnya | 10.425,84 | 14.981,81 | 16.397,45 | 21.924,88 | 19.337,01 | 18,76 |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 37.521,38 | 42.551,69 | 52.536,49 | 18,44 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 37.521,38 | 36.786,18 | 52.536,49 | 20,43 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.765,51 | 0,00 | - |
| | TOTAL PENDAPATAN | 1.170.939,15 | 1.282.415,45 | 1.333.621,05 | 1.507.208,54 | 1.482.042,27 | 6,21 |

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2020



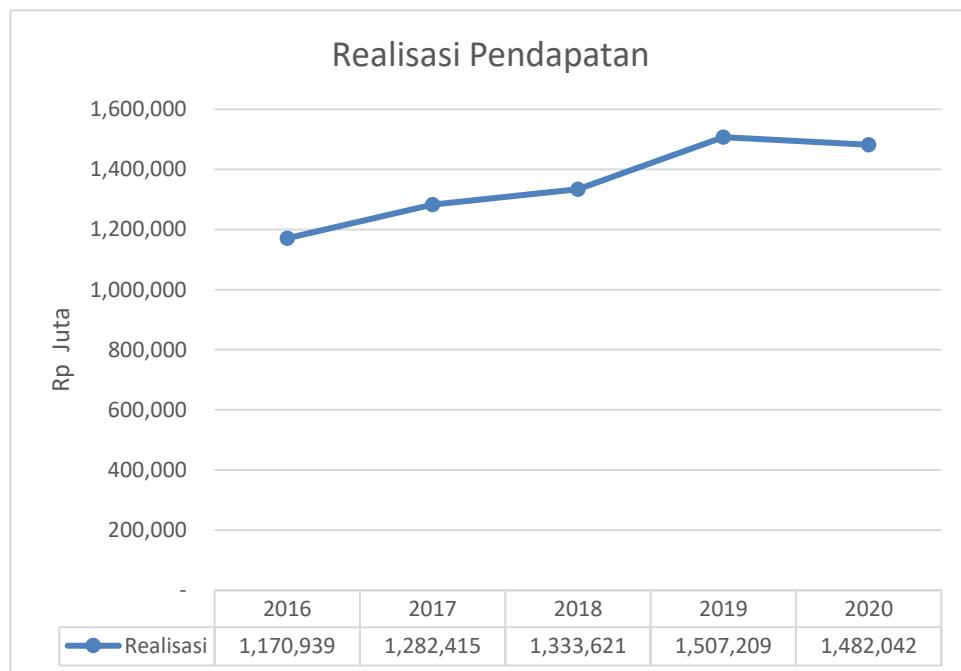
Berdasarkan data Tabel 3.2. menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dari Rp 25.932.460.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp 75.395.570.000,- pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 33,76 persen.

Demikian pula Penerimaan daerah dari Dana Transfer setiap tahun mengalami peningkatan, dari Rp 1.145.006.690.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp 1.354.110.210.000,- pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 4,46 persen

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah jumlahnya juga meningkat dari tahun ketahun dari Rp 37.521.380.000,- pada tahun 2018, menjadi Rp 52.536.490.000,- pada tahun 2020. Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan SD dan SMP.

Pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 1.170.939.150.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp 1.482.042.270.000,- pada tahun 2020 atau rata-rata pertumbuhan sebesar 6,21% per tahun, perhatikan gambar 3.1. berikut ini.

Gambar 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber: DPKAD Kab Halmahera Selatan (LKPD 2016-2020)

Dana Transfer memberikan sumbangan terbesar terhadap pendapatan daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 95,00 persen, yang berarti ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. Sedang kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya rata-rata sebesar 3,16 persen.



Tabel 3.3
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Total APBD
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020

| Uraian | Pertumbuhan (%) | | | | | Kontribusi Terhadap Pendapatan Total (%) | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Rata-rata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
| TOTAL PENDAPATAN | 9,52 | 3,99 | 13,02 | (1,67) | 6,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pendapatan Asli Daerah | 11,35 | 9,09 | 85,78 | 28,83 | 33,76 | 2,21 | 2,25 | 2,36 | 3,88 | 5,09 | 3,16 |
| - Pajak Daerah | 0,38 | (2,89) | 241,58 | 41,12 | 70,05 | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 1,96 | 2,81 | 1,37 |
| - Retribusi Daerah | 216,11 | (64,79) | 140,12 | (28,14) | 65,82 | 0,18 | 0,53 | 0,18 | 0,38 | 0,28 | 0,31 |
| - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lain-lain PAD yang Sah | (3,45) | 55,46 | 13,54 | 22,08 | 21,91 | 1,16 | 1,03 | 1,53 | 1,54 | 1,91 | 1,44 |
| Dana Perimbangan | 9,48 | 0,88 | 11,19 | (3,70) | 4,46 | 97,79 | 97,75 | 94,82 | 93,29 | 91,37 | 95,00 |
| - Bagi Hasil Pajak | (38,91) | (21,13) | (14,50) | 106,07 | 7,88 | 2,02 | 1,13 | 0,85 | 0,65 | 1,35 | 1,20 |
| - Bagi Hasil Bukan Pajak | (26,69) | 46,96 | 56,55 | 14,64 | 22,87 | 3,38 | 2,27 | 3,20 | 4,43 | 5,17 | 3,69 |
| - Dana Alokasi Umum | (1,43) | 9,98 | 2,01 | (8,53) | 0,51 | 59,17 | 53,25 | 56,32 | 50,84 | 47,29 | 53,38 |
| - Dana Alokasi Khusus | 32,01 | 4,82 | 42,98 | (5,28) | 18,63 | 14,99 | 18,06 | 18,21 | 23,03 | 22,19 | 19,29 |
| - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 38,20 | (28,63) | (2,96) | 7,26 | 3,47 | 17,33 | 21,87 | 15,01 | 12,89 | 14,06 | 16,23 |
| - Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 43,70 | 9,45 | 33,71 | (11,80) | 18,76 | 0,89 | 1,17 | 1,23 | 1,45 | 1,30 | 1,21 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | - | - | (1,96) | 23,47 | 18,44 | - | - | 2,81 | 2,82 | 3,54 | 1,84 |
| - Pendapatan Hibah | - | - | (1,96) | 42,82 | 20,43 | - | - | 2,81 | 2,44 | 3,54 | 1,76 |
| - Dana Darurat | - | - | - | (100) | (100) | - | - | - | 0,38 | - | 0,08 |

Sumber: Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2020



Jika memperhatikan tabel 3.3 di atas, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun meningkat sebesar 6,21 persen, demikian pula PAD mengalami rata-rata pertumbuhan selama lima tahun sebesar 33,76 persen, akan tetapi kontribusi PAD terhadap Total APBD masih sangat kecil yakni rata sebesar 3,16 persen. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama, bahwa kedepan sumber-sumber PAD harus lebih diperluas.

3.1.1.2 Kesehatan Keuangan APBD dari sisi Pendapatan

Salah satu hal yang sering dialami dalam pengelolaan keuangan publik adalah kendala penganggaran (*budget constraint*), yang tercermin dari banyaknya kebutuhan yang dihadapkan dengan keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, prioritas belanja dan perencanaan yang baik dapat menjadi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran. Terkait dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan analisis tentang kesehatan keuangan APBD yang mampu memberikan informasi yang berguna dalam memotret kondisi keuangan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Disisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: rasio pajak (*tax ratio*), ruang fiskal (*fiscal space*), serta rasio kemandirian daerah. Pada belanja, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja per jumlah penduduk, serta rasio belanja modal per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur atau belanja pegawai.

Rasio pajak mencerminkan hubungan pajak daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah. Rasio pajak kabupaten Halmahera Selatan masih sangat rendah dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk itu pengelolaan penerimaan pajak daerah perlu terus dioptimalkan agar penerimaan pajak daerah dapat meningkat secara signifikan. Tabel 3.4. berikut ini memperlihatkan gambaran rasio pajak Kabupaten Halmahera Selatan.

Sementara Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Rasio kemandirian Kabupaten Halmahera Selatan masih harus terus ditingkatkan hingga mencapai rata-rata nasional. Perhatikan rasio kemandirian Kabupaten Halmahera Selatan pada table 3.4 berikut:



Tabel 3.4
Rasio Pajak Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|----|----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rasio Pajak (Tax Ratio) Daerah | 0,76 | 0,69 | 0,65 | 1,96 | 2,81 |
| 2 | Rasio PAD per Total Pendapatan | 2,21 | 2,25 | 2,36 | 3,88 | 5,09 |

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2021

Sedang Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Tinggi rendah angka tersebut dapat disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu: tinggi-rendahnya pendapatan umum, tinggi-rendahnya pendapatan yang bersifat terikat, tinggi-rendahnya belanja wajib, serta gabungan beberapa faktor di atas. Berdasarkan rilis dari Kementerian Keuangan RI bahwa Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) Kabupaten Halmahera Selatan selama 10 tahun terakhir dalam kategori baik, dan hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Halmahera Selatan membiayai pembangunannya semakin baik, perhatikan table 3.5. beikur ini.

Tabel 3.5
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2011-2020

| TAHUN | Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) | Kategori | PMK NO |
|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2011 | 0,7330 | Sedang | 66/PMK.07/2011 |
| 2012 | 0,9074 | Sedang | 226/PMK.07/2012 |
| 2013 | 0,9074 | Sedang | 226/PMK.07/2012 |
| 2014 | 1,2317 | Tinggi | 54/PMK.07/2014 |
| 2015 | 1,0700 | Tinggi | 33/PMK.07/2015 |
| 2016 | 1,0100 | Tinggi | 37/PMK.07/2016 |
| 2017 | 0,6800 | Rendah | 119/PMK.07/2017 |
| 2018 | 0,771 | Sedang | 107/PMK.07/2018 |
| 2019 | 0,936 | Sedang | 126/PMK.07/2019 |
| 2020 | 0,895 | Sedang | 120/PMK.07/2020 |

Sumber : Kementerian Keuangan RI (IRFD), 2011-2020



3.1.1.3 Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran Kinerja (*Performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, serta berorientasi pada kepentingan public. Perkembangan belanja daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagaimana tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun (Rp Juta) | | | | | Rerata Pertumbuhan |
|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2 | BELANJA | | | | | | |
| 2.1 | Belanja Operasi | 613.050,55 | 684.364,04 | 713.958,00 | 811.647,73 | 836.134,57 | 8,16 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 310.928,39 | 305.099,47 | 330.535,77 | 341.471,05 | 331.086,04 | 1,68 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 255.990,51 | 351.562,83 | 361.299,32 | 447.243,54 | 415.027,28 | 14,17 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | 4.895,52 | 4.233,74 | 2.481,01 | 4.625,44 | 4.496,65 | 7,18 |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | 4.334,96 | 1.809,20 | 429,20 | 117,60 | 0,00 | (76,79) |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | 29.962,17 | 16.780,30 | 14.025,70 | 14.690,10 | 83.525,10 | 103,23 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 6.939,00 | 4.878,50 | 5.187,00 | 3.500,00 | 1.999,50 | (24,69) |
| 2.2 | Belanja Modal | 335.550,84 | 317.603,83 | 317.603,83 | 309.085,49 | 330.034,17 | 4,03 |
| 2.2.1 | Tanah | 12.120,00 | 12.577,35 | 12.577,35 | 9.476,76 | 1.269,86 | (30,26) |
| 2.2.2 | Peralatan dan Mesin | 65.432,00 | 62.040,01 | 62.040,01 | 38.409,35 | 42.213,15 | (5,99) |
| 2.2.3 | Bangunan | 78.450,00 | 82.214,35 | 82.214,35 | 101.624,51 | 143.178,29 | 22,15 |
| 2.2.4 | Jalan dan Jaringan | 177.203,84 | 157.078,79 | 157.078,79 | 156.316,45 | 142.829,34 | (0,83) |
| 2.2.5 | Aset Tetap Lainnya | 2.345,00 | 3.693,33 | 3.693,33 | 3.258,42 | 543,53 | (6,38) |
| 2.3 | Belanja Tak Terduga | 595,50 | 1.404,00 | 1.404,00 | 475,00 | 38.014,34 | 417,91 |
| | TOTAL BELANJA | 949.196,89 | 1.003.371,87 | 1.023.518,49 | 1.295.961,41 | 1.204.183,08 | 6,81 |
| 3 | TRANSFER | | | | | | |
| 3.1 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,79 | - |
| 3.2 | Transfer Bantuan Keuangan | 199.323,63 | 243.518,84 | 280.161,89 | 280.409,02 | 274.517,28 | 8,80 |
| | TOTAL TRANSFER | 199.323,63 | 243.518,84 | 280.161,89 | 280.409,02 | 276.169,07 | 8,95 |
| | JUMLAH BELANJA + TRANSFER | 1.148.520,52 | 1.246.890,71 | 1.303.680,38 | 1.576.370,43 | 1.480.352,15 | 6,99 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 22.418,63 | 35.524,75 | 29.940,67 | (69.161,89) | 1.690,12 | (97,67) |

Sumber: *Laporan Keuangan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2020*

Dari data yang ada terlihat bahwa realisasi belanja dari tahun ketahun meningkat rata-rata 14,73% walaupun pencapaiannya selalu dibawah target, perhatikan table 3.7. berikut ini.



Tabel 3.7
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah dan Kontribusi Terhadap Belanja Total APBD
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020

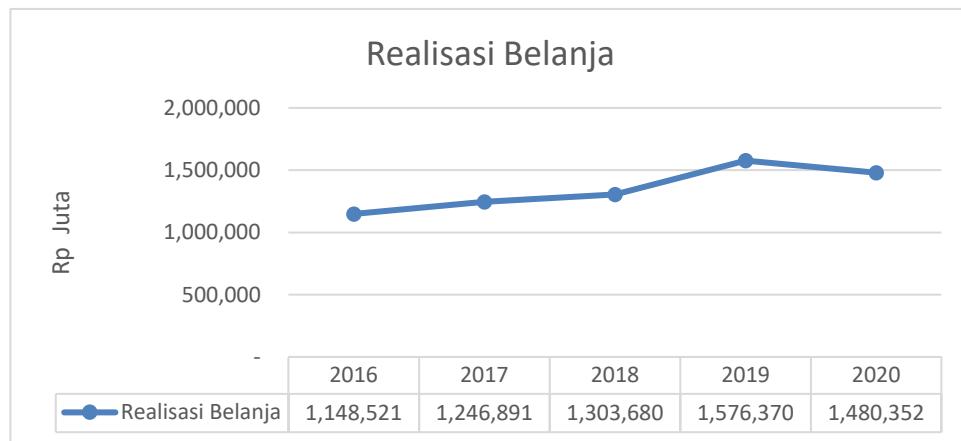
| No | Uraian | Pertumbuhan (%) | | | | | Kontribusi Terhadap Belanja Total (%) | | | | |
|-------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | Rata-rata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2 | BELANJA | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Belanja Operasi | 11,63 | 4,32 | 13,68 | 3,02 | 8,16 | 53,38 | 54,89 | 54,76 | 51,49 | 56,48 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | (1,87) | 8,34 | 3,31 | (3,04) | 1,68 | 27,07 | 24,47 | 25,35 | 21,66 | 22,37 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 37,33 | 2,77 | 23,79 | (7,20) | 14,17 | 22,29 | 28,20 | 27,71 | 28,27 | 28,04 |
| 2.1.3 | Belanja Bunga | (13,52) | (41,40) | 86,43 | (2,78) | 7,18 | 0,43 | 0,34 | 0,19 | 0,20 | 0,30 |
| 2.1.4 | Belanja Subsidi | (58,26) | (76,28) | (72,60) | (100,00) | (76,79) | 2,17 | 0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 2.1.5 | Belanja Hibah | (44,00) | (16,42) | 4,74 | 468,58 | 103,23 | 2,61 | 1,35 | 1,08 | 0,93 | 5,64 |
| 2.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | (29,69) | 6,32 | (32,52) | (42,87) | (24,69) | 0,60 | 0,39 | 0,40 | 0,22 | 0,14 |
| 2.2 | Belanja Modal | (5,35) | (2,68) | 55,47 | (31,32) | 4,03 | 29,22 | 25,47 | 23,71 | 30,48 | 22,29 |
| 2.2.1 | Tanah | 3,77 | (24,65) | (16,12) | (84,03) | (30,26) | 1,06 | 1,01 | 0,73 | 0,50 | 0,09 |
| 2.2.2 | Peralatan dan Mesin | (5,18) | (38,09) | 41,80 | (22,49) | (5,99) | 5,70 | 4,98 | 2,95 | 3,46 | 2,85 |
| 2.2.3 | Bangunan | 4,80 | 23,61 | 83,38 | (23,17) | 22,15 | 6,83 | 6,59 | 7,80 | 11,82 | 9,67 |
| 2.2.4 | Jalan dan Jaringan | (11,36) | (0,49) | 45,89 | (37,37) | (0,83) | 15,43 | 12,60 | 11,99 | 14,47 | 9,65 |
| 2.2.5 | Aset Tetap Lainnya | 57,50 | (11,78) | 14,14 | (85,39) | (6,38) | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,04 |
| 2.3 | Belanja Tak Terduga | 135,77 | (66,17) | 693,68 | 908,34 | 417,91 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,24 | 2,57 |
| | TOTAL BELANJA | 5,71 | 2,01 | 26,62 | (7,08) | 6,81 | 82,65 | 80,47 | 78,51 | 82,21 | 81,34 |
| 3 | TRANSFER | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | 0,02 |
| 3.2 | Transfer Bantuan Keuangan | 22,17 | 15,05 | 0,09 | (2,10) | 8,80 | 17,35 | 19,53 | 21,49 | 17,79 | 18,54 |
| | TOTAL TRANSFER | 22,17 | 15,05 | 0,09 | (2,10) | 8,80 | 17,35 | 19,53 | 21,49 | 17,79 | 18,66 |
| | JUMLAH BELANJA + TRANSFER | 8,56 | 4,55 | 20,92 | (6,09) | 6,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2020



Belanja daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 1.148.520.520.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp 1.480.352.150.000,- pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan sebesar 6,99 persen per tahun, perhatikan gambar 3.3. berikut ini.

Gambar 3.3
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016 - 2020



Sumber: DPKAD Kab Halmahera Selatan (LKPD 2016-2020)

Sementara proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja rata-rata sebesar 45,68%, dan belanja langsung rata-rata sebesar 54,32%, perhatikan gambar 3.4. berikut ini.

3.1.1.4 Kesehatan Keuangan APBD dari sisi Belanja

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesehatan keuangan APBD juga dapat dilihat dari sisi belanja. Pada belanja, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja per jumlah penduduk, serta rasio belanja modal per jumlah penduduk. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur atau belanja pegawai. Kondisi kesehatan keuangan APBD Kabupaten Halmahera Selatan dilihat dari sisi belanja sebagaimana disajikan pada table 3.8 dibawah ini.



Tabel 3.8.
Indikator Belanja APBD
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Rata-rata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (%) | 53,38 | 54,89 | 54,76 | 51,49 | 56,48 | 54,20 |
| 2 | Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja (%) | 22,29 | 28,20 | 27,71 | 28,27 | 28,04 | 26,92 |
| 3 | Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja (%) | 27,07 | 24,47 | 25,35 | 21,66 | 22,37 | 24,18 |
| 4 | Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (%) | 29,22 | 25,47 | 23,71 | 30,48 | 22,29 | 26,23 |
| 5 | Rasio Belanja per jumlah penduduk (Rp) | 5.139.714 | 5.486.143 | 5.698.626 | 6.272.887 | 5.780.961 | 5.675.666 |
| 6 | Rasio Belanja Modal per jumlah penduduk (Rp) | 1.501.614 | 1.397.412 | 1.351.069 | 1.912.238 | 1.288.825 | 1.490.232 |

Sumber: Bappelitbangda (data diolah), 2021

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa rasio belanja pegawai terhadap total belanja relative tetap pada kisaran angka 24,18% sedang rasio belanja modal terhadap total belanja juga cenderung tetap, jika pada tahun 2016 rasio belanja modal sebesar 29,22% maka pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 22,29%. Faktor lain yang menyebabkan stabilnya rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah diberlakukannya moratorium penerimaan PNS sejak tahun 2014 sampai tahun 2018, sementara rasio belanja modal turun pada tahun 2020 karena adanya kebijakan refocusing anggaran ke penanganan Covid-19.

3.1.1.5 Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan Pasal 17 ayat (3) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 83 ayat (2) berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD serta Jumlah Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit



anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 % dari produk domestik regional brutto tahun bersangkutan. Pinjaman daerah direncanakan untuk memenuhi belanja yang merupakan prioritas.

Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan. Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2020 seperti terlihat dalam tabel 3.9. berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun (Rp Juta) | | | | |
|----|---|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | SURPLUS / (DEFISIT) | 22.418,63 | 35.524,74 | 29.940,67 | (69.161,89) | 1.690,12 |
| B | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | - | 2.795,19 | 28.994,32 | 136.987,80 | 73.755,81 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | - | 2.795,19 | 6.868,67 | 26.342,92 | 56.526,34 |
| 2 | Penerimaan Pinjaman Daerah | - | - | 22.125,65 | 110.644,88 | 17.229,47 |
| C | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 19.623,44 | 31.451,27 | 34.080,59 | 11.299,57 | 41.641,60 |
| 1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 3.700,00 | 10.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 |
| 2 | Pembayaran Pokok Utang | 15.923,44 | 21.251,27 | 28.080,59 | 5.299,57 | 34.141,60 |
| D | PEMBIAYAAN NETTO | (19.623,44) | (28.656,08) | (5.086,27) | 125.688,23 | 32.114,21 |
| E | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 2.795,19 | 6.868,67 | 24.854,40 | 56.526,34 | 33.804,33 |

Sumber: *Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2016-2021*



3.1.2 Neraca Daerah

Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2018-2020 sebagaimana tabel 3.10. berikut:

Tabel 3.10
Neraca Konsolidasi Kabupaten Halmahera Selatan
PER 31 DESEMBER TAHUN 2018 - 2020

| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | ASET | 1.875.288.706.138,11 | 2.000.225.259.551,07 | 2.118.996.240.475,60 | 6,38 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 52.505.436.621,12 | 89.103.734.502,78 | 62.719.665.580,65 | 33,92 |
| 1.1.1 | Kas di BUD | 15.664.969.304,05 | 54.419.119.180,23 | 18.049.171.215,85 | 190,64 |
| 1.1.2 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0 | 263.309.449,69 | 21.061.377,40 | (64,00) |
| 1.1.3 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 130.356.946,00 | 155.600.284,00 | - | 679,89 |
| 1.1.4 | Kas di BLUD | 4.542.030.269,84 | 6.035.609.047,87 | 10.205.728.271,06 | 82,68 |
| 1.1.5 | Kas Lainnya | 8.411.681.715,39 | 1.774.639.616,30 | 7.485.579.788,72 | 137,36 |
| 1.1.6 | Piutang Pendapatan | 13.354.699.138,00 | 18.587.385.761,00 | 19.984.279.114,00 | 7,93 |
| 1.1.7 | Beban Bayar Dimuka | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 9.972.678,00 | (20,02) |
| 1.1.8 | Penyisihan Piutang | (4.746.004.557,16) | (6.561.501.222,31) | (9.168.615.588,38) | 37,94 |
| 1.1.9 | Piutang Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.10 | Paiutang Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.11 | Piutang Dana Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.12 | Piutang Dana Alokasi Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.13 | Piutang Dana Alokasi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.14 | Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.15 | Persediaan | 7.937.497.772,40 | 7.506.027.795,00 | 8.605.770.804,00 | 17,32 |
| 1.2 | INVESTASI JANGKA PANJANG | 48.368.485.615,00 | 47.337.274.400,00 | 49.523.793.813,00 | 0,63 |
| 1.2.1 | Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 | Investasi Permanen | 48.368.485.615,00 | 47.337.274.400,00 | 49.523.793.813,00 | 0,63 |
| 1.3 | ASET TETAP | 1.740.262.374.968,87 | 1.828.695.177.429,17 | 1.973.686.516.620,46 | 7,33 |
| 1.3.1 | Tanah | 187.213.612.976,49 | 197.262.036.829,00 | 198.580.399.708,90 | 7,68 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 419.709.824.250,83 | 472.935.308.859,24 | 527.966.901.559,24 | 11,20 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 550.320.197.872,73 | 670.366.756.183,94 | 959.737.249.361,04 | 25,41 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.054.787.513.467,34 | 1.197.361.801.618,91 | 1.421.024.498.267,97 | 15,63 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 39.284.563.759,12 | 46.193.469.722,12 | 56.834.661.098,12 | 18,54 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 173.134.610.417,36 | 331.056.516.664,66 | 114.321.253.606,83 | 17,22 |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | (684.187.947.775,00) | 1.086.480.712.448,70 | 1.304.778.446.981,64 | 35,74 |



| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1.4 | DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4.1 | Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 34.152.408.933,12 | 35.089.073.219,12 | 32.068.280.694,49 | (21,39) |
| 1.5.1 | Tagihan Piutang Jangka Panjang | 5.580.910.120,65 | 5.864.333.120,65 | 6.614.513.161,56 | 5,96 |
| 1.5.2 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5.3 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5.4 | Aset Tak Berwujud | 287.946.667,00 | 520.799.167,00 | - | (5,64) |
| 1.5.5 | Aset Lain-lain | 28.283.552.145,47 | 28.703.940.931,47 | 25.453.767.532,93 | (24,22) |
| 2 | KEWAJIBAN | 52.270.378.952,62 | 153.818.710.180,36 | 162.899.287.345,74 | 44,76 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 30.144.728.402,62 | 21.048.179.430,36 | 72.627.506.471,74 | 44,85 |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2.406.115.847,81 | 5.279.479.909,36 | 1.449.702.897,42 | 37,69 |
| 2.1.2 | Utang Beban | 2.584.632.288,67 | 422.570.000,00 | 4.276.714.376,00 | 245,41 |
| 2.1.3 | Utang Bunga | - | - | 4.656.005.745,00 | - |
| 2.1.4 | Utang Pajak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.5 | UJP - Utang Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.6 | UJP - Utang Obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.7 | UJP - Utang Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.8 | UJP - Utang Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.9 | UJP - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.10 | Pendapatan Diterima Dimuka | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.11 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 25.149.480.266,14 | 15.346.129.521,00 | 62.245.083.453,32 | 62,61 |
| 2.2 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 22.125.650.550,00 | 132.770.530.750,00 | 90.271.780.874,00 | 156,02 |
| 2.2.1 | Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan | 22.125.650.550,00 | 132.770.530.750,00 | 90.271.780.874,00 | 156,02 |
| 2.2.2 | Utang Dalam Negeri-Obligasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.3 | Utang Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.4 | Utang Pemerintah Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.5 | Utang Pemerintah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.6 | Utang Bunga Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | EKUITAS DANA | 1.823.018.327.185,49 | 1.846.406.549.371,61 | 1.956.096.953.129,86 | 6,89 |
| 3.1 | EKUITAS DANA LANCAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.2 | Cadangan Untuk Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.3 | Cadangan Untuk Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |



| No | Uraian | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | Pertumbuhan (%) |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 3.1.4 | Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.1.5 | Pendapatan yang Ditangguhkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2 | EKUITAS DANA INVESTASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.1 | Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.2 | Diinvestasikan Dalam Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.3 | Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.4 | Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3 | EKUITAS DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3.1 | Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | KEWAJIBAN + EKUITAS DANA | 1.875.288.706.138,11 | 2.000.225.259.551,97 | 2.118.996.240.475,60 | 6,38 |

Sumber: Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Halmahera Selatan, 2018-2020

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Analisa neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas terdiri dari: Rasio Lancar (Current ratio) merupakan rasio asset lancar terhadap kewajiban jangka pendek (semakin tinggi makin bagus), Quick Ratio merupakan rasio asset lancar dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek (semakin tinggi makin bagus), Rasio total hutang terhadap total asset (semakin rendah makin bagus), dan Rasio total hutang terhadap modal/ekuitas dana (semakin rendah semakin baik).

Tabel 3.11
Rasio Likuiditas Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2017-2020

| NO | Uraian | Tahun | | | |
|----|---|-------|--------|--------|-------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Current Ratio | 21,20 | 174,18 | 423,33 | 86,36 |
| 2 | Quick Ratio | 14,38 | 124,09 | 355,01 | 64,15 |
| 3 | Rasio Total Hutang Jangka Pendek terhadap | 8,71 | 1,61 | 1,05 | 3,43 |



| | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | Total Asset | | | | |
| 4 | Rasio Hutang Jangka Pendek terhadap Modal (Ekuitas) | 9,54 | 1,65 | 1,14 | 3,71 |

Sumber: Bappelitbangda dan DPKAD (data diolah), 2021

b. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas terdiri dari rasio kewajiban terhadap total asset (semakin rendah makin baik), dan rasio kewajiban terhadap ekuitas dana (semakin rendah makin baik).

Tabel 3.12
Rasio Solvabilitas Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020

| NO | Uraian | Tahun | | | |
|----|---|-------|------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rasio Kewajiban Jangka Panjang terhadap Asset | 0,00 | 1,18 | 6,64 | 4,26 |
| 2 | Rasio Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas | 0,00 | 1,21 | 7,19 | 4,61 |

Sumber: Bappelitbangda dan DPKAD (data diolah), 2021

3.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

- Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi kabupaten Halmahera Selatan;
- Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan fokus pembiayaan secara proporsional;
- Menjamin ketersediaan pendanaan khususnya untuk membiayai program pembangunan yang memiliki potensi besar bagi penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan, dengan alternatif melakukan pinjaman kepada pihak-pihak lainnya dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan resiko fiscal lainnya;
- Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
- Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;



- f. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran.

3.2.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya.

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Terkait dengan pos pendapatan daerah, dalam lima tahun ke depan perlu diantisipasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah, antara lain menyangkut permasalahan: aparat pengelola keuangan, laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga perbankan serta besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita agar kinerja perekonomian daerah dapat berjalan sesuai dengan target dan skenario yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan maka kebijakan pengelolaan pendapatan daerah antara lain berupa:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
- 3) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman;
- 4) Mengoptimalkan hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya



diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah, tanpa disadari dapat berdampak pada terlupakanya substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal tersebut terjadi apabila satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontra produktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu segenap unsur pemerintah perlu menyadari dan konsisten dalam menjalankan kebijakan terutama terhadap peraturan daerah yang mengatur mengenai fungsi-fungsi kelembagaan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menyadari hal tersebut sehingga kebijakan yang diterapkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah akan tetap memperhatikan aspek pelayanan dan senantiasa menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha, serta memperhatikan kepentingan masyarakat miskin.

b. Perbaikan manajemen

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur.

Berbagai upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki manajemen pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

- Identifikasi sumber-sumber pendapatan meliputi objek pajak, subyek pajak dan wajib pajak, objek retribusi, subyek retribusi dan wajib retribusi, sumber penerimaan bukan pajak, serta potensi pendapatan lainnya yang sah.
- Penataan Administrasi Pendapatan meliputi penetapan wajib pajak dan retribusi, penentuan jumlah pajak dan retribusi, penetapan nomor NPWP Daerah dan NPWRetribusi Daerah serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- Koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah maupun sumber lainnya.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi kebocoran pendapatan, yang disebabkan oleh adanya penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar dan/atau korupsi petugas. Beberapa langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah melakukan audit baik sifatnya rutin maupun insidentil, memperbaiki sistem akuntansi



penerimaan daerah, memberikan penghargaan yang mamadai bagi masyarakat yang taat pajak atau sanksi bagi yang tidak taat pajak, serta meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan daerah.

c. Optimalisasi aset daerah

Peningkatan PAD juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai melalui perbaikan administrasi aset, peningkatan turnover, bekerjasama dengan swasta, dan perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru

Optimalisasi aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilaksanakan melalui sensus aset dan dilakukan update setiap tahun, sedangkan untuk pengelolaan rutinnya telah dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan perundangan terkait aset. Hasil sensus aset dapat diketahui aset yang belum optimal pemanfaatannya sehingga diperlukan kebijakan untuk mendayagunakan aset secara lebih optimal.

d. Peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Penghitungan DAU didasarkan pada celahfiskal dan alokasi dasar. Celahfiskal merupakan kebutuhan fiscal daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiscal daerah dihitung berdasarkan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahanan konstruksi (IKK), indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks PDRB. Sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas pendapatan asli daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan SDA yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar DAU dihitung berdasarkan gaji PNS daerah. Analisis tentang celahfiskal ini tidak merupakan acuan utama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memproyeksikan DAU.

Sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi



pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2021-2026 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan: bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur social dan pelayanan publik, reformasi birokrasi, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditi unggulan rempah (pala dan cengkeh) dan penyegar (kelapa dan kopi) dari hulu sampai hilir serta pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kawasan sekitarnya.

c. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.



Belanja daerah harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektivitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi). Sehingga pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

3.2.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus maka diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

3.3 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara



- optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- c. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada:
- 1) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - 2) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah;
 - 3) Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolaan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum;
 - 4) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial.

3.3.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) akan melanjutkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran untuk belanja aparatur, sehingga trend ke depan komposisinya untuk pelayanan publik semakin bertambah besar. Selain itu untuk belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis akan lebih didorong kepada pengeluaran yang bersifat cost recovery dan menjadi faktor pendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi, sehingga nantinya belanja pelayanan publik yang bernilai ekonomis tidak lagi membebani belanja daerah, tetapi sebaliknya akan menjadikan sebagai pendapatan daerah.

Perhitungan secara teoritis dengan asumsi dasar yang kuat tentang kedua kebijakan diatas yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah dan proyeksi belanja daerah akan sangat strategis di dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026.

Guna mewujudkan Kabupaten Halmahera Selatan yang mandiri dan berdaya saing, sebagai antisipasi kemungkinan terus menurunnya dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, perlu diusahakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap mengusahakan semaksimal mungkin berbagai kebijakan yang akan dilakukan dan tidak membebani masyarakat.

a. Kebijakan belanja operasional

Belanja operasional adalah komponen belanja utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya meliputi gaji pegawai dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan social.



Belanja Gaji

- Penganggaran Gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;

Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/atau jasa kepada perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;

Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya;

b. Belanja Bagi Hasil/ Keuangan Bagi Pemdes (Pajak)

Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada pemerintah desa;

c. Belanja Bantuan Keuangan Bagi Pemerintahan Desa

Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus (sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan desa;

d. Belanja tidak terduga



Penganggaran belanja tidak terdugadi pergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

e. Kebijakan belanja Modal

Kebijakan belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Modal untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Halmahera Selatan.

3.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup deficit anggaran adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah.

Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.4 Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Dalam konteks ini, kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Kerangka pendanaan untuk RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan analisa kinerja pengelolaan keuangan tahun 2016-2020 dan arah pengelolaan keuangan daerah, maka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan lima tahun kedepan (2021-2026) digambarkan dalam table 3.14

Asumsi dalam melakukan prediksi keuangan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:



- a. Accress gaji pegawai per tahun sebesar 2,5%;
- b. Belanja gaji pegawai diasumsikan naik 11% setiap tahun;
- c. Belanja bunga tetap;
- d. Pendapatan Transfer diasumsikan naik 11,50 persen tiap tahun.
- e. PAD diasumsikan naik 11,99 persen per tahun
- f. Belanja Modal diasumsikan setiap tahun naik 10-20 persen

Tabel 3.13
Estimasi Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2026

| No. | Uraian | Proyeksi (Rp) |
|-----|-----------------|--------------------|
| 1 | Pendapatan | 11.387.974.960.000 |
| 2 | Belanja | 11.155.066.740.000 |
| | Surplus/Defisit | 232.908.220.000 |

Sumber: Bappeliitbangda dan DPKAD (data diolah), 2021

Formulasi kegiatan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 11,99 persen dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen pajak daerah.

Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk dana transfer, komponen bagi hasil pajak serta komponen bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan provinsi adalah dua faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh nantinya, dan dengan beroperasinya Pabrik Smelter (Feronikel) di Pulau Obi pada tahun 2017 serta semakin berkembangnya sektor perkebunan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Secara teoritis, pendapatan daerah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang akan terjadi sampai dengan tahun 2026 atau dengan kata lain, bahwa suatu pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah harus benar-benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.



Tabel 3.14
Kerangka Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

| NO | URAIAN | TAHUN (Juta Rp) | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 1.496.089,32 | 100 | 1.558.080,45 | 100 | 1.723.969,13 | 100 | 1.927.562,04 | 100 | 2.181.018,18 | 100 | 2.501.255,84 | 100 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 81.654,76 | 5,46 | 100.552,49 | 6,45 | 142.901,00 | 8,29 | 203.994,28 | 10,58 | 292.445,16 | 13,41 | 420.930,78 | 16,83 |
| 1.1.1 | - Pajak Daerah | 43.576,00 | 2,91 | 56.654,80 | 3,64 | 84.982,20 | 4,93 | 127.473,30 | 6,61 | 191.209,95 | 8,77 | 286.814,93 | 11,47 |
| 1.1.2 | - Retribusi Daerah | 9.731,50 | 0,65 | 10.218,07 | 0,66 | 14.305,30 | 0,83 | 20.027,42 | 1,04 | 28.038,38 | 1,29 | 39.253,74 | 1,57 |
| 1.1.3 | - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1.700,00 | 0,11 | 1.700,00 | 0,11 | 2.040,00 | 0,12 | 2.448,00 | 0,13 | 2.937,60 | 0,13 | 3.525,12 | 0,14 |
| 1.1.4 | - Lain-lain PAD yang sah | 26.647,26 | 1,78 | 31.979,62 | 2,05 | 41.573,51 | 2,41 | 54.045,56 | 2,80 | 70.259,23 | 3,22 | 91.336,99 | 3,65 |
| 1.2 | DANA TRANSFER | 1.372.222,16 | 91,72 | 1.415.315,56 | 90,84 | 1.538.855,73 | 89,26 | 1.681.355,37 | 87,23 | 1.846.360,62 | 84,66 | 2.038.112,66 | 86,87 |
| 1.2.1 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT | 1.353.586,24 | 90,47 | 1.393.747,85 | 89,45 | 1.514.052,86 | 87,82 | 1.652.832,07 | 85,75 | 1.813.558,83 | 83,15 | 2.000.390,60 | 85,42 |
| 1.2.1.1 | - Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH) | 93.232,15 | 6,23 | 111.893,76 | 7,18 | 134.272,51 | 7,79 | 161.127,01 | 8,36 | 193.352,42 | 8,87 | 232.022,90 | 9,28 |
| 1.2.1.2 | - Dana Alokasi Umum (DAU) | 716.679,45 | 47,90 | 738.179,45 | 47,38 | 760.324,83 | 44,10 | 783.134,58 | 40,63 | 806.628,62 | 36,98 | 830.827,47 | 33,22 |
| 1.2.1.3 | - Dana Alokasi Khusus (DAK) | 312.355,04 | 20,88 | 312.355,04 | 20,05 | 374.826,05 | 21,74 | 449.791,26 | 23,33 | 539.749,51 | 24,75 | 647.699,41 | 25,89 |
| 1.2.1.4 | - Dana Insentif Daerah (DID) | 34.877,78 | 2,33 | 34.877,78 | 2,24 | 38.365,56 | 2,23 | 42.202,11 | 2,19 | 46.422,33 | 2,13 | 51.064,56 | 2,04 |
| 1.2.1.5 | - Dana Desa (DD) | 196.441,82 | 13,13 | 196.441,82 | 12,61 | 206.263,91 | 11,96 | 216.577,11 | 11,24 | 227.405,96 | 10,43 | 238.776,26 | 9,55 |
| 1.2.2 | TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 18.635,92 | 1,25 | 21.567,71 | 1,38 | 24.802,87 | 1,44 | 28.523,30 | 1,48 | 32.801,79 | 1,51 | 37.722,06 | 1,43 |
| 1.2.2.1 | - Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 18.635,92 | 1,25 | 21.567,71 | 1,38 | 24.802,87 | 1,44 | 28.523,30 | 1,48 | 32.801,79 | 1,51 | 37.722,06 | 1,43 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 42.212,40 | 2,82 | 42.212,40 | 2,71 | 42.212,40 | 2,45 | 42.212,40 | 2,19 | 42.212,40 | 1,94 | 42.212,40 | 1,69 |
| 1.3.1 | - Hibah | 42.212,40 | 2,82 | 42.212,40 | 2,71 | 42.212,40 | 2,45 | 42.212,40 | 2,19 | 42.212,40 | 1,94 | 42.212,40 | 1,69 |
| 2 | BELANJA DAERAH | 1.484.581,10 | 100 | 1.514.280,45 | 100 | 1.680.169,13 | 100 | 1.883.762,04 | 100 | 2.136.018,18 | 100 | 2.456.255,84 | 100 |
| 2.1 | BELANJA OPERASI | 879.993,70 | 59,28 | 890.707,17 | 58,82 | 1.003.450,29 | 59,72 | 1.140.228,14 | 60,53 | 1.301.262,36 | 60,92 | 1.521.371,04 | 61,94 |
| 2.1.1 | - Belanja Pegawai | 382.139,18 | 25,74 | 382.139,18 | 25,24 | 427.995,88 | 25,47 | 487.915,31 | 25,90 | 561.102,60 | 26,27 | 645.267,99 | 26,27 |
| 2.1.2 | - Belanja Barang dan Jasa | 417.558,36 | 28,13 | 425.862,95 | 28,12 | 482.824,75 | 28,74 | 550.420,22 | 29,22 | 622.983,25 | 29,17 | 741.350,07 | 30,18 |
| 2.1.3 | - Belanja Operasi Lainnya | 80.296,16 | 5,41 | 82.705,04 | 5,46 | 92.629,65 | 5,51 | 101.892,62 | 5,41 | 117.176,51 | 5,49 | 134.752,98 | 5,49 |



| NO | URAIAN | TAHUN (Juta Rp) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| 2.2 | BELANJA MODAL | 313.436,89 | 21,11 | 326.571,26 | 21,57 | 367.476,77 | 21,87 | 420.352,57 | 22,31 | 495.352,24 | 23,19 | 576.161,59 | 23,46 |
| 2.3 | BELANJA TAK TERDUGA | 6.000,00 | 0,40 | 9.000,00 | 0,59 | 12.600,00 | 0,75 | 17.640,00 | 0,94 | 24.696,00 | 1,16 | 34.574,40 | 1,41 |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER DAN BAGI HASIL (PEMDES) | 285.150,51 | 19,21 | 288.002,02 | 19,02 | 296.642,08 | 17,66 | 305.541,34 | 16,22 | 314.707,58 | 14,73 | 324.148,81 | 13,20 |
| | SURPLUS / DEFISIT | 11.508,22 | | 43.800,00 | | 43.800,00 | | 43.800,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 33.804,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.1 | - SILPA Tahun Sebelumnya | 33.804,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2 | - Penerimaan Pinjaman Daerah | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.3 | - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 45.312,56 | | 43.800,00 | | 43.800,000 | | 43.800,000 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| 3.2.1 | - Pembentukan Dana Cadangan | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.2.2 | - Penyertaan Modal (Investasi) Pemda | 6.500,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 3.2.3 | - Pembayaran Pokok Utang | 38.812,56 | | 38.800,00 | | 38.800,00 | | 38.800,00 | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 3.2.4 | - Pemberian Pinjaman Daerah | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.2.5 | - Fasilitasi Pembayaran Subsidi | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | (11.508,22) | | (43.800,00) | | (43.800,00) | | (43.800,00) | | (45.000,00) | | (45.000,00) | |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Sumber: Bappelitbangda dan DPKAD (data diolah), 2021



3.4.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Selatan periode 2021-2026 tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.1.5.

Tabel 3.1.5
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2021-2026

| No | Uraian | Proyeksi (Juta Rupiah) | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Pendapatan | 1.496.089,32 | 1.558.080,45 | 1.723.969,13 | 1.927.562,04 | 2.181.018,18 | 2.501.255,84 |
| 2 | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 33.804,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Penerimaan Dikurangi: | 1.529.893,66 | 1.558.080,45 | 1.723.969,13 | 1.927.562,04 | 2.181.018,18 | 2.501.255,84 |
| 3 | Belanja Operasional | 667.289,69 | 670.141,2 | 724.637,96 | 793.456,65 | 875.810,18 | 969.416,8 |
| 4 | Pengeluaran Pembiayaan | 45.312,56 | 43.800,00 | 43.800,000 | 43.800.000 | 43.800.000 | 43.800.000 |
| | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 817.291,41 | 844.139,25 | 955.531,17 | 1.090.305,39 | 1.261.408 | 1.488.039,04 |

Sumber: Bappelitbangda dan DPKAD (data diolah),2021

Penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai belanja prioritas yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

Prioritas I

Prioritas I berisi program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah dan amanat/kebijakan nasional yang didalamnya termasuk pemenuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa urusan wajib.

Selain itu, prioritas I juga berisi belanja yang wajib dan mengikat termasuk didalamnya adalah anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Prioritas II

Program prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Dengan demikian belanja pada prioritas II berisi belanja di semua SKPD dikurangi belanja yang sudah dianggarkan pada prioritas I



Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksud untuk alokasi belanja-belanja operasional seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan dalam Tabel 3.16 sebagaimana berikut:

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

| No | Uraian | Proyeksi (Juta Rupiah) | | | | | |
|----|--|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 817.291,41 | 844.139,25 | 955.531,17 | 1.090.305,39 | 1.261.408 | 1.488.039,04 |
| | Rencana Penggunaan | | | | | | |
| 2 | Prioritas I | 417.558,36 | 425.862,95 | 482.824,75 | 487.915,31 | 561.102,60 | 645.267,99 |
| 3 | Prioritas II | 313.436,89 | 326.571,26 | 367.476,77 | 420.352,57 | 495.352,24 | 576.161,59 |
| 4 | Prioritas III | 86.296,16 | 91.705,04 | 105.229,65 | 119.532,62 | 141.872,51 | 169.327,38 |

Sumber: Bappelitbangda dan DPKAD (data diolah), 2021



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil-hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuan analisis ini adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Berdasarkan permasalahan utama dalam pembangunan daerah selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan yang bersifat antisipatif dan solutif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melihat perbandingan kondisi ideal yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program-program pembangunan dengan kondisi aktual saat ini.

4.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB. SDGs ini mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang terukur sampai dengan tahun 2030. Uraian 17 tujuan dari implementasi SDGs adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;



7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar-negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian indikator SDGs pada tahun 2020, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat pandemi COVID-19 yakni pada angka 5,21 persen, sehingga diperlukan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi antar perangkat daerah;
2. Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan masih di angka 45,9 persen atau sebanyak 115.960 jiwa, selain akibat adanya kebijakan penonaktifan kepersertaan PBI APBN, juga akibat pandemi COVID-19;
3. Angka kematian bayi 9 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi antara lain adanya pandemi mengakibatkan penanganan kelahiran tidak berjalan secara optimal. Selain itu, ibu hamil kurang mendapatkan monitoring, baik dari masyarakat, keluarga dan puskesmas.
4. Prevalensi anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan. Salah satu penyebabnya adalah cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah sebanyak 90 tablet selama hamil hanya mencapai 70%. Selain itu tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah masih perlu ditingkatkan dengan



pendampingan. Program pemberian tablet tambah darah sejak dari remaja putri bisa menjadi alternatif pencegahan.

5. Angka kematian ibu melahirkan juga mengalami peningkatan, sebesar 161 per 100.000 kelahiran hidup.
6. Penyalahgunaan narkotika juga mengalami peningkatan. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi serta banyaknya tempat hiburan di wilayah Halmahera Selatan menjadi bidikan pasar yang potensial oleh para pengedar narkoba bahkan jaringan internasional. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum bagi para pengedar narkoba dan miras sehingga memberikan efek jera; dan
7. Koefisien gini berada pada angka 0,260 yang menunjukkan Kabupaten Halmahera Selatan berada pada ketimpangan rendah dan ini perlu dipertahankan.

4.2. Telaah Kebijakan Nasional / RPJM Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selain Nawacita Kedua, ada arahan presiden yang harus dijadikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.



Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat juga 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan inklusif melalui:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:
 - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan

Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten/kota di Maluku Utara yang menjadi lokasi prioritas pembangunan. Sebagai lokasi prioritas mencakup beberapa kegiatan prioritas, antara lain:

1. Pengembangan sektor unggulan;
 - a. Pengembangan komoditas unggulan berupa kelapa, pala dan perikanan tangkap.
 - b. Pengembangan sentra UMKM
2. Pengembangan kawasan strategis;
 - a. Pengembangan PKW Kawasan Perkotaan Labuha.
 - b. Pengembangan Proyek Strategis Nasional di Pulau Obi



- c. Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Gane Timur dan Bacan Barat Utara
- 3. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan;
 - a. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)
 - b. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat
- 4. Penataan kelembagaan dan keuangan daerah
 - a. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten
 - b. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi
 - c. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif
 - d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - e. Peningkatan riset dan inovasi daerah
 - f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah
 - g. Peningkatan kualitas belanja daerah
 - h. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan
 - i. Penataan ruang dan lahan meliputi: 1) Pemetaan rupabumi dan toponim dengan penyusunan data informasi geospasial dasar; 2) Penyusunan materi teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang; 3) Pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR;
 - j. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan

4.3. Telaah Kebijakan Provinsi / RPJM Daerah Provinsi Maluku Utara

Sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara, maka sangat penting bagi Kabupaten Halmahera Selatan untuk merujuk pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara. Visi jangka menengah Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Provinsi Maluku Utara No. 7 tahun 2020 adalah “**Maluku Utara Sejahtera**”



Makna Maluku Utara Sejahtera yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara, baik pangan, sandang, papan, pendidikan maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatannya sebagai manusia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan Sumber Daya Alam Maluku Utara.

Untuk mewujudkan visi MALUKU UTARA SEJAHTERA tersebut, ada 5 Misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya.
2. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah.
3. Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis.
4. Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan.

4.4. Telaah RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009. RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tersebut berisikan penjabaran secara lebih rinci dari tujuan dan cita-cita dibentuknya Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana terteta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.

RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 bertujuan untuk memberikan arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah beberapa tahun ke depan. Dengan demikian diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan, akan bersinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mendorong proses pembangunan daerah Halmahera Selatan secara keseluruhan.

Visi pada dasarnya adalah kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Halmahera Selatan, prediksi 20 tahun mendatang dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan sebelumnya, dapat ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2025 mendatang adalah: **"Menjadi Kabupaten Kepulauan yang Adil dan Damai, Maju dan Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat, Melayani dan Diridhoi Allah Yang Maha Kuasa"**



Visi di atas mengandung pengertian bahwa:

Kabupaten Halmahera Selatan telah dikaruniai Allah Yang Maha Kuasa dengan wilayah yang berkarakter **Kepulauan**. Wilayah seperti ini memiliki karakteristik khas dalam hal kondisi alam dan penduduknya. Kondisi alam yang kaya akan berbagai potensi dan penduduk yang beragam suku, bahasa dan agama adalah karakteristik khas kepulauan yang harus disyukuri melalui pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan karakteristiknya.

Adil adalah kata kunci untuk meredam semua potensi konflik dan potensi buruk yang mengancam kesatuan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Ketidakadilan adalah akar dari semua bentuk kecemburuan, ketegangan dan konflik sosial. Sebaliknya, perwujudan nilai keadilan yang bermakna menempatkan dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan tempat dan ukurannya, dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hubungan antar agama dan suku serta semua aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Damai adalah kebutuhan mendasar masyarakat sebagai prasyarat dalam melakukan pembangunan pada semua aspek. Untuk itu perlu menciptakan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Wilayah kepulauan yang dikelola dengan adil dalam suasana damai akan menjadikan Kabupaten Halmahera Selatan sangat berpotensi untuk **Maju dan Mandiri**. Sumber daya yang ada harus dioptimalkan menjadi potensi unggulan dan daya saing daerah. Semua potensi lokal harus diapresiasi, diolah dan dikembangkan menjadi bagian dari proses kemajuan dan kemandirian daerah.

Sejahtera dan bermartabat adalah kondisi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang dicita-citakan 20 tahun ke depan. Sejahtera mengacu kepada capaian-capaihan indikator pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Sementara bermartabat mengacu kepada pengamalan nilai-nilai agama, kepercayaan diri yang timbul akan prestasi daerah dan moral yang menjadi landasan mengabdi kepada kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, termasuk di dalamnya adalah penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan meningkatnya harkat kemanusiaan yang semakin beradab.

Visi di atas harus didukung oleh sistem pemerintahan yang berparadigma **melayani**, tanpa membeda-bedakan asal kelompok, suku maupun agama. Sistem pemerintahan dan birokrasi harus menjadi khadimatul ummat, artinya pelayan bagi seluruh masyarakat.

Aparat birokrasi dalam melayani tanpa pamrih. Motifnya semata-mata mengabdi kepada Allah SWT dan demi kemajuan daerahnya. Di depan memberi contoh kepada masyarakat dan di belakang memberi motivasi. Karakter birokrasi semacam inilah yang akan mengetuk pintu langit untuk **turunnya ridho Allah Yang Maha Kuasa** kepada Kabupaten



Halmahera Selatan menjadi *Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghafur* di mana berkah dari langit akan turun melingkupi.

Untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Kabupaten Halmahera Selatan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. *Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan keamanan* adalah mematuhi aturan hukum, menjaga keamanan lingkungan, memelihara kerukunan internal dan antar umatberagama, penegakan hukum dan hakasasi manusia, memantapkan persatuan dan kesatuan masyarakat Halmahera Selatan yang heterogen, memberdayakan peran partai politik sebagai saluran aspirasi politik masyarakat, perluasan akses masyarakat terhadap media massa. Stabilitas bertujuan menciptakan kondisi aman dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang.
2. *Mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil* adalah pembangunan berpihak kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, kesenjangan antar wilayah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, serta menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.
3. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan budaya untuk kemajuan wilayah* artinya mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing berbasis kelautan dan kepariwisataan, pengembangan akses dan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan peran serta perempuan dan pemuda dalam pembangunan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kapasitas aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah dan desa, mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
4. *Mewujudkan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong terbentuknya kemandirian daerah* artinya optimalisasi pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif dengan membangun sistem produksi dan distribusi yang terpadu, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan pariwisata, bahari dan kelautan, meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi, pengembangan sektor keuangan, UKM dan Koperasi, diversifikasi bahan pangan lokal, pengembangan komoditas pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan berorientasi ekspor, pemanfaatan potensi tambang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kelautan secara berkelanjutan, membangun ekonomi kelautan secara terpadu, pemanfaatan ruang yang serasi antara permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi, penyediaan infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi, serta utilitas pendukungnya, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
5. *Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bermoral dan Berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama* artinya pelaksanaan pembangunan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan ditandai dengan



semakin meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin baik, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika bangsa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umatberagama.

6. *Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Melayani yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa* artinya membangun sistem pemerintahan dan birokrasi yang berparadigma melayani / khadimatul ummat, pembinaan aparatur berbasis nilai, peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, peningkatan Kesejahteraan aparatur dilakukan guna mengeliminir penyalahgunaan wewenang, peningkatan kualitas sistem keuangan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur, menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

4.5. Telaah RTRW Kabupaten Halmahera Selatan

Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012-2032, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem kota-kota;
2. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan aksesibilitas regional maupun sub regional dengan pengembangan sistem transportasi yang terpadu;
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana;
5. Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung;
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
7. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan;
8. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
9. Pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
10. Pengembangan kawasan strategis;
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;



Lebih lanjut, pengembangan wilayah Halmahera Selatan sebagai pusat-pusat kegiatan dan kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lain-lain sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah berdasarkan struktur ruang meliputi : *Pusat Kegiatan Wilayah* (PKW) yaitu kawasan perkotaan Labuha di Pulau Bacan. *Pusat Kegiatan Lokal* (PKL) yaitu kawasan perkotaan Guruapin, Maffa, Saketa dan Babang. *Pusat Pelayanan Kawasan* (PPK) yaitu kawasan perkotaan Laiwui, Loleo Jaya, Kukupang dan Waikyon, serta *Pusat Pelayanan Lokal* (PPL) di 21 kecamatan.
2. Pengembangan wilayah berdasarkan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Halmahera Selatan terdiri atas Kawasan suaka alam, Kawasan hutan lindung dan Kawasan resapan air. Sedangkan Kawasan Budidaya terdiri atas Kawasan hutan produksi tetap, Kawasan hutan produksi terbatas, Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan pertanian lahan kering, Kawasan perkebunan, Kawasan peternakan, Kawasan perikanan (minapolitan, perikanan tangkap, budidaya perikanan), Kawasan pertambangan, Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, Kawasan pertambangan panas bumi, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Kawasan peruntukan lainnya.

Sedang pengembangan kawasan strategis meliputi kawasan strategis berdasarkan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi, serta daya dukung lingkungan.

4.6. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

Selama tahun 2016-2020, lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku adalah sektor *pertanian, kehutanan dan perikanan* (rata-rata 28,69%), *industri pengolahan* (rata-rata 19,23%), *perdagangan besar dan eceran* (rata-rata 16,35%), *pertambangan dan penggalian* (rata-rata 10,12%), serta *administrasi pemerintahan dan jaminan sosial* (rata-rata 9,51%).

Selama 5 tahun terakhir (2015-2019), peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB cenderung menurun. Sementara peran sektor industri pengolahan cendrung naik dengan dominasi industri pengolahan logam dasar, seiring beroperasinya smelter di Pulau Obi. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan industri kecil dan menengah yang juga banyak berkembang karena sifatnya yang tidak padat modal. Sektor perdagangan juga mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB dengan penyerapan tenaga kerja yang juga besar. Sektor ini berkembang seiring pertumbuhan penduduk di Halmahera Selatan serta semakin mudahnya konektivitas antar wilayah di Halmahera Selatan.

Berdasarkan analisis data, yang termasuk dalam sektor basis / unggulan adalah pertanian, industri pengolahan, perdagangan serta transportasi dan pergudangan. Sementara sektor



yang berdaya saing tinggi meliputi transportasi dan pergudangan; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor jasa pendidikan; dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor yang memiliki potensi untuk berkembang meliputi: sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta pariwisata.

Berdasarkan data di atas, sektor yang akan dikembangkan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah sektor industri pengolahan, sektor industri perikanan serta sektor transportasi, perdagangan dan pergudangan. Namun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan akselerasi sektor-sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Sektor pertanian dikembangkan sebagai potensi lokal, pada sisi konvensional adalah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif, konsumsi keberagaman pangan masih rendah dan pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan masih kurang dan sebagai jaring pengaman permasalahan pengangguran dan kemiskinan karena berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan mencapai 57,18% penduduk yang bekerja.

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah, sektor pertanian perlu dikembangkan sebagai suatu industri, bukan lagi usaha subsisten, untuk mensuplai bahan-bahan (input) yang diperlukan oleh sektor lain, diantaranya sektor industri pengolahan makanan minuman dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum karena selama ini input dari industri pengolahan makanan minuman terutama kelompok industri mikro dan kecil serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih banyak yang didatangkan dari luar daerah.

Apabila kebutuhan input sektor industri dan pariwisata dapat dipasok oleh petani lokal, ketahanan ekonomi daerah akan meningkat. Pengembangan sektor pertanian ini memerlukan strategi yang tepat. Sebagai suatu industri maka perlu dilakukan standarisasi kualitas dan kontinuitas produksi, hal ini tentu saja terkait dengan penyediaan input pertanian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani. Melihat data statistik dimana tren jumlah pekerja sektor pertanian menurun yang disebabkan regenerasi pengelola pertanian tidak berlangsung dengan baik. Generasi muda banyak yang tidak tertarik lagi bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat menarik minat masyarakat usia muda untuk menekuni dunia pertanian.

Selain sektor pertanian, dalam rangka meningkatkan pendapatan sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan adalah melalui pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah. UMKM ini bergerak dalam bidang, antara lain: perdagangan dan jasa; kuliner; fashion; otomotif; agrobisnis; dan teknologi informasi.

Dalam sektor pariwisata, berdasarkan jumlah wisatawan, Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu destinasi unggulan di Maluku Utara. Wisatawan tersebut berkunjung untuk menikmati alam yang ada serta adat dan budayanya. Oleh karena itu,



arah pengembangan pariwisata harus diletakkan bagi pembangunan manusia dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap langkah dan tahapnya. Desa wisata menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kecenderungan pasar yang mulai bergeser, dari kondisi yang serba modern kepada kondisi skala kecil yang unik. Pengembangan desa wisata yang baik, dalam perspektif ekonomi daerah, dapat memeratakan pendapatan secara lebih luas, mulai dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut, masyarakat sekitar desa sampai dengan pemerintah yang menaungi desa wisata tersebut karena sekitar 40% pengeluaran wisatawan digunakan untuk belanja, baik kuliner, produk pertanian maupun produk kerajinan. Saat ini kerja sama antara pengelola desa wisata dengan para produsen hasil pertanian, kuliner dan produk kerajinan hampir belum ada, padahal desa-desa wisata yang ada dapat dioptimalkan untuk menyajikan cindera mata dan oleh-oleh yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, kerja sama antar pihak-pihak tersebut perlu dibangun dan ditingkatkan demi terjalannya keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkage) antarsektor tersebut. Pengelolaan desa wisata dan penguatan kapasitas para pengelola desa wisata dan kelembagaan perlu dibangun untuk mewujudkan desa wisata mandiri yang berkelanjutan.

Untuk mendorong peningkatan peran sektor basis/unggulan, sektor yang berdaya saing tinggi serta sektor yang memiliki potensi untuk berkembang, maka perlu adanya dukungan infrastruktur yang mamadai, seperti jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan, listrik dan air, serta informasi dan telekomunikasi dengan konsep pembangunan berbasis kepulauan/kawasan. Jika tidak direncanakan secara baik, maka akan terjadi pembangunan-pembangunan fisik yang sporadis yang kurang selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang memadai.

4.7. Telaah Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Halmahera Selatan

Salah satu Kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dikembangkan di daerah adalah Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan ekonomi daerah. Roadmap penguatan SIDa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

4.8. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan seluruh kajian yang telah dilakukan dan diuraikan secara detail pada bagian-bagian sebelumnya, disimpulkan bahwa penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan dari berbagai saran yang disepakati. Dengan demikian, isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pilar Sosial meliputi:
 - 1) Penanggulangan kemiskinan;



- 2) Penanggulangan kesenjangan wilayah;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat;
- 5) Kedaulatan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat;
- 6) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b) Pilar Ekonomi meliputi:
 - 1) Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
- c) Pilar Lingkungan meliputi:
 - 1) Keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA;
- d) Pilar Hukum dan Tata Kelola meliputi:
 - 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - 2) Tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

4.9. Telaah Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kondisi Ekonomi dan Sosial

Coronavirus 19 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada awal tahun 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan lokasi di Depok, Jawa Barat. Kasus COVID-19 pertama di Halmahera Selatan pada Bulan April 2021, dan sampai saat ini telah berdampak pada perubahan tata kehidupan sosial dan sektor ekonomi. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis dan secara langsung berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan seluruh lapisan masyarakat turun sehingga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan pada periode kedepan untuk dapat keluar dari kondisi ini.

4.10. Permasalahan Pembangunan

4.10.1. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, masyarakat dan orang tua. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih rendahnya angka Indek Pembangunan Manusia
- 2) Masih adanya warga masyarakat yang buta huruf;
- 3) Masih adanya anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Taman Kanak-kanak;
- 4) Masih adanya anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
- 5) Masih tingginya lulusan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
- 6) Sebagian anak putus sekolah karena alasan kerja, ini menyumbang angka pekerja anak dibawah umur.
- 7) Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi DIV/S1 jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK masih terbatas;



- 8) Persebaran guru/tenaga pendidik pada setiap satuan pendidikan yang masih belum merata
- 9) Peningkatan kompetensi guru/tenaga pendidik pada setiap satuan pendidikan masih kurang
- 10) Sarana prasarana masih minim terutama pada jenjang TK, SD, dan SMP terutama perpustakaan dan laboratorium serta meubelair masih kurang;
- 11) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 12) Kompetensi lulusan siswa SMA belum sesuai dengan pasar kerja.

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Selatan bertujuan untuk mengembangkan penanganan situs budaya, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah, dan inovasi dan kreativitas dalam mengelola budaya daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat;
- 5) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- 6) Perlindungan dan pelestarian asset-aset budaya dan naskah sejarah yang masih kurang
- 7) Kurangnya fasilitas pengembangan adat dan budaya

4.10.2. Kepemudaan dan Olah Raga

Peran pemuda serta prestasi olah raga yang dicapai dalam pembangunan sumber daya manusia bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan masih belum optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- 2) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi;
- 3) Pembinaan organisasi kepemudaan masih belum optimal
- 4) Pembinaan dan pelatihan *life skill* dan kewirausahaan bagi pemuda masih kurang
- 5) Kesadaran Pemuda sebagai “agent of change” di masyarakat masih rendah
- 6) Meningkatnya masalah sosial di kalangan pemuda seperti pergaulan bebas, konsumsi minuman keras, dan penyabgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);
- 7) Pembinaan olah raga prestasi belum optimal;
- 8) Upaya pembentukan karakter dan kepribadian pemuda belum optimal.
- 9) Fasilitas dan Ruang kreatifitas bagi pemuda masih sangat minim

4.10.3. Kesehatan

Dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat



kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Munculnya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat yang menyedot energi serta anggaran yang besar;
- 2) Penanganan dan pencegahan penularan wabah COVID-19 yang masih belum optimal terutama terkait penerapan protokol kesehatan, 3T dan cakupan vaksinasi;
- 3) Kapasitas dan kompetensi sumberdaya kesehatan yang masih perlu terus ditingkatkan;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang masih perlu ditingkatkan
- 5) Sebaran SDM Tenaga Kesehatan yang belum merata;
- 6) Kesiapan SDM Tenaga Medis di lapangan yang belum optimal berakibat pada trend penurunan tingkat layanan terutama wilayah-wilayah terisolir;
- 7) Pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan masyarakat Halmahera Selatan masih belum optimal;
- 8) Ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih terjadi, seperti TB, kusta dan stunting yang masih tinggi serta penangannya yang belum optimal;
- 9) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;
- 10) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai;
- 11) Masih ada penduduk miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan karena alokasi anggaran untuk pembayaran premi jaminan kesehatan penduduk miskin belum mencukupi untuk seluruh jumlah penduduk miskin yang ada, sehingga pencapaian UHC (*Universal Health Coverage*) masih rendah

4.10.4. Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan bidang sosial di Halmahera Selatan. Permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih lambat
- 2) Belum terpadunya penanganan kemiskinan dan PMKS (Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial) antar instansi
- 3) Prosentase KK miskin dan KK rawan miskin masih cukup tinggi;
- 4) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 5) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan kegiatan keagamaan belum optimal;



- 6) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas;
- 7) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 8) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai;

4.10.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap-nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Tingkat partisipasi dan akses bagi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
- 2) Peningkatan kompetensi dan wawasan kebangsaan bagi perempuan masih minim;
- 3) Perlindungan dan advokasi terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih lemah;
- 4) Penguatan dan pembinaan kelembagaan organisasi wanita dan jaringan pengaruh utama keluarga masih lemah;
- 5) Pendidikan dan pelatihan parenting bagi keluarga muda yang masih kurang;
- 6) Rehabilitasi terhadap anak pecandu rokok dan korban narkoba belum ada;
- 7) Sebagian anak putus sekolah karena alasan kerja, ini menyumbang angka pekerja anak dibawah umur;
- 8) Penguatan ketrampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi ibu-ibu rumah tangga masih minim;
- 9) Pendidikan karakter dan kepribadian bagi perempuan dan anak masih kurang
- 10) Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media soial, penyalahgunaan NAPZA, dan minuman keras masih kurang.

4.10.6. Pengendalian Penduduk dan KB

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Halmahera Selatan cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- 2) Tingkat partisipasi KB pria masih rendah;
- 3) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- 4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- 5) Pasangan usia subur yang tidak ber-KB jumlahnya masih cukup tinggi;
- 6) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal;
- 7) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.



4.10.7. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi di antaranya sebagai berikut:

- 1) Koordinasi terkait pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan antara kabupaten, provinsi dan pusat belum optimal;
- 2) Masih banyak daerah yang terisolasi dan terhubung akibat akses jalan yang belum memadai;
- 3) Kurangnya pemeliharaan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber-sumber air lainnya seperti telaga atau danau;
- 4) Belum adanya sarana irigasi yang memadai di daerah sentra-sentra produksi pertanian;
- 5) Proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang rumit dan status kepemilikan lahan banyak yang bermasalah serta sertifikasi aset yang kurang optimal
- 6) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan serta kegiatan pemeliharaan jalan yang lambat;
- 7) Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi;
- 8) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- 9) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan kebinamargaan masih kurang.

4.10.8. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, pemakaman. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang;
- 2) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan;
- 3) Ketersediaan ruang terbuka hijau masih minim;
- 4) Konservasi terhadap daerah resapan air masih belum maksimal;
- 5) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat;
- 6) Perumahan tidak layak huni masih cukup banyak;
- 7) Penataan kawasan perkotaan Labuha dan ibu kota kecamatan lainnya belum maksimal;
- 8) Penyediaan listrik perkotaan dan permukiman masih minim;
- 9) Penyediaan tempat pemakaman umum bagi perumahan masih kurang;
- 10) Pembangunan dan pengelolaan sistem drainase di perkotaan dan perdesaan belum memadai;
- 11) Pengelolaan sistem persampahan masih belum optimal ;



- 12) Rumah yang belum ber-IMB masih cukup banyak.

4.10.9. Tata Ruang , Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh wilayah Halmahera Selatan serta masih ada Rencana Rinci Tata Ruang yang telah disusun sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum;
- 2) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- 3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- 4) Pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan masih banyak;
- 5) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan pembangunan rumah dan bangunan masih kurang.
- 6) Masih terdapat tapal batas kecamatan maupun tapal batas desa yang belum terlalu jelas.

Kondisi lingkungan di Kabupaten Halmahera Selatan secara umum masih cukup baik, walaupun ada kecenderungan menurun akibat kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan, pertambangan dan sektor lainnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang masih terbatas;
- 2) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
- 3) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;
- 4) Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang;
- 5) Pelayanan persampahan masih terbatas di sekitar ibu kota kabupaten Labuha dan masih belum optimal menjangkau seluruh penduduk ibu kota kabupaten;
- 6) Penanganan air limbah rumah tangga /domestik belum dilakukan secara terpadu;
- 7) Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;

Pembangunan kehutanan di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan potensinya masih diarahkan untuk produksi. Selain memproduksi hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya, sebagian masyarakat Halmahera Selatan mulai membudidayakan tanaman kayu melalui hutan tanaman rakyat (HTR) yang ijinnya telah diberikan sejak beberapa tahun yang lalu. Permasalahan yang dihadapi di sektor kehutanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
- 2) Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan pertambangan;



- 3) Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagian besar kewenangan urusan kehutanan sudah dilimpahkan ke pemerintah Provinsi.
- 4) Kegiatan eksploitasi hutan produksi masih ada yang belum memenuhi ketentuan teknis yang baik dan benar.

4.10.10. Pertanahan

Salah satu kegiatan dibidang pertanahan adalah penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan. Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi tanah milik desa, tanah milik pemda maupun tanah hak milik masyarakat masih rendah;
- 2) Pengelolaan tanah milik pemerintah termasuk milik desa belum baik;
- 3) Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal;
- 4) Pelayanan perijinan dan sertifikasi pertanahan belum optimal;

4.10.11. Perhubungan

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana terminal, pelabuhan dan bandara belum mamadai;
- 2) Pelayanan moda transportasi umum belum terintegrasi;
- 3) Masih banyak terjadi pelanggaran terhadap tarif harga moda transportasi yang sudah ditetapkan;
- 4) Jumlah armada perhubungan antar pulau yang masih terbatas;
- 5) Frekuensi penerbangan pesawat masih terbatas
- 6) Masih banyak ruas jalan di wilayah kecamatan di luar pulau Bacan yang belum diaspal atau masih dalam kondisi rusak berat
- 7) Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
- 8) Belum meratanya PJU berbasis energi surya di seluruh desa;
- 9) Pemilik kendaraan wajib uji belum semua melakukan pengujian kendaraannya secara berkala.

4.10.12. Komunikasi, Informatika dan Persandaian

Kemajuan di bidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain:



- 1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum memadai;
- 2) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Belum optimalnya pengimplementasikan *E-government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Kurangnya pengembangan inovasi dan aplikasi sistem informasi yang lebih efektif dan efisien;
- 5) Minimnya infrastruktur sistem keamanan informasi bagi pemerintah;
- 6) Kualitas sumberdaya manusia yang melek teknologi informasi dan persandian belum memadai;
- 7) Masih sebagian wilayah terjadi *blank spot area* telekomunikasi;

4.10.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;
- 2) Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- 3) Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal;
- 4) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib;
- 5) Belum dapat memanfaatkan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Pengembangan ekonomi masyarakat di perdesaan melalui BUMDes masih belum maksimal;
- 7) Rendahnya kualitas SDM Aparatur Desa dan kurangnya sarana peningkatan kapasitas aparatur;
- 8) Kurangnya efektifnya pendampingan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa;
- 9) Sebagian besar desa masih berstatus desa tertinggal (terdapat 1 desa mandiri, 49 desa berkembang dan 199 desa tertinggal)

4.10.14. Penanaman Modal dan PTSP

Penanaman Modal (investasi) adalah salah satu komponen penting dalam kemajuan perekonomian suatu daerah. Investasi memberi peluang meningkatnya lapangan kerja serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Permasalahan penanaman modal di Halmahera Selatan antara lain:

- 1) Realisasi investasi masih sangat rendah khususnya sektor pertanian dan perikanan;
- 2) Daya serap tenaga kerja lokal atas investasi yang ada juga masih sangat rendah;
- 3) Pelayanan perizinan masih belum sepenuhnya terintegrasi;
- 4) Kurangnya insentif investasi pada bidang manufaktur;
- 5) Promosi investasi yang belum maksimal dilakukan;

4.10.15. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja. Permasalahan yang dihadapi :

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) masih lemah;
- 5) Kurangnya *link and match* antara dunia usaha dengan dunia kampus
- 6) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi daerah tujuan transmigrasi selama ini mendasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima) dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung transmigrasi;
- 3) Kurangnya pendampingan dan monitoring;
- 4) Lemahnya korordinasi antar instansi terkait program transmigrasi
- 5) Sebagai daerah tujuan transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan masih belum optimal dalam menyiapkan lokasi tujuan transmigrasi, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan.

4.10.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah;
- 2) Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
- 3) Kurangnya pelatihan peningkatan manajerial, ketrampilan dan inovasi produk UMKM;
- 4) Kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM tentang *digital marketing*;
- 5) Kurangnya dukungan terhadap legalisasi mutu produk UMKM
- 6) Akses modal bagi UMKM masih terbatas.

4.10.17. Kelautan dan Perikanan



Secara geografis Kabupaten Halmahera Selatan memiliki wilayah laut yang sangat luas, yang mencapai hampir 80% dari luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Usaha perikanan tangkap di Halmahera Selatan sebagian besar dilaksanakan oleh nelayan secara perorangan, dan belum banyak badan usaha yang melaksanakan operasi perikanan tangkap secara sistematis. Saat ini ikan yang paling banyak ditangkap di dalam wilayah perairan kabupaten Halmahera Selatan adalah dari jenis-jenis ikan pelagis, ikan layang dan ikan dasar, yang kemudian dijual di dalam dan keluar wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, baik sebelumnya diolah ataupun dalam kondisi segar dan beku. Sedang disubsektor budi daya perikanan dan kelautan, sudah ada individu dan badan usaha yang melakukan budi daya mutiara, rumput laut dan udang, tetapi belum mencapai skala ekonomi yang cukup besar. Beberapa permasalahan yang ada di sektor perikanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan seperti armada penangkap ikan, pabrik es, ABF dan *cold storage* untuk menjaga rantai dingin ikan, maupun sarana penangkapan ikan untuk nelayan kecil;
- 2) Keberadaan rumpon di laut yang belum maksimal pengelolaannya;
- 3) Tingginya biaya operasional penangkapan ikan akibat masih tingginya harga BBM
- 4) Tingginya biaya operasional budi daya perikanan dan kelautan karena pakan, bibit dan benih yang masih harus didatangkan dari luar Halmahera Selatan;
- 5) Kemampuan melaksanakan budi daya perikanan dan kelautan yang masih harus ditingkatkan lebih lanjut;
- 6) Akses permodalan bagi nelayan yang belum merata.

4.10.18. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Halmahera Selatan mengalami penurunan, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;
- 2) Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi dan tidak cepat ditangani.
- 3) Harga hasil produksi pertanian tidak stabil;
- 4) Belum optimalnya peran penyuluhan pertanian dalam mendorong peningkatan produksi pertanian;
- 5) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produksi pertanian masih rendah;
- 6) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;
- 7) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;
- 8) Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
- 9) Ketersediaan pakan ternak masih terbatas dan mahal karena masih didatangkan dari luar;



- 10) Akses permodalan bagi petani belum merata.

Sementara sub sektor perkebunan merupakan salah satu komponen PDRB Kabupaten Halmahera Selatan yang memberikan kontribusi cukup besar. Sebagian besar perkebunan yang ada merupakan perkebunan yang dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan yang dikelola oleh badan usaha walaupun sudah ada belum begitu memberikan kontribusi yang besar kepada perekonomian Halmahera Selatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor perkebunan ini antara lain adalah:

- 1) Volume hasil produksi perkebunan yang belum optimal, terutama di sektor perkebunan kelapa, pala, cengkeh dan kakao;
- 2) Kemampuan dalam pengolahan dan pemasaran hasil produk perkebunan masih rendah;
- 3) Harga hasil produk perkebunan yang belum stabil;
- 4) Masih tingginya ketergantungan petani/pekebun kepada tengkulak di desa-desa, terutama yang di sektor perkebunan kelapa;
- 5) Industri pengolahan hasil-hasil perkebunan yang dapat memberi nilai tambah belum dikembangkan;
- 6) Jaringan informasi pasar produk perkebunan belum optimal.

4.10.19. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
- 2) Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak;
- 3) Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun;
- 4) Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal;
- 5) Belum adanya lumbung pangan lokal;
- 6) Belum adanya upaya maksimal mewujudkan daerah Mandiri Pangan/ swasembada pangan

4.10.20. Pariwisata

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup baik dari sisi potensi alam maupun budaya. Hanya saja potensi ini perlu diberdayakan lebih baik lagi untuk mendorong berkembangnya sektor pariwisata di Halmahera Selatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;



- 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing dan daya tarik objek wisata masih kurang;
- 3) Masih kurangnya promosi potensi pariwisata;
- 4) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;
- 5) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;
- 6) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.
- 7) Prasarana penunjang pariwisata seperti hotel dan restoran masih sangat terbatas;

4.10.21. Energi dan Sumber Daya Mineral

Mayoritas desa di Halmahera Selatan belum memiliki jaringan listrik dan menikmati layanan listrik dari PLN, terutama di desa-desa pesisir yang belum memiliki akses jalan yang baik dan jauh dari ibu kota kabupaten. Sementara untuk sumberdaya mineral, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi pertambangan untuk nikel, tembaga, emas, batu bara dan pasir besi. Sebagian pemegang IUP sudah mulai berproduksi, terutama untuk nikel, yang sudah berproses juga pada pembangunan smelter di pulau Obi. Sedangkan yang lain sebagian besar masih dalam tahap eksplorasi dan membutuhkan waktu cukup panjang untuk sampai ke tahap produksi. Beberapa permasalahan yang ada di sektor energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut:

- 1) Belum meratanya layanan listrik PLN ke seluruh masyarakat Halmahera Selatan (hanya desa-desa di sekitar ibu kota kabupaten yang dapat menikmati layanan listrik 24 jam);
- 2) Kapasitas suplai energi listrik yang belum mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri skala besar;
- 3) Ketergantungan yang tinggi pada sumber energi listrik dari fosil (solar, minyak tanah);
- 4) Potensi energi terbarukan seperti energi matahari, panas bumi dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal;
- 5) Masih banyaknya wilayah pertambangan yang belum mencapai tahap produksi dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah;
- 6) Masih adanya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis yang baik dan benar;
- 7) Masih ada kegiatan pertambangan rakyat yang tidak berijin.

4.10.22. Perindustrian dan Perdagangan

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Di samping menangani perdagangan antar wilayah regional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain:



- 1) Daya saing dan standar baku mutu produk Halmahera Selatan di pasar nasional maupun global masih rendah;
- 2) Biaya angkut dan transportasi barang masih tinggi menyebabkan ongkos produksi dan harga barang cukup tinggi;
- 3) Kelancaran distribusi bahan pokok/barang strategis belum optimal;
- 4) Masih belum optimalnya pelaku usaha dalam membaca peluang pasar;
- 5) Perlindungan konsumen belum optimal;
- 6) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai

Sebagai kabupaten yang memiliki sumber daya alam cukup besar terutama di sektor perikanan, pertambangan dan kehutanan, Kabupaten Halmahera Selatan berpotensi membangun industri yang mengolah hasil produksi di ketiga sektor usaha tersebut. Hanya saja untuk membangun industri yang memiliki skala ekonomi yang cukup besar dan dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Halmahera Selatan, ada permasalahan-permasalahan sebagai berikut ini yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan:

- 1) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung kegiatan industri lainnya yang masih belum mencukupi;
- 2) Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerjanya;
- 3) Keberadaan industri-industri pendukung yang masih sangat minim;
- 4) Pasar lokal untuk hasil-hasil industri pengolahan yang skalanya kecil dan masih memperhatikan fleksibilitas harga daripada kualitas produk;
- 5) Belum termanfaatkan dengan maksimal ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang cukup dan stabil sepanjang tahun.

4.10.23. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah perencanaan pembangunan desa, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Perhatian SKPD terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang;
- 2) Kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;
- 3) Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas;
- 4) Data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat;
- 5) Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang;
- 6) Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah;



- 7) Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
- 8) Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa *wishing list*, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran;
- 9) Adanya ego sektor atau kepentingan sektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;
- 10) Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah;
- 11) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah;
- 12) Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya;
- 13) Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 14) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan;
- 15) Kondisi geografis Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan menyebabkan beberapa wilayah masih terisolir yang sering tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan;
- 16) Masih rendahnya kapasitas SDM Aparatur khususnya Perencana baik di Bapelitbangda maupun di SKPD;
- 17) Masih lemahnya inovasi dan penelitian daerah dalam mengatasi permasalahan daerah;
- 18) Pola perencanaan dan penganggaran yang masih berbasis pada Money Follow Function, yang seharusnya sudah berbasis Money Follow Program

4.10.24. Pemerintahan Umum

Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi Daerah mengandung makna mengatur segala sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten/ Kota masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumber daya aparatur. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Potensi keuangan berupa pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal;
- 2) Pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;
- 3) Sistem pelayanan kepegawaian yang responsif dan transparan belum dilaksanakan secara optimal;
- 4) Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan yang belum optimal



- 5) Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
- 6) Penegakan hukum dan regulasi belum efektif;
- 7) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Prosedur Standar Operasional (SOP);
- 8) Pelayanan perijinan belum optimal;
- 9) Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;
- 10) Belum adanya penyelenggaraan persandian daerah;
- 11) Penerapan sistem administrasi pemerintahan dan e-Government yang belum optimal.

4.10.25. Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penetapan data tunggal belum disepakati;
- 2) Data sektoral dari SKPD kurang konsisten;
- 3) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;
- 4) Kualitas SDM di bidang kestatistikinan belum memadai;
- 5) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai.

4.10.26. Perpusatakaan dan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan karsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana karsipan belum memadai;
- 2) Kurangnya kesadaran akan tertib arsip di lingkungan instansi pemerintah;
- 3) Pemeliharaan dan perawatan dokumen negara dan naskah kuno belum terkelola dengan baik;
- 4) Kualitas dan kuantitas SDM arsiparis belum memadai;
- 5) Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- 6) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal.

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum memadai;
- 3) Pelayanan keperpustakaan belum menjangkau ke pelosok desa;
- 4) Perpustakaan digital belum berfungsi optimal;
- 5) Minat baca masyarakat masih rendah.



4.10.27. Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan jumlah penduduk di Halmahera Selatan masih didominasi oleh kelahiran/kematian dari pada migrasi penduduk. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Validitas data penduduk masih rendah;
- 2) Sistem administrasi desa yang belum berfungsi optimal;
- 3) Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih terpusat di ibukota kabupaten;
- 4) Sistem administrasi kependudukan sering mengalami perubahan;
- 5) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
- 6) Petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan desa belum tersedia;
- 7) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang;
- 8) Masih banyaknya pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah, mengakibatkan pengurusan Kartu Keluarga dan e-KTP masih menemui kendala.

4.10.28. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tentram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi:

- 1) Deteksi dini terhadap potensi konflik dan gangguan kantibmas melalui pemberdayaan peran kominda belum optimal;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui siskamling masih kurang;
- 3) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat;
- 4) Penegakan Perda belum optimal;
- 5) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal;
- 6) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;
- 7) Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang;
- 8) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang.

4.10.29. Penanggulangan Bencana

Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana belum banyak dilakukan. Paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana.

Perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini; 1) penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko; 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak



asasi rakyat dan bukan semata-mata kewajiban pemerintah; 3) penanganan bencana bukan lagi menjadi semata-mata tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat). Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas;
- 2) Koordinasi lintas sector penanganan bencana masih lemah;
- 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang;
- 4) Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta penetapan system peringatan dini masih kurang;
- 5) Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.

4.11. Isu-Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan seperti di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah lima tahun ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut:

4.11.1. Isu Strategis 1: Penanganan Pandemi COVID-19, Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan

Musibah bencana non alam, wabah pandemi COVID-19 telah menjadi tragedi kemanusiaan dan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Tingkat penyebaran yang begitu cepat dan proses mutasi virus yang terus berlangsung menyebabkan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan para ahli epidemiologi dunia sulit memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. Para ahli menyepakati bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 hanya dapat melalui 3 pendekatan: *pertama*, penegakan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas), *kedua*, pelaksanaan 3T (*test, tracing, dan treatment*), *ketiga*, vaksinasi untuk mendorong terjadinya *herd immunity* (imunitas komunal). Tantangan yang dihadapi dalam penanganan COVID-19 adalah kesadaran masyarakat untuk menjalankan penegakan protokol kesehatan dinilai masih rendah. Di sisi lain tingkat intervensi 3T yang masih rendah dan cakupan vaksinasi yang juga masih rendah disebabkan oleh rendahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksinasi.

Selain tantangan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dampak ikutan dari wabah pandemi ini adalah menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat akibat lesunya perekonomian. Hal ini mengakibatkan angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Tantangan dalam upaya pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan program jaring pengamanan sosial terhadap masyarakat rawan sosial dan termarjinalkan (anak terlantar, fakir miskin, penyandang disabilitas dan



pengangguran) yang terdampak COVID-19 dalam rangka memastikan ketersediaan dan akses terhadap kebutuhan pokok, penguatan dan pemberdayaan UMKM, insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat, dan jaminan terhadap akses pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih bagi masyarakat miskin dan pekerja informal.

4.11.2. Isu Strategis 2: Pengembangan Kawasan serta Penyediaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Selama ini pendekatan pembangunan lebih banyak pendekatan parsial dan sporadis, sehingga *output* dan *outcome* yang dirasakan oleh masyarakat dirasa kurang. Sementara karakteristik geografis Halmahera Selatan yang berupa kepulauan, membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis kawasan terpadu sesuai tipologi, potensi dan fokus pengembangan kewilayahannya. Setidaknya ada 5 klaster pulau besar yang ada di Halmahera Selatan, yaitu: Bacan, Obi, Gane, Kasiruta Mandioli dan Makian Kayoa. Tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pembangunan kawasan adalah belum adanya *roadmap* pengembangan kawasan, belum fokus dan holistiknya perencanaan pengembangan kawasan, masalah status kawasan dan penyediaan ruang/luhan, lemahnya koordinasi lintas sektor dan terbatasnya ruang fiskal.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, ekonomi dan sosial secara merata dan berkualitas dibutuhkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, membuka keterisolasi dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Tantangan bagi pembangunan infrastruktur adalah angka pertumbuhan pembangunan jalan yang lebih lambat daripada kecepatan pertumbuhan penduduk dan mobilitas orang dan barang, adanya penetapan status jalan antara kabupaten, provinsi dan pusat yang belum jelas menyebabkan lambannya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan, penyebaran pembangunan infrastruktur yang belum merata, masalah pembebasan lahan dan kualitas infrastruktur yang rendah.

Terkait dengan sektor perhubungan yang menjadi tantangan adalah penyediaan fasilitas terminal, pelabuhan dan bandara yang representatif, penyediaan moda transportasi publik baik darat, laut maupun udara yang terintegrasi, murah dan nyaman.

Terkait infrastruktur telekomunikasi, informatika dan komunikasi (TIK), tidak dapat dipungkiri memang transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan di era desruptif 4.0. Oleh karenanya penyediaan infrastuktur TIK menjadi kebutuhan yang tidak bias dielakkan. Namun tantangannya adalah rentang kendali dan tipologi wilayah Halmahera Selatan yang berupa kepulauan membutuhkan sumber daya yang besar, keterbatasan anggaran, masih adanya daerah yang *blank spot*, kurangnya dukungan dari pihak provider telekomunikasi, minimnya sumber daya manusia yang melek teknologi informatika, kurangnya literasi digital bagi terkait infrastruktur listrik dan air bersih, masyarakat.



Sementara tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya angka elektrifikasi, kapasitas pembangkit listrik PLN yang masih terbatas, pelayanan PLN yang belum menjangkau semua wilayah, masih terbatasnya penyediaan listrik perkotaan, pedesaan dan permukiman, masih lambatnya pelayanan gangguan listrik, minimnya pemeliharaan jaringan listrik, pemanfaatan sumber energi terbarukan yang masih minim, sumber air baku yang masih terbatas, belum adanya sistem pengolahan air bersih yang memadai, jaringan pipa air bersih yang belum memadai, penyediaan air bersih pedesaan yang masih minim, pelayanan PDAM masih terbatas dan belum prima.

Tantangan dalam sektor lingkungan hidup adalah regulasi terkait daya dukung lingkungan dan penataan tata ruang yang belum memadai dan menjangkau semua wilayah, ketersediaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang masih minim, konservasi lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai yang masih kurang, penataan drainase yang masih belum optimal, sistem pengelolaan sampah masih tradisional, penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin masih belum optimal, masih banyaknya rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh, masih banyaknya pelanggaran terhadap regulasi tata ruang dan tingkat ketaatian terhadap dokumen lingkungan masih rendah.

4.11.3. Isu Strategis 3: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Inovasi Daerah

Pembangunan sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan suatu daerah karena sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang. Indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah Indek Pembangunan Manusia karena menggambarkan ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (angka harapan hidup), mempunyai pengetahuan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan memiliki standar hidup yang layak (pengeluaran per kapita pe bulan). Walaupun setiap tahun angka IPM Kabupaten Halmahera Selatan terus naik, namun dibandingkan dengan kabupaten lain di Maluku Utara, tingkat IPM Kabupaten Halmahera Selatan masih berada di peringkat 6 yaitu sebesar 64,11 (BPS, 2019), masih jauh di bawah IPM Kota Ternate sebesar 80,03 (BPS,2019).

Dalam sektor pendidikan, masih ditemukan angka rata-rata lama sekolah masih rendah berarti tingkat putus sekolah yang cukup tinggi, kesadaran dan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi juga masih minim, masih kurangnya tenaga guru, ditambah dengan belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas guru/ tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, rendahnya manajemen pengelolaan sekolah, kurangnya perhatian terhadap pendidikan informal dan nonformal, pengembangan perguruan tinggi dan pendidikan vokasi.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai masih rendahnya tingkat *Universal Health Coverage* (UHC),



baru sekitar 42,68% (BPJS, 2021) artinya cakupan masyarakat yang bisa mendapatkan akses dan pelayanan jaminan kesehatan masih rendah. Kemudian masih minim dan belum meratanya penempatan tenaga kesehatan, masih tingginya angka stunting dan penyakit menular lainnya, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.

Di sektor tenaga kerja, jumlah angkatan kerja di Halmahera Selatan cukup tinggi namun tidak ditunjang dengan kompetensi dan ketrampilan yang mumpuni, sehingga angka pengangguran cukup tinggi. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya serta meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja.

Tantangan dalam mengembangkan inovasi daerah adalah masih rendahnya budaya literasi masyarakat, terbatasnya akses terhadap media ilmu pengetahuan, masih rendahnya kreativitas aparatur dan masyarakat, kurangnya sarana pengembangan kreativitas, kompetisi inovasi dan kreativitas yang masih minim, minimnya perlindungan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas inovasi, masih minimnya riset dan penelitian serta kurangnya insentif terhadap pelaku industri kreatif

4.11.4. Isu Strategis 4: Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik

Peran aparatur birokrasi sebagai *public servant* ke depan sangat strategis karena adanya tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Pergeseran paradigma dan budaya birokrasi dari “dilayani” menjadi “melayani” bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan *political will*, keteladan dan konsistensi untuk merealisasikan konsep reformasi birokrasi. Era disruptif dan transformasi digital juga memaksa birokrasi untuk bisa lebih “*agile*” (lincah) dan adaptif terhadap perubahan. Tantangan yang dihadapi adalah terjadinya *culture shock* di tubuh birokrasi yang membutuhkan dorongan dan motivasi untuk *open minded* (terbuka) dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Selain itu perlu adaanya *guidance* terhadap proses bisnis (*bussines process*) di birokrasi berupa SOP atau regulasi agar terbangun sistem organisasi yang handal. Kemudian masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pelayanan yang lebih transparan, cepat dan murah. Perlu juga adanya peningkatan kualitas perencanaan melalui perbaikan kualitas data dan peningkatan kapasitas perencana. Selain itu dalam konteks pengelolaan keuangan dan transformasi pemerintahan menuju *enterpreneurship government* (pemerintahan berbasis kewirausahaan) perlu kiranya inovasi dalam penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Sementara itu dalam hal transformasi pengawasan, tantangannya adalah masih lemahnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), pembinaan mental aparatur yang masih belum optimal, serta masih kurangnya tenaga auditor.



Di sektor pemberdayaan kelembagaan desa, terlihat masih banyak desa yang masuk kategori tertinggal. Hal ini dikarenakan minimnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, belum optimalnya peran BUMDesa sebagai akselerator perekonomian di desa, masih minimnya infrastruktur publik di desa dan lemahnya administrasi desa.

Di sektor kependudukan, tantangannya adalah masalah desentralisasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal serta validasi data kependudukan yang lambat.

4.11.5. Isu Strategis 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah., terutama di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai mata pencaharian utama masyarakat Halmahera Selatan. Seiring dengan meningkatnya investasi terutama di sektor pertambangan, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh sektor ekonomi kerakyatan untuk bisa menangkap peluang bersinergi dengan investasi yang ada, namun banyak tantangannya.

Di sektor koperasi dan UMKM misalnya, kinerja koperasi dan UMKM pada level produktivitas, kontinuitas dan kualitas produk yang masih rendah, jaringan pasar yang masih terbatas, dan akses permodalan yang juga terbatas.

Sementara di sektor pertanian, masih belum optimalnya produksi pertanian karena masih terkendala masalah kapasitas dan kualitasnya, khususnya terkait dengan kemampuan produktifitas petani dan pengolahan hasil-hasil pertanian paska panen.

Kemampuan produksi hasil perkebunan masih rendah padahal potensi ketersediaanya tinggi. Potensi luas lahan perkebunan di Halmahera Selatan adalah 105.509,77 Ha, tetapi yang termanfaatkan baru 45.794,47 Ha. Demikian juga kemampuan dalam pengolahan paska panen juga rendah sehingga pemasukan devisa bagi daerah dari sektor ini masih lemah.

Di sektor kehutanan, tantangannya adalah luas kawasan hutan yang semakin menyempit (deforestasi) akibat dari kegiatan pertambangan. Di satu sisi kegiatan penambangan dibutuhkan dalam rangka pendayagunaan bahan-bahan tambang tetapi di sisi lain mengurangi luas kawasan hutan yang juga dibutuhkan dalam konteks konservasi dan penjagaan keseimbangan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Kemudian belum optimalnya kegiatan reboisasi dan penghijauan serta masih minimnya pemanfaatan hasil hutan non kayu

Selain itu tantangan di sektor perikanan dan kelautan yaitu belum optimalnya pengelolaan atas potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah. Perlu dukungan yang lebih memadai lagi berupa penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan khususnya desa-desa yang mayoritas penduduknya nelayan. Masih belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya dan pemanfaatan hasil laut non ikan.

Kemudian dari sisi daya saing produk daerah tantangannya adalah belum optimalnya kualitas produk-produk daerah sehingga memiliki daya saing yang rendah di pasar nasional maupun global. Masih rendahnya kompetensi dan



kemampuan inovasi dalam hal diversifikasi produk, pengemasan maupun aspek legalisasi

Di sektor industri, bahan baku untuk industri tersedia melimpah di Halmahera Selatan, khususnya di sector kehutanan, perkebunan, tambang, dan perikanan. Namun ketersediaan industri pengolahan (manufaktur) yang dibutuhkan untuk mengembangkan nilai tambah komoditas masih belum ada, akibat ketersediaan pesokan listrik yang masih terbatas dan ongkos transportasi yang masih tinggi.

4.11.6. Isu Strategis 6: Stabilitas Keamanan, Rekonsiliasi Sosial, dan Pengembangan Budaya Daerah

Keberagaman etnis dan budaya di Kabupaten Halmahera Selatan di satu sisi adalah anugerah dan aset daerah, namun di sisi lain menyimpan potensi konflik yang besar apabila tidak dikelola dengan baik. Pengalaman sejarah terjadinya konflik horizontal memberikan pelajaran penting akan mahalnya harga sebuah perdamaian. Peran kesultanan Bacan sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya selama ini kurang dioptimalkan dalam menjembatani potensi konflik. Selain itu, faktor keadilan terhadap kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi proses akulturasi. Selama ini juga dirasakan kurangnya kegiatan dialog antar umat beragama dan paguyuban etnis, padahal kegiatan ini sangat penting untuk menjembatani perbedaan yang ada. Sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang selama ini aktif, namun akhir-akhir ini semakin menurun juga berkontribusi terhadap meningkatnya gangguan keamanan dan kantibmas.

Di sektor Budaya, terlihat bahwa masih minimnya even-even budaya yang diselenggarakan untuk melestarikan potensi budaya, masih kurangnya dukungan terhadap pengembangan Kesultanan Bacan dan masih kurangnya ruang dan sarana untuk pengembangan dan pelestarian budaya.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui mayoritas masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam Pemilukada tahun 2020 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi, yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan saat ini memasuki Kebijakan Pembangunan tahap ke-5 (2021-2025) atau tahap akhir yang secara spesifik diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan tahap sebelumnya yang belum terselesaikan dengan penekanan arah kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan infrastruktur ekonomi dan wilayah, 2) Mengembangkan investasi dan pemasaran komoditas unggulan, 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan dan berkelanjutan dan 5) Mengembangkan tata kehidupan pemerintahan, keagamaan dan sosial budaya.

Dengan menyelaraskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada maka VISI RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik,
Beradab dan Penuh Berkah”**

Penjelasan Visi:

BERSATU, merepresentasikan adanya suatu jalinan persaudaraan abadi dan kebersamaan yang adil diantara seluruh komponen masyarakat yang mendiami wilayah Halmahera Selatan dalam satu ikatan Saruma, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat seatorang.

MENGEMBALIKAN, merepresentasikan adanya upaya sungguh-sungguh, terencana, terarah dan terukur guna meletakkan kembali nilai-nilai dasar pemerintahan dan hak-hak dasar masyarakat Halmahera Selatan.

SENYUM, merepresentasikan suatu kondisi kejiwaan masyarakat yang mengekspresikan suasana keimanan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kemakmuran dan ketulusan.

HALMAHERA SELATAN, merepresentasikan tempat dimana kita hidup dan wilayah tempat pengabdian, dengan segala karakteristik, dinamika, potensi dan keberagaman yang meliputinya.

BERADAB, merepresentasikan nilai-nilai luhur dan budaya seatorang, yang dijunjung tinggi oleh seluruh pengambil kebijakan dan masyarakat Halmahera Selatan.

PENUH BERKAH, merepresentasikan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang selalu mengedepankan nilai-nilai agama, dalam menggapai keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat untuk menjalankannya dalam upaya mewujudkan cita-cita masa depan Kabupaten Halmahera Selatan.

5.2. Misi Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan 7 (tujuh) Misi atau disebut juga **SAPTA SENYUM** (TUJUH SEMANGAT NYATA UNTUK MEMBANGUN) yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. **SENYUM SARUMA: Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian**
Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma.
2. **SENYUM PRIMA: Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan** yang bertumpu pada prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta manajemen berbasis nilai.
3. **SENYUM BERDAYA: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat** dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
4. **SENYUM UNGGUL: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.**
5. **SENYUM SEJAHTERA: Merevitalisasi Sistem Kemandirian Ekonomi Daerah** berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing.
6. **SENYUM MAJU: Mengembangkan sistem Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan** yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan.



7. **SENYUM BERKAH: Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seatorang**, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian.

Penjelasan masing-masing Misi:

1. Misi Pertama merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengarahkan pembangunan kehidupan bernegara untuk penguatan idiosafis Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan masyarakat Halmahera Selatan yang bertanggung jawab, gotong-royong, tentram dan tertib serta penuh prestasi.
2. Misi Kedua merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus memantapkan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Misi Ketiga merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengarahkan pembangunan kehidupan sosial sebesar-besarnya untuk penguatan kehidupan masyarakat Halmahera Selatan yang bertanggung jawab dan mandiri.
4. Misi Keempat merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, serta derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, merata dan terjangkau.
5. Misi kelima merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada semua sektor dengan prioritas sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang menjadi unggulan daerah, didukung sektor UMKM yang produktif serta peningkatan investasi sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam kancah regional, nasional dan global.
6. Misi keenam merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis kepulauan yang bertujuan untuk peningkatan konektivitas wilayah, mempermudah aksesibilitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.
7. Misi Ketujuh merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengembangkan kehidupan beragama di Halmahera Selatan yang lebih beradab, berkepribadian dan harmonis serta masyarakat yang mampu melestarikan budaya, kearifan lokal dan adat seatorang di Bumi Saruma Halmahera Selatan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah atau masyarakat dalam jangka waktu tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat lebih fokus, efektif, dan efisien.



Adapun Tujuan dan Sasaran masing-masing Misi Pembangunan Halmahera Selatan tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama SENYUM SARUMA

Misi Pertama **SENYUM SARUMA** bertujuan “Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, tertib dan aman serta berprestasi” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan.
2. Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana.
4. Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda.

Tujuan dan Sasaran Misi Kedua SENYUM PRIMA:

Misi Kedua **SENYUM PRIMA** bertujuan “Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang prima sesuai azas reformasi birokrasi dan Budaya Kerja ASN yang professional” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan.
3. Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara.
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara.
5. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
6. Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
7. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
8. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
9. Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah.
10. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD.
11. Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga SENYUM BERDAYA:

Misi Ketiga **SENYUM BERDAYA** bertujuan “Mewujudkan Sitem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatnya Ketahanan dan Kemananan Pangan Strategis Daerah.



Tujuan dan Sasaran Misi Keempat SENYUM UNGGUL:

Misi Keempat **SENYUM UNGGUL** bertujuan “Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing” dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan.

Tujuan dan Sasaran Misi Kelima SENYUM SEJAHTERA:

Misi Kelima **SENYUM SEJAHTERA** bertujuan “Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal” dengan sasaran:

1. Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata.
2. Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan.
3. Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan.
4. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan.
5. Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan.

Tujuan dan Sasaran Misi Keenam SENYUM MAJU:

Misi Keenam **SENYUM MAJU** bertujuan “Mewujudkan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut.
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman.
5. Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan.
7. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kawasan Transmigrasi.



Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh SENYUM BERKAH:

Misi Ketujuh **SENYUM BERKAH** bertujuan “Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang” dengan sasaran:

1. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang.
2. Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas.

Sedang hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2



Tabel 5.1
Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2021-2026

| Visi | | | | | |
|--|---|--|--------|---------------|-------------|
| “ Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah ” | | | | | |
| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Baseline 2020 | Target 2026 |
| Misi 1: SENYUM SARUMA Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma | Tujuan 1: Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, tertib dan aman serta berprestasi | 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Persentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani | Skor % | N/A N/A | 75 100 |
| Misi 2: SENYUM PRIMA Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan yang bertumpu pada prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta manajemen berbasis nilai | Tujuan 2: Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Prima sesuai azas reformasi birokrasi dan Budaya Kerja ASN yang profesional | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | Skor | N/A | 65 |
| Misi 3: SENYUM BERDAYA Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat | Tujuan 3: Mewujudkan Sitem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas | Persentase Penduduk Miskin | % | 5,21 | 4,00 |
| Misi 4: SENYUM UNGGUL Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sestim Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau | Tujuan 4: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia | Skor | 63,84 | 67,00 |



| <p style="text-align: center;">Visi</p> <p style="text-align: center;">“ Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah “</p> | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Baseline 2020 | Target 2026 |
| Misi 5: SENYUM SEJAHTERA Merevitalisasi Sistem Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing | Tujuan 5: Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal | 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB per Kapita | % Rp / Kapita/ Tahun | 16,22 35.020.675 | 13,50 55.416.044 |
| Misi 6: SENYUM MAJU Mengembangkan sistem Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan | Tujuan 6: Mewujudkan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas | Indeks Konektivitas Wilayah - Rumus: Jumlah jaringan jalan / rute pelayaran dibagi jumlah kota - Semakin tinggi indeks Konektivitas wilayah semakin baik | Skor | NA | 65 |
| Misi 7: SENYUM BERKAH Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seatorang , sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian | Tujuan 7: Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang | Indeks Kerukunan Umat Beragama - Skor 0 – 100, semakin tinggi semakin baik - Menggunakan tiga variabel: toleransi, kesetaraan dan kerjasama | Skor | NA | 70 |



Tabel 5.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) | Baseline 2020 | Target 2026 | OPD PJ |
|--|--|---|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, tertib dan aman serta berprestasi | 1) Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan | 1. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan (Indeks) 2. Persentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani (%) | N/A 100 | 75 100 | Kesbangpol |
| | 2) Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat | 1. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam (%) | N/A 100 | 80 100 | Satpol – PP Pemadam Kebakaran |
| | 3) Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana | 1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2. Indeks Resiko Bencana (IRB) | 0,26 213,82 | 0,40 213,82 | BPBD |
| | 4) Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda | 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%) 2. Peningkatan prestasi olahraga (Medali) | N/A 5 | 12 60 | Pemuda dan OR |
| 2. Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Prima sesuai azas reformasi birokrasi dan Budaya Kerja ASN yang professional | 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan | 1. Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP 2. Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA 3. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | 78 3 65 | 100 50 100 | Dukcapil |
| | 6) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan | 1. Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa (Orang) 2. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (dokumen) 3. Jumlah Pengunjung perpustakaan (Orang) | N/A N/A 386 | 360 720 2.880 | Perpustakaan dan Kearsipan |
| | 7) Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara | 1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti (%) 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus | 19 75 | 70 90 | Inspektorat |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) | Baseline 2020 | Target 2026 | OPD PJ |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------|--------|
| | | ditindaklanjuti (%) 3. Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Minimal A (%) | 30 | 80 | |
| 8) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara | 1. Indeks Profesionalitas Aparatur (IPA) | NA | 82 | BKPPD | |
| 9) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | 1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2. Persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD (%) 3. Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat (%) | N/A 7,00 25 | 73,543 11,50 80 | BPKAD | |
| 10) Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum. | 1. Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha) | 30 | 90 | Pertanahan/ Bidang Aset | |
| 11) Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%) 2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%) | N/A | 100 | Statistik | |
| 12) Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 1. Tersedianya informasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lain) 2. Persentase kesesuaian antara Program RPJMD dengan RKPD (%) 3. Persentase Program RPJMD yang tercapai target kinerjanya (%) 4. Persentase OPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja \geq 76 %) | 2 100 68 49 | 15 100 90 80 | Bappelitbang da | |
| 13) Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah | 1. Indeks Inovasi Daerah | 46 | 1.000 | Bappelitbang da | |
| 14) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD | 1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Skor) 2. Nilai LPPD Pemerintah Daerah (skor) 3. Tingkat pencapaian Program Legislasi Daerah/PROLEGDA (%) | CC 3,00 30 | AA 4,00 100 | Setda Setwan | |
| 15) Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan | Cakupan pelayanan kecamatan | 90 | 100 | Kecamatan | |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) | Baseline 2020 | Target 2026 | OPD PJ |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 16) Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | 1. Jumlah desa maju dan mandiri (Desa) 2. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (Desa) | 9 187 | 21 127 | DPMD |
| 3. Mewujudkan Sitem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas | 17) Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1. Persentase PMKS yang tertangani (%) 2. Persentase Maskin yang tertangani (Orang) | 49,0 35 | 74 70 | Sosial |
| | 18) Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%) | 50 70 50 70 | 62 95 68 95 | DP3AKB |
| | 19) Meningkatnya Ketahanan dan Kemanan Pangan Strategis Daerah | 1. Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) 2. Persentase Cadangan Pangan Masyarakat (%) | 19 NA | 25 20 | Pertanian & Ketahanan Pangan |
| 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing | 20) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan | 1. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 3. Persentase Sekolah dengan nilai Akreditasi Minimal A (%) | 7,91 12,85 20 | 8,97 14,72 50 | Pendidikan |
| | 21) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1. Usia Harapan Hidup (tahun) 2. Persentase Balita Stunting (%) 3. Angka Kesakitan (%) 4. Persentase desa ODF (%) 5. Peningkatan Status / Tipe RS (RSUD Labuha, RSU Obi) | 65,86 11,00 10,72 0,02 C | 66,93 5,00 2,00 24,8 B | Kesehatan |
| | 22) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan | 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | N/A 75,90 | 65 85,00 | DP3AKB |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) | Baseline 2020 | Target 2026 | OPD PJ |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 5. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal | 23) Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata | 1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 33,79 12,85 | 40,29 18,85 | Perindustrian Perdagangan Pariwisata |
| | 24) Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan | 1. Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%) 2. Cakupan bina kelompok petani 3. Cakupan bina kelompok nelayan | 20,24 20 25 | 23,04 50 55 | Pertanian Perikanan |
| | 25) Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan | 1. Jumlah calon investor yg berminat untuk berinvestasi di Halmahera Selatan 2. Realisasi Penanaman Modal di Halmahera Selatan (Juta Rp) 3. Jumlah perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya (dok) 4. Presentasi pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti (%) | 593 88,66 2191 100 | 850 700 2720 100 | Penanaman Modal dan PTSP |
| | 26) Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan | 1. Persentase koperasi Aktif dan volume usahanya meningkat (Koperasi yang Berkualitas) 2. Persentase UMK yang aktif dan volume usahanya meningkat/ Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | 38,18 40 | 70 70 | Koperasi dan UMKM |
| | 27) Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan | 1. Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan) | 125 | 450 | Tenaga Kerja |
| 6. Mewujudkan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas | 28) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut | 1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik/ mantap (%) 2. Rasio Konektivitas Nasional / Wilayah 3. Persentase kendaraan yang layak uji (%) 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Skor) | 23,61 0,495 N/A 83 | 35,69 0,795 100 89 | PU, Perhubungan |
| | 29) Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik | 1. Persentase lahan pertanian yang teraliri irigasi teknis (%) | 12 | 24 | PU Bidang SDA Pertanian |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama) | Baseline 2020 | Target 2026 | OPD PJ |
|--|--|--|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 7. Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang | 30) Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi | 1. Persentase Implementasi E-Goverment di Kabupaten Halmahera Selatan 2. Persentase SKPD yang telah memiliki Sistim Informasi Manajemen (SIM) dan WEB 3. Persentase desa yang dapat mengakses sinyal telepon seluler | 50 80 50 | 100 100 100 | Diskominfo |
| | 31) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman | 1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%) 2. Proporsi jaringan drainase lingkungan dalam kondisi baik (%) 3. Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) | 77,7 75 64 | 83 100 88 | Perkim |
| | 32) Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak | 1. Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak (%) 2. Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak (%) | 58,83 51,90 | 73,83 66,9 | Perkim |
| | 33) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor) 2. Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang (%) | 68,22 30,4 | 71,02 35,4 | Lingkungan Hidup Tata Ruang |
| | 34) Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | 1. Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang direvitalisasi | N/A | 100 | Transmigrasi |
| 7. Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang | 35) Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang | 1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan/ dilindungi 2. Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/ dilindungi 3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 6 6 2 | 6 12 6 | Pariwisata dan Kebudayaan |
| | 36) Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas | 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama | 76,4 | 78,8 | Bag Kesra Setda Kesbangpol |



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu adanya manajemen pembangunan yang sistematis, terencana dan terukur. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Strategi pembangunan pada dasarnya adalah merupakan rincian cara atau upaya yang diperlukan untuk dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah dijelaskan pada Bab V. Untuk menjaga operasionalisasi dari strategi pembangunan ini, maka perumusannya juga didasarkan pada kondisi umum daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab II serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Untuk menjaga konsistensi, maka perumusan strategi dikaitkan langsung dengan misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, untuk melaksanakan strategi diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena arah kebijakan merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin. Selanjutnya, agar perumusan strategi dan arah kebijakan menjadi lebih terarah, sebelumnya dilakukan analisis lingkungan dan analisis strategi pilihan.

6.1 Analisis Lingkungan

6.1.1 Analisis Lingkungan Strategis

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Lingkungan internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.



6.1.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif yang tersedia seperti posisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta organisasi pemerintah. Identifikasi ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi tersebut terdiri dari unsur kekuatan dan kelemahan daerah. Adapun hasil identifikasi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

a. Kekuatan

Kekuatan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat;
- 2) Penduduk usia produktif yang jumlahnya cukup besar;
- 3) Potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan, perkebunan dan perikanan;
- 4) Potensi pariwisata yang terdiri dari pulau-pulau yang masih alami dalam jumlah cukup banyak serta kearifan lokal;
- 5) Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 6) Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali;
- 7) Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan;
- 8) Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Belajar;
- 9) Adanya 3 perguruan tinggi (STP Labuha, Politeknik Halmahera, STAI Al-Khairat) yang telah mendidik dan menghasilkan SDM berpendidikan tinggi di Halmahera Selatan;

b. Kelemahan

Kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Persentase KK miskin yang masih cukup tinggi
- 2) Angka pengangguran yang masih cukup banyak;
- 3) Masih adanya permasalahan KDRT yang belum terlaporkan;
- 4) Sebagian kawasan strategis belum memiliki RDTR;
- 5) Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama;
- 6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
- 7) Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan;
- 8) Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- 9) Masih adanya kawasan permukiman kumuh;



- 10) Belum adanya komitmen pelayanan publik yang tercermin dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 11) Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal;
- 12) Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang;
- 13) Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;
- 14) Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;
- 15) Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;
- 16) Sarana dan prasarana publik belum memadai;
- 17) Akses media komunikasi dan informasi yang masih kurang;
- 18) Kualitas dan akurasi data masih kurang.

6.1.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis terhadap lingkungan eksternal Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang ada di luar organisasi yang dapat berpotensi mengganggu atau sebaliknya mempercepat upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Identifikasi tersebut terdiri dari identifikasi atas unsur peluang dan ancaman yang sedang atau kemungkinan dihadapi. Hasil identifikasi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

a. Peluang

Peluang yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
- 2) Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah;
- 3) Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi;
- 4) Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan Negara;
- 5) Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan Negara;
- 6) Pengembangan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan lembaga-lembaga pemerintah lain dan swasta;
- 7) Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat;
- 8) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan public;
- 9) Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah;

b. Ancaman

Ancaman yang teridentifikasi sebagai berikut:

- 1) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;
- 2) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;



- 3) Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah;
- 4) Migrasi antar daerah yang cukup tinggi berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan local;
- 5) Meningkatnya kerawanan kejahatan dan penyalahgunaan NAPZA;
- 6) Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar;
- 7) Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 dengan lambatnya penyediaan vaksin dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;
- 8) Dampak atas dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perjanjian-perjanjian antar negara multi-partit lainnya;

6.2 Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threat, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang.

Masing-masing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan.



6.2.1 Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O)

| Kekuatan (S) | Peluang (O) | Strategi S-O |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1) Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat;</p> <p>2) Penduduk usia produktif yang jumlahnya cukup besar;</p> <p>3) Potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan, perkebunan dan perikanan;</p> <p>4) Potensi pariwisata yang terdiri dari pulau-pulau yang masih alami dalam jumlah cukup banyak serta kearifan lokal;</p> <p>5) Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>6) Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali;</p> <p>7) Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan;</p> <p>8) Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Belajar;</p> <p>9) Adanya 3 perguruan tinggi (STP Labuha, Politeknik Halmahera, STAI Al-Khairat) yang telah mendidik dan menghasilkan SDM berpendidikan tinggi di Halmahera Selatan;</p> | <p>1) Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;</p> <p>2) Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah;</p> <p>3) Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi;</p> <p>4) Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan Negara;</p> <p>5) Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan Negara;</p> <p>6) Pengembangan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan lembaga-lembaga pemerintah lain dan swasta;</p> <p>7) Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat;</p> <p>8) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan public;</p> <p>9) Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> | <p>1) Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi daerah ke dalam sistem informasi terintegrasi.</p> <p>2) Peningkatan kemandirian dan kewirausahaan di tingkat ekonomi lokal melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>3) Optimalisasi kualitas manajemen dan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.</p> <p>4) Memperkuat kerjasama pemerintah dan swasta khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur.</p> <p>5) Optimalisasi kinerja sektor dominan dengan fokus kepada ekonomi kreatif dan berkelanjutan.</p> <p>6) Menguatkan kemitraan antar daerah dan antar negara sehingga menumbuhkan peluang ekspor dan transaksi antar wilayah.</p> <p>7) Meningkatkan pemerataan dan pemenuhan standar pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan berkarakter.</p> <p>8) Optimalisasi dalam implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender dari tingkat desa.</p> <p>9) Penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak terlantar dan korban kekerasan.</p> <p>10) Penguatan kerja sama antar pemerintah, non lembaga, dan swasta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni</p> <p>11) Memanfaatkan posisi strategis dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata;</p> |



6.2.2 Strategi antara Kelemahan dan Peluang (W-O)

| Kelemahan (W) | Peluang (O) | Strategi W-O |
|---|--|--|
| | | 1 |
| <p>1) Persentase KK miskin yang masih cukup tinggi</p> <p>2) Angka pengangguran yang masih cukup banyak;</p> <p>3) Masih adanya permasalahan KDRT yang belum terlaporkan;</p> <p>4) Sebagian kawasan strategis belum memiliki RDTR;</p> <p>5) Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama;</p> <p>6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;</p> <p>7) Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan;</p> <p>8) Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>9) Masih adanya kawasan permukiman kumuh;</p> <p>10) Belum adanya komitmen pelayanan publik yang tercermin dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</p> <p>11) Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal;</p> <p>12) Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang;</p> <p>13) Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;</p> <p>14) Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;</p> <p>15) Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;</p> <p>16) Sarana dan prasarana publik belum memadai;</p> <p>17) Akses media komunikasi dan informasi yang masih kurang;</p> <p>18) Kualitas dan akurasi data masih kurang.</p> | <p>1) Telah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan aturan terkait penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;</p> <p>2) Tersedianya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang mempermudah investasi di daerah;</p> <p>3) Minat investor untuk menanamkan investasi cukup tinggi;</p> <p>4) Terbukanya kesempatan dalam pemasaran produk antar wilayah dan Negara;</p> <p>5) Adanya kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja antar daerah dan Negara;</p> <p>6) Pengembangan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan lembaga-lembaga pemerintah lain dan swasta;</p> <p>7) Pesatnya pertumbuhan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat;</p> <p>8) Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam transparansi dan efektivitas layanan public;</p> <p>9) Tumbuhnya pangsa pasar khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> | <p>1) Meningkatkan upaya pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin.</p> <p>2) Memperkuat komunikasi dan manajemen kelembagaan dalam forum antar umat beragama sehingga mampu meredam konflik yang terjadi.</p> <p>3) Percepatan dalam penyediaan produk hukum yang mengatur tata ruang wilayah.</p> <p>4) Meningkatkan keterjangkauan, kecepatan, dan keterbukaan dalam investasi serta pemanfaatannya bagi masyarakat.</p> <p>5) Memperkuat komitmen dan transparansi layanan publik melalui kesepakatan bersama dalam pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.</p> <p>6) Memfokuskan kembali penyediaan infrastruktur berkualitas dalam mendukung mitigasi bencana dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan.</p> <p>7) Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan ketersediaan layanan kesehatan secara merata.</p> <p>8) Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan dan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.</p> <p>9) Memperkuat inovasi, menjamin perlindungan, dan memperluas daya dukung sarana prasarana bagi pertanian berkelanjutan</p> <p>10) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan;</p> <p>11) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance;</p> <p>12) Memperluas kesempatan kerja melalui kewirausahaan, peningkatan investasi dan kerjasama antar daerah;</p> <p>13) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>14) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama daerah dan swasta;</p> <p>15) Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi;</p> |



6.2.3 Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T)

| Kekuatan (S) | Ancaman (T) | Strategi S-T |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1) Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah sesuai ketentuan yang berlaku dan kepentingan masyarakat;</p> <p>2) Penduduk usia produktif yang jumlahnya cukup besar;</p> <p>3) Potensi sumber daya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan, perkebunan dan perikanan;</p> <p>4) Potensi pariwisata yang terdiri dari pulau-pulau yang masih alami dalam jumlah cukup banyak serta kearifan lokal;</p> <p>5) Berkembang pesatnya usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>6) Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali;</p> <p>7) Terpenuhinya rasio minimal RTH di tingkat perkotaan;</p> <p>8) Tersedianya jaminan dalam upaya pencapaian Angka Partisipasi Belajar;</p> <p>9) Adanya 3 perguruan tinggi (STP Labuha, Politeknik Halmahera, STAI Al-Khairat) yang telah mendidik dan menghasilkan SDM berpendidikan tinggi di Halmahera Selatan;</p> | <p>1) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;</p> <p>2) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;</p> <p>3) Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah;</p> <p>4) Migrasi antar daerah yang cukup tinggi berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan local;</p> <p>5) Meningkatnya kerawanan kejahatan dan penyalahgunaan NAPZA;</p> <p>6) Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar;</p> <p>7) Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 dengan lambatnya penyediaan vaksin dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;</p> <p>8) Dampak atas dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perjanjian-perjanjian antar negara multi-partit lainnya;</p> | <p>1) Peningkatan dan penyelarasan arah reformasi birokrasi didukung pembinaan terhadap ASN daerah.</p> <p>2) Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan ketahanan desa mandiri dan berbudaya secara berkelanjutan.</p> <p>3) Peningkatan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>4) Menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal, serta pendampingan dalam penciptaan mekanisme pemasaran digital.</p> <p>5) Peningkatan ketahanan keluarga dan pengembangan keterlindungan warga.</p> <p>6) Optimalisasi penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan standar pengelolaan ekonomi hijau.</p> <p>7) Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin.</p> <p>8) Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat tumbuhnya desa mandiri tangguh bencana.</p> <p>9) Penguatan kualitas komunikasi pusat daerah, penyediaan fokus anggaran dalam upaya pemulihan kesehatan masyarakat, dan pengetatan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan.</p> <p>10) Memperkuat sinergitas terbukanya akses yang adil dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat yang dimulai dari tingkat Desa</p> <p>11) Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk mengantisipasi pengaruh negatif nilai dan budaya asing terhadap perilaku masyarakat;</p> <p>12) Memanfaatkan semua potensi sumberdaya untuk mengantisipasi gangguan terhadap kamtibmas, pengaruh nilai dan budaya asing serta pengaruh dari perjanjian-perjanjian multilateral oleh pemerintah Indonesia;</p> <p>13) Mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah dan OPD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam rangka antisipasi menurunnya dana perimbangan Pemerintah.</p> |





***RPJMD Halmahera Selatan Tahun 2021-2026
SAPTA SENYUM***

6.2.4 Strategi antara Kelemahan dan Ancaman (W-T)

| Kelemahan (W) | Ancaman (T) | Strategi W-T |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1) Persentase KK miskin yang masih cukup tinggi</p> <p>2) Angka pengangguran yang masih cukup banyak;</p> <p>3) Masih adanya permasalahan KDRT yang belum terlaporkan;</p> <p>4) Sebagian kawasan strategis belum memiliki RDTR;</p> <p>5) Belum optimalnya lembaga keagamaan dan forum antar umat beragama;</p> <p>6) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;</p> <p>7) Masih adanya masyarakat yang belum tercakup dalam layanan kependudukan dan jaminan kesehatan;</p> <p>8) Belum maksimalnya upaya perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>9) Masih adanya kawasan permukiman kumuh;</p> <p>10) Belum adanya komitmen pelayanan publik yang tercermin dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</p> <p>11) Penanganan sampah dan limbah yang belum optimal;</p> <p>12) Sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana yang masih kurang;</p> <p>13) Kualitas sumberdaya manusia masih kurang;</p> <p>14) Kualitas pelayanan pemerintah belum optimal;</p> <p>15) Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih kurang;</p> <p>16) Sarana dan prasarana publik belum memadai;</p> <p>17) Akses media komunikasi dan informasi yang masih kurang;</p> <p>18) Kualitas dan akurasi data masih kurang.</p> | <p>1) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif terhadap perilaku masyarakat;</p> <p>2) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang;</p> <p>3) Semakin terbukanya jalur penyampaian ekspresi masyarakat terhadap layanan pemerintah;</p> <p>4) Migrasi antar daerah yang cukup tinggi berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan lunturnya nilai-nilai kearifan local;</p> <p>5) Meningkatnya kerawanan kejahatan dan penyalahgunaan NAPZA;</p> <p>6) Potensi kebencanaan di daerah yang cukup besar;</p> <p>7) Terhambatnya upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 dengan lambatnya penyediaan vaksin dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;</p> <p>8) Dampak atas dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perjanjian-perjanjian antar negara multi-partit lainnya;</p> | <p>1) Penguatan kualitas dan integritas OPD dengan penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.</p> <p>2) Penguatan keterlindungan warga, keamanan, serta ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.</p> <p>3) Percepatan dalam upaya penyediaan produk hukum dan turunannya terkait pengelolaan ruang.</p> <p>4) Memperkuat perlindungan dan menyederhanakan alur investasi bagi pengembangan ekonomi lokal baik skala mikro, kecil, ataupun menengah.</p> <p>5) Menumbuhkan kembali nilai-nilai ketuhanan di dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong.</p> <p>6) Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan sampah masyarakat.</p> <p>7) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan keuangan dan asset-aset daerah.</p> <p>8) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan.</p> <p>9) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.</p> <p>10) Menumbuhkan alternatif kerjasama dan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan baru melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta/badan usaha</p> <p>11) Memberdayakan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas;</p> <p>12) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk mengantisipasi pengaruh nilai dan budaya asing yang negatif, bencana, serta gangguan kamtibmas;</p> <p>13) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam gempa dan banjir di wilayahnya;</p> <p>14) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik untuk mengantisipasi bencana, gangguan kamtibmas serta meningkatkan daya saing daerah;</p> <p>15) Meningkatkan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah.</p> |





***RPJMD Halmahera Selatan Tahun 2021-2026
SAPTA SENYUM***

Berdasarkan analisis strategi tersebut di atas, maka beberapa pilihan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

- Meningkatkan pemerataan dan pemenuhan standar pendidikan inklusif serta pengembangan pendidikan berkarakter
- Penguatan kerja sama antar pemerintah, non lembaga, dan swasta dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk mengantisipasi pengaruh nilai dan budaya asing yang negatif, bencana, serta gangguan kamtibmas;

2. Urusan Kesehatan

- Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan dasar dan ketersediaan layanan kesehatan secara merata
- Penguatan kualitas komunikasi pusat daerah, penyediaan fokus anggaran dalam upaya pemulihian kesehatan masyarakat, dan pengetatan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan

3. Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Perhubungan dan Infokom

- Mengoptimalkan penyediaan sistem jaringan prasarana sarana wilayah yang merata
- Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan dan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- Memperkuat komunikasi dan manajemen kelembagaan dalam forum antar umat beragama sehingga mampu meredam konflik yang terjadi
- Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat tumbuhnya desa mandiri tangguh bencana
- Memanfaatkan semua potensi sumberdaya untuk mengantisipasi gangguan terhadap kamtibmas, pengaruh nilai dan budaya asing serta pengaruh dari perjanjian-perjanjian multilateral oleh pemerintah Indonesia
- Penguatan keterlindungan warga, keamanan, serta ketertiban di dalam lingkungan masyarakat
- Menumbuhkan kembali nilai-nilai ketahanan di dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong



- Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayahnya;
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik untuk mengantisipasi bencana, gangguan kamtibmas serta meningkatkan daya saing daerah
5. Urusan Sosial
- Meningkatkan upaya pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin
 - Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin
 - Memberdayakan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas
6. Urusan Tenaga Kerja
- Memperluas kesempatan kerja melalui kewirausahaan, peningkatan investasi dan kerjasama antar daerah
7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Optimalisasi dalam implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender dari tingkat desa
 - Penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak terlantar dan korban kekerasan
8. Urusan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
- Memfokuskan kembali penyediaan infrastruktur berkualitas dalam mendukung mitigasi bencana dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan
 - Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Optimalisasi penyediaan ruang terbuka hijau dan penguatan standar pengelolaan ekonomi hijau
 - Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah dan sampah masyarakat
 - Percepatan dalam penyediaan produk hukum yang mengatur tata ruang wilayah
 - Peningkatan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang
 - Percepatan dalam upaya penyediaan produk hukum dan turunannya terkait pengelolaan ruang
9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance
10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- Memperkuat kerjasama pemerintah dan swasta khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur
- Memperkuat sinergitas terbukanya akses yang adil dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat yang dimulai dari tingkat Desa
- Menguatkan kemandirian Desa baik secara administratif maupun keuangan

11. Urusan Penendalian Penduduk dan KB

- Peningkatan ketahanan keluarga dan pengembangan keterlindungan warga

12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Peningkatan kemandirian dan kewirausahaan di tingkat ekonomi lokal melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah
- Meningkatkan kapasitas UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama daerah dan swasta;
- Menumbuhkan semangat kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal, serta pendampingan dalam penciptaan mekanisme pemasaran digital
- Memperkuat perlindungan dan menyederhanakan alur investasi bagi pengembangan ekonomi lokal baik skala mikro, kecil, ataupun menengah
- Meningkatkan manajemen UMKM untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah.

13. Urusan Penanaman Modal dan PTSP

- Memanfaatkan posisi strategis dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi, terutama di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata
- Meningkatkan keterjangkauan, kecepatan, dan keterbukaan dalam investasi serta pemanfaatannya bagi masyarakat

14. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Mengoptimalkan ruang publik dalam kegiatan olahraga dan organisasi kepemudaan

15. Urusan Statistik

- Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi;

16. Urusan Kebudayaan

- Internalisasi nilai-nilai budaya dan pengembangan ketahanan desa mandiri dan berbudaya secara berkelanjutan
- Mengoptimalkan peran dan fungsi OPD untuk mengantisipasi pengaruh negatif nilai dan budaya asing terhadap perilaku masyarakat;
- Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya



17. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance
- Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat

18. Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata dan Transmigrasi

- Memperkuat inovasi, menjamin perlindungan, dan memperluas daya dukung sarana prasarana bagi pertanian berkelanjutan
- Optimalisasi kinerja sektor dominan dengan fokus kepada ekonomi kreatif dan berkelanjutan
- Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian
- Meningkatkan branding daerah dan daya tarik pariwisata

19. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

- Menguatkan kemitraan antar daerah dan antar negara sehingga menumbuhkan peluang ekspor dan transaksi antar wilayah
- Optimalisasi kinerja sektor dominan dengan fokus kepada ekonomi kreatif dan berkelanjutan
- Menguatkan sarana distribusi, perlindungan produk, dan kegiatan ekspor

20. Urusan Penunjang Pemerintahan Umum

- Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi daerah ke dalam sistem informasi terintegrasi
- Optimalisasi kualitas manajemen dan layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan
- Memperkuat komitmen dan transparansi layanan publik melalui kesepakatan bersama dalam pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance
- Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi;
- Peningkatan dan penyelarasan arah reformasi birokrasi didukung pembinaan terhadap ASN daerah
- Mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah dan OPD untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam rangka antisipasi menurunnya dana perimbangan Pemerintah
- Penguatan kualitas dan integritas OPD dengan penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan keuangan dan asset-aset daerah
- Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.



- Menumbuhkan alternatif kerjasama dan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan baru melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta/badan usaha
- Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah



6.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan analisis strategi pilihan yang telah dilakukan, maka strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Program OPD Kabupaten Halmahera Selatan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|---|---|--|---|--|
| Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang bertanggung jawab, gotong royong, tertib dan aman serta berprestasi | Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan | Memanfaatkan semua potensi sumberdaya untuk mengantisipasi gangguan terhadap kamtibmas, pengaruh nilai dan budaya asing serta pengaruh dari perjanjian-perjanjian multilateral oleh pemerintah Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan wawasan politik, demokrasi, kebangsaan, dan edisiologi Negara terhadap ASN dan masyarakat melalui sosialisasi/bimtek dan diklat - Deteksi Dini atas gangguan terhadap kamtibmas oleh Kominda | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| | | Menumbuhkan kembali nilai-nilai ketahanan di dalam masyarakat disertai semangat toleransi dan gotong royong | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan stabilitas daerah yang didukung secara swakarsa oleh masyarakat | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| | | Memperkuat komunikasi dan manajemen kelembagaan dalam forum antar umat beragama sehingga mampu meredam konflik yang terjadi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kewaspadaan nasional melalui toleransi antar umat beragama - Peningkatan kewaspadaan nasional melalui pencegahan terjadinya konflik dan percepatan penanganan konflik | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat | Penguatan keterlindungan warga, keamanan, serta ketertiban di dalam lingkungan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib bagi masyarakat | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|---|--|--|---|--|
| | | Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayahnya | - Memberikan rasa aman, nyaman, tenang dan tertib bagi masyarakat | Program Penanggulangan Kebakaran |
| | Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik untuk mengantisipasi bencana. | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air - Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana - Penanganan Pasca Bencana melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Pembangunan jalur dan tempat evakuasi bencana khususnya dalam Kawasan Perkotaan Labuha - Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat tumbuhnya desa mandiri tangguh bencana | Program Pengelolaan SDA (PUPR) Program Penanggulangan Bencana |
| | Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda | Meningkatkan kualitas pembinaan olah raga prestasi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pembina olah raga - Peningkatan perekutan atlit baru - Peningkatan prestasi atlit - Penghargaan bagi atlit berprestasi - Peningkatan jumlah event pertandingan olah raga tingkat kabupaten - Peningkatan kuantitas dan kualitas Prasarana dan Sarana Olah Raga | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan |
| | | Mendorong semangat pemuda untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan keaktifan ormas kepemudaan - Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana aktivitas kepemudaan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan |
| Mewujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Prima sesuai azas reformasi birokrasi dan Budaya Kerja | Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan serta informasi kependudukan kepada masyarakat - Pembebasan biaya administrasi pengurusan KK/KTP/Akta Lahir - Desentralisasi pelayanan dokumen | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pendaftaran Penduduk • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|----------------------|---|--|---|--|
| ASN yang profesional | | | <p>kependudukan ditingkat kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan buku nikah/ akta nikah gratis (diprioritaskan pada pasturi yang belum memiliki buku nikah) - Peningkatan kualitas pelayanan dokumen pencatatan sipil | |
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan | Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan arsip daerah - Peningkatan kapasitas Arsiparis Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Arsip • Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip • Program Perijinan Penggunaan Arsip |
| | | Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan perpustakaan daerah - Peningkatan kapasitas Pustakawan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan Perpustakaan • Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno |
| | Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara | Memperkuat komitmen dan transparansi layanan publik melalui kesepakatan bersama dalam pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani - Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju Halsel Zero Corruption - Peningkatan Kapasitas APIP - Peningkatan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran serta Pelaksanaan Pembangunan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi • Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara | Meningkatkan kualitas SDM ASN melalui Penegakan Disiplin, Pembinaan Karier serta Pendidikan dan Pelatihan | <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil - Penyusunan pedoman budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani - Internalisasi pedoman budaya kerja birokrasi - Implementasi budaya kerja birokrasi yang profesional, bebas KKN dan melayani - Perbaikan Manajemen Kepegawaian dan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---|--|---|--|
| | | | <p>Pembinaan Karier ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis - Peningkatan Kesejahteraan ASN - Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai kompetensi - Rekrutmen ASN sesuai kebutuhan baik kuantitas maupun kualitasnya | |
| | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset-asset daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan asset daerah - Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah - Peningkatan jumlah aset tanah Pemda bersertifikat | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| | | Menumbuhkan alternatif kerjasama dan tumbuhnya sumber-sumber pembiayaan baru melalui kerjasama antar pemerintah dan swasta/badan usaha | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber PAD dan Sumber Pendapatan Lainnya - Pemanfaatan IT dalam pengelolaan pendapatan daerah | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum | Optimaliasi kerjasama Pemda, Badan Pertanahan dan masyarakat dalam Pengadaan tanah untuk Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian secara menyeluruh atas sengketa tanah dengan masyarakat - Identifikasi dan Pensertifikatan setiap kapling tanah milik Pemda - Penyusunan dokumen rencana pengadaan tanah Pemerintah Daerah - Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kab Halmahera Selatan dalam Tata Guna Tanah | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan • Program Penatagunaan Tanah |
| | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan teknologi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penataan database dan pemanfaatan statistik daerah - Membangun pengelolaan database berbasis Teknologi | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---|--|--|---|
| | Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi daerah ke dalam sistem informasi terintegrasi | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan aparatur perencana (Bappeda dan SKPD) dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah - Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui Monitoring dan Evaluasi - Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan pembangunan - Pemanfaatan IT dalam Perencanaan dan Penganggaran - Perbaikan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah | Mendorong tumbuhnya inovasi dan pemanfaatannya di daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah - Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah - Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah |
| | Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan fungsi dan peran Pemda dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan - Peningkatan penyusunan dan penyelarasan produk hukum daerah (Perda/Perbup) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. - Penguatan kelembagaan OPD menurut kebutuhan dan kewenangan - Implementasi <i>e-Government</i> dan Senyum <i>Smart City</i> di seluruh unit kerja (OPD) | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (semua OPD) |
| | | Membangun kerjasama kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD | - Penguatan fungsi dan peran Pemda dan DPRD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---|--|---|--|
| | Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas aparatur dan penerapan good governance di Tingkat Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan melalui Diklat - Pelimpahan Kewenangan kepada Camat sesuai ketentuan perundang-undangan - Peningkatan koordinasi antar Unit Kerja di Kecamatan - Peningkatan Fungsi Pengawasan Pembangunan ditingkat kecamatan oleh Camat - Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Camat | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum • Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum • Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | Meningkatnya kualitas infrastruktur Perdesaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan | Memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam menata desa baik infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan melalui Koperasi dan/atau BUMDES - Pembangunan infrastruktur perdesaan termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, social keagamaan, dan ekonomi - Rintisan desa percontohan melalui Lomba Desa dan Lomba PKK - Penyelesaian tapal batas wilayah kecamatan dan desa | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Program-Program dalam APBDes |
| | | Menguatkan kemandirian Desa baik secara administratif maupun keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD - Mendorong perbaikan Nilai Indeks Membangun Desa secara bertahap - Mengoptimalkan peran dan fungsi camat dalam pemberdayaan masyarakat dan desa | Program Administrasi Pemerintahan Desa |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|---|---|--|--|---|
| Mewujudkan Sitem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat yang berkualitas | Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Memberdayakan keluarga miskin dan menciptakan kesempatan kerja untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas | - Menjalankan fungsi rehabilitasi dan pemberdayaan kelembagaan sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial |
| | | Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan miskin | <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan PMKS secara bertahap - Penanggulangan dan penanganan kemiskinan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | Optimalisasi dalam implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender dari tingkat desa | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah perempuan yang terlibat di pemerintahan dan lembaga legislatif - Peningkatan kegiatan perempuan di bidang sosial dan ekonomi - Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Peningkatan kualitas data Gender dan Anak | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak |
| | | Penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak terlantar serta perempuan dan anak korban kekerasan | <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum KDRT dan perlindungan anak - Penerapan perlindungan anak di bawah umur | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Perempuan • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program Perlindungan Khusus Anak |
| | Meningkatnya Ketahanan dan Kemanan Pangan Strategis Daerah | Meningkatkan kemandirian pangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan intervensi penanganan daerah rawan pangan - Meningkatkan diversifikasi, penganekaragaman dan keamanan pangan - Meningkatkan upaya ketersediaan dan penguatan stok cadangan pangan. - Swasembada pangan lokal (Peningkatan kemandirian pangan) - Pembentukan BULOG Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan | Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui kerjasama | <ul style="list-style-type: none"> - Gratis biaya Pendidikan Dasar (SD/SMP) melalui subsidi BOSDA - Pemberian subsidi untuk lembaga PAUD | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|------------------------------------|---------|---|---|---|
| yang berkualitas dan berdaya saing | | antar daerah, lembaga pendidikan dan swasta dan pemanfaatan iptek berlandaskan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas pendidikan dasar termasuk pendidikan dasar di pesantren/swasta sesuai SNP - Peningkatan jumlah sekolah yang terakreditasi minimal A - Peningkatan kualitas pendidikan Non Formal dan Informal - Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan terutama di desa-desa terpencil - Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditempatkan di desa-desa terpencil - Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan - Pemberian Beasiswa Berprestasi dan siswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi Lokal untuk peningkatan kualitas pendidikan - Penyusunan Kurikulum bermuatan kearifan lokal | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---|--|---|---|
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan perbaikan gizi masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan rasio jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) - Pemerataan sebaran Bidan Desa (satu desa satu bidan) - Peningkatan akses informasi dan promkes - Peningkatan Akreditasi Puskesmas - Peningkatan status RSU Laiwui dari Non Type ke Type D - Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan sesuai SPM (Rumah Sakit dan Puskesmas) - Peningkatan pelayanan kesehatan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. - Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS) - Peningkatan pemenuhan gizi masyarakat termasuk penurunan angka stunting - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak - Peningkatan status RSUD Labuha dari type D ke type B - Kesehatan gratis untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya masyarakat miskin termasuk biaya persalinan/ melahirkan dan biaya ambulance/ pemakaman pada saat dirujuk | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|---|---|--|---|---|
| | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelola Kependudukan | Meningkatkan pelayanan KB dan keluarga sejahtera | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan - Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga - Peningkatan pelayanan KB terpadu | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Penduduk • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) |
| Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal | Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata | Meningkatkan kemampuan berwirausaha para pelaku UMKM sektor perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM sektor perdagangan - Pemberian dukungan akses permodalan kepada wirausahawan dan UMKM sektor perdagangan - Fasilitasi Tera dan Tera Ulang - Pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui mekanisme dana bergulir atau disalurkan melalui Bank / BPRS - Pengawasan keamanan barang perdagangan yang beredar di masyarakat - Peningkatan sarana dan prasarana distribusi dan perdagangan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen |
| | | Meningkatkan kapasitas Pelaku Industri Kecil dan menengah termasuk Home Industry | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas Pelaku Industri Kecil dan menengah termasuk Home Industry melalui Diklat - Fasilitasi pengurusan izin dan sertifikasi produk dan sertifikasi Halal pelaku IKM dan Home Industri - Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan di Pulau Obi - Pengembangan sentra-sentra Industri Kecil Menengah (IKM) atau Home Industri | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---------|---|--|--|
| | | Membangun, memperbaiki, dan merawat destinasi wisata melalui pelibatan pihak swasta | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah, perbaikan dan perawatan destinasi wisata dengan pelibatan swasta - Peningkatan angka kunjungan wisatawan melalui promosi dengan menggunakan berbagai media - Peningkatan sarana penunjang seperti hotel dan restoran - Mempermudah akses ke Halmahera Selatan baik darat, laut maupun udara terutama ketempat-tempat destinasi wisata | <ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|--|---|--|--|
| | Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan | Mendorong peningkatan kualitas produksi di bidang pertanian dan perkebunan serta mendorong tumbuhnya agroindustri | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi di bidang pertanian dan perkebunan melalui teknologi pengolahan pasca panen termasuk pengembangan industri pakan ternak - Fasilitasi pemasaran produk-produk pertanian dan perkebunan - Pengembangan industri terpadu sektor pertanian/perkebunan - Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman komoditi unggulan: Kelapa, Pala, Cengkeh, Kopi Bacan - Pembangunan industri pengolahan tanaman rempah (komoditi unggulan) bekerjasama dengan swasta (investor) - Menurunkan peran para tengkulak atas pemasaran komoditi unggulan dan memaksimalkan fungsi BUMDes dan/atau Koperasi - Peningkatan luas lahan pertanian dan perkebunan dengan pemanfaatan lahan tidur sebagai bagian ekstensifikasi lahan pertanian - Mengoptimalkan peran dan fungsi Penyuluhan Pertanian dan pengadaan Sarprodi - Peningkatan produksi ternak (sapi dan ayam) serta pengendalian penyakit ternak | <ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Perizinan Usaha Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---|---|--|---|
| | | Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kualitas produksi perikanan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pengelolaan dan kualitas produksi perikanan - Pemanfaatkan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) sebagai wadah pemasaran produk perikanan Halmahera Selatan - Perintisan Kawasan Industri Terpadu Pengolahan Ikan dan Kawasan Pelabuhan Perikanan. - Penguatan Kelembagaan dengan membentuk Koperasi / BUMDes Nelayan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan | Memanfaatkan posisi strategis, dan potensi sumberdaya wilayah yang tersedia untuk menarik investasi, terutama di sektor perkebunan dan perikanan. | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemudahan penanaman modal (investasi) di daerah - Pembebasan biaya administrasi pengurusan ijin usaha khususnya UMKM - Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| | Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan | Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan Koperasi serta akses permodalan | <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan berkelanjutan pada Koperasi Aktif - Pemberian dukungan akses permodalan kepada koperasi aktif - Pembentukan dan/atau pengaktifan kembali Koperasi Primer atau Koperasi Induk | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|---|--|---|--|--|
| | | Meningkatkan kemampuan berwirausaha para pelaku UMKM | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah wirausahawan dan penciptaan iklim wirausaha yang baik - Pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM - Pembentukan jaringan wirausahawan daerah - Pemberian dukungan akses permodalan kepada wirausahawan dan UMKM - Optimalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendukung pelaku UMKM - Pemberian bantuan kepada pelaku usaha mikro melalui mekanisme dana bergulir atau disalurkan melalui BPRS - Pembentukan BUMDes baru dan pembinaan terhadap BUMDes yang sudah ada | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM |
| | Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan | Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing tenaga kerja daerah untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja daerah melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasional - Peningkatan jumlah prasarana, sarana dan instruktur pelatihan tenaga kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial |
| Mewujudkan konektivitas antar wilayah serta ketersediaan infrastruktur dasar, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas | Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut | Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang | <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan berbasis gugus pulau sesuai arahan Tata Ruang - Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat - Peningkatan status jalan Kabupaten/Provinsi menjadi jalan Nasional: Labuha-Sawadai, Jikotamo-Jikodolong, Sayoang-Yaba dan | Program Penyelenggaraan Jalan |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|--|---|--|--|
| | | | Saketa-Batulak, Matuitng-Gane Dalam <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat - Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | |
| | | Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan laut antar pulau dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik | <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi transportasi laut dan udara untuk mengatasi keterisolasi - Pengembangan sistem transportasi laut antar pulau - Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan laut antar pulau - Memfasilitasi Pengembangan Kawasan Pelabuhan Babang dan Bandara Oesman Sadik Labuha - Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan penyebrangan | Program Pengelolaan Pelayaran |
| | Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik | Meningkatkan konservasi Sumber Daya Air dan pendayagunaan sumber daya air | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan konservasi Sumber Daya Air dan pendayagunaan sumber daya air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) |
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi | Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dengan mendorong pihak swasta membangun infrastruktur telekomunikasi seluler dan internet serta optimalisasi pemanfaatannya | <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan kapasitas telepon seluler bekerjasama dengan provider dalam rangka Halsel bebas blank spot area - Peningkatan manajemen birokrasi dan pelayanan masyarakat dengan E-Government berbasis Teknologi Informasi - Pengembangan " SMART CITY " di Kawasan Perkotaan Labuha - Pengembangan " SMART VILLAGE " di luar Kawasan Perkotaan Labuha | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--------|---|--|--|--|
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman | Meningkatkan ketersediaan perumahan dan kualitas kawasan permukiman | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kompetensi Pelakau Jasa Konstruksi melalui diklat dan sertifikasi - Penataan Bangunan dan lingkungannya - Peningkatan bangunan fasilitas umum dan sosial (Fasum dan Fasos), Fasilitas Publik serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Peningkatan bangunan Pemerintahan - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian - Pembangunan Perumahan Layak Huni - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap listrik - Pembangunan PJU (Penerangan Jalan Umum) disetiap desa - Penyediaan PJU yang memadai untuk mendukung kualitas kawasan permukiman | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya • Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Permukiman • Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) |
| | Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak | Meningkatkan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum dan Akses Sanitasi yang Layak | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas air bersih PDAM Halmahera Selatan (SPAM Perkotaan) - Peningkatan penyediaan air minum melalui pengembangan jaringan perpipaan / non perpipaan (SPAM Perdesaan) - Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestic (akses sanitasi) - Advokasi dan sosialisasi tentang Penyehatan lingkungan dan PHBS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|--|---|---|---|--|
| Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang | <p>Perencanaan pengembangan Kawasan Strategis secara komprehensif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkotaan Labuha (PKW Labuha) - Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kec. Gane Timur - Kawasan Perdesaan Prioritas - Kawasan PSN (Program Strategis Nasional) di Pulau Obi <p>Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan Tata Ruang dengan memperhatikan pola ruang sesuai RTRW</p> <p>Melakukan Revisi Tata Ruang Halmahera Selatan</p> | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang |
| | Peningkatan kualitas SDM Pengelola dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup | Peningkatan kualitas SDM Pengelola dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan neraca SDA - Pengembangan kompetensi SDM lingkungan hidup melalui pendidikan teknis dan sertifikasi serta penyiapan Laboratorium Lingkungan Hidup - Pelaksanaan evaluasi ijin lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum oleh Tim Terpadu | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan |
| | Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca | Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Pengembangan Kawasan Khusus Mangrove | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) • Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |
| | Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan drainase lingkungan | Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan drainase lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan layanan persampahan dan drainase lingkungan - Advokasi dan sosialisasi tentang Penyehatan lingkungan dan PHBS kepada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program OPD |
|---|--|---|---|---|
| | Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | Mendorong partisipasi masyarakat warga transmigrasi dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi | <p>dan pemangku kepentingan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan afirmasi pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi | <ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi |
| Mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang religius, berkepribadian dan beradab berdasarkan nilai-nilai agama dan adat seatorang | Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang | Mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Halmahera Selatan | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan peran serta masyarakat dan Kesultanan Bacan dalam pembangunan dan pelestarian budaya dan adat seatorang - Peningkatan kapasitas pembina seni budaya dan kualitas pembinaan seni budaya - Peningkatan jumlah event seni budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengembangan Kebudayaan |
| | Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas | Mendorong peningkatan semangat beragama masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai (PMBN) - Peningkatan Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN) - Peningkatan kapasitas tokoh agama serta kesejahteraan para Imam dan Pendeta - Peningkatan kualitas prasarana dan sarana rumah ibadah | <ul style="list-style-type: none"> • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Setda) • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum /PSU (Dinas Perkim dan LH) |



6.4 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan merupakan acuan atau pedoman dalam penentuan focus dan prioritas pembangunan setiap tahun selama lima tahun agar lebih terarah, terstruktur dan berkelanjutan. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 tersaji dalam Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

| Arah Kebijakan Pembangunan | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat untuk memperkuat landasan pertumbuhan dan pelayanan masyarakat | Mengakselerasi transformasi pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur dasar dan kawasan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing daerah | Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur kawasan dan reformasi birokrasi untuk memperkuat pertumbuhan yang berkualitas | Memperkuat Daya Saing SDM dan ekonomi melalui transformasi sistem layanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan infrastruktur ekonomi | Mengakselerasi pemeratan dan kualitas layanan publik serta infrastruktur dasar dan ekonomi melalui transformasi struktural dan pembangunan infrastruktur terintegrasi | Memantapkan transformasi pelayanan publik dan daya saing SDM dan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat |

6.5 Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu

Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu Kabupaten Halmahera Selatan merupakan pengembangan dengan pendekatan tematis holistik kawasan strategis dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan strategis terpilih baik Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten.

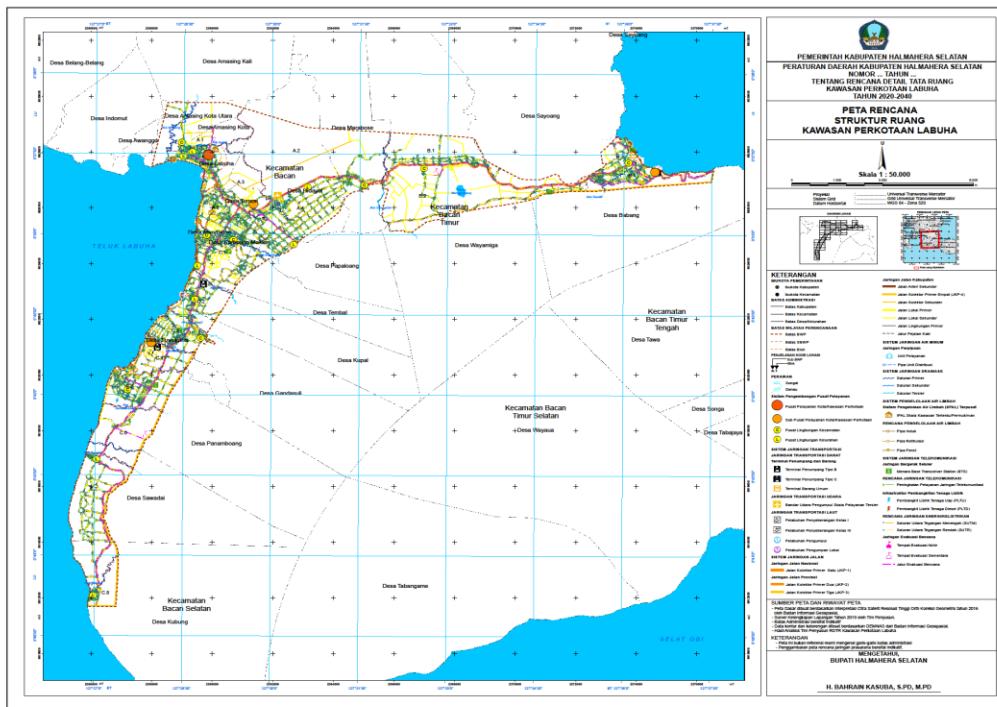
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Terpadu yang ditempuh meliputi:



1. Pengembangan PKW Kawasan Perkotaan Labuha seluas 5.969,67 Ha dengan konsep **SMART CITY** (Kota Cerdas)

Penataan Kawasan Perkotaan Labuha melalui konsep Smart City ditetapkan menjadi fokus prioritas pengembangan kawasan strategis karena Labuha sebagai ibukota kabupaten merupakan etalase dan barometer pembangunan serta pelayanan pemerintahan. Kawasan Perkotaan Labuha merupakan suatu ekosistem multidimensi yang menjadi episentrum pelayanan pemerintahan, interaksi sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus merupakan representasi dan wajah Halmahera Selatan, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur.

**Gambar 6.1
Peta Rencana Struktur Ruang
Kawasan Perkotaan Labuha**



Sumber : RDTR Kawasan Perkotaan Labuhan, 2021

Labuha Smart City dikembangkan sebagai model tata kelola kawasan perkotaan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan memaksimalkan potensi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat agar tercapainya kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi, tata kelola dan sumber daya manusia yang baik.

Pengembangan Labuha Smart City dilakukan dengan pendekatan 3 Kluster utama meliputi: *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), *Smart Environment* (Lingkungan)



Cerdas) dan *Smart Society* (Masyarakat Cerdas) dan 3 Komponen *Enabler* (pengungkit) meliputi: *Smart People* (Sumber Daya Manusia), *Smart Governance* (Tata Kelola Pemerintahan) dan *Smart Infrastructure & Technology* (Infrastruktur dan Teknologi).

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Labuha dengan konsep *Smart City* meliputi:

a. Kluster *Smart Economy*

- 1) Penataan, Pembangunan dan Pemeliharaan Ruas Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian Kawasan Perkotaan
- 2) Penamaan dan Penetapan Fasilitas Umum Berkarakter Budaya Lokal
- 3) Pengembangan dan Rehabilitasi Objek Wisata Pulau Nusara
- 4) Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Panambuang
- 5) Revitalisasi Kawasan Halmahera Selatan Bisnis Center di Tuwokona dan Labuha
- 6) Penataan dan Pembangunan Kawasan Pelabuhan Babang, Kupal dan Tuwokona
- 7) Penataan dan Pembangunan Kawasan Pasar Baru Babang
- 8) Penataan dan Pengembangan Kawasan Bandara Oesman Sadik Labuha
- 9) Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Bandara Udara Oesman Sadik Labuha dan Pelabuhan Nasional Babang
- 10) Penataan dan pengembangan Kawasan Sentra UMKM di Kawasan Perkotaan
- 11) Pengembangan Kawasan Sentra Pertanian di Kecamatan Bacan, Bacan Selatan, Bacan Timur, Bacan Timur Tengah dan Bacan Timur Selatan
- 12) Penataan dan Revitalisasi Terminal Labuha dan Babang
- 13) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) dan Internet
- 14) Peningkatan Kapasitas Listrik Kawasan Ibukota Kabupaten melalui penambahan mesin pembangkit, rehabilitasi jaringan dan percepatan realisasi investasi pembangunan PLTPB Tawa, Bacan Timur Tengah
- 15) Revitalisasi dan Restrukturisasi PERUSDA PD. Prima Niaga Halmahera Selatan

b. Kluster *Smart Environment*

- 1) Pembangunan Papaloang Park, Tugu Zero Point dan Landmark Kota Labuha



- 2) Penataan dan Pembangunan Avenue, *Fitness Ground, Playground*, Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau dengan konsep Ramah Anak
- 3) Penataan dan Pembangunan Sempadan Pantai dan Sungai dalam kota
- 4) Penataan dan Pembangunan Talud (*break water*) Teluk Labuha
- 5) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Hutan Mangrove/ Hutan Kota sebagai daerah resapan air (*catchment area*) dan kawasan wisata lingkungan
- 6) Pengelolaan Sampah dan Limbah Terpadu melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang ramah lingkungan
- 7) Penataan Kawasan Hutan Karet Kantor Bupati dan Hutan Kota Lainnya sebagai kawasan hijau dan konservasi habitat Yakis Bacan
- 8) Pembangunan Pusat Mitigasi Bencana dan Pengadaan Alat Mitigasi
- 9) Pembangunan Kanal Pengendali Banjir
- 10) Revitalisasi infrastruktur jaringan dan pengolahan air bersih serta restrukturisasi PDAM Labuha
- 11) Penataan Pantai Teluk Labuha dan Perumahan Kumuh dengan Konsep *Water Front City*
- 12) Normalisasi dan Revitalisasi DAS Kawasan Sungai Perkotaan
- 13) Pembangunan Listrik Perkotaan, Permukiman dan Penerangan Jalan Umum dengan Konsep Ramah Lingkungan
- 14) Pembangunan *Traffic Light* dan *Zebra Cross*

c. **Kluster *Smart Society***

- 1) Pengembangan pelayanan umum digital dan penerapan *e-Government* melalui Aplikasi *e-Smart* Labuha
- 2) Pembangunan *Command Center Senyum Smart City*
- 3) Pembangunan Media Publikasi dalam bentuk Videotron
- 4) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan (Landscap Kantor Bupati, Rumah Jabatan KDH/WKDH, Rehabilitasi Kantor Bupati, Rehabilitasi Kantor DPRD, pembangunan kantor OPD)
- 5) Penyelesaian Pembangunan Masjid Raya sebagai Pusat Dakwah dan Wisata Religi
- 6) Pengembangan Perguruan Tinggi Lokal sebagai *Center of Excelent* masyarakat intelektual perkotaan
- 7) Penataan dan Pembangunan Kawasan Kota Tua sebagai destinasi *Culture and Heritage Tourism*
- 8) Pembangunan Rumah Budaya Saruma sebagai Pusat Pengembangan dan Pelestarian Budaya Saruma sekaligus Sekretariat Bersama Paguyuban
- 9) Pengembangan RSUD Labuha sebagai RS Rujukan Regional Tipe B dengan tingkat pelayanan yang terstandarisasi



- 10) Pengembangan Sekolah Unggulan yang Terakreditasi dan Penetapan Zona Aman Sekolah
2. Pengembangan Pulau Obi untuk mendukung Kawasan PSN (Proyek Strategis Nasional) dalam pembangunan Industri Pengolahan Nikel dan Logam Dasar di Pulau Obi.

Pengembangan Kawasan Pulau Obi dilakukan untuk mendukung perubahan status Kawasan Industri Pulau Obi dari program pembangunan berskala provinsi menjadi program pembangunan berskala nasional sekaligus mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terkait dengan aspek keamanan investasi, penyiapan kapasitas SDM daerah, proteksi terhadap daya dukung dan konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang masyarakat.

Pengembangan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Nikel dan Logam Dasar di Pulau Obi diarahkan dengan tetap menjaga iklim investasi industri yang sudah ada seperti industri pengelolaan hasil hutan di Jikodolong, industri pengolahan emas di Anggai dan industri budidaya mutiara di Garga.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Pulau Obi dilakukan secara seimbang dan komprehensif dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat Obi dan peningkatan daya dukung lingkungan meliputi:

- 1) Penguatan Koordinasi dan Sinergisitas dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak Perusahaan dalam rangka Pembangunan Ruas Jalan Lingkar dan Jembatan Pulau Obi, Pembangunan Pelabuhan, Pembangunan Bandara dan Program *Community Social Responsibility* (CSR).
- 2) Pemberian Subsidi Transportasi untuk membuka akses ke daerah terpencil
- 3) Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan Internet.
- 4) Pengembangan dan Revitalisasi Pukesmas, Pustu, Polindesa serta Rumah Sakit Obi sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- 5) Peningkatan produksi pertanian dan perikanan desa lingkar tambang untuk menopang kebutuhan industri melalui penguatan kapasitas petani/nelayan dan peningkatan sarana pertanian dan perikanan masyarakat.
- 6) Peningkatan Kapasitas Petani dan Nelayan melalui penyuluhan dan bantuan bibit, pupuk, sarana produksi dan alat tangkap serta program pemberdayaan



- 7) Pengembangan PDAM Laiwui dalam rangka peningkatan kapasitas air bersih di Pulau Obi
 - 8) Peningkatan Kapasitas PLN Laiwui dalam rangka penyediaan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Obi
 - 9) Penguatan Program Konservasi Lingkungan terutama pada Daerah Aliran Sungai dan Daerah Rawan Bencana
 - 10) Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui program rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang merata dan berkualitas dan program beasiswa kemitraan
 - 11) Penguatan Lembaga BUMDes sebagai sentra pengelolaan potensi dan komoditi lokal unggulan
 - 12) Penguatan kerjasama dengan perbankan dalam pembiayaan, penyaluran KUR dan modal bergulir bagi pelaku UMKM di Obi untuk menggerakkan sektor usaha riil yang menopang kebutuhan industri
 - 13) Pembangunan Pasar dan Sentra Ekonomi masyarakat
 - 14) Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu
3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Gane Timur seluas lk. 5.517,19 hektar sebagai lumbung pangan Halmahera Selatan.

Wilayah Gane Timur khususnya Kawasan Transmigrasi di SP 1, SP2, SP3, SP4, SP5 dan SP6 memiliki peranan penting sebagai Lumbung Pangan Daerah karena memiliki potensi sebagai sentra produksi padi (bahan pangan utama) sehingga diharapkan bisa berperan dalam pemenuhan kebutuhan beras dalam daerah secara mandiri (swasembada) sekaligus sebagai *buffer stock* dalam mengantisipasi kerawanan dan krisis pangan serta gejolak harga atau keadaan darurat. Oleh karena itu arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung Lumbung Pangan Halmahera Selatan antara lain:

- 1) Peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- 3) Peningkatan kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan pendampingan pada petani.
- 4) Penyediaan Saprodi berupa: Bibit, Pupuk dan Obat-Obatan
- 5) Penyediaan Saproton/Alsintan berupa: *Hand Tractor*, *Jhonn Deer*, RMU (*Rice Milling Unit*) dan bangunannya, Pengering Padi (*Driyer*)
- 6) Pembangunan dan Revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat di SP2 Desa Sumber Makmur.



- 7) Penguatan kelembagaan BUMDes dalam rangka optimalisasi distribusi dan pemasaran hasil pertanian

6.6 Program Strategis Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan janji-janji politik serta mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mencanangkan 7 (tujuh) Program Strategis Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan yang disebut **SAPTA SENYUM**, sebagai berikut:

5.1.1. *Program Senyum Saruma*

Pada Program Strategis Senyum Saruma terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Revitalisasi peran FKUB dalam melakukan dialog antar umat beragama dan tokoh masyarakat untuk mencegah konflik horizontal
2. Menginisiasi pembentukan “Rumah Saruma” sebagai Sekretariat Bersama Forum Kerukunan antar Paguyuban
3. Revitalisasi peran Kominda dalam mendekripsi dini konflik termasuk Faham Menyimpang dengan memperkuat kerjasama FORKOMINDA
4. Reaktivasi Pos Kampling desa
5. Kegiatan *coffee morning* antar seluruh *stake holder*
6. Penguatan wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
7. Pemberian Modal Usaha bagi para pemuda

5.1.2. *Program Senyum Prima*

Pada Program Strategis Senyum Prima terdapat 14 (empat belas) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Goverment* di semua bidang pelayanan pemerintahan agar lebih cepat, murah, mudah dan transparan
2. Pembangunan Aplikasi SIM Pemerintahan, SIM Informasi Publik, SIM Keuangan, SIM Perencanaan dan SIM Pengawasan serta SIM Informasi Aduan Masyarakat (responsif)
3. Penyusunan kabinet kerja berbasis representasi dan kompetensi
4. Reformasi pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, seleksi jabatan, pelayanan kepegawaian dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan prinsip transparansi, profesionalitas dan bebas KKN
5. Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan penilaian kinerja
6. Revitalisasi Program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai
7. Reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan berbasis single data
8. Kerjasama pendampingan pembangunan dengan BPK, BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan



9. Penguatan peran Camat sebagai wakil pemerintah kabupaten di kecamatan dalam rangka pelayanan, pengawasan pembangunan dan pembinaan desa
10. Implementasi Aplikasi “Senyum Smart City”
11. Pengaplikasian Senyum (Smile Central Clearing House) dan Broadband Learning Centre
12. Cetak dokumen kependudukan ditempat (berbasis IT)
13. Pengaplikasian teknologi dalam berinvestasi, mempermudah akses perizinan (perizinan by online)
14. Birokrasi bersih dan berintegritas
15. Pengangkatan Staf Khusus/ Tenaga Ahli Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP)
16. Penerapan Key Performance Indeks (KPI) dalam birokrasi

5.1.3. Program Senyum Berdaya

Pada Program Strategis Senyum Berdaya terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pembentukan BULOGDA sebagai buffer stock sandang dan pangan dalam sistem jaring pengaman sosial pasca COVID-19
2. Program Santunan Kelahiran dan Kematian
3. Bedah Rumah (Lantainisasi, MCKnisasi, Atapnisasi)
4. Santunan Lansia Miskin dan Disabilitas
5. Program Rumah Berdaya bagi masyarakat terdampak COVID-19 atau bencana lain.
6. Tunjangan Imam, Pendeta, Guru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu

5.1.4. Program Senyum Unggul

Pada Program Strategis Senyum Unggul terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Gratis dari Pendidikan Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi melalui skema tabungan/asuransi pendidikan, beasiswa, orang tua asuh, CSR, atau hibah pendidikan
2. Peningkatan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui program beasiswa pendidikan, diklat, magang, kemitraan dengan LSM pendidikan, serta pemberian insentif tambahan bagi guru terpencil dan berprestasi
3. Pembangunan fasilitas pendukung pendidikan yang lebih memadai dan merata seperti rumah guru, ICT, ruang belajar dan sarana penunjang lainnya
4. Pengembangan Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Non Formal melalui kemitraan riset, beasiswa dosen dan mahasiswa utusan desa, subsidi operasional PT dan program Desa Sarjana



5. Jaminan Kesehatan Paripurna melalui skema asuransi kesehatan daerah meliputi: persalinan gratis, sunat gratis, bingkisan persalinan, biaya rujukan, rumah tunggu keluarga pasien, check up bagi masyarakat tidak mampu penerima manfaat .
6. Peningkatan jumlah faskes dan nakes (dokter, perawat dan bidan) sampai tingkat polindes
7. Pemberantasan penyakit menular dan edukasi kesehatan masyarakat

5.1.5. Program Senyum Sejahtera

Pada Program Strategis Senyum Sejahtera terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pengembangan produk pertanian organik serta ekstensifikasi dan intensifikasi komoditi perkebunan unggulan (kelapa dan rempah-rempah) serta industri pengolahannya
2. Pengembangan komoditi perikanan dan kelautan budidaya serta industri pengolahan perikanan tangkap
3. Penghapusan sistem ijon melalui program pemberdayaan BUMD, koperasi, BUMDes atau kemitraan dengan pengepul
4. Pemberian Insentif khusus bagi investasi di bidang manufaktur, pengolahan perkebunan dan perikanan
5. Pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan desa sadar wisata
6. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan e-commerce
7. Penguatan dan pemberdayaan UMKM dan ekonomi syariah melalui kemitraan dengan lembaga keuangan.

5.1.6. Program Senyum Maju

Pada Program Strategis Senyum Maju terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Road Map pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kepulauan
2. Fasilitasi Peningkatan status bandara dan pelabuhan Babang
3. Pembangunan jalan lingkar dan jembatan Pulau Bacan, Obi, Gane, Kasiruta, Mandioli, Kayoa dan Makian
4. Subsidi transportasi dan angkutan barang untuk stabilisasi harga barang
5. Revitalisasi PDAM dan peningkatan kapasitas dan kualitas air bersih perkotaan dan pedesaan
6. Pemasangan listrik gratis bagi warga miskin dan pembangunan PLTS di desa-desa
7. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah melalui edukasi sadar sampah, 3 R (reduce, reuse, recycle)



8. Percepatan pembangunan tower telekomunikasi dan kawasan internet gratis menuju zero blank spot dan desa digital

5.1.7. Program Senyum Beradab

Pada Program Strategis Senyum Beradab terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pengembangan Kesultanan Bacan dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Penyelenggaraan Festival Saruma.
3. Pengembangan Pusat Budaya Saruma.
4. Pengembangan Pondok-Pondok Pesantren Modern.
5. Revitalisasi Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai (PMBN).
6. Pengembangan dan Pemberdayaan Rumah Ibadah (Masjid dan Gereja).
7. Program Fasilitator Penggerak Pembangunan.

6.7 Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan hasil pilihan strategi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi organisasi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, maka prioritas urutan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut meliputi:

- 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama keluarga miskin melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui keterpaduan program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga penelitian.
- 3) Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM melalui keterpaduan program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kerja sama untuk meningkatkan daya saing.
- 4) Memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal sosial yang tersedia untuk meningkatkan daya saing daerah serta mengantisipasi gangguan



- kamtibmas, bencana, dampak kebijakan nasional dan global dan masuknya nilai-nilai dan budaya asing.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah menguraikan program per urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Selain itu, disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, serta alokasi pagu indikatif program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan. Jumlah dana yang dialokasikan tersebut merupakan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis, sekaligus menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setiap satuan kerja perangkat daerah mempunyai 1 (satu) program yang sama yang melekat pada salah satu urusan yang diampu, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pencapaian target kinerja program di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten saja, tetapi juga dapat bersumber dari APBN, APBD Propinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pencantuman pendanaan yang disajikan hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten.

7.1. Program Prioritas Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan, disusun Program Prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan disertai indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Program Prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan mengacu pada:

1. Program Strategis Kepala Daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada BAB VI.
2. Program Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta target Pembangunan Nasional.
3. Program Prioritas OPD sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi OPD yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Bidang urusan berpedoman pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari:

Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Perencanaan
5. Keuangan
6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7. Penelitian dan Pengembangan



8. Kesbangpol, Penanggulangan Bencana, serta fungsi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dinas Pendidikan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Kurikulum

Dinas Kesehatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

RSUD Labuha

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Jalan (Ur. PUPR)
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Ur. PUPR)
4. Program Kawasan Permukiman (Ur. Perkim)
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi (Ur. PUPR)
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Ur. PUPR)
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Ur. PUPR)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan (Ur. Perkim)
3. Program Kawasan Permukiman (Ur. Perkim)
4. Program Pengembangan Permukiman (Ur. PUPR)
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Ur. Perkim)
6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Ur. Perkim)



7. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ur. Perkim)
8. Program Penataan Bangunan Gedung (Ur. PUPR)
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Ur. PUPR)
10. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Ur. PUPR)
11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Ur. PUPR)
12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (Ur. PUPR)

Dinas Lingkungan Hidup

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (Ur. PUPR)
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan LIMBAH B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan
6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dinas Sosial

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak



8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Pencatatan Sipil

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Arsip
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Program Perijinan Penggunaan Arsip
5. Program Pembinaan Perpustakaan
6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3. Program Pemasaran Pariwisata
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengembangan Kebudayaan

Dinas Pemuda dan Olah Raga

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi



4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Penempatan Tenaga Kerja
7. Program Hubungan Industrial

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10. Program Perizinan Usaha Pertanian
11. Program Penyuluhan Pertanian

Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



Sekretariat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat DPRD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
6. Program Penatagunaan Tanah

Inspektorat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol – PP)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Kebakaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Kecamatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung tercapainya target setiap Program Prioritas Perangkat Daerah membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi masing-masing program dan dalam pengelolaannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek pengelolaan anggaran yang professional, transparan dan akuntabel.
2. Aspek manfaat, bahwa setiap program yang dilaksanakan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (*pro rakyat*), memiliki daya ungkit besar, daya tarik investasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan.
3. Aspek capaian kinerja, bahwa program-program yang dilaksanakan harus mampu mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Program dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2





RPJMD Halmahera Selatan Tahun 2021-2026
SAPTA SENYUM

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program dan Pendanaan
RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

| Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|---|---|--------|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| DINAS PENDIDIKAN | | | | 279.826.875 | | 293.818.219 | | 308.509.130 | | 323.934.586 | | 340.131.315 | | 357.137.881 | | | |
| Program Penunjang | | | | 161.255.554 | | 169.318.332 | | 177.784.248 | | 186.673.461 | | 196.007.134 | | 205.807.490 | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 161.255.554 | 100 | 169.318.332 | 100 | 177.784.248 | 100 | 186.673.461 | 100 | 196.007.134 | 100 | 205.807.490 | 100 | |
| | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | | | | | | 5 dok (100,00) | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | 31 dok (109,23%) | | |
| Urusan Pendidikan | | | | 118.571.321 | | 124.499.887 | | 130.724.881 | | 137.261.125 | | 144.124.182 | | 151.330.391 | | | |
| Program Pengembangan Kurikulum | Prosentase sekolah dengan akreditasi minimal B | % | 10,00 | 15 | 17.785.698 | 20 | 18.674.983 | 25 | 19.608.732 | 30 | 20.589.169 | 40 | 21.618.627 | 40 | 22.699.559 | 40,00 | |
| Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/S2 | % | 20,25 | 25 | 23.714.264 | 35 | 24.899.977 | 45 | 26.144.976 | 55 | 27.452.225 | 60 | 28.824.836 | 60 | 30.266.078 | 60 | |
| | Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik | % | 40,00 | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| 1 | Meningkatnya akses pendidikan anak usia 4-6 tahun (PAUD) | % APS | 25,00 | 26 | 71.142.793 | 27 | 74.699.932 | 28 | 78.434.929 | 29 | 82.356.675 | 30 | 86.474.509 | 30 | 90.798.235 | 30 | |
| | Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 7-12 Tahun (SD/MI) | % APM | 97,90 | 97,90 | | 98,10 | | 98,30 | | 98,50 | | 98,80 | | 98,80 | | 98,80 | |
| | Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 13-15 Tahun (SMP/MTs) | % APM | 75,60 | 77,00 | | 79,00 | | 81,00 | | 83,00 | | 84,61 | | 84,61 | | 84,61 | |
| | Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 7-12 Tahun (SD/MI) | % APK | 117,60 | 117,60 | | 117,60 | | 117,60 | | 117,60 | | 117,60 | | 117,60 | | 117,60 | |
| | Meningkatnya akses pendidikan penduduk usia 13-15 Tahun (SMP/MTs) | % APK | 91,89 | 92,39 | | 92,89 | | 93,39 | | 93,89 | | 94,39 | | 94,39 | | 94,39 | |
| | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0,65 | 0,55 | | 0,45 | | 0,35 | | 0,25 | | 0,15 | | 0,15 | | 0,15 | |
| | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 4,81 | 4,71 | | 3,71 | | 2,71 | | 1,03 | | 1,01 | | 1,01 | | 1,01 | |
| | Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 99,50 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA | % | 78,00 | 80 | | 82 | | 84 | | 86 | | 88 | | 90 | | 90 | |
| | Persentase SD yang memenuhi prasarana dan sarana sesuai SNP | % | 35,00 | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 60 | |
| | Persentase SMP yang memenuhi prasarana dan sarana sesuai SNP | % | 40,00 | 40 | | 45 | | 50 | | 55 | | 60 | | 65 | | 65 | |
| | Angka Melek Huruf usia > 15 tahun | % | 98,05 | 98,20 | | 98,40 | | 98,60 | | 98,80 | | 99,00 | | 99,00 | | 99,00 | |
| Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase sekolah yang membebaskan siswa dari pungutan IURAN SEKOLAH (Gratis biaya pendidikan dari SD s.d SMP dan sederajat) | % | 100 | 100 | 5.928.566 | 100 | 6.224.994 | 100 | 6.536.244 | 100 | 6.863.056 | 100 | 7.206.209 | 100 | 7.566.520 | 100 | |
| DINAS KESEHATAN (A) | | | | | 58.611.490 | | 61.542.065 | | 64.619.168 | | 67.850.126 | | 71.242.632 | | 74.804.764 | | |
| Program Penunjang | | | | | 13.817.878 | | 14.508.772 | | 15.234.210 | | 15.995.921 | | 16.795.717 | | 17.635.503 | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 13.817.878 | 100 | 14.508.772 | 100 | 15.234.210 | 100 | 15.995.921 | 100 | 16.795.717 | 100 | 17.635.503 | 100 | |
| | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| Urusan Kesehatan | | | | | 44.793.612 | | 47.033.293 | | 49.384.957 | | 51.854.205 | | 54.446.915 | | 57.169.261 | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDMK yang memiliki sertifikat kesehatan | % | 7,11 | 18,22 | 3.583.489 | 31,78 | 3.762.663 | 50 | 3.950.797 | 66,67 | 4.148.336 | 100 | 4.355.753 | 100 | 4.573.541 | | |
| | Persentase Puskesmas yang terakreditasi | % | 0 | 3,12 | | 9,37 | | 15,62 | | 21,87 | | 28,12 | | 37,5 | | 37,5 | |
| | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan layanan kesehatan | % | - | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | Persentase layanan kesehatan pada event OR | % | - | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Persentase ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan | % | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |

| 2 | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | | |
|---|---|--|--------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | | |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Presentase penurunan keracunan obat dan bahan makanan | % | | 26.876.167 | | | 28.219.976 | | 29.630.974 | | 31.112.523 | | 32.668.149 | | 34.301.557 | | | | |
| | Cakupan penemuan dan pemanganan penderita penyakit TBC BTA | % | - | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Cakupan penemuan dan pemanganan penderita penyakit Kusta | % | - | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Cakupan penemuan dan pemanganan penderita penyakit Malaria | % | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | Persentase penurunan penyakit tidak menular | % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase desa dengan status ODF | % | 0,8 | | 1,20 | | | 4,02 | | 9,62 | | 19,24 | | 38,48 | | 76,96 | | | |
| | Persentase Balita Gizi Buruk | % | 4,04 | | 4,04 | | | 3,54 | | 3,04 | | 2,54 | | 2,04 | | 1,54 | | | |
| | Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | % | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Angka Kematian Bayi (AKB) | % | | 0,05 | | | 11.198.403 | | 0,01 | | 12.346.239 | | 0,01 | | 13.611.729 | 0,01 | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Cakupan masyarakat terhadap air bersih | % | | 54,31 | | | 55 | | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | 90 | | |
| | | Cakupan masyarakat terhadap sanitasi yang layak | % | | 45 | | | 47,5 | | 60 | | 65 | | 70 | | 80 | 80 | | |
| RSUD LABUHA (BLUD) | | | | | 20.233.047 | | 29.559.943 | | 32.515.937 | | 35.767.531 | | 39.344.284 | | 43.278.713 | | | | |
| Program Penunjang | | | | | 6.165.345 | | 7.573.612 | | 8.330.973 | | 9.164.071 | | 10.080.478 | | 11.088.525 | | | | |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 6.165.345 | 100 | 7.573.612 | 100 | 8.330.973 | 100 | 9.164.071 | 100 | 10.080.478 | 100 | 11.088.525 | 100 | | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| | Urusan Kesehatan | | | | | 14.067.702 | | 21.986.331 | | 24.184.964 | | 26.603.461 | | 29.263.807 | | 32.190.187 | | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat >80% | % | 75,72 (B) | 77,50 | 1.406.770 | 80,00 | 2.198.633 | 82,50 | 2.418.496 | 85,00 | 2.660.346 | 87,50 | 2.926.381 | 87,50 | 3.219,019 | 87,50 | | |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Tingkat layanan kefarmasian (resep obat) | % | 75 | 75,00 | 4.220.311 | 75,00 | 6.595.899 | 75,00 | 7.255.489 | 75,00 | 7.981.038 | 75,00 | 8.779.142 | 75,00 | 9.657.056 | 75,00 | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kelas III) melalui BPJS/KHS di RSUD Labuha | % | 100 | 100,00 | 8.440.621 | 85,00 | 13.191.799 | 85,00 | 14.510.978 | 90,00 | 15.962.076 | 90,00 | 17.558.284 | 90,00 | 19.314.112 | 90,00 | | |
| | | Pelayanan rujukan dari RSUD Labuha ke RSUD Chasan Boesorie Ternate | % | | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | Cakupan Pemulangan Jenazah dan Pemakaman Gratis | % | | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | Status / Tipe RS | Tipe | | D | | D | | C | | B | | B | | B | | B | | |
| | | Persentase pemenuhan SPM sarana prasarana rumah sakit | % | | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | Persentase pemenuhan SPM sarana prasarana rumah sakit | % | | 100 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (A) | | | | | 224.061.687 | | 194.165.217 | | 203.873.478 | | 214.067.152 | | 224.770.510 | | 236.009.035 | | | | |
| Program Penunjang | | | | | 31.566.600 | | 3.894.930 | | 4.089.677 | | 4.294.160 | | 4.508.868 | | 4.734.312 | | | | |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 31.566.600 | 100 | 3.894.930 | 100 | 4.089.677 | 100 | 4.294.160 | 100 | 4.508.868 | 100 | 4.734.312 | 100 | | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | | 100 | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | | |
| | Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | | | | | 177.282.088 | | 174.296.638 | | 183.011.470 | | 192.162.044 | | 201.770.146 | | 211.858.653 | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase infrastruktur irigasi dalam lahan pertanian | % | 31.910.776 | 5% | 31.910.776 | 7% | 31.373.395 | 8% | 32.942.065 | 9% | 38.432.409 | 10% | 44.389.432 | 10% | 46.608.904 | 10% | | |
| | | Persentase lahan pertanian yang teraliri irigasi | % | | 300 (18%) | | 320 Ha (19%) | | 350 Ha (21%) | | 375 Ha (22%) | | 400 Ha (24%) | | 425 Ha (25%) | | 425 Ha (25%) | | |
| | | Persentase Kawasan sumber air baku untuk pertanian yang tersedia dan terpelihara | % | | 50% | | 51% | | 53% | | 55% | | 58% | | 60% | | 65% | | |
| | | Persentase Kawasan sumber air baku untuk air minum yang tersedia dan terpelihara | % | | 27% | | 35% | | 45% | | 65% | | 80% | | 100% | | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4 | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | | | |
|--|--|--|--------|---|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--------|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase berkurangnya Kawasan Rawan Longsor dan Abrasi | % | 16% | 17% | | | 19% | | 21% | | 23% | | 25% | | 30% | | 30% | |
| | Persentase jalan baru yang terbangun | % | | | 3% | | | 6% | | 9% | | 12% | | | 18% | | 18% | |
| | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap | % | 17,74% | 19,24% | | 92.186.686 | 20,74% | | 90.634.252 | 22,24% | | 25,00% | | 35,00% | | 40,00% | 40,00% | |
| | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap | % | 17,74% | 19,24% | | | 20,74% | | | 22,24% | | 25,00% | | 35,00% | | 40,00% | 40,00% | |
| | Persentase meningkatnya kondisi struktur jalan | % | 17,74% | 21,35% | | | | 27,95% | | | 31,95% | | 35,90% | | 38,90% | | 40,00% | |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik | % | 15% | 25% | 35.456.418 | 37% | 34.859.328 | 50% | 36.602.294 | 65% | 34.589.168 | 80% | 30.265.522 | 80% | 31.778.798 | 80% | |
| | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Peningkatan ratio tenaga ahli konstruksi bersertifikat | % | N/A | 5% | 5.318.463 | 10% | 5.228.899 | 20% | 5.490.344 | 30% | 5.764.861 | 40% | 6.053.104 | 50% | 6.355.760 | 50% | |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase luas kawasan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dalam tata ruang | % | 50% | 50% | 8.864.104 | 65% | 8.714.832 | 75% | 9.150.574 | 90% | 9.608.102 | 100% | 10.088.507 | 100% | 10.592.933 | 100% | |
| | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | 15.212.999 | | 15.973.649 | | 16.772.331 | | 17.610.948 | | 18.491.495 | | 19.416.070 | | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase Pemenuhan Listrik Perkotaan (PJU) | % | 60% | 60% | | 70% | | 80% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | |
| | | Persentase Desa Yang Sudah Terakses Listrik | % | 44% | 44% | 15.212.999 | 56% | 15.973.649 | 68% | 16.772.331 | 84% | 17.610.948 | 90% | 18.491.495 | 100% | 19.416.070 | 100% | |
| | | Persentase Desa Yang Memiliki PJU | % | 55% | 55% | | 67% | | 78% | | 88% | | 95% | | 100% | | 100% | |
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (A) | | | | | 193.799.723 | | 240.890.155 | | 262.934.663 | | 276.081.396 | | 289.885.466 | | 304.379.739 | | | |
| Program Penunjang | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | 1.304.636 | 6 dok (42,31) | 50.619.868 | 63.150.861 | 66.308.404 | 69.623.824 | 73.105.016 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | 15.212.999 | | 15.973.649 | | 16.772.331 | | 17.610.948 | | 18.491.495 | | 19.416.070 | | |
| | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah Tidak Layak Huni | % | 29% | 27% | | 25% | | 23% | | 21% | | 19% | | 17% | | 17% | |
| | | Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam | % | 60% | 60% | 6.845.850 | 70% | 4.792.095 | 5.031.699 | 5.283.284 | 5.547.449 | 5.547.449 | 100% | 5.547.449 | 100% | 5.824.821 | 100% | |
| | | Cakupan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Penda | % | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | % | 30% | 28% | 1.217.040 | 26% | 3.194.730 | 24% | 3.354.466 | 22% | 3.522.190 | 20% | 3.698.299 | 18% | 3.883.214 | 18% | |
| 5 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | % | 177,66 | 100 | 3.042.600 | 75 | 2.396.047 | 50 | 2.515.850 | 25 | 2.641.642 | 0 | 2.773.724 | 0 | 2.912.411 | 0% | |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Lokasi Taman Kota Yang Dikelola | % | 48,5 | 0% | 3.346.860 | | | | 5.031.699 | | | | | | | | |
| | | Persentase Lokasi pemakaman Yang Dikelola | % | - | 0% | | 25% | 43% | 62% | | | 5.283.284 | 70% | 5.547.449 | 80% | 5.824.821 | 80% | |
| | | | | | | | 10% | | 20% | | 30% | | 35% | | 40% | | 40% | |
| | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Cakupan layanan PBG yang diterbitkan | % | N/A | 0% | 760.650 | 5% | 798.682 | 10% | 838.617 | 15% | 880.547 | 25% | 924.575 | 30% | 970.804 | 30% | |
| | Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | | | | | 177.282.088 | | 174.296.638 | | 183.011.470 | | 192.162.044 | | 201.770.146 | | 211.858.653 | | |
| | Program Pengembangan Permukiman | Rasio bangunan yang ber IMB (Kawasan Perkotaan) | % | 1% | 1% | 8.864.104 | 5% | 8.714.832 | 10% | 9.150.574 | 13% | 9.608.102 | 17% | 10.088.507 | 25% | 10.592.933 | 25% | |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase pemukiman yang tertata | % | 10% | 12% | 17.728.209 | 15% | 17.429.664 | 18% | 18.301.147 | 21% | 19.216.204 | 24% | 20.177.015 | 26% | 21.185.865 | | |
| | Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase penurunan lingkungan permukiman kumuh | % | 20% | 22% | 35.456.418 | 24% | 34.859.328 | 26% | 36.602.294 | 28% | 38.432.409 | 30% | 40.354.029 | 32% | 42.371.731 | 32% | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rumah tangga pengguna air bersih (Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak) | % | 54,31 | 60,00 | 44.320.522 | 65,00 | 43.574.160 | 70,00 | 45.752.868 | 80,00 | 48.040.511 | 90,00 | 50.442.537 | 95,00 | 52.964.663 | 95,00% | |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rumah Tangga Ber Sanitasi (Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak) | % | 56,25 | 60,00 | 26.592.313 | 65,00 | 26.144.496 | 70,00 | 27.451.721 | 80,00 | 28.824.307 | 90,00 | 30.265.522 | 95,00 | 31.778.798 | 95,00% | |
| | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Proporsi drainase lingkungan dalam kondisi baik | % | 60,00 | 60,00 | 44.320.522 | 65,00 | 43.574.160 | 70,00 | 45.752.868 | 80,00 | 48.040.511 | 90,00 | 50.442.537 | 95,00 | 52.964.663 | 95,00% | |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP (B) | | | | | 181.586.724 | | 228.916.506 | | 67.150.861 | | 70.408.404 | | 74.123.824 | | 77.605.016 | | | |
| Program Penunjang | | | | | 1.304.636 | | 50.619.868 | | 63.150.861 | | 66.308.404 | | 69.623.824 | | 73.105.016 | | | |

| | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|---|--|--|--------|---|--|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------------------|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 1.043.709 | 100 | 40.495.894 | 100 | 50.520.689 | 100 | 53.046.723 | 100 | 55.699.060 | 100 | 58.484.013 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | 260.927 | 6 dok (42,31) | 10.123.974 | 5 dok (61,54) | 12.630.172 | 5 dok (80,77) | 13.261.681 | 5 dok (100,00) | 13.924.765 | 5 dok (109,23) | 14.621.003 | 31 dok (109,23%) | |
| | Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | 3.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.100.000 | | 4.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara | % | N/A | 0 | 300.000 | 10 | 400.000 | 15 | 400.000 | 19 | 410.000 | 19 | 450.000 | 20 | 450.000 | 20 | |
| | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan LIMBAH B3 | Jumlah limbah B3 yang dikelola | angka | N/A | 0 | 300.000 | 10 | 400.000 | 15 | 400.000 | 18 | 410.000 | 20 | 450.000 | 25 | 450.000 | 25 | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan | Persentase usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air | % | 5,26 | 10,53 | 450.000 | 26,32 | 600.000 | 52,63 | 600.000 | 78,95 | 615.000 | 100 | 675.000 | 100 | 675.000 | 100 | |
| | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Status pengelolaan kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya | | N/A | - | 450.000 | MOU, Survey dan persiapan kawasan | 600.000 | Rencana Induk dan Rencana Aksi | 600.000 | Action | 615.000 | Action | 675.000 | Action | 675.000 | Beroperasinya Kebun Raya Mangrove dan/atau TAHURA | |
| 7 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan | Persentase Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sesuai RTRW | % | 50 | 50 | 1.350.000 | 50 | 1.800.000 | 50 | 1.800.000 | 45 | 1.845.000 | 45 | 2.025.000 | 40 | 2.025.000 | 40 | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | % | N/A | 0 | 150.000 | 11 | 200.000 | 16 | 200.000 | 22 | 205.000 | 27 | 225.000 | 30 | 225.000 | 30 | |
| | Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | | | | | 177.282.088 | | 174.296.638 | | 183.011.470 | | 192.162.044 | | 201.770.146 | | 211.858.653 | | |
| | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Persentase Penanganan Sampah Perkotaan Dengan Prinsip Menuju 3R | % | 37% | 45% | | 65% | | 70% | | 75% | | 80% | | 85% | | 85% | |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | 40.282.918 | | 42.297.064 | | 44.411.917 | | 46.632.513 | | 48.964.139 | | 51.412.346 | | |
| | Program Penunjang | | | | | 6.252.171 | | 6.564.780 | | 6.893.019 | | 7.237.669 | | 7.599.553 | | 7.979.531 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6.252.171 | 6 dok (42,31) | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 7.237.669 | 5 dok (100,00) | 7.599.553 | 5 dok (109,23) | 7.979.531 | 31 dok (109,23%) |
| 8 | Urusan Perhubungan | | | | | 34.030.747 | | 35.732.284 | | 37.518.899 | | 39.394.843 | | 41.364.586 | | 43.432.815 | | |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan darat dan laut | % | 33% | 35% | | 40% | | 45% | | 50% | | 55% | | 60% | | 60% | |
| | | Persentase Desa yang terlayani Angkutan laut | % | 53% | 57% | | 60% | | 62% | | 64% | | 67% | | 75% | | 75% | |
| | | Persentase pengguna fasilitas Pemda di bandara | % | 30% | 33% | | 40% | | 50% | | 60% | | 70% | | 70% | | 70% | |
| | | Persentase menurunnya tingkat Kecelakaan Darat | % | 30% | 28% | | 26% | | 23% | | 19% | | 17% | | 15% | | 15% | |
| | | Persentase Menurunnya tingkat Kecelakaan Laut | % | <1% | <1% | | <1% | | <1% | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | |
| | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA) | Persentase Keandaraan Yang Layak Operasi | % | 75% | 75% | 8.507.687 | 80% | 8.933.071 | 90% | 11.255.670 | 90% | 13.788.195 | 100% | 14.477.605 | 100% | 13.029.844 | 100% | |
| | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (A) | | | | | 7.950.017 | | 8.347.518 | | 8.764.894 | | 9.203.138 | | 9.663.295 | | 10.146.460 | | |
| 8 | Program Penunjang | | | | | 3.974.353 | | 4.173.071 | | 4.381.724 | | 4.600.810 | | 4.830.851 | | 5.072.393 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 3.974.353 | 100 | 4.173.071 | 100 | 4.381.724 | 100 | 4.600.810 | 100 | 4.830.851 | 100 | 5.072.393 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | 5 dok (61,54) | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 4.600.810 | 5 dok (109,23) | 4.830.851 | 5 dok (109,23) | 5.072.393 | 31 dok (109,23%) |
| | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | 3.116.819 | | 3.272.660 | | 3.436.293 | | 3.608.108 | | 3.788.513 | | 3.977.939 | | |
| | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Desa Terlayani Jaringan Informasi | % | 53% | 53% | 1.246.728 | 63% | 1.145.431 | 74% | 1.202.703 | 83% | 1.443.243 | 90% | 1.515.405 | 90% | 1.591.175 | 90% | |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Implementasi E-Goverment di Kabupaten Halmahera Selatan | % | 22% | 22% | 1.870.091 | 44% | 2.127.229 | 66% | 2.233.590 | 88% | 2.164.865 | 92% | 2.273.108 | 100% | 2.386.763 | 100% | |
| | Urusan Persandian | | | | | 150.000 | | 157.500 | | 165.375 | | 173.644 | | 182.326 | | 191.442 | | |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase Terpenuhinya Pengembangan dan Pengendalian Sandi Negara | % | 0% | 0% | 150.000 | 10% | 157.500 | 20% | 165.375 | 25% | 173.644 | 30% | 182.326 | 35% | 191.442 | 35% | |

| | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|----|--|---|---|---|--|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|--|----|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| | Urusan Statistik Daerah | | | | | 708.845 | | 744.287 | | 781.502 | | 820.577 | | 861.606 | | 904.686 | | |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase ketersediaan data dan informasi (Buku Profil Halsel, Buku PDRB, Buku Indikator Ekonomi, Buku IPM, Buku Inkesra, IKM) untuk perencanaan pembangunan | % | 100 | 6 dok (20.00) | 708.845 | 6 dok (20.00) | 744.287 | 6 dok (20.00) | 781.502 | 6 dok (20.00) | 820.577 | 6 dok (20.00) | 861.606 | 6 dok (20.00) | 904.686 | 30 dok (100.00) | |
| 9 | DINAS SOSIAL (A) | | | | | 5.581.738 | | 5.860.825 | | 6.153.866 | | 6.461.559 | | 6.784.637 | | 7.123.869 | | |
| | Program Penunjang | | | | | 3.354.162 | | 3.521.870 | | 3.697.964 | | 3.882.862 | | 4.077.005 | | 4.280.855 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 3.354.162 | 100 | 3.521.870 | 100 | 3.697.964 | 100 | 3.882.862 | 100 | 4.077.005 | 100 | 4.280.855 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | | | | |
| | Urusan Sosial | | | | | 2.227.576 | | 2.338.955 | | 2.455.903 | | 2.578.698 | | 2.707.633 | | 2.843.014 | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase pelayanan kelembagaan sosial di masyarakat | % | 50,00 | 50,00 | 556.894 | 60,00 | 584.739 | 70,00 | 613.976 | 80,00 | 644.674 | 90,00 | 676.908 | 100,00 | 710.754 | 100,00 | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase Menurunnya angka PMKS | % | 22,46 | 20,42 | 668.273 | 18,39 | 701.686 | 16,36 | 736.771 | 14,32 | 773.609 | 12,29 | 812.290 | 12,00 | 852.904 | 12,00 | |
| | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase cakupan pelayanan sosial masyarakat | % | 2,96 | 2,59 | 1.002.409 | 2,33 | 1.052.530 | 2,37 | 1.105.156 | 3,00 | 1.160.414 | 4,00 | 1.218.435 | 5,00 | 1.279.356 | 5,00 | |
| | | Cakupan korban bencana yang menerima bantuan | % | 22,50 | 30,00 | | 40,00 | | 50,00 | | 60,00 | | 70,00 | 80,00 | | | | |
| | | Persentase tersedianya tenaga kesejahteraan sosial di tiap kecamatan | % | 46,67 | 46,67 | | 63,33 | | 80,00 | | 96,67 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Persentase Pemberian Bantuan Tepat Guna dan Tepat Sasaran | % | 70,00 | 70 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Persentase cakupan pelayanan sosial keagamaan | % | 2,96 | 2,59 | | 2,33 | | 2,37 | | 3,00 | | 4,00 | 5,00 | | | | |
| 10 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (A) | | | | | 13.365.312 | | 14.033.578 | | 14.735.256 | | 15.472.019 | | 16.245.620 | | 17.057.901 | | |
| | Program Penunjang | | | | | 3.566.812 | | 3.745.153 | | 3.932.410 | | 4.129.031 | | 4.335.482 | | 4.552.256 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 3.566.812 | 100 | 3.745.153 | 100 | 3.932.410 | 100 | 4.129.031 | 100 | 4.335.482 | 100 | 4.552.256 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | | | | |
| | Urusan Pengendalian Penduduk dan KB | | | | | 8.930.898 | | 9.377.443 | | 9.846.315 | | 10.338.631 | | 10.855.562 | | 11.398.340 | | |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cakupan Peserta KB Aktif | % | 29,73 | 57,08 | 3.125.814,30 | 69,91 | 3.282.105 | 82,73 | 3.446.210 | 95,56 | 3.101.589 | 100 | 3.256.669 | 100 | 3.989.419 | 100 | |
| | | Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate(CPR)) | % | 65,2 | 65,4 | | 65,6 | | 65,8 | | 66,0 | 66,5 | 67,0 | | | | | |
| | | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 10,6 | 10,4 | | 10,2 | | 10 | | 9,91 | 9,88 | 9,51 | | | | | |
| | | Persentase TRIBINA yang mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari target 275 kel. | % | 63,64 | 70,91 | | 78,18 | | 85,45 | | 92,73 | 96,36 | 100,00 | | | | | |
| | | Persentase Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera | % | 14,30 | 13 | | 12 | | 11 | | 10 | 9 | 8 | | | | | |
| 10 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Meningkatnya Keluarga Sejahtera 1 | % | 32 | 0 | 3.125.814,30 | 34 | 3.282.105 | 35 | 2.953.895 | 36 | 3.618.521 | 37 | 3.799.447 | 40 | 3.989.419 | 40 | |
| | | Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun) | % | 3,8 | 3,7 | | 3,6 | | 3,5 | | 3,4 | 3,3 | 3,0 | | | | | |
| | | Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) | % | 7,89 | 7,00 | | 6,5 | | 6 | | 5,5 | 5 | 4,5 | | | | | |
| | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Persentase KK yang pendapatannya meningkat setelah diberikan bantuan dari UPPKS | % | 40 | 40 | 2.679.269,40 | 50 | 2.813.233 | 55 | 3.446.210 | 60 | 3.618.521 | 65 | 3.799.447 | 70 | 3.989.419 | 70 |
| | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | 867.602 | | 910.982 | | 956.531 | | 1.004.358 | | 1.054.576 | | 1.107.304 | | |
| | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | 50,87 | - | 104.112 | 50,93 | 91.098 | 50,97 | 95.653 | 51,01 | 100.436 | 51,05 | 105.458 | 51,05 | 110.730 | 51,05 | |
| | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Persentase penurunan angka KDRT | % | 0,12 | 0,15 | 130.140 | 0,14 | 182.196 | 0,12 | 191.306 | 0,10 | 200.872 | 0,09 | 210.915 | 0,08 | 221.461 | 0,08 | |
| | Perlindungan Perempuan | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | % | 0,17 | 0 | 173.520 | 0,16 | 209.526 | 0,15 | 210.437 | 0,13 | 220.959 | 0,11 | 232.007 | 0,09 | 243.607 | 0,09 | |
| | Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | % | 100 | 100 | 199.548 | 100 | 182.196 | 100 | 191.306 | 100 | 200.872 | 100 | 210.915 | 100 | 221.461 | 100 | |
| | Perlindungan Khusus Anak | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | % | N/A | < 5% | 130.140 | < 5% | 109.318 | < 5% | 124.349 | < 5% | 130.567 | < 5% | 137.095 | < 5% | 143.950 | < 5% | |

| | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | | | | | |
|---|--|--|--------|--|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | | | |
| Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase capaian Kota Labuha sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak | % | 5 | 10 | 130.140 | 20 | 136.647 | 40 | 143.480 | 60 | 150.654 | 100 | 158.186 | 100 | 166.096 | 100 | | | | |
| | | % | 0 | 3,33 | | 10,00 | | 16,67 | | 23,33 | | 33,33 | | 35,00 | | 35 (13 Kecamatan) | | | | |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (A) | | | | | 7.366.151 | | 7.734.459 | | 8.121.181 | | 8.527.241 | | 8.953.603 | | 9.401.283 | | | | | |
| Program Penunjang | | | | | 5.341.432 | | 5.608.504 | | 5.888.929 | | 6.183.375 | | 6.492.544 | | 6.817.171 | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 5.341.432 | 100 | 5.608.504 | 100 | 5.888.929 | 100 | 6.183.375 | 100 | 6.492.544 | 100 | 6.817.171 | 100 | | | | |
| | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23%) | 31 dok (109,23%) | | | | | | |
| Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil | | | | | 2.024.719 | | 2.125.955 | | 2.232.253 | | 2.343.865 | | 2.461.059 | | 2.584.112 | | | | | |
| 11 | Program Pendaftaran Penduduk | Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP | % | 48,86 | 50,01 | 809.888 | 59,57 | 850.382 | 69,14 | 892.901 | 78,71 | 937.546 | 88,28 | 984.423 | 90,00 | 1.033.645 | 90,00 | | | |
| | | Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA | % | N/A | 0 | | 2 | | 5 | | 8 | | 13 | | 16 | | 20,00 | | | |
| | | Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) | % | 25,10 | 50,01 | | 59,57 | | 69,14 | | 78,71 | | 88,28 | | 90,00 | | 90,00 | | | |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | Cakupan pelaksanaan sistem informasi administrasi Kependudukan | % | 80 | 85,00 | 506.180 | 90,00 | 531.489 | 95,00 | 558.063 | 100,00 | 585.966 | 100,00 | 615.265 | 100,00 | 646.028 | 100,00 | |
| Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | Persentase data kependudukan dan capil yang akurat dan akuntabel | % | 75,00 | 80,00 | 303.708 | 85,00 | 318.893 | 90,00 | 334.838 | 95,00 | 351.580 | 95,00 | 369.159 | 100,00 | 387.617 | 100,00 | |
| 12 | Program Pencatatan Sipil | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 14,22 | 15 | 404.944 | 20,00 | 425.191 | 30,00 | 446.451 | 40,00 | 468.773 | 50,00 | 492.212 | 50,00 | 516.822 | 50,00 | | | |
| | | Persentase cakupan bantuan akta/buku nikah gratis | % | N/A | 0 | | 20 | | 40 | | 60 | | 80 | | 100 | | 100 | | | |
| DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | | | | | 4.264.743 | | 4.477.980 | | 4.701.879 | | 4.936.973 | | 5.183.822 | | 5.443.013 | | | | | |
| Program Penunjang | | | | | 2.588.473 | | 2.717.897 | | 2.853.791 | | 2.996.481 | | 3.146.305 | | 3.303.620 | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 2.329.626 | 100 | 2.446.107 | 100 | 2.568.412 | 100 | 2.696.833 | 100 | 2.831.675 | 100 | 2.973.258 | 100 | | | | |
| | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | 258.847 | 6 dok (42,31) | 271.790 | 5 dok (61,54) | 285.379 | 5 dok (80,77) | 299.648 | 5 dok (100,00) | 314.631 | 5 dok (109,23%) | 330.362 | 31 dok (109,23%) | | | | |
| Urusan Perpustakaan | | | | | 926.270 | | 972.584 | | 1.021.213 | | 1.072.273 | | 1.125.887 | | 1.182.181 | | | | | |
| 12 | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah | % | 57,7 | 66,85 | 741.016 | 75,14 | 778.067 | 83,43 | 816.970 | 91,71 | 857.819 | 100 | 900.710 | 100 | 945.745 | 100 | | | |
| | | Angka kunjungan perpustakaan | % | 16,92 | 20 | | 30 | | 40 | | 50 | | 75 | | 75 | | 75 | | | |
| | | Persentase Perpustakaan Desa / Khusus yang Aktif | % | 12,05 | 12,05 | | 14,06 | | 16,06 | | 18,07 | | 22,09 | | 25 | | 25 | | | |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | | | | Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang disimpan | % | N/A | 5 | 185.254 | 10 | 194.517 | 15 | 204.243 | 20 | 214.455 | 25 | 225.177 | 30 | 236.436 | 30 | |
| Urusan Kearsipan | | | | | 750.000 | | 787.500 | | 826.875 | | 868.219 | | 911.630 | | 957.211 | | | | | |
| Program Pengelolaan Arsip | Tingkat pengelolaan arsip secara baku | % | 0 | 0 | 487.500 | 20 | 511.875 | 40 | 537.469 | 60 | 564.342 | 80 | 592.559 | 80 | 622.187 | 80 | | | | |
| | Persentase dokumen penting yang diarsipkan | % | 0,42 | 0,69 | | 24,31 | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | | |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | | Persentase arsip yang dimusnahkan dan diselamatkan | % | N/A | 50 | 112.500 | 60 | 118.125 | 70 | 124.031 | 80 | 130.233 | 90 | 136.744 | 100 | 143.582 | 100 | |
| Program Perijinan Penggunaan Arsip | | | | Tingkat layanan informasi kearsipan | % | 0 | 0 | 150.000 | 50 | 157.500 | 50 | 165.375 | 100 | 173.644 | 100 | 182.326 | 100 | 191.442 | 100 | |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | 4.717.489 | | 7.953.363 | | 5.851.032 | | 6.143.583 | | 6.450.762 | | 6.773.300 | | | | | |
| Program Penunjang | | | | | 3.208.022 | | 3.368.423 | | 3.536.844 | | 3.713.686 | | 3.899.371 | | 4.094.339 | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 3.208.022 | 100 | 3.368.423 | 100 | 3.536.844 | 100 | 3.713.686 | 100 | 3.899.371 | 100 | 4.094.339 | 100 | | | | |
| | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23%) | 31 dok (109,23%) | | | | | | |
| Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 1.509.467 | | 4.584.940 | | 2.314.187 | | 2.429.897 | | 2.551.392 | | 2.678.961 | | | | | |
| 13 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kapasitasnya meningkat | % | 30,12 | 0 | 670.260 | 60,24 | 670.260 | 70,28 | 1.041.284 | 80,32 | 1.042.454 | 100,00 | 1.148.126 | 100,00 | 1.205.523 | 100,00 | | | |
| | | Persentase desa yang telah memiliki prasarana pemerintahan desa dan berfungsi baik | % | 35,74 | 37,35 | | 38,15 | | 40,00 | | 50,00 | | 60,00 | | 70,00 | | 70,00 | | | |

| 13 | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|--|----------------|------------|----------------------|-----|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | | |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Perempuan di Dalam Kelembagaan Desa | % | 5 | 5 | 079.200 | | 10 | 2.005.223 | 15 | 1.047.304 | 20 | 1.053.434 | 25 | 1.140.120 | 30 | 1.205.353 | 30,00 | | |
| | Rasio Posyandu Aktif | % | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Rasio PKK Aktif | % | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| | Persentase BUMDES yang beroperasi aktif | % | 7,23 | 0 | | | 21,29 | | 33,82 | | 47,11 | | 60,00 | | 70,00 | | 70 | | |
| | Rata-rata peningkatan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) | % | 0 | 0 | | | 4,02 | | 8,05 | | 12,11 | | 18,19 | | 25,00 | | 25 | | |
| | Rasio Produktifitas Pemanfaatan TTG | | 2,01 | 2,41 | | | 12,45 | | 22,49 | | 32,53 | | 42,57 | | 42,57 | | 803.688 | | |
| | Tingkat peran serta kelembagaan masyarakat perdesaan | % | 8,03 | 10,71 | | | 14,73 | | 20,08 | | 24,10 | | 26,77 | | 30,00 | | 30,00 | | |
| | Program Penataan Desa | Jumlah desa mandiri | desa | 1 | | | 377.367 | 5 | 1.146.235 | 10 | 578.547 | 15 | 607.474 | 20 | 637.848 | 30 | 669.740 | | |
| | | Jumlah desa tertinggal | desa | 199 | | | | 187 | | 175 | | 163 | | 150 | | 150 | | 150 | |
| | | | | | 10.461.006 | | | 8.171.910 | | 8.580.505 | | 9.009.531 | | 9.460.007 | | 9.933.008 | | | |
| 14 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | 3.471.241 | | 2.235.621 | | 2.347.402 | | 2.464.772 | | 2.588.011 | | 2.717.411 | | |
| Program Penunjang | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 3.471.241 | 100 | 2.235.621 | 100 | 2.347.402 | 100 | 2.464.772 | 100 | 2.588.011 | 100 | 2.717.411 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| | Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Satpol-PP) | | | | 6.989.765 | | | 5.936.289 | | 6.233.103 | | 6.544.759 | | 6.871.996 | | 7.215.596 | | | |
| | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Ketersediaan Juknis SP / SOP Patrol, Penertiban, Penegakan Perda, Regulasi Penetapan Jumlah POL PP dan Regulasi PKD / Ketertiban Kantor | % | 0,00% | 0,00% | | | 20,00% | | 40,00% | | 55,00% | | 70,00% | | 85,00% | | 85,00% | |
| | | Rasio Tenaga SATPOL PP Per 10.000 Penduduk | Per 10.000 Penduduk | 4,41 | 5,00 | | | 6,00 | | 7,00 | | 8,00 | | 9,00 | | 10,28 | | 10,28 | |
| | | Rasio Limas Terlatih Pamswakarsa per 10.000 penduduk; | Per 10.000 Penduduk | - | 0 | | | 0 | | 4,78 | | 9,55 | | 14,33 | | 14,33 | | 14,33 (315 Orang) | |
| | | Cakupan Keterlibatan dalam Pengendalian Kamtit di Daerah | Frekwensi Pengamanan | 0 Kali dalam setahun | 0,3 Kali | | | 0,3 Kali | | 0,5 Kali | | 0,5 Kali | | 0,5 Kali | | 0,5 Kali | | 0,5 Kali dlm setahun | |
| | | Cakupan Patroli Siaga Trantib; | Frekwensi Patroli | 0,03 Kali Per Wil | 0,00 Kali | | | 0,20 Kali | | 0,30 Kali | | 0,90 Kali | | 0,90 Kali | | 0,90 Kali | | 0,90 Kali Per Wil | |
| | | Cakupan Penegakan Perda/K3; | % | 41,40% | 50% | | | 50% | | 50% | | 60% | | 60% | | 60% | | 60% | |
| | | Persentase Desa Tersosialisasi Standar Penyelenggaraan Limas. | % | --- | --- | | | --- | | 24,10 | | 30,00 | | 40,00 | | 50,00 | | 50,00 | |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Program Penunjang | | | | - | | 3.163.585 | | 3.321.764 | | 3.487.852 | | 3.662.245 | | 3.845.357 | | | | |
| | Program Penunjang | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 100 | | 1.235.621 | | 1.297.402 | | 1.362.272 | | 1.430.386 | | 1.501.905 | |
| | | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| | | Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran) | | | | | | 1.927.964 | | 2.024.362 | | 2.125.580 | | 2.231.859 | | 2.343.452 | | | |
| | Program Penanggulangan Kebakaran | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam | % | - | 100 | | | 100 | | 1.927.964 | 100 | 2.024.362 | 100 | 2.125.580 | 100 | 2.231.859 | 100 | 2.343.452 | 100 |
| | SEKRETARIAT DAERAH (A) | | | | | | 36.706.318 | | 38.541.634 | | 40.468.716 | | 42.492.151 | | 44.616.759 | | 46.847.597 | | |
| | Program Penunjang | | | | | | 22.970.100 | | 24.118.605 | | 25.324.535 | | 26.590.762 | | 27.920.300 | | 29.316.315 | | |
| | Program Penunjang | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 100 | | 5 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 100 | |
| | | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | | | | | | | | | | 31 dok (109,23%) | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 16 | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|----|---|---|-----------|---|--|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|------------------|------------|--|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| 16 | Pengadaan Barang Milik Daerah | | | 22.970.100 | | | 24.118.605 | | 25.324.535 | | 26.590.762 | | 27.920.300 | | 29.316.315 | | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Keuangan dan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penataan Organisasi | Percentase Peningkatan Kinerja SKPD Minal CC | % | 6,67 | 20,00 | | 37,04 | | 51,85 | | 66,67 | | 92,59 | | 92,59 | | 92,59 | |
| | | Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah | skor | C | CC | | CC | | B | | BB | | A | | A | | A | |
| 16 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Percentase pelayanan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan | % | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | Urusan Pemerintahan (Umum) | | | | | 13.736.218 | | 14.423.029 | | 15.144.180 | | 15.901.389 | | 16.696.459 | | 17.531.282 | | |
| | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Tata Pemerintahan | Percentasi Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan | % | 0% | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 20% | | 100% | |
| | | Percentase Tanah dan Bangunan Yang Termanfaatkan Untuk Pelayanan Masyarakat Kecamatan | % | 70 | 75% | | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Percentase pelayanan bansos | % | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 12.271.897 | |
| | | Percentase pelaksanaan pembinaan keagamaan (MTQ, PABN dan PMBN) | % | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Percentase Jumlah Perda yang telah memiliki Perbub | % | 35 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | | Percentase pemberian bantuan Hukum (kasus) | % | 50 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Program Perekonomian Dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Percentase pengendalian inflasi daerah | % | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Percentase data monev pembangunan | % | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Percentase ASN yang memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa | % | 7% | 7% | | 73% | | 84% | | 92% | | 100% | | 100% | | 5.259.385 | |
| | | Percentase Peningkatan PBJ Tepat Waktu | % (Paket) | 10 | 20 | | 50 | | 70 | | 80 | | 95 | | 95 | | 95 | |
| | | Tercapainya ISO 9000 | Kategori | Belum Sertifikasi | Belum | | Persipan | | TERSERTIFI KASI | | TERSERTIFI KASI | | TERSERTIFI KASI | | TERSERTIFI KASI | | Tersertifikasi | |
| | Penitidauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Percentase kajian pengelolaan SDA | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEKRETARIAT DPRD (B) | | | | | 36.287.682 | | 38.102.066 | | 40.007.169 | | 42.007.528 | | 44.107.904 | | 46.313.299 | | |
| | Program Penunjang | | | | | 11.042.757 | | 11.594.895 | | 12.174.640 | | 12.783.372 | | 13.422.540 | | 14.093.667 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 11.042.757 | 100 | 11.594.895 | 100 | 12.174.640 | 100 | 12.783.372 | 100 | 13.422.540 | 100 | 14.093.667 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | 31 dok (109,23%) | | | |
| 17 | Program Pemerintahan (Umum) | | | | | 25.244.925 | | 26.507.171 | | 27.832.530 | | 29.224.156 | | 30.685.364 | | 32.219.632 | | |
| | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Percentase Ranperda yang disahkan | Perda | N/A | 20 | 25.244.925 | 20 | 26.507.171 | 20 | 27.832.530 | 20 | 29.224.156 | 20 | 30.685.364 | 20 | 32.219.632 | 100 | |
| | INSPEKTORAT DAERAH (A) | | | | | 11.158.589 | | 12.716.518 | | 13.352.344 | | 14.019.962 | | 14.930.129 | | 15.977.840 | | |
| 17 | Program Penunjang | | | | | 6.088.012 | | 6.392.413 | | 6.712.033 | | 7.047.635 | | 7.400.017 | | 7.770.017 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 6.088.012 | 100 | 6.392.413 | 100 | 6.712.033 | 100 | 7.047.635 | 100 | 7.400.017 | 100 | 7.770.017 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | 31 dok (109,23%) | | | |
| | Urusan Pemerintahan (Pengawasan) | | | | | 5.070.577 | | 6.324.106 | | 6.640.311 | | 6.972.327 | | 7.530.113 | | 8.207.823 | | |

| Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 2020) | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|---|--|--------|---|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|--|-----------|
| | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| 18 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | % | Persentase SKPD dan Desa mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi | 5,38 | 4,66 | 3,94 | | 3,23 | | 2,51 | | 1,79 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | % | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti | 0,00 | 20,00 | 40,00 | | 60,00 | | 80,00 | | 95,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | % | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 58,49 | 60,00 | 70,00 | | 80,00 | | 90,00 | | 95,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | Maturitas Implementasi SPIP | % | Maturitas Implementasi SPIP | Level 1 | Level 1 | Level 1 | | Level 2 | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | 7.387.041 |
| | | % | Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi LAKIP/AKIP oleh Inspektorat Minimal B | 20,00 | 23,33 | 55,56 | | 74,01 | | 81,48 | | 92,59 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | % | Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi | 60,00 | 70,00 | 80,00 | | 90,00 | | 92,50 | | 97,50 | | 100,00 | | 100,00 | |
| | | Level | Level Kapabilitas APIP | Level 1 | Level 1 | Level 1 | | Level 2 | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | | Level 3 | |
| | | % | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | N/A | 100 | 507.058 | 100 | 632.411 | 100 | 664.031 | 100 | 697.233 | 100 | 753.011 | 100 | 820.782 | 100 |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANGDA (A) | | | | 12.561.948 | 13.190.045 | 14.849.548 | 15.592.025 | 16.371.626 | 17.190.208 | | | | | | | |
| 19 | Program Penunjang | | | | 6.321.764 | 6.637.852 | 6.969.745 | 7.318.232 | 7.684.144 | 8.068.351 | | | | | | | |
| | | % | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | % | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | 100 | 5 dok (19,23) | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 8.068.351 | |
| | | % | Urusan Pemerintahan (Perencanaan) | | | 5.474.924 | 5.748.670 | 6.036.104 | 6.337.909 | 6.654.804 | 6.987.545 | | | | | | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | % | Tersedianya informasi perencanaan daerah | 100 | 25 | 18,75 | | 18,75 | | 18,75 | | 18,75 | | 18,75 | | 100 | |
| | | % | Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD | 25 | 30 | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | | % | Persentase kesesuaian antara Program RPJMD dengan RKPD | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | 3.144.395 |
| | | % | Persentase kesesuaian antara Program RKPD dengan PPAS | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| | Program Perencanaan Tata Ruang | % | Persentase luas wilayah yang peruntukannya telah sesuai dengan RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi | | > 60% | 273.746 | > 60% | 287.434 | > 60% | 301.805 | > 60% | 316.895 | > 60% | 332.740 | > 60% | 349.377 | >60% |
| | Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah | % | Persentase ketersediaan data evaluasi (Dok Evaluasi semesteran, Dok evaluasi tahunan, Dok Kemajuan Indeks Pembangunan Desa, Dok Laporan Monitoring) | 100 | 5 dok (20,00) | 5 dok (20,00) | | 5 dok (20,00) | | 5 dok (20,00) | | 5 dok (20,00) | | 5 dok (20,00) | | 25 dok (100,00) | |
| | | % | Persentase Program RPJMD yang tercapai target kinerjanya | n.a | 50 | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | 90 | | 90 | 2.096.263 |
| | | % | Persentase OPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %) | n.a | 50 | 60 | | 70 | | 80 | | 90 | | 90 | | 90 | |
| | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | % | Persentase kesesuaian program RPJMD dengan program OPD | | | 1.094.985 | | 1.149.734 | | 1.207.221 | | 1.267.582 | | 1.330.961 | | 1.397.509 | |
| | Urusan Pemerintahan (Litbang) | | | | | 765.260 | 803.523 | 1.843.699 | 1.935.884 | 2.032.678 | 2.134.312 | | | | | | |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | % | Prosentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh Pemda, masyarakat dan stakeholder lainnya | n.a | - | 765.260 | 50 | 803.523 | 60 | 1.843.699 | 70 | 1.935.884 | 80 | 2.032.678 | 80 | 2.134.312 | 80 |
| BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (A) | | | | | 248.548.153 | 261.375.969 | 274.885.217 | 289.113.973 | 304.102.616 | 319.893.985 | | | | | | | |
| 20 | Program Penunjang | | | | 34.874.935 | 36.618.682 | 38.449.616 | 40.372.097 | 42.390.701 | 44.510.237 | | | | | | | |
| | | % | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | % | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | 100 | 5 dok (19,23) | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| | | % | Urusan Pemerintahan (Keuangan Daerah) | | | 205.665.043 | 215.948.295 | 226.745.710 | 238.082.995 | 249.987.145 | 262.486.502 | | | | | | |
| | | % | Persentase LKPD tepat waktu | Ya | Ya | Ya | | Ya | | Ya | | Ya | | Ya | | Ya | |

| Kode | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|------|--|--|--------|---|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------------|--|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| 20 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase SKPD, UPTD, PUSKESMAS, dan Kecamatan yang menyusun LK secara mandiri dan sesuai SAP | % | 2,46 | 6,56 | 92.549.269 | 35,25 | 97.176.733 | 59,02 | 102.035.569 | 82,79 | 107.137.348 | 100,00 | 112.494.215 | 100,00 | 118.118.926 | 100 | |
| | | Presentase Pemanfaatan Teknologi informasi berbasis IT yang berkesinambungan. | % | 24,59 | 40,98 | | 57,38 | | 73,77 | | 81,97 | | 100,00 | | 100,00 | | 100 | |
| | | Presentase Pemenuhan Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Presentase Peningkatan Realisasi Jumlah PAD/total Pendapatan Daerah. | % | 46,97 | 50,00 | | 55,00 | | 60,00 | | 65,00 | | 70,00 | | 70,00 | 78.745.951 | 70,00 | |
| | | Presentase meningkatnya jumlah kesadaran wajib pajak dan retribusi. | % | 26,00 | 31,19 | | 34,76 | | 38,32 | | 44,56 | | 54,37 | | 54,37 | | 70 | |
| | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Presentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah | % | 24,59 | 32,79 | 51.416.261 | 35,25 | 53.987.074 | 59,02 | 56.686.427 | 82,79 | 59.520.749 | 100,00 | 62.496.786 | 100,00 | 65.621.626 | 100 | |
| 21 | URUSAN PERTANAHAN | | | | 8.008.175 | | 8.808.993 | | 9.689.892 | | 10.658.881 | | 11.724.769 | | 12.897.246 | | | |
| | Program Penatagunaan Tanah | Presentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah | % | 21 | 20 | 4.804.905 | 20 | 5.285.396 | 20 | 5.813.935 | 20 | 6.395.329 | 20 | 7.034.861 | 20 | 7.738.348 | 80 | |
| | Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Presentase luas tanah yang diselesaikan ganti rugi | % | 40 | 45 | 3.203.270 | 50 | 3.523.597 | 60 | 3.875.957 | 70 | 4.263.552 | 80 | 4.689.908 | 90 | 5.158.898 | 90 | |
| | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | | | | 8.914.199 | | 10.359.909 | | 10.877.904 | | 11.421.800 | | 11.992.890 | | 12.592.534 | | | |
| | Program Penunjang | | | | 4.744.621 | | 4.981.852 | | 5.230.945 | | 5.492.492 | | 5.767.116 | | 6.055.472 | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 4.744.621 | 100 | 4.981.852 | 100 | 5.230.945 | 100 | 5.492.492 | 100 | 6.055.472 | 100 | 31 dok (109,23%) | | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | 5.767.116 | 5 dok (109,23) | | | | | |
| 22 | URUSAN PEMERINTAHAN (Kepegawaian dan Diklat) | | | | 4.169.578 | | 5.378.057 | | 5.646.960 | | 5.929.308 | | 6.225.773 | | 6.537.062 | | | |
| | Program Kepegawaian Daerah | Persentasi Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010) | % | 100 Pelanggaran (2,22) | 10 | 2.710.226 | 10 | 3.495.737 | 10 | 3.670.524 | 10 | 3.854.050 | 10 | 4.046.753 | 10 | 4.249.090 | 50 | |
| | | Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya | % | 35 | 40 | | 45 | | 50 | | 60 | | 65 | | | | | |
| | | Persentase ASN yang Mengakses Data Base Pegawai | % | 10 | 15 | | 30 | | 50 | | 70 | | 100 | | | | | |
| | | Persentase Peningkatan Karir Pegawai | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | |
| | | Persentase Peningkatan PNS dengan kualifikasi S1/S2/S3 | % | 35,21 | 38,67 | | 39,17 | | 40,07 | | 39,57 | | 40,57 | | | | | |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Persentase Meningkatnya Profesionalisme Pejabat Struktural | % | 15,69 | 18,94 | 1.459.352 | 26,07 | 1.882.320 | 33,2 | 1.976.436 | 40,34 | 2.075.258 | 47,47 | 2.179.021 | 47,47 | 2.287.972 | 47,47 | |
| | | Persentase Meningkatnya Profesionalisme Pejabat Fungsional | % | 3,00 | 3 | | 5 | | 8 | | 14 | | 14 | | | | | |
| 23 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN (A) | | | | 27.574.154 | | 28.952.862 | | 30.400.505 | | 31.920.530 | | 33.516.557 | | 35.192.384 | | | |
| | Program Penunjang | | | | 9.589.218 | | 10.068.679 | | 10.572.113 | | 11.100.718 | | 11.655.754 | | 12.238.542 | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 9.589.218 | 100 | 10.068.679 | 100 | 10.572.113 | 100 | 11.100.718 | 100 | 11.655.754 | 100 | 12.238.542 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | | | | | |
| | Urusan Pertanian | | | | 17.001.500 | | 17.851.575 | | 18.744.154 | | 19.681.361 | | 20.665.430 | | 21.698.701 | | | |
| | Urusan Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan) | | | | 4.065.000 | | 4.268.250 | | 4.481.663 | | 4.705.746 | | 4.941.033 | | 5.188.085 | | | |
| 24 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Produksi Tanaman Pangan : | ton | | | 3.252.000 | | 3.414.600 | | 3.585.330 | | 3.764.597 | | 3.952.826 | | 4.150.468 | | |
| | | Produksi Tanaman Hortikultura : | ton | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produtivitas Tanaman Pangan : | ton | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penyaluran Pertanian | Persentase kelompok tani yang mendapat penyaluran | % | 50% | 55 | 813.000 | 60 | 853.650 | 65 | 896.333 | 70 | 941.149 | 75 | 988.207 | 80 | 1.037.617 | 80 | |

| 22 | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | | | |
|----|---|--|--------------------|---|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|--|------------|------------------|--------|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| | Urusan Pertanian (Sub Sektor Tanaman Perkebunan) | | | | | 11.936.500 | | 12.533.325 | | 13.159.991 | | 13.817.991 | | 14.508.890 | | 15.234.335 | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Produksi tanaman perkebunan: | ton | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produtivitas tanaman perkebunan: | ton | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Jalan Usaha Tani yang terbangun dari target | % | | 50,00 | | 7.161.900 | 60,00 | 7.519.995 | 70,00 | 7.895.995 | 80,00 | 8.290.794 | 90,00 | 8.705.334 | 100,00 | 9.140.601 | 100,00 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase luas tanaman Perkebunan yang terserang OPT Perkebunan | % | 40 | 40 | 3.580.950 | 35 | 3.759.998 | 30 | 3.947.997 | 25 | 4.145.397 | 20 | 4.352.667 | 20 | 4.570.300 | 20 | |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase pertumbuhan investasi industri pengolahan hasil-hasil perkebunan | % | | 0 | 1.193.650 | 5 | 1.253.333 | 5 | 1.315.999 | 5 | 1.381.799 | 5 | 1.450.889 | 5 | 1.523.433 | 5 | |
| | Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) | | | | | 1.000.000 | | 1.050.000 | | 1.102.500 | | 1.157.625 | | 1.215.506 | | 1.276.282 | | |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Ketersediaan telur lokal ditingkat konsumen | Kg | 600 | 680 | 1.000.000 | 760 | 1.050.000 | 840 | 1.102.500 | 920 | 1.157.625 | 1.000 | 1.215.506 | 1.200 | 1.276.282 | 1.200 | |
| | | Ketersediaan daging lokal ditingkat konsumen | Kg | 56.000 | 64.800 | | 73.600 | | 82.400 | | 91.200 | | 100.000 | | 120.000 | | 120.000 | |
| | Urusan Ketahanan Pangan | | | | | 983.436 | | 1.032.608 | | 1.084.238 | | 1.138.450 | | 1.195.373 | | 1.255.141 | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Ketersediaan energy per kapita per hari | Kkal/ kapita/ hari | 1940 | - | | 22,5 | | | 22,5 | | | 22,5 | | 22,5 | | 22,5 | |
| | | Skor PPH | Gr/ kapita/ hari | 50,2 | - | 393.374 | 51,17 | 413.043 | 52,67 | 433.695 | 54,17 | 455.380 | 55,67 | 478.149 | 56 | 502.056 | 56,00 | |
| | | Jumlah persediaan bahan pangan pokok setara beras per tahun | ton | 0 | - | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 250 | | 1000 | |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Stabilitas harga pangan (beras) ditingkat konsumen (% Coefisien Variasi (CV) <10%) | % | 0 | - | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | | Stabilitas harga pangan (beras) ditingkat produsen Sesuai HPP (Rp) | % | 11,5 | - | 196.687 | 10 | 206.522 | 10 | 216.848 | 10 | 227.690 | 10 | 239.075 | 10 | 251.028 | 10 | |
| | | Prosentase Pangan yang Aman dikonsumsi | % | 0 | - | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL) | kawasan | 0 | - | 245.859 | 2 | 258.152 | 5 | 271.060 | 1 | 284.613 | 5 | 298.843 | 5 | 313.785 | 3 | |
| | | Prosentase penanganan wilayah/desa rawan pangan | % | 0 | - | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 20 | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Percentase penyuluhan pertanian bersertifikat | % | 7,1 | 7,1 | 147.515 | 21,4 | 154.891 | 21,43 | 162.636 | 23,81 | 170.768 | 26,19 | 179.306 | 26,19 | 188.271 | 100 | |
| | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Percentase Kelompok Tani baru yang terbentuk | Kel | 269 | 100 | | 150 | | 150 | | 160 | | 171 | | 171 | | 100 | |
| | Program Penunjang | | | | | 15.955.016 | | 16.752.767 | | 17.590.405 | | 18.469.925 | | 19.393.422 | | 20.363.093 | | |
| | | | | | | 3.796.656 | | 3.986.489 | | 4.185.813 | | 4.395.104 | | 4.614.859 | | 4.845.602 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 3.796.656 | 100 | 3.986.489 | 100 | 4.185.813 | 100 | 4.395.104 | 100 | 4.614.859 | 100 | 4.845.602 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| | Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | | 12.158.360 | | 12.766.278 | | 13.404.592 | | 14.074.821 | | 14.778.563 | | 15.517.491 | | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi perikanan tangkap | ton | 38.237,88 | 39.121,20 | 4.863.344 | 40.041,42 | 5.106.511 | 41.069,42 | 5.361.837 | 42.105,08 | 5.629.929 | 42.856,26 | 5.911.425 | 50.000,00 | 6.206.996 | 50.000,00 | |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Budidaya Perikanan | ton | 14.084,06 | 15.674,96 | 4.255.426 | 17.462,53 | 4.468.197 | 19.471,57 | 4.691.607 | 21.729,73 | 4.926.188 | 24.267,97 | 5.172.497 | 28.000,00 | 5.431.122 | 28.000,00 | |
| | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Produksi hasil pengolahan ikan | ton | 442,00 | 460,00 | | 479,00 | | 501,00 | | 525,00 | | 565,00 | | 600,00 | | 600,00 | |
| | | Persentase ketakutan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku | % | 35 | 50 | 3.039.590 | 60 | 3.191.570 | 70 | 3.351.148 | 85 | 3.518.705 | 100 | 3.694.641 | 100 | 3.879.373 | 100,00 | |
| | | Persentase peningkatan produksi perikanan di kawasan Minapolitan | % | 50 | 55 | | 60 | | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 80,00 | |
| | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | 9.345.389 | | 9.812.658 | | 10.303.291 | | 10.818.456 | | 11.359.379 | | 11.927.348 | | |
| | Program Penunjang | | | | | 4.128.491 | | 4.334.916 | | 4.551.661 | | 4.779.244 | | 5.018.207 | | 5.269.117 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 4.128.491 | 100 | 4.334.916 | 100 | 4.551.661 | 100 | 4.779.244 | 100 | 5.018.207 | 100 | 5.269.117 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | |
| | Urusan Perindustrian | | | | | 893.373 | | 938.042 | | 984.944 | | 1.034.191 | | 1.085.900 | | 1.140.195 | | |
| | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Persentase sentra industri yang mudah diakses masyarakat | % | 3 | 3 | 312.681 | 3 | 328.315 | 3 | 344.730 | 3 | 361.967 | 3 | 380.065 | 3 | 399.068 | 3 | |
| | Program Pengendalian Izin Usaha Industri | Cakupan Bina Usaha IKM | % | ... | 27 | 312.681 | 33 | 328.315 | 40 | 344.730 | 46 | 361.967 | 55 | 380.065 | 60 | 399.068 | 60 | |

| Kode | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | | | | | | | |
|------|--|---|---------|---|--|-----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|--|------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-------|-------|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | | | | | |
| 24 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan | Persentase IKM binaan yang meningkat volume produksinya | % | ... | 8 | 268.012 | 16 | 281.412 | 24 | 295.483 | 32 | 310.257 | 40 | 325.770 | 45 | 342.059 | 45 | | | | | |
| | Urusan Perdagangan | | | | | 2.736.973 | | 2.873.822 | | 3.017.513 | | 3.168.388 | | 3.326.808 | | 3.493.148 | | | | | | |
| | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Tingkat keamanan : barang beredar, air bersih, BBM dan produk-produk UKM | % | 100 | 100 | 875.831 | 100 | 919.623 | 100 | 965.604 | 100 | 1.013.884 | 100 | 1.064.578 | 100 | 1.117.807 | 100 | | | | | |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Tingkat Inflasi Daerah | % | 5,25 | 5,25 | 903.201 | 5,25 | 948.361 | 5,25 | 995.779 | 5,25 | 1.045.568 | 5,25 | 1.097.847 | 5,25 | 1.152.739 | 5,25 | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Tingkat pemanfaatan gudang (resi gudang) | % | N/A | 25 | | 957.941 | 25 | | 1.005.838 | 40 | | 1.056.129 | 60 | | 1.108.936 | 80 | | | | | |
| | | Persentase pasar (Los) yang dimanfaatkan | % | 3 | 3 | | | 30 | | | 40 | | | 60 | | 70 | | 80 | | | | |
| | Urusan Koperasi dan UKM | | | | | 1.586.552 | | 1.665.880 | | 1.749.174 | | 1.836.632 | | 1.928.464 | | 2.024.887 | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | Cakupan Bina Usaha UMKM | % | 13,20 | 17,40 | | | 25,20 | | | 28,92 | | | 32,40 | | 44,60 | | 50,00 | | | | |
| | | Persentase UMKM binaan yang meningkat volume usahanya | % | 35 | 37,00 | | 555.293 | 40,00 | | 583.058 | | | 612.211 | | 642.821 | | 674.962 | | | | | |
| | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Prosntase koperasi aktif | % | 38,18 | 50,00 | 237.983 | 52,50 | | 249.882 | 54,00 | | 262.376 | 56,50 | | 275.495 | 59,50 | 289.270 | 65,00 | | | | |
| | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Prosntase koperasi aktif | % | 38,18 | 50,00 | 158.655 | 52,50 | | 166.588 | 54,00 | | 174.917 | 56,50 | | 183.663 | 59,50 | 192.846 | 65,00 | | | | |
| | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase Koperasi aktif yang volume usahanya meningkat | % | 5 | 8 | 237.983 | 10 | | 249.882 | 20 | | 262.376 | 30 | | 275.495 | 40 | 289.270 | 50 | | | | |
| | Program Pengembangan UMKM | Cakupan UMK penerima dana bergulir dari Pemerintah Daerah | % | - | 0,07 | | 396.638 | 2,00 | | 416.470 | 4,00 | | 437.293 | 6,00 | | 459.158 | 8,00 | 482.116 | 10,00 | | | |
| | | Persentase Usaha Mikro dampingan (penerima bantuan) yang volume usahanya meningkat | % | 4,00 | 50,00 | | | 55,00 | | | 60,00 | | | 65,00 | | 70,00 | | 75,00 | | | | |
| | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) (A) | | | | | 7.712.045 | | 8.097.647 | | 10.502.530 | | 9.527.656 | | 10.004.039 | | 10.504.241 | | | | | | |
| | Program Penunjang | | | | | 6.062.509 | | 6.365.634 | | 6.683.916 | | 7.018.112 | | 7.369.018 | | 7.737.468 | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 6.062.509 | 100 | | 6.365.634 | 100 | | 6.683.916 | 100 | | 7.018.112 | 100 | | 7.737.468 | 100 | | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | 6 dok (42,31) | | | 5 dok (61,54) | | | 5 dok (80,77) | | | 7.369.018 | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | | |
| | Urusan Penanaman Modal dan PTSP | | | | | 1.649.536 | | 1.732.013 | | 3.818.613 | | 2.509.544 | | 2.635.021 | | 2.766.772 | | | | | | |
| | Program Pelayanan Penanaman Modal | Persentase perizinan yg dikeluarkan dan sesuai peruntukannya | % | 90 | 90 | 494.861 | 90 | | 519.604 | 90 | | 1.145.584 | 90 | | 752.863 | 90 | 790.506 | 90 | 830.032 | 90 | | |
| | | Persentase Peningkatan Retribusi Daerah | % | 24,68 | 20,00 | | | 20,00 | | | 20,00 | | | 20,00 | | | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 | |
| | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | presentasi pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti | % | N/A | 80 | 494.861 | 80 | | 519.604 | 80 | | 1.145.584 | 80 | | 752.863 | 80 | 790.506 | 80 | 830.032 | 80 | | |
| | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase investor yg berinvestasi | % | N/A | - | 412.384 | - | | 433.003 | > 50 | | 954.653 | > 50 | | 627.386 | > 50 | 658.755 | > 50 | 691.693 | > 50 | | |
| | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Tersedianya informasi PMPTSP (Persentase peningkatan akses terhadap informasi PMPTSP) | web (%) | N/A | - | 247.430 | - | | 259.802 | Ada Web | | 572.792 | 20 | | 376.432 | 20 | 395.253 | 20 | 415.016 | 20 | | |
| | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | | | | | 4.302.706 | | 13.717.841 | | 14.403.733 | | 15.123.920 | | 15.880.116 | | 16.674.122 | | | | | | |
| | Program Penunjang | | | | | 1.962.326 | | 2.060.442 | | 2.163.464 | | 2.271.638 | | 2.385.220 | | 2.504.480 | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 1.962.326 | 100 | | 2.060.442 | 100 | | 2.163.464 | 100 | | 2.271.638 | 100 | | 2.504.480 | 100 | | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | 6 dok (42,31) | | | 5 dok (61,54) | | | 5 dok (80,77) | | | 2.385.220 | 5 dok (109,23) | | 31 dok (109,23%) | | |
| | Urusan Pariwisata | | | | | 1.590.380 | | 10.669.899 | | 11.203.394 | | 11.763.564 | | 12.351.742 | | 12.969.329 | | | | | | |
| | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Jumlah kawasan pariwisata yang dikembangkan | Kawasan | 4 | 3 | 715.671 | 3 | | 4.801.455 | 3 | | 5.041.527 | 3 | | 5.293.604 | 3 | 5.558.284 | 3 | 5.836.198 | 3 kawasan | | |
| | | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | % | N/A | 2,38 | | | 4,49 | | | 6,25 | | | 7,72 | | | 9,22 | | 10,00 | | 10,00 | |
| | Program Pemasaran Pariwisata | Angka kunjungan wisatawan Manca Negara | orang | 150 | 150 | | 477.114 | 160 | | 3.200.970 | 170 | | 3.361.018 | 180 | | 3.529.069 | 200 | 3.705.523 | 200 | 3.890.799 | 860 | |
| | | Angka kunjungan wisatawan Domestik | orang | 2243 | 2300 | | | 2400 | | | 2550 | | | 2750 | | | 3000 | | 3000 | | 3000 | 13000 |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase peningkatan kualitas Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif | % | | | 397.595 | | | 2.667.475 | | | 2.800.848 | | | 2.940.891 | | 3.087.935 | | 3.242.332 | | | |
| | Urusan Kebudayaan | | | | | 750.000 | | 987.500 | | 1.036.875 | | 1.088.719 | | 1.143.155 | | 1.200.312 | | | | | | |

| | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|----|--|--|--------------|---|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|--|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | cagar budaya | 6 | 6 | 300.000 | 6 | 395.000 | 6 | 414.750 | 6 | 435.488 | 6 | 457.262 | 6 | 480.125 | 6 | |
| | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Kesenian Daerah yang Dilestarikan | % | 17 | 17 | 450.000 | 44 | 592.500 | 72 | 622.125 | 89 | 653.231 | 100 | 685.893 | 100 | 720.187 | 100 | |
| 27 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | - | 100 | 1.745.442 | 100 | 1.832.714 | 100 | 1.924.350 | 100 | 2.020.568 | 100 | 2.121.596 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | - | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | | | | |
| | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rata-rata Tingkat Partisipasi Organisasi Kepemudaan | % | N/A | 80 | - | 70 | 565.337 | 80 | 593.603 | 90 | 623.284 | 100 | 654.448 | 100 | 687.170 | 100 | |
| | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Jumlah event Olah Raga Tingkat Kabupaten | Event | 2 | 2 | - | 2 | 1.356.808 | 4 | 1.424.648 | 2 | 1.495.881 | 2 | 1.570.675 | 2 | 1.649.208 | 12 | |
| | | Jumlah atlet berprestasi pada event Olah Raga Tingkat Provinsi / Nasional | orang | N/A | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Persentasi peningkatan kapasitas kepramukaan | % | N/A | 50 | - | 60 | 339.202 | 70 | 356.162 | 80 | 373.970 | 80 | 392.669 | 80 | 412.302 | | |
| 28 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 3.287.307 | 100 | 3.451.672 | 100 | 3.624.256 | 100 | 3.805.469 | 100 | 3.995.742 | 100 | 4.195.529 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | | | | | |
| | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja terdaftar dan mendapatkan pelatihan serta ditempatkan | % | 60,00 | 60,00 | 201.205 | 60,00 | 211.265 | 70,00 | 221.828 | 70,00 | 232.919 | 70,00 | 244.565 | 80,00 | 256.794 | 80,00 | |
| | | Persentase peningkatan TKM | % | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | 80,00 | | | |
| | | Persentase TKM yang memanfaatkan TTG dan volume usahanya meningkat | % | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | 80,00 | | | |
| | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 60,00 | 60,00 | 229.948 | 60,00 | 241.445 | 70,00 | 253.518 | 70,00 | 266.194 | 70,00 | 279.503 | 80,00 | 293.478 | 80,00 | |
| | Program Hubungan Industrial | Persentase kasus ketengkerjaan yang diselesaikan | % | 60,00 | 50,00 | 143.718 | 50,00 | 150.903 | 60,00 | 158.449 | 60,00 | 166.371 | 60,00 | 174.690 | 60,00 | 183.424 | 60,00 | |
| | | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK/ BPJS Ketenagakerjaan | % | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 60,00 | | 70,00 | | 86,00 | 90,00 | 90,00 | | | |
| 29 | Urusan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Tersedianya informasi kawasan transmigrasi | % | 100 | 100 | 306.250 | 100 | 321.563 | 100 | 337.641 | 100 | 354.523 | 100 | 372.249 | 100 | 390.861 | 100 | |
| | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase peserta transmigrasi yang berhasil ditempatkan pada kawasan baru | % | | | 490.000 | 10 | 514.500 | 15 | 540.225 | 20 | 567.236 | 35 | 595.598 | 50 | 625.378 | 50 | |
| | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Persentase kawasan transmigrasi lama yang ditingkatkan kualitas sarana dan prasaranaanya | % | 60 | 60 | 428.750 | 65 | 450.188 | 70 | 472.697 | 75 | 496.332 | 80 | 521.148 | 85 | 547.206 | 85 | |
| | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | 3.332.021 | 100 | 3.498.622 | 100 | 3.673.553 | 100 | 3.857.231 | 100 | 4.050.092 | 100 | 4.252.597 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | 5 dok (100,00) | 5 dok (109,23) | | | | | |
| | Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILU | % | 67,88 | 68 | 958.679 | 70 | 1.006.612 | 73 | 1.056.943 | 78 | 1.109.790 | 82 | 1.165.280 | 85 | 1.223.544 | 85 | |

| | Bidang Urusan / SKPD / Program Prioritas | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja akhir RPJMD (Thn 2026) | |
|--|--|--|-------------------|---|--|------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|--|--|
| | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | Target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | target | Rp ribu | | |
| | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan edisiologi negara terhadap aparatur dan masyarakat per 1.000 penduduk | per 1000 penduduk | 7 | 7 | 575.207 | 8 | 603.967 | 10 | 634.166 | 12 | 665.874 | 15 | 699.168 | 20 | 734.126 | 20 | |
| | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Percentase pembinaan terhadap Ormas dan Forum-forum daerah | % | 41,18 | 49,02 | 1.533.886 | 58,82 | 1.610.580 | 78,43 | 1.691.109 | 88,24 | 1.775.664 | 95,00 | 1.864.448 | 100,00 | 1.957.670 | 100,00 | |
| | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Prosentase penyelesaian konflik di masyarakat | % | 50 | 55,00 | 766.943 | 60,00 | 805.290 | 65,00 | 845.554 | 70,00 | 887.832 | 75,00 | 932.224 | 80,00 | 978.835 | 80,00 | |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Program Penunjang | | | | | 12.970.513 | | 8.619.039 | | 9.049.991 | | 9.502.490 | | 9.977.615 | | 10.476.495 | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 3.321.921 | 3.488.017 | | 3.662.418 | | 3.845.539 | | 4.037.816 | | 4.239.707 | | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| | Urusan Pemerintahan Umum | | | | | 9.648.592 | | 5.131.022 | | 5.387.573 | | 5.656.951 | | 5.939.799 | | 6.236.789 | | |
| | Program Penanggulangan Bencana | Percentase Pembinaan Penduduk di daerah Rawan Bencana | % | 13 | 20 | 9.648.592 | 25 | 5.131.022 | 30 | 5.387.573 | 35 | 5.656.951 | 40 | 5.939.799 | 50 | 6.236.789 | 50 | |
| 31 | | Percentase Kecukupan Logistik | % | 50 | 60 | | | | 70 | | 80 | | 90 | | 100 | | 100 | |
| | KECAMATAN | | | | | 3.500.000 | | 15.000.000 | | 15.750.000 | | 16.537.500 | | 17.364.375 | | 18.232.594 | | |
| | Program Penunjang | | | | | | 2.179.672 | | 1.388.656 | | 1.458.088 | | 1.530.993 | | 1.607.542 | | 1.687.920 | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi | % | 100 | 100 | | 2.179.672 | 100 | | 1.388.656 | 100 | | 1.458.088 | 100 | | 1.607.542 | 100 | |
| | | Tersedianya informasi perencanaan, kinerja, dan keuangan OPD | % | 100 | 5 dok (19,23) | | | | 6 dok (42,31) | | 5 dok (61,54) | | 5 dok (80,77) | | 5 dok (100,00) | | 5 dok (109,23) | |
| 31 | Urusan Kewilayahani | | | | | 1.249.598 | | 11.312.078 | | 11.877.682 | | 12.471.566 | | 13.095.144 | | 13.749.901 | | |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan E-KTP | % | 60 | 70 | 187.440 | 80 | 1.696.812 | 90 | 1.781.652 | 95 | 1.870.735 | 95 | 1.964.272 | 100 | 2.062.485 | 100 | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Percentase KK Miskin Kecamatan xx | % | 40 | 40 | 249.920 | 35 | 2.262.416 | 30 | 2.375.536 | 20 | 2.494.313 | 10 | 2.619.029 | 5 | 2.749.980 | 5 | |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Percentase penyelesaian Administrasi Umum Pemerintahan | % | 50 | 60 | 374.879 | 70 | 3.393.623 | 80 | 3.563.305 | 90 | 3.741.470 | 100 | 3.928.543 | 100 | 4.124.970 | 100 | |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Percentase desa yang meningkat statusnya (IDM) | % | 6 | 10 | 187.440 | 10 | 1.696.812 | 20 | 1.781.652 | 40 | 1.870.735 | 60 | 1.964.272 | 80 | 2.062.485 | 80 | |
| | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Percentase penyelesaian konflik | % | 100 | 100 | 249.920 | 100 | 2.262.416 | 100 | 2.375.536 | 100 | 2.494.313 | 100 | 2.619.029 | 100 | 2.749.980 | 100 | |

Tabel 7.1.
Rekapitulasi Jumlah Program dan Pendanaan
RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

| SKPD / Bidang Urusan | Jumlah Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH | Persen | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|--|
| | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | | | | | |
| | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | |
| TOTAL BELANJA | | 1.499.828.814 | | | 1.640.745.472 | | | 1.745.001.193 | | | 1.832.761.544 | | | 1.927.125.112 | | | 2.026.111.024 | 10.671.573.159 | |
| 1 DINAS PENDIDIKAN | 5 | 279.826.875 | 18,66 | 5 | 293.818.219 | 17,91 | 5 | 308.509.130 | 17,68 | 5 | 323.934.586 | 17,67 | 5 | 340.131.315 | 17,65 | 5 | 357.137.881 | 17,63 | |
| Program Penunjang | 1 | 161.255.554 | | 1 | 169.318.332 | | 1 | 177.784.248 | | 1 | 186.673.461 | | 1 | 196.007.134 | | 1 | 205.807.490 | 1.096.846.219 | |
| Urusan Pendidikan | 4 | 118.571.321 | | 4 | 124.499.887 | | 4 | 130.724.881 | | 4 | 137.261.125 | | 4 | 144.124.182 | | 4 | 151.330.391 | 806.511.788 | |
| 2 DINAS KESEHATAN | 5 | 58.611.490 | 3,91 | 5 | 61.542.065 | 3,75 | 5 | 64.619.168 | 3,70 | 5 | 67.850.126 | 3,70 | 5 | 71.242.632 | 3,70 | 5 | 74.804.764 | 3,69 | |
| Program Penunjang | 1 | 13.817.878 | | 1 | 14.508.772 | | 1 | 15.234.210 | | 1 | 15.995.921 | | 1 | 16.795.717 | | 1 | 17.635.503 | 93.988.001 | |
| Urusan Kesehatan | 4 | 44.793.612 | | 4 | 47.033.293 | | 4 | 49.384.957 | | 4 | 51.854.205 | | 4 | 54.446.915 | | 4 | 57.169.261 | 304.682.243 | |
| 3 RSUD LABUHA (BLUD) | 4 | 20.233.047 | 1,35 | 4 | 29.559.943 | 1,80 | 4 | 32.515.937 | 1,86 | 4 | 35.767.531 | 1,95 | 4 | 39.344.284 | 2,04 | 4 | 43.278.713 | 2,14 | |
| Program Penunjang | 1 | 6.165.345 | | 1 | 7.573.612 | | 1 | 8.330.973 | | 1 | 9.164.071 | | 1 | 10.080.478 | | 1 | 11.088.525 | 52.403.004 | |
| Urusan Kesehatan | 3 | 14.067.702 | | 3 | 21.986.331 | | 3 | 24.184.964 | | 3 | 26.603.461 | | 3 | 29.263.807 | | 3 | 32.190.187 | 148.296.451 | |
| 4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 7 | 224.061.687 | 14,94 | 7 | 194.165.217 | 11,83 | 7 | 203.873.478 | 11,68 | 7 | 214.067.152 | 11,68 | 7 | 224.770.510 | 11,66 | 7 | 236.009.035 | 11,65 | |
| Program Penunjang | 1 | 31.566.600 | | 1 | 3.894.930 | | 1 | 4.089.677 | | 1 | 4.294.160 | | 1 | 4.508.868 | | 1 | 4.734.312 | 53.088.547 | |
| Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 5 | 177.282.088 | | 5 | 174.296.638 | | 5 | 183.011.470 | | 5 | 192.162.044 | | 5 | 201.770.146 | | 5 | 211.858.653 | 1.140.381.040 | |
| Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 1 | 15.212.999 | | 1 | 15.973.649 | | 1 | 16.772.331 | | 1 | 17.610.948 | | 1 | 18.491.495 | | 1 | 19.416.070 | 103.477.493 | |
| 5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 12 | 193.799.723 | 12,92 | 12 | 240.890.155 | 14,68 | 12 | 262.934.663 | 15,07 | 12 | 276.081.396 | 15,06 | 12 | 289.885.466 | 15,04 | 12 | 304.379.739 | 15,02 | |
| Program Penunjang | 1 | 1.304.636 | | 1 | 50.619.868 | | 1 | 63.150.861 | | 1 | 66.308.404 | | 1 | 69.623.824 | | 1 | 73.105.016 | 324.112.609 | |
| Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 6 | 177.282.088 | | 6 | 174.296.638 | | 6 | 183.011.470 | | 6 | 192.162.044 | | 6 | 201.770.146 | | 6 | 211.858.653 | 1.140.381.040 | |
| Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 5 | 15.212.999 | | 5 | 15.973.649 | | 5 | 16.772.331 | | 5 | 17.610.948 | | 5 | 18.491.495 | | 5 | 19.416.070 | 103.477.493 | |
| 6 DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 8 | 181.586.724 | 12,11 | 8 | 228.916.506 | 13,95 | 8 | 250.162.332 | 14,34 | 8 | 262.570.448 | 14,33 | 8 | 275.893.970 | 14,32 | 8 | 289.463.669 | 14,29 | |
| Program Penunjang | 1 | 1.304.636 | | 1 | 50.619.868 | | 1 | 63.150.861 | | 1 | 66.308.404 | | 1 | 69.623.824 | | 1 | 73.105.016 | 324.112.609 | |
| Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 6 | 3.000.000 | | 6 | 4.000.000 | | 6 | 4.000.000 | | 6 | 4.100.000 | | 6 | 4.500.000 | | 6 | 4.500.000 | 24.100.000 | |
| Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang | 1 | 177.282.088 | | 1 | 174.296.638 | | 1 | 183.011.470 | | 1 | 192.162.044 | | 1 | 201.770.146 | | 1 | 211.858.653 | 1.140.381.040 | |
| 7 DINAS PERHUBUNGAN | 3 | 40.282.918 | 2,69 | 3 | 42.297.064 | 2,58 | 3 | 44.411.917 | 2,55 | 3 | 46.632.513 | 2,54 | 3 | 48.964.139 | 2,54 | 3 | 51.412.346 | 2,54 | |
| Program Penunjang | 1 | 6.252.171 | | 1 | 6.564.780 | | 1 | 6.893.019 | | 1 | 7.237.669 | | 1 | 7.599.553 | | 1 | 7.797.531 | 42.526.722 | |
| Urusan Perhubungan | 2 | 34.030.747 | | 2 | 35.732.284 | | 2 | 37.518.899 | | 2 | 39.394.843 | | 2 | 41.364.586 | | 2 | 43.432.815 | 231.474.174 | |
| 8 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 5 | 7.950.017 | 0,53 | 5 | 8.347.518 | 0,51 | 5 | 8.764.894 | 0,50 | 5 | 9.203.138 | 0,50 | 5 | 9.663.295 | 0,50 | 5 | 10.146.460 | 0,50 | |
| Program Penunjang | 1 | 3.974.353 | | 1 | 4.173.071 | | 1 | 4.381.724 | | 1 | 4.600.810 | | 1 | 4.830.851 | | 1 | 5.072.393 | 27.033.203 | |
| Urusan Komunikasi dan Informatika | 2 | 3.116.819 | | 2 | 3.272.660 | | 2 | 3.436.293 | | 2 | 3.608.108 | | 2 | 3.788.513 | | 2 | 3.977.939 | 21.200.331 | |
| Urusan Persandian | 1 | 150.000 | | 1 | 157.500 | | 1 | 165.375 | | 1 | 173.644 | | 1 | 182.326 | | 1 | 191.442 | 1.020.287 | |
| Urusan Statistik Daerah | 1 | 708.845 | | 1 | 744.287 | | 1 | 781.502 | | 1 | 820.577 | | 1 | 861.606 | | 1 | 904.686 | 4.821.502 | |
| 9 DINAS SOSIAL | 4 | 5.581.738 | 0,37 | 4 | 5.860.825 | 0,36 | 4 | 6.153.866 | 0,35 | 4 | 6.461.559 | 0,35 | 4 | 6.784.637 | 0,35 | 4 | 7.123.869 | 0,35 | |
| Program Penunjang | 1 | 3.354.162 | | 1 | 3.521.870 | | 1 | 3.697.964 | | 1 | 3.882.862 | | 1 | 4.077.005 | | 1 | 4.280.855 | 22.814.717 | |
| Urusan Sosial | 3 | 2.227.576 | | 3 | 2.338.955 | | 3 | 2.455.903 | | 3 | 2.578.698 | | 3 | 2.707.633 | | 3 | 2.843.014 | 15.151.778 | |
| 10 DINAS PENGEDILIAN PENDUDUK, KB DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN | 10 | 13.365.312 | 0,89 | 10 | 14.033.578 | 0,86 | 10 | 14.735.256 | 0,84 | 10 | 15.472.019 | 0,84 | 10 | 16.245.620 | 0,84 | 10 | 17.057.901 | 0,84 | |
| Program Penunjang | 1 | 3.566.812 | | 1 | 3.745.153 | | 1 | 3.932.410 | | 1 | 4.129.031 | | 1 | 4.335.482 | | 1 | 4.552.256 | 24.261.144 | |
| Urusan Pengendalian Penduduk dan KB | 3 | 8.930.898 | | 3 | 9.377.443 | | 3 | 9.846.315 | | 3 | 10.338.631 | | 3 | 10.855.562 | | 3 | 11.398.340 | 60.747.190 | |
| Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 6 | 867.602 | | 6 | 910.982 | | 6 | 956.531 | | 6 | 1.004.358 | | 6 | 1.054.576 | | 6 | 1.107.304 | 5.901.353 | |
| 11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 7.366.151 | 0,49 | 5 | 7.734.459 | 0,47 | 5 | 8.121.181 | 0,47 | 5 | 8.527.241 | 0,47 | 5 | 8.953.603 | 0,46 | 5 | 9.401.283 | 0,46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.103.917 | 0,47 | |

| SKPD / Bidang Urusan | Jumlah Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH | Persen | |
|--|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | | | | |
| | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen |
| Program Penunjang | 1 | 5.341.432 | | 1 | 5.608.504 | | 1 | 5.888.929 | | 1 | 6.183.375 | | 1 | 6.492.544 | | 1 | 6.817.171 | 36.331.955 |
| Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil | 4 | 2.024.719 | | 4 | 2.125.955 | | 4 | 2.232.253 | | 4 | 2.343.865 | | 4 | 2.461.059 | | 4 | 2.584.112 | 13.771.962 |
| 12 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 6 | 4.264.743 | 0,28 | 6 | 4.477.980 | 0,27 | 6 | 4.701.879 | 0,27 | 6 | 4.936.973 | 0,27 | 6 | 5.183.822 | 0,27 | 6 | 5.443.013 | 0,27 |
| Program Penunjang | 1 | 2.588.473 | | 1 | 2.717.897 | | 1 | 2.853.791 | | 1 | 2.996.481 | | 1 | 3.146.305 | | 1 | 3.303.620 | 17.606.568 |
| Urusan Perpustakaan | 2 | 926.270 | | 2 | 972.584 | | 2 | 1.021.213 | | 2 | 1.072.273 | | 2 | 1.125.887 | | 2 | 1.182.181 | 6.300.408 |
| Urusan Karsipan | 3 | 750.000 | | 3 | 787.500 | | 3 | 826.875 | | 3 | 868.219 | | 3 | 911.630 | | 3 | 957.211 | 5.101.435 |
| 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 4 | 4.717.489 | 0,31 | 4 | 7.953.363 | 0,48 | 4 | 5.851.032 | 0,34 | 4 | 6.143.583 | 0,34 | 4 | 6.450.762 | 0,33 | 4 | 6.773.300 | 0,33 |
| Program Penunjang | 1 | 3.208.022 | | 1 | 3.368.423 | | 1 | 3.536.844 | | 1 | 3.713.686 | | 1 | 3.899.371 | | 1 | 4.094.339 | 21.820.686 |
| Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3 | 1.509.467 | | 3 | 4.584.940 | | 3 | 2.314.187 | | 3 | 2.429.897 | | 3 | 2.551.392 | | 3 | 2.678.961 | 16.068.844 |
| 14 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 10.461.006 | 0,70 | 2 | 8.171.910 | 0,50 | 2 | 8.580.505 | 0,49 | 2 | 9.009.531 | 0,49 | 2 | 9.460.007 | 0,49 | 2 | 9.933.008 | 0,49 |
| Program Penunjang | 1 | 3.471.241 | | 1 | 2.235.621 | | 1 | 2.347.402 | | 1 | 2.464.772 | | 1 | 2.588.011 | | 1 | 2.717.411 | 15.824.458 |
| Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) | 1 | 6.989.765 | | 1 | 5.936.289 | | 1 | 6.233.103 | | 1 | 6.544.759 | | 1 | 6.871.996 | | 1 | 7.215.596 | 39.791.509 |
| 15 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 2 | - | 0,00 | 0 | 3.163.585 | 0,19 | 2 | 3.321.764 | 0,19 | 2 | 3.487.852 | 0,19 | 2 | 3.662.245 | 0,19 | 2 | 3.845.357 | 0,19 |
| Program Penunjang | 1 | - | | | 1.235.621 | | 1 | 1.297.402 | | 1 | 1.362.272 | | 1 | 1.430.386 | | 1 | 1.501.905 | 6.827.586 |
| Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Pemadam Kebakaran) | 1 | - | | | 1.927.964 | | 1 | 2.024.362 | | 1 | 2.125.580 | | 1 | 2.231.859 | | 1 | 2.343.452 | 10.653.218 |
| 16 SEKRETARIAT DAERAH | 3 | 36.706.318 | 2,45 | 3 | 38.541.634 | 2,35 | 3 | 40.468.716 | 2,32 | 3 | 42.492.151 | 2,32 | 3 | 44.616.759 | 2,32 | 3 | 46.847.597 | 2,31 |
| Urusan Penunjang | 1 | 22.970.100 | | 1 | 24.118.605 | | 1 | 25.324.535 | | 1 | 26.590.762 | | 1 | 27.920.300 | | 1 | 29.316.315 | 156.240.617 |
| Urusan Pemerintahan (Umum) | 2 | 13.736.218 | | 2 | 14.423.029 | | 2 | 15.144.180 | | 2 | 15.901.389 | | 2 | 16.696.459 | | 2 | 17.531.282 | 93.432.557 |
| 17 SEKRETARIAT DPRD | 2 | 36.287.682 | 2,42 | 2 | 38.102.066 | 2,32 | 2 | 40.007.169 | 2,29 | 2 | 42.007.528 | 2,29 | 2 | 44.107.904 | 2,29 | 2 | 46.313.299 | 2,29 |
| Program Penunjang | 1 | 11.042.757 | | 1 | 11.594.895 | | 1 | 12.174.640 | | 1 | 12.783.372 | | 1 | 13.422.540 | | 1 | 14.093.667 | 75.111.870 |
| Program Pemerintahan (Umum) | 1 | 25.244.925 | | 1 | 26.507.171 | | 1 | 27.832.530 | | 1 | 29.224.156 | | 1 | 30.685.364 | | 1 | 32.219.632 | 171.713.779 |
| 18 INSPEKTORAT DAERAH | 3 | 11.158.589 | 0,74 | 3 | 12.716.518 | 0,78 | 3 | 13.352.344 | 0,77 | 3 | 14.019.962 | 0,76 | 3 | 14.930.129 | 0,77 | 3 | 15.977.840 | 0,79 |
| Program Penunjang | 1 | 6.088.012 | | 1 | 6.392.413 | | 1 | 6.712.033 | | 1 | 7.047.635 | | 1 | 7.400.017 | | 1 | 7.770.017 | 41.410.127 |
| Urusan Pemerintahan (Pengawasan) | 2 | 5.070.577 | | 2 | 6.324.106 | | 2 | 6.640.311 | | 2 | 6.972.327 | | 2 | 7.530.113 | | 2 | 8.207.823 | 40.745.257 |
| 19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANDGA | 6 | 12.561.948 | 0,84 | 6 | 13.190.045 | 0,80 | 6 | 14.849.548 | 0,85 | 6 | 15.592.025 | 0,85 | 6 | 16.371.626 | 0,85 | 6 | 17.190.208 | 0,85 |
| Program Penunjang | 1 | 6.321.764 | | 1 | 6.637.852 | | 1 | 6.969.745 | | 1 | 7.318.232 | | 1 | 7.684.144 | | 1 | 8.068.351 | 43.000.088 |
| Urusan Pemerintahan (Perencanaan) | 4 | 5.474.924 | | 4 | 5.748.670 | | 4 | 6.036.104 | | 4 | 6.337.909 | | 4 | 6.654.804 | | 4 | 6.987.545 | 37.239.956 |
| Urusan Pemerintahan (Litbang) | 1 | 765.260 | | 1 | 803.523 | | 1 | 1.843.699 | | 1 | 1.935.884 | | 1 | 2.032.678 | | 1 | 2.134.312 | 9.515.357 |
| 20 BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BKPAD) | 6 | 248.548.153 | 16,57 | 6 | 261.375.969 | 15,93 | 6 | 274.885.217 | 15,75 | 6 | 289.113.973 | 15,77 | 6 | 304.102.616 | 15,78 | 6 | 319.893.985 | 15,79 |
| Program Penunjang | 1 | 34.874.935 | | 1 | 36.618.682 | | 1 | 38.449.616 | | 1 | 40.372.097 | | 1 | 42.390.701 | | 1 | 44.510.237 | 237.216.267 |
| Urusan Pemerintahan (Keuangan Daerah) | 3 | 205.665.043 | | 3 | 215.948.295 | | 3 | 226.745.710 | | 3 | 238.082.995 | | 3 | 249.987.145 | | 3 | 262.486.502 | 1.398.915.691 |
| Urusan Pertanahan | 2 | 8.008.175 | | 2 | 8.808.993 | | 2 | 9.689.892 | | 2 | 10.658.881 | | 2 | 11.724.769 | | 2 | 12.897.246 | 61.787.955 |
| 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH (BKPPD) | 3 | 8.914.199 | 0,59 | 3 | 10.359.909 | 0,63 | 3 | 10.877.904 | 0,62 | 3 | 11.421.800 | 0,62 | 3 | 11.992.890 | 0,62 | 3 | 12.592.534 | 0,62 |
| Program Penunjang | 1 | 4.744.621 | | 1 | 4.981.852 | | 1 | 5.230.945 | | 1 | 5.492.492 | | 1 | 5.767.116 | | 1 | 6.055.472 | 32.272.498 |
| Urusan Pemerintahan (Kepegawaian dan Diklat) | 2 | 4.169.578 | | 2 | 5.378.057 | | 2 | 5.646.960 | | 2 | 5.929.308 | | 2 | 6.225.773 | | 2 | 6.537.062 | 33.886.737 |
| 22 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | 11 | 27.574.154 | 1,84 | 11 | 28.952.862 | 1,76 | 11 | 30.400.505 | 1,74 | 11 | 31.920.530 | 1,74 | 11 | 33.516.557 | 1,74 | 11 | 35.192.384 | 1,74 |
| Program Penunjang | 1 | 9.589.218 | | 1 | 10.068.679 | | 1 | 10.572.113 | | 1 | 11.100.718 | | 1 | 11.655.754 | | 1 | 12.238.542 | 65.225.025 |
| Urusan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan) | 2 | 4.065.000 | | 2 | 4.268.250 | | 2 | 4.481.663 | | 2 | 4.705.746 | | 2 | 4.941.033 | | 2 | 5.188.085 | 27.649.776 |
| Urusan Pertanian (Sub Sektor Tanaman Perkebunan) | 3 | 11.936.500 | | 3 | 12.533.325 | | 3 | 13.159.991 | | 3 | 13.817.991 | | 3 | 14.508.890 | | 3 | 15.234.335 | 81.191.032 |
| Urusan Pertanian (Sub Sektor Peternakan) | 1 | 1.000.000 | | 1 | 1.050.000 | | 1 | 1.102.500 | | 1 | 1.157.625 | | 1 | 1.215.506 | | 1 | 1.276.282 | 6.801.913 |
| Urusan Ketahanan Pangan | 4 | 983.436 | | 4 | 1.032.608 | | 4 | 1.084.238 | | 4 | 1.138.450 | | 4 | 1.195.373 | | 4 | 1.255.141 | 6.689.246 |

| SKPD / Bidang Urusan | Jumlah Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | JUMLAH | Persen | | |
|--|---------------------------------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|--------|--|--|
| | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | | | | |
| | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | Jml Program | Rp ribu | Persen | | | | |
| 23 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 4 | 15.955.016 | 1,06 | 4 | 16.752.767 | 1,02 | 4 | 17.590.405 | 1,01 | 4 | 18.469.925 | 1,01 | 4 | 19.393.422 | 1,01 | 4 | 20.363.093 | 1,01 | 108.524.628 | 1,02 | | |
| Program Penunjang | 1 | 3.796.656 | | 1 | 3.986.489 | | 1 | 4.185.813 | | 1 | 4.395.104 | | 1 | 4.614.859 | | 1 | 4.845.602 | | 25.824.523 | | | |
| Urusan Kelautan dan Perikanan | 3 | 12.158.360 | | 3 | 12.766.278 | | 3 | 13.404.592 | | 3 | 14.074.821 | | 3 | 14.778.563 | | 3 | 15.517.491 | | 82.700.105 | | | |
| 24 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 12 | 9.345.389 | 0,62 | 12 | 9.812.658 | 0,60 | 12 | 10.303.291 | 0,59 | 12 | 10.818.456 | 0,59 | 12 | 11.359.379 | 0,59 | 12 | 11.927.348 | 0,59 | 63.566.521 | 0,60 | | |
| Program Penunjang | 1 | 4.128.491 | | 1 | 4.334.916 | | 1 | 4.551.661 | | 1 | 4.779.244 | | 1 | 5.018.207 | | 1 | 5.269.117 | | 28.081.636 | | | |
| Urusan Perindustrian | 3 | 893.373 | | 3 | 938.042 | | 3 | 984.944 | | 3 | 1.034.191 | | 3 | 1.085.900 | | 3 | 1.140.195 | | 6.076.645 | | | |
| Urusan Perdagangan | 3 | 2.736.973 | | 3 | 2.873.822 | | 3 | 3.017.513 | | 3 | 3.168.388 | | 3 | 3.326.808 | | 3 | 3.493.148 | | 18.616.652 | | | |
| Urusan Koperasi dan UKM | 5 | 1.586.552 | | 5 | 1.665.880 | | 5 | 1.749.174 | | 5 | 1.836.632 | | 5 | 1.928.464 | | 5 | 2.024.887 | | 10.791.588 | | | |
| 25 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) | 5 | 7.712.045 | 0,51 | 5 | 8.097.647 | 0,49 | 5 | 10.502.530 | 0,60 | 5 | 9.527.656 | 0,52 | 5 | 10.004.039 | 0,52 | 5 | 10.504.241 | 0,52 | 56.348.158 | 0,53 | | |
| Program Penunjang | 1 | 6.062.509 | | 1 | 6.365.634 | | 1 | 6.683.916 | | 1 | 7.018.112 | | 1 | 7.369.018 | | 1 | 7.737.468 | | 41.236.658 | | | |
| Urusan Penanaman Modal dan PTSP | 4 | 1.649.536 | | 4 | 1.732.013 | | 4 | 3.818.613 | | 4 | 2.509.544 | | 4 | 2.635.021 | | 4 | 2.766.772 | | 15.111.500 | | | |
| 26 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 6 | 4.302.706 | 0,29 | 6 | 13.717.841 | 0,84 | 6 | 14.403.733 | 0,83 | 6 | 15.123.920 | 0,83 | 6 | 15.880.116 | 0,82 | 6 | 16.674.122 | 0,82 | 80.102.439 | 0,75 | | |
| Program Penunjang | 1 | 1.962.326 | | 1 | 2.060.442 | | 1 | 2.163.464 | | 1 | 2.271.638 | | 1 | 2.385.220 | | 1 | 2.504.480 | | 13.347.570 | | | |
| Urusan Pariwisata | 3 | 1.590.380 | | 3 | 10.669.899 | | 3 | 11.203.394 | | 3 | 11.763.564 | | 3 | 12.351.742 | | 3 | 12.969.329 | | 60.548.307 | | | |
| Urusan Kebudayaan | 2 | 750.000 | | 2 | 987.500 | | 2 | 1.036.875 | | 2 | 1.088.719 | | 2 | 1.143.155 | | 2 | 1.200.312 | | 6.206.561 | | | |
| 27 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | 4 | - | 0,00 | 4 | 4.006.789 | 0,24 | 4 | 4.207.128 | 0,24 | 4 | 4.417.485 | 0,24 | 4 | 4.638.359 | 0,24 | 4 | 4.870.277 | 0,24 | 22.140.037 | 0,21 | | |
| Program Penunjang | 1 | - | | 1 | 1.745.442 | | 1 | 1.832.714 | | 1 | 1.924.350 | | 1 | 2.020.568 | | 1 | 2.121.596 | | 9.644.671 | | | |
| Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | 3 | - | | 3 | 2.261.346 | | 3 | 2.374.414 | | 3 | 2.493.134 | | 3 | 2.617.791 | | 3 | 2.748.681 | | 12.495.366 | | | |
| 28 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 7 | 5.087.177 | 0,34 | 7 | 5.341.536 | 0,33 | 7 | 5.608.613 | 0,32 | 7 | 5.889.043 | 0,32 | 7 | 6.183.495 | 0,32 | 7 | 6.492.670 | 0,32 | 34.602.534 | 0,32 | | |
| Program Penunjang | 1 | 3.287.307 | | 1 | 3.451.672 | | 1 | 3.624.256 | | 1 | 3.805.469 | | 1 | 3.995.742 | | 1 | 4.195.529 | | 22.359.976 | | | |
| Urusan Tenaga Kerja | 3 | 574.870 | | 3 | 603.614 | | 3 | 633.794 | | 3 | 665.484 | | 3 | 698.758 | | 3 | 733.696 | | 3.910.216 | | | |
| Urusan Transmigrasi | 3 | 1.225.000 | | 3 | 1.286.250 | | 3 | 1.350.563 | | 3 | 1.418.091 | | 3 | 1.488.995 | | 3 | 1.563.445 | | 8.332.343 | | | |
| 29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4 | 7.166.735 | 0,48 | 4 | 7.525.072 | 0,46 | 4 | 7.901.325 | 0,45 | 4 | 8.296.392 | 0,45 | 4 | 8.711.211 | 0,45 | 4 | 9.146.772 | 0,45 | 48.747.507 | 0,46 | | |
| Program Penunjang | 1 | 3.332.021 | | 1 | 3.498.622 | | 1 | 3.673.553 | | 1 | 3.857.231 | | 1 | 4.050.092 | | 1 | 4.252.597 | | 22.664.116 | | | |
| Urusan Trantib dan Perlindungan Masyarakat (Kesangpol) | 3 | 3.834.714 | | 3 | 4.026.450 | | 3 | 4.227.772 | | 3 | 4.439.161 | | 3 | 4.661.119 | | 3 | 4.894.175 | | 26.083.390 | | | |
| 30 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 4 | 12.970.513 | 0,86 | 4 | 8.619.039 | 0,53 | 4 | 9.049.991 | 0,52 | 4 | 9.502.490 | 0,52 | 4 | 9.977.615 | 0,52 | 4 | 10.476.495 | 0,52 | 60.596.142 | 0,57 | | |
| Program Penunjang | 1 | 3.321.921 | | 1 | 3.488.017 | | 1 | 3.662.418 | | 1 | 3.845.539 | | 1 | 4.037.816 | | 1 | 4.239.707 | | 22.595.417 | | | |
| Urusan Pemerintahan Umum | 3 | 9.648.592 | | 3 | 5.131.022 | | 3 | 5.387.573 | | 3 | 5.656.951 | | 3 | 5.939.799 | | 3 | 6.236.789 | | 38.000.725 | | | |
| 31 KECAMATAN | 180 | 3.429.270 | 0,23 | 180 | 12.700.734 | 0,77 | 180 | 13.335.770 | 0,76 | 180 | 14.002.559 | 0,76 | 180 | 14.702.687 | 0,76 | 180 | 15.437.821 | 0,76 | 73.608.840 | 0,69 | | |
| Program Penunjang | 30 | 2.179.672 | | 30 | 1.388.656 | | 30 | 1.458.088 | | 30 | 1.530.993 | | 30 | 1.607.542 | | 30 | 1.687.920 | | 9.852.871 | | | |
| Urusan Kewilayahan | 150 | 1.249.598 | | 150 | 11.312.078 | | 150 | 11.877.682 | | 150 | 12.471.566 | | 150 | 13.095.144 | | 150 | 13.749.901 | | 63.755.969 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|--|-----|---------------|--|-----|---------------|--|-----|---------------|--|-----|---------------|--|-----|---------------|--|----------------|--|
| JUMLAH TOTAL PROGRAM DAN PENDANAAN | 342 | 1.499.828.814 | | 340 | 1.640.745.472 | | 342 | 1.745.001.193 | | 342 | 1.832.761.544 | | 342 | 1.927.125.112 | | 342 | 2.026.111.024 | | 10.671.573.159 | |
| Program Penunjang | 60 | 370.873.625 | | 59 | 460.439.187 | | 60 | 503.839.827 | | 60 | 529.448.367 | | 60 | 556.378.989 | | 60 | 584.701.962 | | 3.005.681.958 | |
| Urusan Pemerintahan | 282 | 1.128.955.189 | | 281 | 1.180.306.285 | | 282 | 1.241.161.366 | | 282 | 1.303.313.177 | | 282 | 1.370.746.122 | | 282 | 1.441.409.062 | | 7.665.891.201 | |

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Salah satu tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah adalah memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dijelaskan bahwa parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Makro. IPM dihitung berdasarkan tiga parameter yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Selain IPM terdapat beberapa indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja yang ditargetkan pada akhir masa perencanaan.

Sedang Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan dan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD ini merupakan indikator kinerja terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Rasio Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indek Pembangunan Manusia (IPM) dll.

Aspek Pelayanan Umum merupakan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan serta urusan yang telah diserahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Seluruh indikator aspek Pelayanan Umum akan menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: produktivitas total daerah, laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, kualitas infrastruktur daerah, iklim investasi, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, dan kualitas SDM.

Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 ini, disamping indikator kinerja tersebut di atas terdapat pula Indikator Kinerja Program (*outcome*) untuk mengukur pencapaian kinerja suatu program pembangunan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan menjadi tanggungjawab Pejabat Administrasi (Eselon III) pada setiap OPD atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai penanggungjawab suatu program. Penetapan indikator kinerja dan target capaianya dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian (SMART). Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 8.1; Tabel 8.2; dan Tabel 8.3.



8.1. Indikator Kinerja Makro

Tabel 8.1.
INDIKATOR KINERJA MAKRO
RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 - 2026

| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal | | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 |
|-----|----------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 64,11 | 63,84 | 64,00 | 64,50 | 65,00 | 65,50 | 66,00 | 67,00 | 67,00 |
| 2 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Milyar Rp | 7.246,45 | 8.698,97 | 10.003,82 | 11.504,39 | 13.230,05 | 15.214,55 | 17.496,74 | 20.121,25 | 20.121,25 |
| 3 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Milyar Rp | 4.879,31 | 5.670,74 | 6.521,35 | 7.434,34 | 8.549,49 | 9.746,42 | 11.208,38 | 12.777,56 | 12.777,56 |
| 4 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 12,46 | 16,22 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 13,50 |
| 5 | PDRB Per Kapita | Rp | 30.823.852 | 35.020.675 | 37.804.458 | 40.809.522 | 44.053.459 | 47.555.255 | 51.335.408 | 55.416.044 | 55.416.044 |
| 6 | Inflasi | % | 1,53 | 2,08 | 1,81 | 1,71 | 1,61 | 1,51 | 1,41 | 1,31 | 1,31 |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,58 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,60 |
| 8 | Indeks Gini | % | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Jumlah Penduduk Miskin | Jiwa | 11.790 | 12.410 | 12.656 | 12.896 | 13.141 | 13.391 | 13.645 | 13.905 | 13.905 |
| 10 | Prosentase Penduduk Miskin | % | 5,03 | 5,21 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 4,00 |
| 11 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,91 | 1,89 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 12 | Jumlah Penduduk | Jiwa | 235.092 | 248.395 | 253.115 | 257.924 | 262.825 | 267.818 | 272.907 | 278.092 | 278.092 |



8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 8.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 - 2026

| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|-----|--|--------|------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Meningkatnya kesadaran hukum, wawasan kebangsaan, politik dan berdemokrasi masyarakat Halmahera Selatan | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan | Indeks | N/A | 60 | 60,30 | 61,50 | 62,10 | 65 | 70 | 70 |
| 1.2 | Persentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani | % | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2 | Terkendalinya ketentraman dan ketertiban masyarakat | | | | | | | | | |
| 2.1 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks | 51 | 52,50 | 59,25 | 66 | 71 | 76 | 82,75 | 82,75 |
| 2.2 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana | | | | | | | | | |
| 3.1 | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) | Nilai | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,40 |
| 3.2 | Indeks Resiko Bencana (IRB) | Nilai | 213,82 | 211,20 | 210,80 | 209,20 | 205,60 | 203,20 | 202,40 | 202,40 |
| 4 | Meningkatnya prestasi olah raga dan partisipasi generasi muda | | | | | | | | | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|-----|---|--------|------------------------------|----------------------|-------|------|------|------|------|-----|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4.1 | Presentase Organisasi Pemuda yang aktif | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 4.2 | Jumlah atlet berprestasi | Atlet | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | |
| 5 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP | % | 78 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
| 5.2 | Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA | % | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
| 6 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Tingkat pengelolaan arsip secara baku | % | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 6.2 | Presentase Pengunjung perpustakaan | % | 26,92 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | |
| 7 | Meningkatnya integritas, akuntabilitas dan transparansi Aparatur Sipil Negara | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti | % | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| 7.2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti | % | 72,50 | 75 | 77,50 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| 8 | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Rata – rata indeks profesional ASN | % | NA | 64 | 68 | 71 | 74 | 77 | 82 | 82 | |
| 9 | Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | skor | N/A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|------|--|--------|------------------------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9.2 | Percentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan APBD | % | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 11,50 |
| 9.3 | Percentase Bidang Tanah Aset Pemda yang bersertifikat | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 10 | Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah serta tersedianya tanah untuk kepentingan umum | | | | | | | | | |
| 10.1 | Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya | Ha | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 11 | Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | | | | | | |
| 11.1 | Percentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | | | | | | | | | |
| 12.1 | Indeks Perencanaan pembangunan daerah (LPPD) | % | N/A | 58 | 66 | 74 | 80 | 84 | 88 | 88 |
| 13 | Meningkatnya kualitas Penelitian dan Inovasi Pembangunan Daerah | | | | | | | | | |
| 13.1 | Indeks Inovasi Daerah | % | 46 | 100 | 200 | 300 | 501 | 750 | 1.001 | 1.001 |
| 14 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD | | | | | | | | | |
| 14.1 | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Skor | CC | CC | B | BB | A | A | AA | AA |
| 14.2 | Nilai LPPD Pemerintah Daerah | Skor | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|------|---|--------|------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14.3 | Presentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh inspektorat minimal A | % | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 14.4 | Tingkat pencapaian PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) | % | 30 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Meningkatnya Peran dan Fungsi Camat dalam Sistem Pelayanan Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Rata – rata nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan (30 kecamatan) | Point | N/A | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | Meningkatnya kualitas infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Presentase Desa mandiri | % | 3,61 | 4,41 | 5,62 | 6,83 | 8,03 | 10,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| 16.2 | Presentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal | % | 75,10 | 71,08 | 67,06 | 63,05 | 59,03 | 54,21 | 48,19 | 48,19 | 48,19 |
| 17 | Meningkatnya kualitas pelayanan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Persentase PMKS yang tertangani | % | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 18 | Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial serta meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 |
| 18.2 | Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan | % | 20 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | Meningkatnya Ketahanan dan Kemanan Pangan Strategis Daerah | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) | Skor | 90 | 91 | 92,80 | 93 | 93,50 | 94 | 95 | 95 | 95 |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|------|---|---------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 19.2 | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | % | N/A | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
| 20 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,91 | 8,08 | 8,25 | 8,42 | 8,60 | 8,78 | 8,97 | 8,97 | |
| 20.2 | Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,85 | 13,14 | 13,45 | 13,75 | 14,07 | 14,39 | 14,72 | 14,72 | |
| 20.3 | Persentase Sekolah (SD+SMP) dengan nilai Akreditasi Minimal A | % | 40 | 45 | 50 | 52,50 | 55 | 57,50 | 60 | 60 | 60 |
| 21 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Usia Harapan Hidup (tahun) | Tahun | 65,86 | 66,04 | 66,22 | 66,39 | 66,57 | 66,75 | 66,93 | 66,93 | |
| 21.2 | Angka Kesakitan | % | 10,72 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 21.3 | Presentase indikator standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target | % | 87,83 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | |
| 22 | Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | N/A | N/A | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | |
| 22.2 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | % | 75,90 | 75,90 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 | 85,00 | |
| 23 | Meningkatnya daya saing industri, perdagangan dan pariwisata | | | | | | | | | | |
| 23.1 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | % | 32,96 | 33,00 | 33,25 | 33,50 | 33,75 | 34,00 | 34,25 | 34,25 | |
| 23.2 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 13,77 | 14,00 | 14,25 | 14,50 | 14,75 | 15,00 | 15,50 | 15,50 | |
| 23.3 | Presentase Kunjungan Wisatawan | % | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| 24 | Meningkatnya daya saing sektor pertanian dan perikanan | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Jumlah produksi pertanian (Tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan dan peternakan) | Ton per tahun | 44.583,90 | 49.042,29 | 53.946,52 | 59.341,17 | 65.275,29 | 71.802,82 | 78.983,10 | 78.983,10 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|------|--|---------------|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 24.2 | Jumlah Produksi perikanan (tangkap dan budidaya) | Ton per tahun | 34.125,85 | 36.524,49 | 38.321,47 | 40.213,04 | 42.208,69 | 44.313,13 | 45.731,90 | 45.731,90 | |
| 25 | Meningkatnya penanaman modal dan investasi di Halmahera Selatan | | | | | | | | | | |
| 25.1 | Realisasi penanaman modal di Halmahera Selatan | Miliar Rp | 88,65 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 25.2 | Jumlah perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 26 | Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM di Halmahera Selatan | | | | | | | | | | |
| 26.1 | Persentase koperasi Aktif dan volume usahanya meningkat (Koperasi yang berkualitas) | % | 38,18 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 50 | 52,50 | 52,50 | |
| 26.2 | Presentase usaha mikro dan kecil (UMK) yang aktif dan volume usahanya meningkat/usaha kecil yang menjadi wirausaha | % | N/A | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 27 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan lembaga pendidikan ketenagakerjaan | | | | | | | | | | |
| 27.1 | Besaran pekerja yang meningkat produktivitasnya (mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi) | % | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 28 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana transportasi darat dan laut | | | | | | | | | | |
| 28.1 | Proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik/mantap | % | 28,34 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 28.2 | Presentase sarana perhubungan yang layak operasi | % | 65,00 | 70,00 | 72,50 | 77,50 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 28.3 | Presentase prasarana perhubungan yang layak fungsi | % | 70,00 | 72,50 | 77,50 | 82,50 | 88,00 | 92,00 | 95,00 | 95,00 | |
| 29 | Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik dan non domestik | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Persentase jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | % | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|------|--|--------|------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 30 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi | | | | | | | | | | |
| 30.1 | Percentase SKPD yang telah memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan WEB (Smart City) | % | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 30.2 | Presentase Desa yang dapat mengakses internet (Smart Village) | % | 28 | 28 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
| 31 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman | | | 1 | | | | | | | |
| 31.1 | Percentase Rumah layak huni | % | 70 | 70 | 72,50 | 75 | 77,50 | 80 | 90 | 90 | |
| 31.2 | Presentase kawasan permukiman layak huni | % | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
| 31.3 | Percentase pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | % | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
| 32 | Meningkatnya akses pelayanan dan kualitas air bersih serta akses sanitasi yang layak | | | | | | | | | | |
| 32.1 | Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak | % | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| 32.2 | Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak | % | 68,34 | 68,34 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| 33 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penataan Ruang di Halmahera Selatan | | | | | | | | | | |
| 33.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH (Skor) | Skor | N/A | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | |
| 33.2 | Presentase timbulan sampah yang tertangani | % | 48 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 33.3 | Kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari luasan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang | % | N/A | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | |
| 34 | Meningkatnya kualitas sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang direvitalisasi | Indeks | N/A | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 60 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Kondisi Awal RPJMD (2020) | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2026) |
|------|--|--------|---------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|----|----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 35 | Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta adat seatorang | | | | | | | | | | |
| 35.1 | Presentase cagar budaya, kesenian tradisional dan tradisi budaya yang mendapatkan perlindungan dan dilestarikan | Unit | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 36 | Meningkatnya peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kehidupan beragama yang berkualitas | | | | | | | | | | |
| 34.1 | Presentase kelompok –kelompok pembelajaran agama yang aktif | % | N/A | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | |

8.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 8.3.
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
RPJMD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 – 2026

| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-----|--|---------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | |
| 1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | | | Komposit |
| 1.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 63,84 | 64,00 | 64,50 | 65,00 | 65,50 | 66,00 | 67,00 | 67,00 | |
| 1.2 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | % | 16,22 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | |
| 1.3 | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku | Juta Rp | 8.698.970,00 | 10.003,82 | 11.504,39 | 13.230,05 | 15.214,55 | 17.496,74 | 20.121,25 | 20.121,25 | |
| 1.4 | PDRB Atas Dasar Harga Konstan | Juta Rp | 5.670.698,00 | 6.521,35 | 7.434,34 | 8.549,49 | 9.746,42 | 11.208,38 | 12.777,56 | 12.777,56 | |
| 1.5 | Inflasi | % | 2,08 | 1,81 | 1,71 | 1,61 | 1,51 | 1,41 | 1,31 | 1,31 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|----------|----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.6 | PDRB Per Kapita | Rp | 35.020.675 | 37.804.458 | 40.809.522 | 44.053.459 | 47.555.255 | 51.335.408 | 55.416.044 | 55.416.044 | |
| 1.7 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,60 | |
| 1.8 | Indeks Gini | % | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| 1.9 | Prosentase Penduduk Miskin | % | 5,21 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | |
| 1.10 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,89 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
| 2 | Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Pendidikan | | | | | | | | | | Dikbud |
| 2.1.1 | Angka Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7,91 | 8,08 | 8,25 | 8,42 | 8,60 | 8,78 | 8,97 | 8,97 | |
| 2.1.2 | Angka Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,85 | 13,14 | 13,45 | 13,75 | 14,07 | 14,39 | 14,72 | 14,72 | |
| 2.1.3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI | % | 117,60 | 118,78 | 119,97 | 121,17 | 122,38 | 123,60 | 124,83 | 124,83 | |
| 2.1.4 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs | % | 91,89 | 92,81 | 93,74 | 94,68 | 95,63 | 96,59 | 97,56 | 97,56 | |
| 2.1.5 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | % | 73,06 | 73,79 | 74,53 | 75,28 | 76,03 | 76,79 | 77,56 | 80,00 | |
| 2.2 | Kesehatan | | | | | | | | | | Dinkes |
| 2.2.1 | Angka Usia Harapann Hidup (Thn) | thn | 65,86 | 66,04 | 66,22 | 66,39 | 66,57 | 66,75 | 66,93 | 66,93 | |
| 2.2.2 | Angka Kematian Bayi | Per 1000 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| 2.2.3 | Prosentase Balita Gizi Buruk | % | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,00 | |
| 2.2.4 | Universal Child Immunization | % | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | |
| 2.2.5 | Angka kesakitan penduduk | % | 10,72 | 9,65 | 8,68 | 7,82 | 7,03 | 6,33 | 5,7 | 5,7 | |
| 2.3 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | Nakertrans |
| 2.3.1 | Rasio Penduduk yang Bekerja | % | 95,60 | 95,69 | 95,78 | 95,88 | 95,97 | 96,07 | 96,17 | 96,17 | |
| 3 | Fokus Seni Budaya dan Olah Raga | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Kebudayaan | | | | | | | | | | Dikbud |
| 3.1.1 | Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan/ | Unit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | dilindungi | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | Unit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 3.1.3 | Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/ dilindungi | Unit | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3.1.4 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan | Unit | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3.1.5 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | Kali | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 3.2 | Pemuda dan Olah Raga | | | | | | | | | | Dinas Pariwisata / OR |
| 3.2.1 | Lapangan olahraga (Prasarana Olah Raga) | Unit | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |
| 3.2.2 | Jumlah prestasi pada event OR tingkat Provinsi / Nasional | Medali/ Penghargaan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 4 | Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pendidikan | | | | | | | | | | Dikbud |
| 4.1.1 | Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | % | 53,23 | 53,76 | 54,29 | 54,84 | 55,38 | 55,93 | 56,49 | 56,49 | |
| 4.1.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | % | 88,73 | 90,50 | 92,31 | 94,16 | 96,04 | 97,96 | 98,80 | 98,80 | |
| 4.1.3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | % | 67,94 | 69,29 | 70,68 | 72,09 | 73,53 | 75,01 | 76,5 | 76,5 | |
| 4.1.4 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | % | 68,23 | 68,91 | 69,59 | 70,29 | 70,99 | 71,69 | 72,41 | 72,41 | |
| 4.1.5 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | % | 20,25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60,00 | 60,00 | |
| 4.1.6 | Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
| 4.1.7 | Sekolah dengan Akreditasi minimal A | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 4.2 | Kesehatan | | | | | | | | | | Dinkes |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2.1 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | % | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 91 | |
| 4.2.2 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.2.3 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | % | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 21 | |
| 4.2.4 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 4.2.5 | Cakupan kunjungan bayi | % | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 | |
| 4.2.6 | Indeks Kepuasan Masyarakat >80% untuk Pelayanan RSUD Labuha | % | 75,72 (B) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87,5 | 87,50 | RSUD Labuha |
| 4.2.7 | Peningkatan Status / Tipe RSUD Labuha | Type | C | C | B | B | B | B | B | B | RSUD Labuha |
| 4.2.8 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (kelas III) melalui BPJS/KHS di RSUD Labuha | % | N/A | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100,00 | RSUD Labuha |
| 4.3 | Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | | | | | | | | | | PU dan TR |
| 4.3.1 | Persentase lahan pertanian yang teraliri irigasi | % | 300 (18%) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | |
| 4.3.2 | Persentase berkurangnya Kawasan Rawan Longsor dan Abrasi | % | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | |
| 4.3.3 | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap | % | 23,61 | 24,11 | 24,51 | 25,01 | 25,51 | 26,01 | 26,01 | 25,24 | |
| 4.3.4 | Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik | % | 5,82 | 6,32 | 6,82 | 7,32 | 7,82 | 8,32 | 8,82 | 8,82 | |
| 4.3.5 | Persentase informasi perencanaan Tata Ruang yang tersedia | % | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.3.6 | Persentase luas kawasan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dalam tata ruang | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.3.7 | Rasio elektrifikasi (cakupan listrik PLN) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|------------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.3.8 | Persentase desa yang sudah terakses listrik PLN | % | 67,32 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | |
| 4.4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | Dinas perumahan dan LH |
| 4.4.1 | Percentase Rumah Tidak Layak Huni | % | 22,29 | 21,79 | 21,29 | 20,79 | 20,29 | 19,79 | 19,29 | 19,29 | |
| 4.4.2 | Luas Kawasan Kumuh Perkotaan | % | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 4.4.3 | Rumah Tangga Ber Sanitasi (Cakupan RT yang memiliki akses sanitasi yang layak) | % | 51,90 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80,00 | |
| 4.4.4 | Rumah tangga pengguna air bersih (Cakupan RT yang memiliki akses air bersih yang layak) | % | 58,83 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 88 | |
| 4.4.5 | Proporsi drainase lingkungan dalam kondisi baik | % | 5,82 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 | |
| 4.4.6 | Rasio bangunan yang ber IMB (Kawasan Perkotaan) | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 4.4.7 | Percentase Penanganan sampah Perkotaan | % | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 67 | |
| 4.4.8 | Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | % | 26,01 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | |
| 4.5 | Trantib dan Linmas | | | | | | | | | | Satpol-PP dan Kesbangpol |
| 4.5.1 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu | % | 74,10 | 75 | 76- | 77 | 78 | 79- | 80 | 80 | Kesbangpol |
| 4.5.2 | Indeks Demokrasi Indonesia di Halmahera Selatan | % | N/A | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
| 4.5.3 | Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan dan edisiologi 14dmini terhadap aparatur dan masyarakat per 10.000 penduduk | % | 4,03 | 7,91 | 11,67 | 15,27 | 18,73 | 22,06 | 25,18 | 25,18 | |
| 4.5.4 | Percentase Potensi Gangguan/ Konflik yang tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.5.5 | Rasio Tenaga SATPOL PP Per 10.000 Penduduk | Per 10.000 | 2,51 | 3,91 | 4,37 | 5,78 | 6,74 | 7,66 | 8,51 | 8,51 | Satpol – PP |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.5.6 | Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum | % | N/A | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 4.5.7 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) kurang dari 24 jam | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.6 | Sosial | | | | | | | | | | Dinas Sosial, KB dan PP |
| 4.6.1 | Persentase pelayanan kelembagaan sosial di masyarakat | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | |
| 4.6.2 | Persentase PMKS yang memperoleh bansos | % | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 4.6.3 | Persentase cakupan pelayanan sosial masyarakat | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | |
| 5 | Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | Nakertrans |
| 5.1.1 | Persentase tenaga kerja terdaftar dan mendapatkan pelatihan serta ditempatkan | % | 5,88 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| 5.1.2 | Persentase peningkatan TKM | % | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | |
| 5.1.3 | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| 5.1.4 | Persentase kasus ketengakerjaan yang diselesaikan | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| 5.1.5 | Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSTOKEK/ BPJS Ketenagakerjaan | % | 11,5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| 5.2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | Dinas Sosial, KB dan PP |
| 5.2.1 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | % | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | |
| 5.2.2 | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.2.3 | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | % | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2.4 | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 70 | 75 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | |
| 5.2.5 | Persentase capaian Kota Labuha sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
| 5.3 | Pangan | | | | | | | | | | Dinas Pertanian |
| 5.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (gr/kapita/hari) | % | 90,00 | 91,00 | 92,80 | 93,00 | 93,50 | 94,00 | 95,00 | 95,00 | |
| 5.3.2 | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat | % | N/A | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
| 5.3.3 | Persentase wilayah/desa rentan rawan pangan | % | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 5.3.4 | Persentase penyuluh pertanian bersertifikat | % | 7,10 | 10,1 | 13,1 | 16,1 | 19,1 | 22,1 | 25,1 | 25,1 | |
| 5.4 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | | | | | | | | LHK |
| 5.4.1 | Persentase jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis izin lingkungan yang diterbitkan kabupaten | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.4.2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | % | N/A | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,00 | 80,5 | 80,5 | |
| 5.4.3 | Prosentase pengelolaan sampah | % | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 5.5 | Pertanahan | | | | | | | | | | DPKAD/BPN |
| 5.5.1 | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | KK | N/A | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| 5.5.2 | Jumlah bidang tanah yang dire distribusi | Bidang/ Persil | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 5.5.3 | Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya | Ha | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| 5.6 | Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | | | | Dinas Kependudukan dan Capil |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|---|---------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.6.1 | Persentase penduduk usia 17 tahun keatas yang memiliki e-KTP | % | 96,59 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.6.2 | Persentase penduduk usia 17 tahun kebawah yang memiliki KIA | % | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
| 5.6.3 | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | % | 72,15 | 77 | 82 | 87 | 92 | 99 | 100 | 100 | |
| 5.6.4 | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.6.5 | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.6.6 | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
| 5.6.7 | Pemanfaatan data kependudukan | Jml MOU | N/A | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5.7 | Pengendalian Penduduk dan KB | | | | | | | | | | DP3AKB |
| 5.7.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | Indeks | N/A | N/A | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | |
| 5.7.2 | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | % | 75,90 | 75,90 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 | 85,00 | 85,00 | |
| 5.7.3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | % | 24,10 | 24,10 | 23,00 | 21,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 5.7.4 | Persentase kategori keluarga Kurang sejahtera (Pra Sejahtera + Sejahtera I) | % | 18,61 | 18,61 | 18,50 | 18,25 | 18,00 | 17,75 | 17,50 | 17,50 | |
| 5.8 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Persentase Perempuan di Dalam Kelembagaan Desa | % | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| 5.8.2 | Rasio Posyandu Aktif | % | 70 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
| 5.8.3 | Rasio PKK aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|--|--------|----------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.8.4 | Persentase BUMDES yang beroperasi aktif | % | 7 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 5.8.5 | Indeks Desa Membangun | skor | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | |
| 5.9 | Perhubungan | | | | | | | | | | Dishub |
| 5.9.1 | Persentase kendaraan yang layak operasi | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.9.2 | Persentase menurunnya tingkat Kecelakaan Darat | % | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | |
| 5.9.3 | Persentase Menurunnya tingkat Kecelakaan Laut | % | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| 5.10 | Komunikasi, Informatika dan Persandian | | | | | | | | | | Dinas Infokom |
| 5.10.1 | Persentase Implementasi E-Goverment di Kabupaten Halmahera Selatan | % | 50 | 65 | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | |
| 5.10.2 | Persentase Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.10.3 | Persentase SKPD yang telah memiliki Sistim Informasi Manajemen (SIM) dan WEB | % | 2,9 | 17,6 | 41,1 | 55,8 | 70,5 | 85,2 | 100 | 100 | |
| 5.10.4 | Persentase Terpenuhinya Pengembangan dan Pengendalian Sandi Negara | % | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| 5.11 | Koperasi dan UKM | | | | | | | | | | Kop & UKM |
| 5.11.1 | Persentase Koperasi aktif | % | 44,49 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 80 | |
| 5.11.2 | Persentase Koperasi Aktif yang volume usahanya meningkat | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
| 5.11.3 | Cakupan Bina Usaha Mikro dan Kecil, Menengah | % | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 57,5 | |
| 5.11.4 | Persentase UMKM yang volume usahanya meningkat | % | 55,00 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | |
| 5.11.5 | Cakupan penerima dana bergulir dari Pemerintah Daerah | % | 0,35 | 0,40 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|--|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.11.6 | Persentase Usaha Mikro dampingan (penerima bantuan) yang volume usahanya meningkat | % | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 97 | |
| 5.12 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | PM dan PTSP |
| 5.12.1 | Presentase peningkatan investasi PMA/PMDN | % | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| 5.12.2 | Rasio daya serap tenaga kerja lokal | % | 45,4 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 57 | |
| 5.12.3 | Persentase perizinan dan non perijinan yang dikeluarkan dan sesuai peruntukannya | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.12.4 | Presentasi pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti | % | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | Dinas Pemuda dan OR |
| 5.13.1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | % | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | |
| 5.13.2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | % | N/A | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,0 | 12,00 | 12,00 | |
| 5.13.3 | Peningkatan prestasi olahraga | Medali | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| 5.14 | Statistik | | | | | | | | | | Dinas Infokom, Statistik dan Persandian |
| 5.14.1 | Ketersediaan data dan informasi (Buku Profil Halsel, Buku PDRB, Buku Indikator Ekonomi, Buku IPM, Buku Inkesra, IKM) untuk perencanaan pembangunan | % | 100 | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 6 Dok | 36 dok (100%) | |
| 5.14.2 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|--------|--|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.14.3 | Persentase OPD yang menggunakan data 20statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | % | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.15 | Kearsipan | | | | | | | | | | Kearsipan & Perpustakaan |
| 5.15.1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| 5.16 | Perpustakaan | | | | | | | | | | Kearsipan & Perpustakaan |
| 5.16.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | N/A | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 | |
| 5.16.2 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Skor | N/A | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 60 | |
| 5.16.3 | Persentase Perpustakaan Desa / Khusus yang aktif | % | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 6 | Fokus Urusan Pilihan | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Pertanian | | | | | | | | | | Distan |
| 6.1.1 | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | % | 37,61 | 38,01 | 38,41 | 38,81 | 39,21 | 39,61 | 40,01 | 40,01 | |
| 6.1.2 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | % | 20,24 | 20,74 | 21,24 | 21,74 | 22,24 | 22,74 | 23,24 | 23,24 | |
| 6.2 | Pariwisata | | | | | | | | | | Dinas Pariwisata dan OR |
| 6.2.1 | Peningkatan angka kunjungan wisatawan | % | 30,06 | 31,56 | 32,06 | 33,56 | 35,06 | 36,56 | 38,06 | 38,06 | |
| 6.2.2 | Kontribusi PAD sektor pariwisata | % | 0,11 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |
| 6.3 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | DKP |
| 6.3.1 | Cakupan Bina kelompok nelayan | % | N/A | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.3.5 | Persentase peningkatan produksi perikanan di kawasan Minapolitan | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 6.4 | Industri | | | | | | | | | | Perindag |
| 6.4.1 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 33,79 | 34,79 | 35,79 | 36,79 | 37,79 | 38,79 | 39,79 | 39,79 | |
| 6.4.2 | Pertumbuhan sector Industri | % | 64,54 | 65,54 | 66,54 | 67,54 | 68,54 | 69,54 | 70,54 | 70,54 | |
| 6.4.3 | Cakupan bina kelompok pengrajin | % | n.a | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | |
| 6.5 | Perdagangan | | | | | | | | | | Perindag |
| 6.5.1 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 16,35 | 16,85 | 17,35 | 17,85 | 18,35 | 18,85 | 19,35 | 19,35 | |
| 6.5.2 | Pertumbuhan PDRB sector perdagangan | % | 12,85 | 13,35 | 13,85 | 14,35 | 14,85 | 15,35 | 15,85 | 15,85 | |
| 6.5.3 | Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal | % | n/a | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20,00 | |
| 6.6 | Transmigrasi | | | | | | | | | | Nakertrans |
| 6.6.1 | Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang dibangun | Indeks | N/A | | | | | | | | |
| 6.6.2 | Nilai rata-rata indeks perkembangan kawasan transmigrasi Prioritas yang direvitalisasi | Indeks | N/A | 39,00 | 40,5 | 42,00 | 43,5 | 44,00 | 45,50 | 47,00 | 47,00 |
| 7 | Fokus Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | Bappeda |
| 7.1.1 | Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD | % | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | |
| 7.1.2 | Tersedianya informasi pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan dokumen perencanaan lain) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7.1.3 | Persentase kesesuaian antara Program RPJMD dengan RKPD | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|---|-----------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.1.4 | Persentase Program RPJMD yang tercapai target kinerjanya | % | 68 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| 7.1.5 | Persentase OPD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76 %) | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
| 7.2 | Keuangan Daerah | | | | | | | | | | DPKD |
| 7.2.1 | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah | % | 5,09 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | |
| 7.2.2 | Persentase Capaian PAD | % | 97,07 | 97,00 | 97,50 | 98,00 | 98,50 | 99,00 | 99,50 | 95,50 | |
| 7.2.3 | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 7.2.4 | Persentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah | % | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | |
| 7.2.5 | Persentase Aset Tanah Pemda yang bersertifikat | % | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| 7.3 | Pengawasan Pembangunan | | | | | | | | | | Inspektorat |
| 7.3.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti | % | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | |
| 7.3.2 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang harus ditindaklanjuti | % | 75 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| 7.3.3 | Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi LAKIP/AKIP oleh Inspektorat Minimal A | % | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
| 7.3.4 | Level Kapabilitas APIP | Level | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7.3.5 | Maturitas Implementasi SPIP | Level | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7.4 | Kepegawaian dan Diklat | | | | | | | | | | BKD |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.4.1 | Persentasi Kehadiran ASN | % | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7.4.2 | Prosentase Peningkatan Karir Pegawai | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | |
| 7.4.3 | Prosentase ASN dengan kualifikasi S1/S2/S3 | % | 35,21 | 35,21 | 40,00 | 45,00 | 50,0 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 7.4.4 | Percentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan | % | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 7.4.5 | Percentase Pejabat Fungsional Tertentu yang telah memiliki Sertifikat Jabatan | % | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 7.4.6 | Rata-rata kinerja aparatur dalam pelaksanaan TUPOKSI | Skor | N/A | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | |
| 7.5 | Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | SETDA |
| 7.5.1 | Rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | Indeks | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,0 | 90,00 | 90,00 | |
| 7.5.2 | Penilaian LPPD Pemerintah Daerah | Skor | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 7.5.3 | Penilaian AKIP/LAKIP Pemerintah Daerah | Skor | CC | CC | B | BB | A | A | AA | AA | |
| 7.5.5 | Percentase RANPERBUP yang disahkan menjadi PERBUP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7.5.6 | Tingkat pencapaian PROLEGDA | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7.6 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | Bappeda |
| 7.6.1 | Prosentase hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah yang dimanfaatkan oleh Pemda, masyarakat dan stakeholder lainnya | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 7.7 | Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | BPPD / PUPR |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|-------|--|----------------|----------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.7.1 | Rasio Pembinaan Penduduk di daerah Rawan Bencana | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | BPBD |
| 7.7.2 | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | % | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | BPBD |
| 7.7.3 | Persentase penanganan pasca bencana | % | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | PUPR |
| C | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | |
| 8 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Produktivitas total daerah | Rp/org/ thn | 49.687.962 | 51.619.652 | 53.631.324 | 55.726.516 | 57.908.882 | 60.182.250 | 62.550.622 | 62.550.622 | Komposit |
| 8.2 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | Rp | 476.439 | 490.732 | 505.453 | 520.616 | 536.234 | 552.321 | 568.890 | 568.890 | Komposit |
| 8.3 | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | Rp | 380.250 | 399.262 | 419.225 | 440.186 | 462.195 | 485.304 | 509.569 | 509.569 | Komposit |
| 9 | Fokus Infrastruktur Daerah | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Km/unit | 3,43 | 3,93 | 4,43 | 4,93 | 5,43 | 5,93 | 6,43 | 6,43 | PU dan Dishub |
| 9.2 | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | % | 58,83 | 61,33 | 63,83 | 66,33 | 68,83 | 71,33 | 73,83 | 73,83 | Dinas Perumahan |
| 9.3 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (Rasio Elektrifikasi) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perumahan |
| 10 | Fokus Keuangan | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Target Capaian Pajak Daerah | Juta Rp | 6.925 | | | | | | | 31.053 | DPKAD |
| 10.2 | Target Capaian Retribusi Daerah | Juta Rp | 2.118 | | | | | | | 6.465 | DOKAD |



| NO. | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2020 | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Akhir Tahun 2026 | SKPD Penanggung Jawab |
|------|---|--------|----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Fokus Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 79,28 | 80,58 | 82,08 | 83,58 | 85,08 | 86,58 | 88,08 | 88,08 | Infokom |
| 11.2 | Persentase desa yang dapat mengakses sinyal telepon seluler | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Infokom |
| 12 | Fokus Iklim Investasi | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Lama proses perijinan | | | | | | | | | | |
| | - Ijin Pola Non Survey | Hari | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | PTSP |
| | - Ijin Pola Survey | Hari | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | PTSP |
| 13 | Fokus Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Rasio Angkatan Kerja lulusan S1/S2/S3 | % | 70,52 | 71,52 | 72,52 | 73,52 | 74,52 | 75,52 | 76,52 | 76,52 | Komposit |
| 13.2 | Rasio Ketergantungan | % | 64,92 | 63,92 | 62,92 | 61,92 | 60,92 | 59,92 | 58,92 | 58,92 | Komposit |



BAB IX

PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Penetapan kaidah pelaksanaan diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026. Kaidah pelaksanaan RPJMD meliputi :

1. Pemda Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban menyebarluaskan rencana pembangunan lima tahun kedepan kepada masyarakat sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021-2026.
2. RPJMD tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta.
3. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Sebagai upaya pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan melakukan sinkronisasi program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah seperti CSR.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappelitbangda Kabupaten Halmahera Selatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD tersebut kedalam Renstra OPD, Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Pagu Indikatif OPD Tahun 2021-2026 serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. RPJMD dipakai sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dalam kurun waktu 2021-2026. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diperlukan adanya revisi atau penyesuaian dengan perkembangan situasi pembangunan nasional dan regional Maluku Utara akan dilakukan revisi dan penyesuaian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
8. Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD, jika diperlukan adanya regulasi lanjutan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan maka akan disusun sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala OPD.

9.2. Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Sebagai upaya pencapaian target-target Prioritas Pembangunan Daerah, namun memiliki keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan seperti penyediaan fasilitas atau infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat maka kebijakan pembiayaan pembangunan dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

Kemitraan pembangunan melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan pelaksanaannya mengacu pada peraturan-peraturan tentang dana CSR.

Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

9.3. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun sampai berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Strategis OPD. Untuk mengisi kekosongan dokumen setelah berakhirnya RPJMD tahun 2021-2026, maka penyusunan program-program indikatif setelah periode RPJMD ini berakhir tetap mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 sampai ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan bersifat melanjutkan target-target kinerja yang ada.

Demikian RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Bupati Halmahera Selatan

H. Usman Sidik